



UNIVERSITAS INDONESIA

**MANAJEMEN SEKURITI FISIK PADA PT ARUN NGL
BLANGLANCANG LHOKSEUMAWE, ACEH**

TESIS

**AYI SATRIA YUDDHA
NPM : 0906595112**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**MANAJEMEN SEKURITI FISIK PADA PT ARUN NGL
BLANGLANCANG LHOKSEUMAWE, ACEH**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
Kajian Ilmu Kepolisian**

**AYI SATRIA YUDDHA
NPM : 0906595112**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI
JAKARTA
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**



**Nama : Ayi Satria Yuddha
NPM : 0906595112
Tanda tangan :
Tanggal : 7 Juni 2011**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Ayi Satria Yuddha
NPM : 0906595112
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul Tesis : Manajemen Sekuriti Fisik Pada PT Arun NGL
Blanglancang Lhokseumawe, Aceh

Tesis berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Science pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

1. Pembimbing : DR. dr. H. Hadiman, SH. MSc (.....)
2. Penguji : Prof. Dr.Sarlito Wirawan Sarwono, Psi (.....)
3. Penguji : Prof. DR. Payaman Simanjuntak, MSi (.....)
4. Penguji : Drs. Suryadi, MT (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka penyusunan tesis ini berhasil diselesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat dalam rangka mencapai gelar Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian.

Penelitian dilakukan baik di PT Arun NGL, Polsek Muara Satu, masyarakat Desa Batuphat Barat, Polres Lhokseumawe, dan Polda Aceh. Penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan hasil penelitian ini bila tidak didukung atau dibantu oleh mereka. Selain itu, penulis menyadari sepenuhnya tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit untuk dapat terselesaikan. Pada kesempatan yang baik ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada :

- (1) DR. dr. Hadiman, SH, M.Sc selaku pembimbing dalam penyusunan tesis ini, atas kesabaran, keikhlasan, kesungguhan, dan rasa kasih sayangnya ditengah-tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan petunjuk selama penelitian dan penyusunan tesis ini.
- (2) Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, Msi, selaku penguji tesis ini, yang telah memberikan petunjuk dalam penyusunan tesis ini.
- (3) Drs. Suryadi MT, selaku penguji tesis ini, dengan sabar, ikhlas, yang sangat santun ditengah kesibukannya masih mau menyempatkan diri memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
- (4) Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Psi selaku Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan penguji tesis ini yang telah mau menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada penulis.
- (5) Seluruh pengajar program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia yang telah mau menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada penulis.

- (6) Seluruh rekan-rekan perkuliahan khususnya angkatan XIV KIK UI yang telah memberikan sumbangsih referensi dan ilmu pengetahuan melalui diskusi maupun pada saat belajar kelompok.
- (7) Seluruh staf KIK UI yang telah ikut andil besar dalam hal terlaksananya proses belajar mengajar di program Pascasarjana KIK UI.
- (8) Kedua orang tua yang sangat sabar telah memberikan dukungan materiil dan moril dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ditengah keterbatasan perekonomian dan kesehatannya.
- (9) Kepada istri saya tercinta yang sangat setia mendampingi dengan segala suka duka selama perjalanan waktu : Cut Maryani, SKM dan buah hatiku tersayang: Nasyiwa Aini Fiantika dan M. Raffa Dziaul Haq, yang telah memberikan andil yang cukup besar dan memberikan semangat dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
- (10) Kepada Kapolres Lhokseumawe beserta jajarannya, yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan penyusunan tesis ini.
- (11) Kepada AKBP Heri Heriadi selaku Wadir Pam Obvit Dit Samapta Polda Aceh dengan senyumannya yang tidak pernah lepas dan sangat sabar hati menjawab pertanyaan penulis.
- (12) Kepada AKBP Isfar selaku Kasubdit Bin Satpam Dit Satpam Polda Aceh yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
- (13) Kepada Bapak Rantau yang menjabat sebagai PNS Dit Binmas Polda Aceh yang banyak membantu penulis dalam memberikan informasi dan data.
- (14) Kepada seluruh manajemen PT Arun NGL dan BUJP PT Bina Nanggroe yaitu Ir. Fuad, Kertasih, Syafrullah, Syamsul, Syafrullah, Firdaus M. Boang, Yuswar, yang telah memberikan kesempatan, meluangkan waktu dan memberikan kebutuhan penulis dalam hal terwujudnya tesis ini.
- (15) Kepada pihak-pihak lain baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang turut andil dalam memberikan kontribusi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan tesis.

Dengan demikian, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua, serta senantiasa diberikan rahmat, hidayat, dan kesuksesan kepada kita semua, amin.

Jakarta, 7 Juni 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYI SATRIA YUDDHA
NPM : 0906595112
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Pasca Sarjana
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non_Eksklusif** (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Manajemen Sekuriti Fisik Pada PT Arun NGL Blanglancang Lhokseumawe, Aceh

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Juni 2011

Yang menyatakan

(AYI SATRIA YUDDHA)

ABSTRAK

Nama : Ayi Satria Yuddha
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul : Manajemen Sekuriti Fisik Pada PT Arun NGL
Blanglancang Lhokseumawe, Aceh.

Tesis ini membahas penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik pada PT Arun NGL sebagai salah satu obyek vital industri yang berisiko tinggi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, fokusnya pada etnografi, pendekatannya yuridis manajerial dan metode penulisannya deskriptif analisis. Hasil penelitian menyarankan kebijakan yang perlu diambil oleh menejer puncak PT Arun NGL terhadap sekuriti fisiknya adalah penambahan anggaran sekuriti dan pembenahan aspek manajemen sekuriti sedangkan kepada kepolisian adalah membuat MoU kepada PT Arun NGL, mengimplementasikan program pemolisian komunitas, pengawasan surat ijin operasional BUJP dan usulan revisi Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 sebagai kebijakan tertulis Kapolda Aceh untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada obyek vital.

Kata kunci:

Sekuriti fisik, Pemolisian Komunitas, obyek vital.

ABSTRACT

Name : Ayi Satria Yuddha
Study Program : Police Studies
Title : Physical Security Management of PT Arun NGL
Blanglancang Lhokseumawe, Aceh

The Thesis talks about the implementation of physical security management of PT Arun NGL as one of vital industrial objects with high risks in Indonesia. The research employs qualitative method which focuses on ethnography as well as managerial judicial approach. It is written using analytical descriptive method. The results of the research recommend some policies that are necessarily taken by top managers of the company : the increase of security budget, the improvement of the aspects of security management, the establishment of an MoU with the local police, the implementation of community policing programs, the supervision of BUJP operational license and the proposal of revising the regulation of Indonesian National Police Chief No. 24/2007 as a written policy of Aceh Regional Police Chief in order to improve the quality of security service to the vital object.

Key words :

Physical security, community policing, vital object

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Masalah Penelitian.....	7
1.3 Hipotesis.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	9
1.6 Tata Urut Penulisan.....	9
2. TINJAUAN LITERATUR.....	12
2.1 Literatur Teori.....	12
2.1.1 Teori Manajemen.....	12
2.1.1.1 Perencanaan.....	13
2.1.1.2 Pengorganisasian.....	13
2.1.1.3 Menggerakkan.....	14
2.1.1.4 Pengawasan.....	14
2.1.2 Teori <i>Crime Prevention Through Environmental Design</i>	15
2.1.3 Teori Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional.....	16
2.2 Literatur Konsep.....	18
2.2.1 Konsep Sekuriti Fisik.....	18
2.2.1.1 Pengendalian Akses.....	19
2.2.1.2 Penghalang (<i>Barrier</i>).....	19
2.2.1.3 Pagar (<i>Fances</i>).....	19
2.2.1.4 Kunci.....	20
2.2.1.5 Penerangan (<i>Lighting</i>)	21
2.2.1.6 Tenaga Sekuriti (<i>Guard</i>).....	22
2.2.1.7 Pos Jaga (<i>Guard Tower</i>)	23
2.2.1.8 Alat Komunikasi (<i>Communication</i>)	24
2.2.1.9 <i>Closed Circuid Television</i>	24
2.2.2 Konsep Pengamanan Proyek Usaha.....	24
2.2.3 Konsep Upaya Sekuriti.....	26
2.2.4 Konsep Hubungan Industrial.....	27
2.2.6 Konsep Pemolisian Komunitas (<i>Community Policing</i>)....	30

2.2.7	Konsep Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	31
3.	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	33
3.1	Gambaran Umum Polsek Muara Satu.....	33
3.1.1	Situasi Wilayah.....	34
3.1.1.1	Geografi.....	34
3.1.1.2	Demografi.....	35
3.1.1.3	Sumber Daya Alam.....	36
3.1.1.4	Panca Gatra.....	37
3.1.2	Situasi Kesatuan.....	42
3.1.2.1	Organisasi.....	42
3.1.2.2	Tugas dan Wewenang Polsek Muara Satu.....	46
3.1.2.3	Pelaksanaan Tugas.....	48
3.1.2.4	Dukungan Sarana dan Prasarana.....	52
3.1.2.5	Gangguan Kamtibmas Polsek Muara Satu.....	53
3.2	Gambaran Umum Kecamatan Muara Satu.....	54
3.2.1	Geografi.....	54
3.2.1.1	Luas Wilayah.....	54
3.2.2	Demografi.....	55
3.2.3	Bidang Pembangunan.....	57
3.3	Gambaran Umum PT Arun NGL.....	60
3.3.1	Sejarah PT Arun NGL.....	60
3.3.2	Lokasi.....	66
3.3.3	Organisasi PT Arun NGL.....	67
3.3.4	Bisnis.....	70
3.3.5	Denah Area Kilang Arun dan Aset-Asetnya.....	71
3.4	Gangguan Keamanan Sebelum dan Sesudah MoU Helsinki.....	73
3.5	Potensi Ancaman pada PT Arun NGL.....	77
4.	METODE PENELITIAN.....	79
4.1	Metode Penelitian.....	79
4.2	Operasionalisasi Faktor-Faktor yang Akan Diteliti.....	82
4.3	Pedoman Wawancara.....	84
5.	HASIL PENELITIAN	89
5.1	Dampak Keberadaan PT Arun NGL.....	89
5.1.1	Dampak Positif.....	89
5.1.1.1	Timbulnya Lapangan Pekerjaan.....	89
5.1.1.2	Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i>	90
5.1.2	Dampak Negatif.....	95
5.1.2.1	Munculnya Lapak - Lapak Tempat Penjualan Hasil Kejahatan.....	96
5.1.2.2	Gangguan Keamanan pada PT Arun NGL.....	97
5.2	Persepsi Perusahaan Terhadap Penciptaan Keamanan.....	111
5.2.1	Persepsi Pihak Karyawan Terhadap Penciptaan Keamanan.....	111
5.3.2	Persepsi Pihak Manajemen Terhadap Penciptaan	

	Keamanan.....	113
5.3	Kondisi Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik Pada PT Arun NGL (Internal PT Arun NGL).....	114
5.3.1	Sekuriti Fisik.....	114
	5.3.1.1 Manajemen Satuan Pengamanan.....	114
	5.3.1.2 Pengendalian Akses.....	147
	5.3.1.3 <i>Barrier</i>	149
	5.3.1.4 <i>Fences</i>	150
	5.3.1.5 Kunci.....	151
	5.3.1.6 Penerangan.....	152
	5.3.1.7 <i>CCTV (Closed Circuit Television)</i>	153
	5.3.1.8 Pos Jaga.....	154
	5.3.1.9 Alat Komunikasi.....	155
5.3.2	Lingkungan Fisik.....	157
	5.3.2.1 Fasilitas Jalan dan Lingkungan Perusahaan.....	157
	5.3.2.2 Penataan Lingkungan.....	158
	5.3.2.3 Sarana Parkir.....	158
5.3.3	<i>Level Security</i>	159
5.3.4	<i>Crime Prevention Through Environmental Design</i>	159
	5.3.4.1 Pembagian Area.....	159
	5.3.4.2 Pengawasan Lingkungan.....	160
	5.3.4.3 Citra.....	161
	5.3.4.4 Lingkungan.....	161
5.3.5	Upaya Taktis Pengamanan Proyek Usaha.....	161
	5.3.5.1 Pengamanan Perimeter.....	161
	5.3.5.2 Penyelamatan Masa Depan / Proyek Usaha.....	162
5.4	Peran Kepolisian pada PT Arun NGL (Eksternal PT Arun NGL)..	166
5.4.1	Polsek Muara Satu.....	166
	5.4.1.1 Tindakan Preventif.....	167
	5.4.1.2 Tindakan Represif.....	168
5.4.2	Polres Lhokseumawe.....	169
5.4.3	Polda Aceh.....	169
	5.5.3.1 Tugas Koordinasi, Pembinaan Tehnis dan Pengawasan pada PT Arun NGL.....	170
6.	ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	172
6.1	Analisa Gangguan Keamanan.....	172
6.2	Analisa Program <i>CSR</i>	174
6.3	Analisa Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik pada PT Arun NGL	175
6.3.1	Manajemen Satpam	175
	6.3.1 Perencanaan.....	175
	6.3.2 Pengorganisasian.....	182
	6.3.3 Menggerakkan.....	186
	6.3.4 Pengawasan.....	186
6.3.2	Analisa Pengendalian Akses Berdasarkan Konsep Sekuriti Fisik.....	187
6.3.3	Analisa <i>Barrier</i> Berdasarkan Konsep Sekuriti Fisik.....	188

6.3.4	Analisa <i>Fances</i> Berdasarkan Konsep Sekuriti Fisik.....	188
6.3.5	Analisa Kunci Berdasarkan Konsep Sekuriti Fisik.....	189
6.3.6	Analisa Penerangan Berdasarkan Konsep Sekuriti Fisik..	190
6.3.7	Analisa <i>CCTV</i> Berdasarkan Konsep Sekuriti Fisik.....	191
6.3.8	Analisa Pos Jaga Berdasarkan Konsep Sekuriti Fisik.....	191
6.3.9	Analisa Alat Komunikasi Berdasarkan Konsep Sekuriti Fisik.....	192
6.3.10	Analisa Lingkungan Fisik.....	192
	6.3.10.1 Fasilitas Jalan dan Lingkungan Perusahaan.....	192
	6.3.10.2 Penataan Lingkungan.....	193
	6.3.10.3 Sarana Parkir.....	193
6.3.11	Analisa <i>Level Security</i>	193
6.3.12	Analisa <i>CPTED</i>	194
6.3.13	Analisa Upaya Taktis Pengamanan Proyek Usaha.....	194
	6.3.13.1 Pengamanan Perimeter.....	194
	6.3.13.2 Penerimaan SDM.....	195
	6.3.13.3 Asuransi.....	195
	6.3.13.4 Supranatural.....	195
	6.3.13.5 Pengembangan Kekuatan.....	196
6.4	Analisa Peran Kepolisian Pada PT Arun NGL (Eksternal PT Arun NGL.....	197
	6.4.1 Polsek Muara Satu.....	197
	6.4.2 Polda Aceh.....	198
6.5	Analisa <i>SWOT</i> PT Arun NGL.....	198
	6.5.1 Kekuatan	198
	6.5.2 Kelemahan.....	199
	6.5.3 Kesempatan.....	201
	6.5.4 Ancaman.....	201
7.	PENUTUP.....	202
	7.1 Kesimpulan.....	202
	7.2 Rekomendasi.....	203
	DAFTAR REFERENSI.....	210

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tabel Imbalan dan Kontribusi Pemangku Kepentingan.....	30
Tabel 3.1.	Data Petugas Polmas dan BKPM.....	45
Tabel 3.2.	Data Sarana dan Prasarana Polsek Muara Satu.....	52
Tabel 3.3.	Data Gangguan Kamtibmas Polsek Muara Satu Tahun 2009 dibanding Tahun 2010.....	53
Tabel 3.4.	Luas Wilayah Kecamatan Muara Satu Tahun 2009.....	55
Tabel 3.5.	Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin Tahun 2009.....	55
Tabel 3.6.	Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha Utama Kepala Keluarga Tahun 2009.....	56
Tabel 3.7.	Jumlah Sekolah Umum Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009	57
Tabel 3.8.	Jumlah Sarana Peribadatan Tahun 2009.....	58
Tabel 3.9.	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Gampong Tahun 2009.....	59
Tabel 3.10.	Gangguan Keamanan Periode 1 Januari 2003 s/d 16 Desember 2004.....	73
Tabel 3.11.	Korban Gangguan Keamanan Periode 1 Januari 2003 s/d 16 Desember 2004.....	74
Tabel 3.12.	Perbandingan Gangguan Keamanan 11 Bulan Sebelum dan Sesudah MoU.....	76
Tabel 4.1.	Operasionalisasi Faktor-Faktor Yang Akan Diteliti.....	82
Tabel 4.2.	Pedoman Wawancara.....	84
Tabel 5.1.	Laporan Singkat Kegiatan CSR PT Arun NGL Tahun 2008....	93
Tabel 5.2.	Data Gangguan Keamanan PT Arun NGL 1 Januari s/d Maret 2011.....	97
Tabel 5.3.	Kelalaian Karyawan Meninggalkan Ruangan Tanpa Mengunci pintu Tahun 2010.....	112

Tabel 5.4. Data *Call Sign* Sekuriti PT Arun NGL 156



DAFTAR GAMBAR

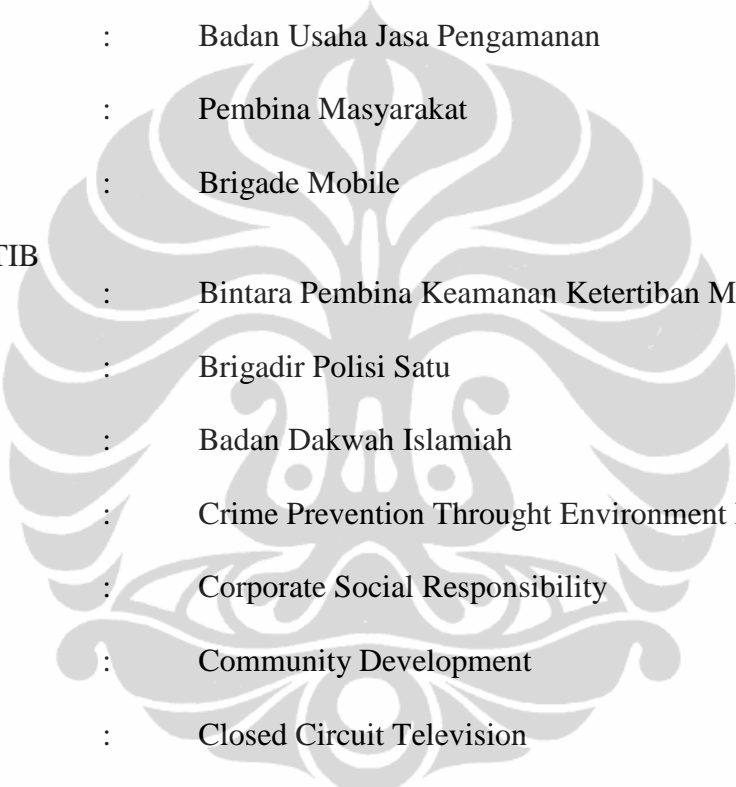
Gambar 2.1.	Proses Manajemen.....	12
Gambar 2.2.	Pemangku Kepentingan Perusahaan.....	28
Gambar 3.1.	Peta Kecamatan Muara Satu.....	33
Gambar 3.2.	Struktur Organisasi Polsek Muara Satu.....	43
Gambar 3.3.	Struktur Organisasi Umum PT Arun NGL.....	67
Gambar 3.4.	Peta Aset PT Arun NGL (<i>Plansite</i>).....	71
Gambar 5.1.	Struktur Otranisasi <i>Security In-House</i> PT Arun NGL.....	124
Gambar 5.2.	Struktur Organisasi <i>Security Out-Sourch</i> PT Arun NGL (BUJP PT Bina Nanggroe).....	130
Gambar 5.3	Posisi Pos PT Arun NGL (<i>Plansite</i>).....	155
Gambar 6.1	Grafik Gangguan Keamanan Tahun 2010 s/d Maret 2011 PT Arun NGL	172

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Nama-Nama Anggota *Security Out-Sourch* PT Arun NGL (BUJP PT Bina Nanggroe).
- Lampiran 2. Daftar Foto-Foto.
- Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian Nomor : 110.4/221/2011 Pemerintah Kota Lhokseumawe Kecamatan Muara Satu.
- Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian Nomor : Ket / 18 / III / 2011 / Dit Binmas Polda Aceh.
- Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian Nomor : Skep / 01 / III / 2011 / MS. Polsek Muara Satu.
- Lampiran 6. *Career Development System* PT Arun NGL.
- Lampiran 7. Formulir Penilaian Kinerja Satpam *Out-Sourch*.
- Lampiran 8. Contoh Laporan *Controller* Satpam *In-House* PT Arun NGL.
- Lampiran 9. Contoh Laporan Harian *Security Out-Sourch* PT Arun NGL (BUJP PT Bina Nanggroe).
- Lampiran 10. Contoh Laporan Kejadian *Security Out-Sourch* PT Arun NGL (BUJP PT Bina Nanggroe).
- Lampiran 11. Harga Satuan Pekerjaan, Daftar Gaji Satpam *Out-Sourch* dan Perjanjinan Pemborongan Pekerjaan Nomor : 1003-017-6.
- Lampiran 12. Prosedur Keselamatan dan Keamanan Untuk Pekerja Konraktor.
- Lampiran 13. Resume Kasus Pengeluaran Barang Milik PTA Tanpa Ijin / Tanpa MRA.
- Lampiran 14. Berita Acara Pemeriksaan Kasus Pengeluaran Barang Milik PT Arun NGL Tanpa Ijin / Tanpa MRA.
- Lampiran 15. Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 672/3-17 tanggal 3 April 1974 Perihal Pemindahan Penduduk Dalam Rangka Pembangunan Proyek LNG Pertamina.

- Lampiran 16. Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2882/1-585 Tanggal 9 Nopember 1974 Perihal Pembebasan Tanah Untuk Proyek LNG Pertamina di Kabupaten Aceh Utara.
- Lampiran 17. Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 541/344 Tanggal 23 Oktober 2001 Perihal Tuntutan Lokasi *Resettlement* Masyarakat Eks Desa Blang Lancang Rencong.
- Lampiran 18. Surat *President Director* PT Arun NGL Nomor PD/233 Tanggal 30 Desember 2002 Perihal Pengajuan Penyelesaian Tuntutan *Resettlement* Desa Blanglancang Barat dan Desa Blanglancang Timur
- Lampiran 19. Surat Direktur BMN II Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5-3718.KN/2009 tanggal 8 September 2009 Perihal Usulan Penyelesaian Tuntutan Masyarakat *Resettlement* Blanglancang-Rencong.
- Lampiran 20. Surat VP Asset Management Pertamina Nomor 569/I10100/2009-SO tanggal 29 September 2009 Perihal Memorandum (Upaya Penyelesaian Tuntutan Masyarakat *Resettlement* Blanglancang – Rencong)
- Lampiran 21. Riwayat Hidup Penulis.

DAFTAR SINGKATAN

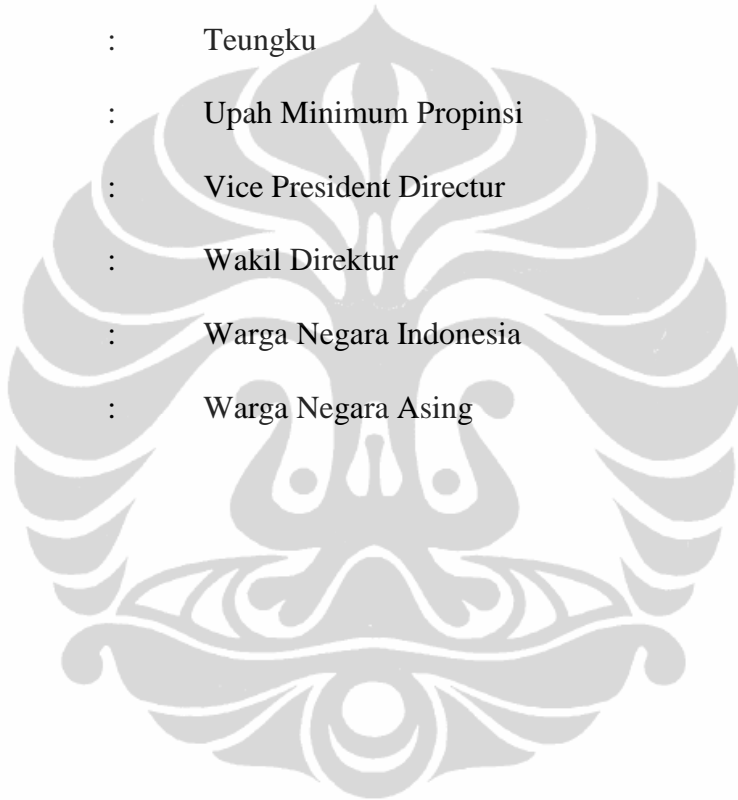


AKBP	:	Ajun Komisaris Besar Polisi
AKP	:	Ajun Komisaris Polisi
AIPTU	:	Ajun Inspektur Polisi Satu
AIPDA	:	Ajun Inspektur Polisi Dua
BUJP	:	Badan Usaha Jasa Pengamanan
BINMAS	:	Pembina Masyarakat
BRIMOB	:	Brigade Mobile
BABINKAMTIB MAS	:	Bintara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat
BRIPTU	:	Brigadir Polisi Satu
BDI	:	Badan Dakwah Islamiah
CPTED	:	Crime Prevention Throught Environment Design
CSR	:	Corporate Social Responsibility
CD	:	Community Development
CCTV	:	Closed Circuit Television
CURAT	:	Pencurian Dengan Pemberatan
CURAS	:	Pencurian Dengan Kekerasan
CURANMOR	:	Pencurian Kendaraan Bermotor
DIT	:	Direktorat
DANRU	:	Komandan Regu
EMOI	:	Exxon Mobile Oil Indonesia
GAM	:	Gerakan Aceh Merdeka
GOLKAR	:	Golongan Karya

HUMAS	:	Hubungan Kemasyarakatan
HRD	:	Human Resources Development
HT	:	Handy Talkie
IPTU	:	Inspektur Polisi Satu
IKBAL	:	Ikatan Keluarga Besar Blanglancang
ID	:	Identity
ISPS	:	International Ship And Port Facility Security
JL	:	Jalan
KASUBDIT	:	Kepala Sub Direktorat
KAPOLSUB SEKTOR	:	Kepala Polisi Sub Sektor
KAPOLSEK	:	Kepala Kepolisian Sektor
KAPOLRES	:	Kepala Kepolisian Resor
KAPOLDA	:	Kepala Kepolisian Daerah
KASAT	:	Kepala Satuan
KANIT	:	Kepala Unit
KORWASBIN - TENIS	:	Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Tehnis
KPA	:	Komisi Peralihan Aceh
KM	:	Kilo Meter
KAMTIBMAS	:	Keamanan Ketertiban Masyarakat
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KUA	:	Kepala Urusan Agama
LNG	:	Liquid Natural Gas
MABES	:	Markas Besar

MoU	:	Memorandum Of Understanding
MKMT	:	Misi Kondultasi Masyarakat Tergusur
NGL	:	Natural Gas Liquefaction
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NSO	:	North Sumatera Offshore
PT	:	Perseroan Terbatas
POLRI	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
POLSEK	:	Kepolisian Sektor
POLRES	:	Kepolisian Resor
POLDA	:	Kepolisian Daerah
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PERKAP	:	Peraturan Kapolri
PBB	:	Peraturan Baris Berbaris
POLMAS	:	Pemolisian Masyarakat
PTA	:	Perseroan Terbatas Arun
R2	:	Roda Dua
R4	:	Roda Empat
RESKRIM	:	Reserse Kriminal
RI	:	Republik Indonesia
SWI	:	Sea Water Intace
SATPAM	:	Satuan Pengamanan
SKCK	:	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
SWOT	:	Strenght, Weakness, Oppurtunity, Threat

SABHARA	:	Samapta Bhayangkara
SRU	:	Sulfur Recovery Unit
SD	:	Sekolah Dasar
SDM	:	Sumberdaya Manusia
SMP	:	Sistem Manajemen Pengamanan
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TGK	:	Teungku
UMP	:	Upah Minimum Propinsi
VPD	:	Vice President Director
WADIR	:	Wakil Direktur
WNI	:	Warga Negara Indonesia
WNA	:	Warga Negara Asing



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini tentang penyelenggaraan manajemen pengamanan fisik (*physical security*) pada PT Arun NGL sebagai salah satu industri yang berisiko tinggi di Indonesia termasuk di dalamnya peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan manajemen pengamanan fisik PT Arun NGL.

Stabilitas keamanan menjadi syarat mutlak dalam dunia usaha. Dengan aman maka perasaan menjadi tenang sehingga aktivitas produksi dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan hal tersebut pemerintah daerah berkewajiban mengupayakan stabilitas keamanan namun disisi lain usaha penciptaan keamanan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga dari masyarakat termasuk pengusaha. Tanggung jawab masyarakat terhadap penciptaan rasa aman dilingkungannya ini disebut juga sebagai sistem pengamanan swakarsa. Awaloedin (2010) mendefinisikan Sistem Pengamanan Swakarsa sebagai suatu sistem keamanan yang mengupayakan hidupnya peranan dan tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan keamanan, menyeimbangkan dan menyesuaikan hubungan satu sama lain, yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri, untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat terhadap segala kemungkinan gangguan keamanan serta daya tanggap dan penyesuaian masyarakat terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial yang membudaya dalam bentuk pola sikap kebiasaan dan perilaku masyarakat, sehingga gangguan kamtibmas dapat dicegah sedini mungkin, sejak dari sumber dasarnya dan kekuaran fisik aparaturnya keamanan digunakan seminimal mungkin dan secara selektif.

“Aman” menurut Soebroto dalam Mudjilin (2010:2) mengandung 4 (empat) unsur pokok yaitu : perasaan bebas dari gangguan fisik maupun psikis; perasaan bebas dari kekhawatiran; perasaan bebas dari risiko; perasaan damai lahiriah dan batiniah. Adapun Maslow memasukkan kebutuhan akan rasa aman di tingkatan kedua setelah kebutuhan fisiologis dari lima tingkatan hirarki kebutuhan

Universitas Indonesia

manusia.

Penciptaan rasa aman dilingkungan perusahaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sudah diterapkan pada PT Arun NGL sebagai salah satu upaya menghindari aset dari ancaman kerugian (*loss prevention*). Pendapat Hadiman (2010) tentang sifat aset :

- a. langka (*scarce*) yang diartikan tidak mudah di dapat dan dapat dipakai untuk berbagai penggunaan yang menghasilkan produk,
- b. terbatas (*limited*) yang diartikan bagaimanapun besarnya perusahaan asetnya tetap terbatas.

Sehingga setiap penggunaan aset harus hati-hati karena aset mempunyai alternatif penggunaan dari yang paling menguntungkan sampai yang kurang menguntungkan karena bila tidak bisa terjadi pemborosan aset yang dapat berakibat memperbesar *cost*.

Aset menurut Hadiman (2010) adalah uang, jumlah yang dapat diterima, kekayaan fisik, kekayaan intelektual, informasi tertentu, dan *claim*, oleh karena itu aset harus dijaga atau dilindungi. Sebagaimana dalil dalam sekuriti (Hadiman, 2010) aman itu mahal, tapi lebih mahal bila tidak aman.

Efisiensi menurut Bhayangkara (2008) berhubungan dengan metode kerja, efisiensi adalah rasio antara input dan output dimana input adalah sumber daya dan output adalah efektifitas, bilamana sumber daya tidak dikelola dengan benar atau prosesnya tidak benar maka akan mempengaruhi dari pencapaian keberhasilan (efektifitas). Input sebagai wujud ekonomisasi yang tentu saja perolehan sumber dayanya melalui pengorbanan yang murah namun kualitas dan kuantitasnya terkadang tidak diperhatikan karena setiap orang, organisasi dan perusahaan ingin mendapatkan hasil keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal serta usaha yang sekecil mungkin. Berkaitan dengan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan, pada kenyataannya di lapangan masih banyak obyek vital industri yang tidak didukung pengamanan yang memadai yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengamankan asetnya, dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- a. Perusahaan hanya berpikir bagaimana menghasilkan produk sebanyak-banyaknya dengan biaya yang murah sehingga keuntungan perusahaan semakin besar. Dengan menekan biaya pengeluaran tapi berharap keuntungan yang sebanyak-banyaknya, maka secara otomatis berbagai aspek lain yang sebenarnya terkait walaupun secara tidak langsung terhadap laba perusahaan menjadi terabaikan. Salah satu aspek yang sering diabaikan adalah masalah keamanan. Kualitas dan kuantitas sekuriti fisik tidak memenuhi standar sekuriti.
- b. Perusahaan sudah memperhitungkan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan demi aspek keamanan perusahaan, sehingga perusahaan mentolerir kehilangan aset-aset dalam lingkungannya.

Hadiman (2010) mengatakan bahwa kejahatan seharusnya dapat diminimalisir oleh perusahaan sedini mungkin, melalui piranti keras yaitu upaya sekuriti level 1 s/d VI, penggunaan piranti-piranti lunak diantaranya pembuatan cek lis kesiapan operasionalisasi perusahaan, pembuatan dan pemberlakuan prosedur, diskripsi teknis, pembuatan statistik dan grafik, format ketertiban administrasi dan penetapan jadwal kegiatan perusahaan. Langkah-langkah tersebut sebagai upaya sekuriti dalam fungsinya di perusahaan yaitu nihil kejadian buruk (*zero incident*), nihil kecelakaan (*zero accident*), nihil kehilangan anggaran (*zero budget loss*), nihil kehilangan waktu (*zero time loss*), dan *full compliance / sesuai*.

Penulis ingin menunjukkan manajemen sekuriti fisik yang diaplikasikan oleh PT Arun NGL dalam mencegah timbulnya kejahatan dari pelaku kejahatan yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan dalam tesis ini. Manajemen sekuriti yang diteliti adalah manajemen sekuriti fisik yang diselenggarakan oleh perusahaan guna mencegah hilangnya aset-aset perusahaan. PT Arun NGL sudah mengaplikasikan sekuriti fisik di lingkungan perusahaan akan tetapi perusahaan masih mengalami gangguan keamanan seperti pencurian dan unjuk rasa yang dapat menghambat pencapaian kinerja perusahaan sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Pertamina dalam mengelola gas LNG.

Kilang Arun mendasari buku *profile* PT Arun NGL tahun 2010, adalah unit pengolahan tambang gas alam cair / LNG (*Liquid Natural Gas*).

Universitas Indonesia

Pembangunan Kilang Arun dimulai pada akhir tahun 1974 oleh *Bechtel Inc* sebagai kontraktor utamanya dengan menyiapkan 3 unit produksi (*Train* awal) sebagai sarana pendukung awal produksi. PT Arun NGL sendiri adalah badan hukum berbentuk Persero yang ditunjuk oleh Pertamina selaku operator untuk mengelola Kilang Arun (Nirlaba). Kilang Arun didirikan atas dasar pembagian saham sebagai bentuk perjanjian kerjasama bagi hasil pencarian gas dimana 50 % saham milik Pertamina dan sisanya adalah mitra kerjanya yaitu 30 % saham milik PT Exxon Mobil dan 15 % saham milik JILC. Aset Kilang Arun sendiri dimiliki dan dibangun oleh PT Pertamina. PT Pertamina adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor migas. Hasil produksi Kilang Arun selain LNG adalah kondensat dan LPG yang berbahan baku sama yaitu LNG yang dipasok dari ladang gas Arun oleh PT *Exxon Mobil* yang terletak di Lhoksukon Aceh Utara. Kilang Arun terletak di Blanglancang Lhokseumawe Aceh, menempati lahan seluas 1.897 Ha yang terbagi atas *plansite area* 594 Ha dan *Community area* 1.303 Ha yang dilengkapi dengan 2 pelabuhan khusus pengangkut produksinya. PT Arun NGL didukung oleh 423 karyawan *in-house* dan 912 karyawan *out-sourch*.

Keberadaan PT Arun NGL dalam memproduksi gas alam cair telah membawa manfaat bagi negara utamanya sebagai penghasil devisa dan merupakan pendapatan negara terbesar setelah minyak bumi. Namun tidak saja negara yang diuntungkan dari obyek vital industri ini, tetapi juga sejumlah pengusaha lain dan masyarakat sekitar ikut memperoleh manfaat atas keberadaannya. Sebagaimana Simanjuntak (2009:2) mengatakan bahwa setiap perusahaan usaha kecil atau besar, selalu menyangkut kepentingan banyak orang antara lain pemerintah, konsumen, perusahaan pengguna, masyarakat sekitar, perusahaan pemasok, pekerja dan pengusaha, pemegang saham dan manajemen serta beberapa pihak terkait lainnya. Masing-masing pemangku kepentingan tersebut memiliki peran dan kepentingan atas perusahaan tersebut misalnya pengusaha yang mengharapkan keuntungan yang tinggi, pekerja mengandalkan perusahaan sebagai sumber penghasilan maupun tempat mengaktualisasi keberhasilan, dan masyarakat serta pemerintah melihat perusahaan sebagai sumber kesempatan kerja dan devisa.

PT Arun NGL dapat dikategorikan sebagai obyek vital industri yang berisiko tinggi di Indonesia karena asetnya yang besar, dan sebagai penghasil devisa bagi negara termasuk menyangkut kepentingan berbagai pihak dan akan berdampak luas bilamana aktivitasnya terganggu. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 6 tahun 2004 tentang pengamanan obyek vital bahwa obyek vital adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi dan / atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan / atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Penciptaan rasa aman yang dilakukan oleh PT Arun NGL salah satunya menyelenggarakan manajemen pengamanan fisik (*physical security*). Manajemen pengamanan fisik dilakukan untuk memberikan jaminan bagi perusahaan agar tidak mengalami kerugian serta kondisi yang bebas dari ancaman dan gangguan. Strauss (1980) dalam bukunya *Security Problem in a Modern Society* mengatakan bahwa : “*security is prevention of losses of all kinds from whatever causes*”, yang diterjemahkan sebagai pengamanan adalah mencegah kerugian dari sebab apapun. Agar pengamanan ini dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan manajemen karena manajemen merupakan suatu ilmu agar hasilnya efektif dan efisien. Pengertian fisik menurut Hadiman (2010) mencakup fisik bangunan itu sendiri. Dengan demikian pengertian manajemen pengamanan fisik menurut Hadiman (2010) adalah upaya mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun dengan menggunakan wujud fisik pengamanan yang didukung proses manajemen agar hasilnya bagus yaitu sangkil (efektif atau yang dikerjakan benar) dan mangkus (efisien atau cara mengerjakannya benar).

Keberadaan sekuriti sebagai wujud dari pengamanan swakarsa, sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pengamanan industri (*industrial security*) diemban oleh kepala proyek yang domainnya adalah *privat* yang fokusnya pada pencegahan kerugian (*loss prevention*). Adapun pengorganisasian tugas pengamanan suatu industri dalam manajemen sekuriti industri tentunya juga harus memegang prinsip-prinsip organisasi yang baik diantaranya pembagian pekerjaan yang jelas menurut tujuan, proses waktu ataupun lokasi; hubungan otoritas yang jelas; ruang lingkup yang jelas; kesatuan komando; pendelegasian tanggungjawab; kerjasama melalui pelatihan dan komunikasi (Hadiman, 2010).

Sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola LNG oleh PT Pertamina, maka teknis operasional produksi hingga sistem pengamanan menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT Arun NGL. Sejak diberlakukannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana perusahaan diberikan kesempatan untuk menerima tenaga *out-sourch* maka semula satuan pengamanan (satpam) pada PT Arun NGL yang berstatus *in-house*, sejak tahun 2004 sudah mulai dilakukan proses tender Badan Usaha jasa Pengananan (BUJP), otomatis personel satpam yang semula *in-house* beralih status menjadi *out-sourch* dan dibawah naungan BUJP. Pada tahun 2004 dipercayakan pada BUJP PT *Protecom*, tender berikutnya dimenangkan oleh BUJP PT Nawakara, selanjutnya BUJP PT Bella Prayatama dan terakhir pada bulan Oktober 2010 dimenangkan oleh BUJP PT Bina Nanggroe. Masing-masing BUJP bergerak dibidang jasa penyediaan tenaga pengamanan. Proses tender dilakukan setiap tahunnya namun bilamana dinilai baik maka diperpanjang secara otomatis. Adapun personel satuan pengamanan tetap menggunakan personel permanen atau eks *in-house* satpam PT Arun NGL atau eks *out-sourching* BUJP PT *Protecom* yang jumlahnya fluktuatif dalam setiap pergantian BUJP, terakhir jumlah satpam adalah 188 orang.

Untuk melakukan pengawasan pada satpam *out-sourching* dan menjembatani kepentingan dengan pihak manajemen PT Arun NGL, PT Arun NGL telah menugaskan satpam *in-house* yang berjumlah 7 orang. Selain satpam, untuk pengamanan fisik perusahaan juga dilengkapi oleh *Barier*, *Fances*, alat komunikasi, pos jaga, akses kontrol, *CCTV*, dan kunci pengaman.

Gangguan menurut pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/4/2005 tentang Pengamanan Obyek Vital, adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian. Gangguan keamanan yang terjadi pada PT Arun NGL berdasarkan data kejadian di perusahaan adalah pencurian kabel tembaga dan besi, dimana pelakunya berasal dari orang dalam maupun luar perusahaan, meskipun hal tersebut tidak mengganggu secara langsung jalannya aktivitas Train LNG, namun dikategorikan tetap merugikan karena perusahaan telah kehilangan asetnya. Pencurian yang dilakukan oleh orang dalam khususnya tenaga *out-sourch* yang bekerja sama dengan Satpam untuk mengeluarkan material tanpa ijin, adapun pelaku dari luar adalah memanfaatkan kelengahan

petugas Satpam dengan cara melewati pagar yang memang tidak memenuhi standar sekuriti ditambah beberapa fasilitas pengamanan meliputi penerangan, kunci, *barier* yang tidak ideal. Banyak faktor yang menjadikan orang sampai nekat melakukan pencurian. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketimpangan masalah pangan karena sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan khususnya yang dialami oleh tenaga kerja *out-sourch*. Kasus pencurian tidak saja menjadi permasalahan sekuriti pada PT Arun NGL, permasalahan sekuriti lainnya yaitu unjuk rasa dari Ikatan Keluarga Besar Blanglancang (IKBAL) yang menuntut *resettlement* Pemerintah Aceh saat pembangunan lokasi Kilang Arun tahun 1974.

Gangguan keamanan tersebut sangat merugikan perusahaan karena banyaknya aset-aset perusahaan yang hilang akibat pencurian meskipun aset yang dicuri tidak langsung berhubungan dengan aktivitas produksi. Hal ini sangat ironis sekali dimana PT Arun NGL sudah menyelenggarakan manajemen sekuriti fisik, namun masih terjadi hilangnya aset-aset perusahaan. Maka dari itu, penulis memilih untuk melakukan penelitian di PT Arun NGL yang fokus penelitiannya pada penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik.

1.2 Masalah Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:32) masalah berbeda dengan rumusan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu berupa pertanyaan penelitian (*research question*) yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah.

Masalah dalam penelitian ini adalah PT Arun NGL sudah melaksanakan manajemen pengamanan fisik, namun perusahaan masih mengalami gangguan pada aset. Tentu saja membuat perusahaan mengalami kerugian. Penulis menganggap masalah ini penting karena menurut Erenst dan Young Consulting bahwa hasil penelitiannya pada tahun 2009 sampai 2010 terhadap perusahaan-perusahaan di 132 negara adalah :

- a. 84 % penipuan (*fraud*) dalam perusahaan dilakukan oleh karyawan sendiri,
- b. hampir separuhnya dilakukan oleh para karyawan yang sudah bekerja selama lima tahun lebih.
- c. jumlah kerugian perusahaan - perusahaan dunia setiap tahun adalah milyaran dollar,
- d. modus operandinya antara lain adalah melalui penyelewengan dalam pengadaan barang, penipuan cek yang bernilai besar, melalui *computer fraud* yaitu penggunaan perangkat lunak secara ilegal dan penyingkapan info rahasia (Hadiman, 2010).

Pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah :

- a. Seberapa efektif penyelenggaraan manajemen pengamanan fisik (*physical security*) pada PT Arun NGL?
- b. Bila belum efektif, apa yang menjadi kendala internal dan eksternalnya?
- c. Bagaimana manajemen pengamanan fisik (*physical security*) yang *standard* yang perlu diterapkan PT Arun NGL?

1.3 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini bahwa penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik pada PT Arun NGL belum optimal.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. untuk mengetahui dan menganalisis seberapa efektif penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik pada PT Arun NGL,
- b. untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendalanya baik internal maupun eksternal,
- c. untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana manajemen sekuriti fisik yang ideal bagi PT Arun NGL.

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Mengembangkan teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan manajemen sekuriti dalam lingkup kajian ilmu kepolisian untuk mempelajari berbagai isu penting dalam penyelenggaraan sistem keamanan swakarsa di masyarakat utamanya dibidang pengamanan industri yang hasilnya dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu kepolisian.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi PT Arun NGL untuk memperbaiki kekurangan dalam penyelenggaraan manajemen pengamanan fisiknya. Model sistem pengamanan ini diharapkan menjadi salah satu acuan untuk menjawab permasalahan tentang sistem pengamanan fisik yang tepat bagi industri berisiko tinggi. Sementara itu bagi Polri, hasil penelitian ini akan menjadi masukan dalam melaksanakan tugas dan perannya selaku aparat negara dibidang keamanan khususnya tanggung jawab dibidang koordinasi, pembinaan teknis dan pengawasan pada obyek vital industri.

1.6 Tata Urut Penulisan

Tata urut penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menjelaskan tentang latar belakang dari dilakukannya penelitian tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik pada PT Arun NGL. Kemudian setelah latar belakang, penulis menjelaskan tentang masalah penelitian serta hipotesis. Setelah itu, penulis mengungkapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan.

Universitas Indonesia

Bab II Tinjauan Literatur

Dalam Bab II berjudul tinjauan literatur. Pada bab ini terbagi dalam 2 bagian yaitu literatur teori dan literatur konsep. Dalam literatur teori, penulis menjelaskan tentang penggunaan teori-teori yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Ada 3 (tiga) teori yang penulis gunakan dalam tesis ini. Ketiga teori ini berasal dari pengetahuan yang berbeda namun terkait dengan masalah penelitian. Disamping berisi literatur teori, pada bab ini juga berisi literatur konsep. Pada literatur konsep, penulis menjelaskan konsep-konsep yang digunakan agar menjadi batasan dari masalah dari penelitian ini.

Bab III Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum wilayah penelitian yang terdiri atas gambaran umum Polsek Muara Satu, Kecamatan Muara Satu dan PT Arun NGL disamping itu data gangguan keamanan sebelum dan sesudah MoU Helsinki dan potensi ancaman pada PT Arun NGL.

Bab IV Metode Penelitian

Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Disini, metode yang digunakan menjadi pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Disamping metode penelitian, penulis juga menjelaskan operasionalisasi faktor - faktor yang diteliti sebagai batasan penelitian yang dilakukan oleh penulis berikut sumber data yang akan digunakan oleh penulis. Setelah ditentukan operasionalisasi faktor – faktor yang akan diteliti maka penulis menyusun pedoman wawancara yang akan dijadikan sebagai tehnik untuk mengumpulkan informasi.

Bab V Hasil Penelitian

Pada bab ini, berisi hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan

Universitas Indonesia

penelitian yaitu efektifkah penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik pada PT Arun NGL dilihat dari manajemen satpam, fasilitas pengamanan fisik, upaya sekuriti, *CPTED* dan peran pemangku kepentingan. Selanjutnya kendala yang ditemukan baik secara internal maupun eksternal.

Bab VI Analisa dan Pembahasan

Pada bab ini, penulis menjelaskan analisa terhadap temuan yang didapatkan mengacu dari teori dan konsep yang ada. Secara tidak langsung bahwa hasil pembahasan tersebut adalah kondisi ideal atau kondisi yang diharapkan bagi penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik pada PT Arun NGL.

Bab VII Penutup

Pada bab ini, penulis menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik pada PT Arun NGL belum efektif yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dari PT Arun NGL. Idealnya bahwa penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik adalah mengikuti standar sekuriti namun terbatasnya anggaran maka diperlukan pengambilan kebijakan yang tepat oleh menejer sekuriti untuk penguatan sekuriti fisik perusahaan. Oleh karena itu, dalam bab ini penulis memberikan rekomendasi sehingga dapat menjadi masukan dalam rangka peningkatan sistem sekuriti fisik pada PT Arun NGL.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

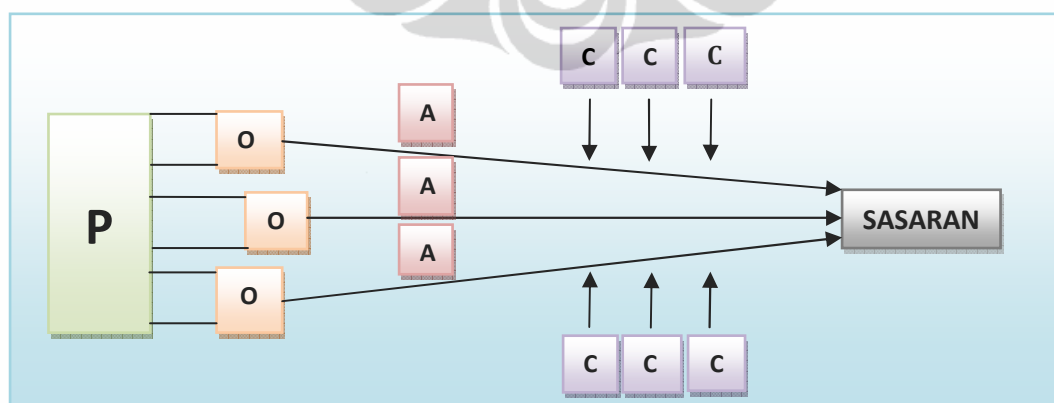
Pada Bab II tentang tinjauan literatur ini berupa teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan memahami fakta-fakta penyelenggaraan manajemen pengamanan fisik pada PT Arun NGL

2.1 Literatur Teori

2.1.1 Teori Manajemen

Terry (1986) menyatakan bahwa “Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain”.

Proses disini diartikan sebagai suatu cara yang sistematis yang sudah ditetapkan dalam melakukan kegiatan. Berikut proses manajemen :



Gambar 2.1 Proses Manajemen

Sumber data : Terry (1986:38), Asas-Asas Manajemen

Proses vital manajemen terdiri dari : *Planning – Organizing – Actuating* dan *Control*. Sumber – sumber daya dasar dikelola oleh fungsi – fungsi dasar manajemen yaitu: Perencanaan – Pengorganisasian – Menggerakkan – Pengawasan, agar sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Sumber-sumber daya dasar tersebut meliputi : *Men, Methode, Material, Money, Machine, Information*.

2.1.1.1 Perencanaan

Perencanaan mengandung arti bahwa manajer harus memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan melakukan perencanaan :

- a. timbulnya aktivitas-aktivitas teratur yang ditujukan kearah pencapaian sasaran,
- b. perencanaan menunjukkan perlu diadakannya perubahan pada masa yang akan datang,
- c. perencanaan menjawab pertanyaan-pertanyaan : “Apakah yang akan terjadi apabila?”
- d. ia memberikan sebuah dasar atau landasan untuk melakukan pengawasan,
- e. perencanaan mendorong orang memberikan prestasi (sebaik mungkin),
- d. perencanaan memaksakan orang untuk memandang perusahaan secara menyeluruh,
- e. perencanaan memperbesar dan mengembangkan pemanfaatan-pemanfaatan fasilitas,
- f. perencanaan membantu seorang manajer mencapai status.

2.1.1.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan

Universitas Indonesia

kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Hal penting dalam pengorganisasian adalah mengharmonisasikan suatu kelompok orang-orang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan kemampuan – kemampuan kesemuanya kesuatu arah tertentu. Untuk itu diperlukan pembagian kerja dan standarisasi kegiatan guna terjaminnya keseragaman, ketetapan dalam pencapaian sasaran.

2.1.1.3 Menggerakkan

Adalah usaha untuk menggerakkan atau mengatur anggota kelompok hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

2.1.1.4 Pengawasan

Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Sementara itu, Manullang (2001) mendefinisikan manajemen sebagai :

Seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Maka manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu :

- a. proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan,
- b. kompetensi yang dimiliki seseorang yang telah menduduki jabatan strategis atau manajerial dalam rangka pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Dikaitkan dengan sekuriti fisik, Hadiman (2010) mengatakan :

“Manajemen sekuriti fisik sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun dengan menggunakan wujud fisik pengamanan yang didukung proses manajemen agar hasilnya bagus yaitu sangkil (efektif /

yang dikerjakannya benar) dan mangkus (efektif / cara mengerjakannya benar). Menggunakan proses manajemen yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, karena manajemen merupakan suatu ilmu agar hasilnya sangkil dan mangkus”.

2.1.2 Teori *Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)*

Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) menurut Mc. Crie (2001:301) adalah upaya pencegahan kejahatan demi menghindari terjadinya kerugian dengan melakukan perencanaan pengamanan yang melibatkan desain lingkungan. Kejahatan dapat diminimalisir dengan desain lingkungan dalam manajemen pengamanan, sehingga terjadi interaksi yang baik dengan lingkungan. Frekuensi kejadian terutama kejahatan diharapkan menurun karena faktor korelatif kriminogen (FKK) dan *police hazard (PH)* yang berpotensi, dapat diketahui sedini mungkin sehingga dapat dilakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan. Penyelenggaraan pengamanan harus direncanakan berdasarkan penelitian yang komprehensif dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada. *CPTED* memiliki empat prinsip dasar dalam perencanaan keamanan yaitu :

- a. pembagian area, yang memudahkan pengawasan halaman dan lingkungan, sehingga kejadian sekecil apapun dapat dikenali atau mudah dikenali, diawasi dan menghalangi orang yang tidak berkepentingan atau seseorang yang akan masuk secara tidak sah. Diantara zona perpindahan transisi area yang satu dengan yang lainnya terdapat ruang yang termonitor dan terkendali,
- b. pengawasan lingkungan, dilakukan dengan mengamati area luar / lingkungan dari dalam dengan jelas, dan dapat dengan mudah untuk meminta bantuan bila diperlukan. Jalan, gang dan akses area terbuka, tidak menghambat bila sewaktu - waktu diperlukan. Daerah yang tidak terjangkau dapat dimonitor dengan menggunakan *Closed Circuit Television (CCTV)* dan sistem alarm.
- c. Citra / *image*, reputasi perusahaan yang memiliki kesan bahwa lingkungan yang tertata dengan baik, terawat dan teratur serta mudah diawasi dan diamankan. Penggunaan ruang kosong diprogramkan secara efektif sesuai dengan peruntukan.

- d. Lingkungan yang meliputi kawasan sekitar perusahaan, bangunan yang berdekatan, jalan-jalan, pedagang kaki lima, ruang kosong yang belum dimanfaatkan dan taman yang merupakan area yang harus diawasi dan diamankan. Sistem komunikasi dan akses jalan keluar / masuk terbuka dan siap digunakan ketika memerlukan bantuan darurat. Tidak tersedianya area yang dapat menarik untuk tempat tinggal para gelandangan.

2.1.3 Teori Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional

Strategi pencegahan kejahatan situasional merupakan bagian dari teori strategi pencegahan kejahatan. Teori strategi pencegahan kejahatan digunakan untuk menerangkan tentang berbagai bentuk strategi pencegahan kejahatan yang diterapkan pada suatu lokasi.

Strategi pencegahan kejahatan menurut Kaiser dalam Dermawan (1994:12) adalah suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik itu melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan, ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh-pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Dermawan (1994) mengutip pendapat beberapa ahli mengatakan terdapat tiga bentuk strategi pencegahan kejahatan, yaitu :

- a. pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial biasa disebut *social crime prevention* yang mempunyai arti segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Populasi umum (masyarakat) ataupun kelompok - kelompok yang secara khusus mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran menjadi sasarannya,
- b. pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut dengan *situasional crime prevention*, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk

melakukan pelanggaran,

- c. pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan sering disebut dengan *community based crime prevention* yang segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi aksi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.

Ronald V. Clarke adalah orang yang pertama kali mengembangkan teori *situasional crime prevention* sebagai strategi pencegahan kejahatan yang di tujukan untuk suatu jenis kejahatan yang spesifik dan bertujuan untuk mengubah situasi dan kondisi yang ada pada awalnya menguntungkan pelaku kejahatan. Dalam hal strategi pencegahan kejahatan, Clarke (1997) membagi 25 teknik pencegahan kejahatan yang meliputi :

- a. mempersulit upaya (*increase the effort*), langkah - langkahnya meliputi:
1. memperkuat sasaran (*target harden*) yang dapat dilakukan dengan cara mengunci pintu ruangan yang tidak digunakan, memasang teralis dan gembok,
 2. mengendalikan akses ke dalam fasilitas (*control access to facilities*),
 3. mengawasi pintu keluar (*screen exist*),
 4. menjauhkan pelaku dari target (*defect offender*),
 5. mengendalikan peralatan / senjata yang digunakan pelaku (*control tools/weapons*).
- b. meningkatkan risiko (*increase the risk*) yang langkah-langkahnya meliputi :
1. memperluas penjagaan (*extend guardianship*),
 2. membantu pengawasan alamiah (*assist natural surveillance*),
 3. mengurangi anonimitas (*reduce anonymity*),
 4. memberdayakan manajer lokasi (*utilize place managers*),
 5. memperkuat pengawasan formal (*strengthen formal surveillance*),

- c. mengurangi imbalan (*reduce the rewards*) yang langkah-langkahnya meliputi :
1. menyembunyikan target (*conceal targets*),
 2. memindahkan target (*remove target*),
 3. memberikan identitas pada benda (*identify property*),
 4. mengganggu pasar (*disrupt markets*),
 5. mencegah keuntungan yang akan diperoleh pelaku (*deny benefits*).
- d. mengurangi provokasi (*reduce provocation*) yang langkah-langkahnya meliputi :
1. mengurangi frustrasi dan stress (*reduce frustrations and stress*),
 2. mencegah munculnya pertengkaran (*avoid disputes*),
 3. mengurangi rangsangan emosional (*reduce emotional arousal*),
 4. menetralkan tekanan rekan (*neutralize peer pressure*),
 5. mencegah imitasi (*discourage imitation*).
- e. menghilangkan alasan (*remove excuses*) yang langkah-langkahnya meliputi :
1. membuat aturan (*set rules*),
 2. menempatkan rambu - rambu larangan maupun perintah (*post instruction*),
 3. meningkatkan kewaspadaan (*alert conscience*),
 4. meningkatkan kesadaran orang untuk patuh (*assist compliance*),
 5. mengendalikan peredaran narkoba dan alkohol (*controlling drugs and alcohol*).

2.2 Literatur Konsep

2.2.1 Konsep Sekuriti Fisik

Defenisi manajemen sekuriti fisik menurut Fay dalam Mc Crie (2001:307-308) yang mengatakan bahwa :

Physical security is that part of security concerned with physical measures designed to safe guard people, to prevent unauthorized acces to equopment, facilities, material and documents, and to safeguard them against damage and loss. The term encompasses measures relating to the effective and economic use

of a facility's full resources to meet anticipated and actual security threats. Concern of physical security planners include design, selection, purchase, installation, and use of physical barriers, locks, safes and vaults, lighting, alarm, CCTV, electronic surveillance, access control, and interrelated electronic measures. Typically, systems involve a combination of two more distinct measures to protect people, physical assets, and intellectual property (Mc Crie, 307-308), yang terjemahannya sekuriti fisik adalah bagian dari sekuriti dengan ukuran fisik yang didesain untuk menjaga orang-orang, mencegah akses yang tidak sah ke peralatan, fasilitas, material dan dokumen-dokumen, dan untuk melindunginya dari kerusakan dan kerugian. Istilah ukuran yang berkenaan dengan penggunaan yang ekonomis dan efektif dari suatu sumber daya fasilitas dari ancaman-ancaman keamanan. Pemerhati dari perencana sekuriti fisik meliputi desain, pemilihan, pembelian, instalasi dan penggunaan fisik penghalang, kunci, penyelamatan, penerangan, alarm, CCTV, pengawasan elektronik. Secara khas, sistem melibatkan suatu kombinasi dari dua sampai lebih ukuran yang berbeda untuk melindungi orang-orang, aset fisik dan hak intelektual.

Pengertian sekuriti fisik dalam penelitian ini adalah mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun dengan menggunakan ukuran fisik yang didesain untuk menjaga dan melindungi aset sedangkan fokus dalam sekuriti fisik adalah pengendalian akses, *barrier* (penghalang), *fences* (pagar), kunci, penerangan (*lighting*), tenaga sekuriti (*guard*), pos jaga (*guard tower*), dan alat komunikasi.

2.2.1.1 Pengendalian Akses

Pengendalian akses menurut Mc. Crie (2001) adalah mengendalikan orang-orang, kendaraan, dan bahan material yang melewati (masuk dan keluar) suatu areal yang dilindungi. Sistem pengendalian akses mempergunakan perangkat keras dan prosedur khusus untuk mengontrol dan memonitor gerakan pada suatu wilayah yang dilindungi.

2.2.1.2 Penghalang (*Barrier*)

Menurut Mc. Crie (2001) bahwa halangan dibangun untuk wilayah yang dilindungi. Sebagai contoh adalah suatu kolam atau semak belukar yang sulit ditembus yang dapat membuat efek psikologis sebagai penghalang jarak. Pagar yang dibangun juga merupakan suatu halangan untuk sekuriti fisik.

2.2.1.3 Pagar (*Fences*)

Pemagaran adalah sarana utama untuk pengendalian akses garis batas luar (*perimeter*) fasilitas. Kegunaan dari pagar adalah sebagai penghalang untuk masuk. Menurut Ricks telah membagi tipe pagar menjadi 3, yaitu :

- a. pagar yang saling terhubung (*chain link fencing*),
Pagar jenis ini terangkai rapi, dengan bagian pagar terdiri dari besi kawat yang terjalin rapi dan tembus pandang dengan bagian atasnya berupa huruf “v” dan dilapisi dengan tiga rangkai kawat berduri. Pagar tersebut terbuat dari baja atau aluminium dengan ketinggian pagar paling tidak mencapai 8 kaki atau 2,4 meter,
- b. pagar kawat berduri (*barbed wire fencing*),
Pagar jenis ini tidak direkomendasikan, mengingat sangat berbahaya jika orang mengenainya. Ketinggian tidak kurang dari 7 kaki terbuat dari baja keras dan aluminium,
- c. pagar berduri atau model kawat konsertina (*barbed tape / concertina wire*)
Pagar berduri konsertina berbentuk gulungan kawat berduri yang digulungkan ke dalam menjadi satu, dua atau lima gulungan dengan diameter 1 kaki, dikepit bersama-sama berselang-seling dan terpakat sebagai suatu halangan untuk mengamankan satu garis bulatan atau jalan kendaraan. Tipe berduri adalah salah satu halangan yang paling sulit untuk ditembus karena pagar ini dibuat sangat lentur dan memiliki duri yang besar, tajam dan sangat rumit. Tipe berduri adalah rintangan pada pagar yang paling tidak baik dipandang dan sulit pemeliharannya. Dengan demikian, pada umumnya tidak direkomendasikan untuk penggunaannya sebagai satu tempat yang permanen.

2.2.1.4 Kunci

Menurut Mc Crie (2001:313) kunci merupakan bagian dari perencanaan sekuriti fisik. Kunci mempunyai manfaat untuk program sekuriti. Mudah digunakan dan sulit untuk dibuat.

Menurut Eric Oliver dalam Kunarto (2000:38-39) :

- a. *box lock*. Kunci jenis Box Lock disebut sebagai rim lock. Kunci memperkuat daun pintu, rumah kunci pada kusen pintu. Jenis kunci yang murah, mudah didobrak dan pada umumnya mempunyai jumlah variasi kunci yang terbatas,
- b. gembok adalah jenis kunci yang tersedia dipasar dengan berbagai harga

dan kualitas, jangan menggunakan kunci yang mempunyai *lever* kurang dari lima atau *shackle* yang dapat dibongkar dengan kawat atau besi baja. Pastikan fungsi pengait, *stapler*, *locking bar* atau *lug* karena sama substansialnya dengan kunci itu sendiri,

- c. *key tab* adalah jenis kunci yang berwarna dan bernomor. Secara komersial sudah tersedia di pasar sehingga berbagai warna dapat dialokasikan untuk departemen yang berbeda dan kunci yang diberikan hanya kepada kepada pihak yang mempunyai *coloured disc* yang sesuai,
- d. *key-suited lock* adalah kunci yang dibuat dengan sistem perencanaan (*pre-planned system*) di mana kunci master tunggal membuka semuanya, kunci sub master membuka nomor spesifik dan kunci biasa hanya membuka kunci tunggal. Dengan demikian seorang eksekutif hanya membuka satu kunci yang membuka seluruh pintu di bawah yuridiksinya, maka kepala departemen hanya dapat membuka pintu pada seksinya sendiri dan pegawai hanya dapat membuka ruang kantornya sendiri.

2.2.1.5 Penerangan (*Lighting*)

Menurut O' Block (1981:314) bahwa penerangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencegah tindak kejahatan dan memperkuat faktor keselamatan publik. Banyak literatur yang menunjukkan pengaruh penerangan terhadap tindak kejahatan dengan membandingkan antara tingkat kejahatan yang terjadi pada siang hari dengan malam hari, serta pengaruh pemadaman listrik di suatu kota. Ada dua manfaat penerangan jika digunakan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, yaitu :

- a. untuk meningkatkan kemungkinan pengamatan terhadap tindak kejahatan,
- b. untuk memungkinkan suatu struktur kosong mudah diawasi.

Menurut Mc. Crie (2001 : 315-316) bahwa kekerasan dan kejahatan properti, kekacauan dan kecelakaan sering terjadi pada malam hari atau di area yang dengan kurang tersinari. Penerangan yang baik merupakan penghalang yang baik dari kejahatan, kekacauan dan akses masuk *ilegal* setelah hari gelap. Penerangan melindungi publik termasuk petugas patroli untuk dapat melihat dengan mudah lingkungannya. Penerangan harus ada sepanjang rute patroli.

Kekuatan penerangan diarahkan ke arah area yang luar di mana orang-orang tidak sah diperkirakan mendekati fasilitas perusahaan.

Menurut Ricks, Tillet dan Van Meter (1994:97) bahwa suatu program sekuriti yang baik akan memastikan bahwa fasilitas aman pada malam hari sama halnya dengan siang hari. Cara paling umum untuk menyamakan tingkat keaamanan diantara siang dan malam hari adalah instalasi dengan pencahayaan yang bersifat melindungi menambahkan upaya jaminan keamanan yang secara psikologis menghalangi aktivitas penjahat potensial.

Dari uraian diatas maka dibuat batasan bahwa penerangan merupakan suatu program sekuriti yang menggunakan pencahayaan yang digunakan penjaga properti untuk membantu pengamatan visual mereka di malam hari terhadap adanya penyusup yang berniat melakukan perbuatan jahat di suatu area properti. Dengan kekuatan yang diarahkan ke arah luar area dimana dimungkinkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk, penerangan secara psikologis dapat menghalangi aktivitas penjahat potensial untuk melakukan kejahatan.

2.2.1.6 Tenaga Sekuriti (*Guard*)

Menurut Gigliotti dan Jason (1984) tenaga sekuriti adalah sepenting sistem perangkat keras yaitu melindungi aset penting. Elemen penting pada tiap-tiap lingkungan maksimum sekuriti adalah petugas sekuritinya. Dasar kualifikasinya adalah kepatutan, fisik dan kecakapan mental, penyaringan dan pelatihan.

Sennewald (1998) mengatakan ada kelebihan dan kekurangan terhadap sekuriti yang berasal dari pegawai karir perusahaan (*in-house*) dan sekuriti yang berasal dari non karir (*kontrak/out-sourch*)

Sekuriti yang berasal dari pegawai karir kelebihanannya adalah :

- a. stabilitas tetap terjaga,
- b. loyalitas lebih tinggi,
- c. memiliki pengetahuan lokal,
- d. memiliki kebanggaan dan motivasi yang lebih tinggi,
- e. serta kesempatan bagi komunikasi dan pelatihan yang lebih baik.

Sedangkan kekurangannya adalah :

- a. biaya yang lebih tinggi,
- b. jumlah personel terbatas,
- c. penugasan kerja yang kurang fleksibel,
- d. potensi disiplin lebih rendah,
- e. tingkat keahlian yang terbatas.

Sementara itu sekuriti yang berasal dari pegawai non karir (kontrak/ *out souch*) kelebihanannya adalah :

- a. pada umumnya biaya relatif murah,
- b. perusahaan bebas memutuskan jasa kapanpun juga,
- c. fleksibilitas tinggi dalam memperoleh sumber daya manusia,
- d. fleksibilitas tinggi dalam memenuhi kebutuhan kegiatan usaha luas,
- e. personel yang memiliki keahlian yang khusus.

Sementara itu kekuarungannya adalah :

- a. personel biasanya digaji rendah,
- b. keluar masuknya karyawan relatif tinggi.
- c. kebanggaan kerja yang relatif rendah,
- d. motivasi yang relatif rendah.

Menurut Theodore Leavit dalam Hadiman (2010) personel satpam yang bagus dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas. Secara kualitas perlu dilakukan pelatihan secara berkesinambungan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang terjadi, secara kuantitas 10 personel untuk mengawasi / mengamankan wilayah 1 Ha serta harus mengenali wilayah penugasan. Secara teknologi didukung oleh peralatan yang tepat dan membantu tugas sekuriti yang bersangkutan. Secara strategi, perusahaan harus mempunyai cara yang digunakan untuk menghadapi ancaman yang ada.

2.2.1.7 Pos Jaga (*Guard Tower*)

Menurut Gigliotti dan Jason (1984:107), menara pengawas memastikan pengaturan sekuriti tingkat tinggi untuk memelihara pengawasan di wilayah yang luas. Ketika instalasi dibuat yang harus dipikirkan utamanya adalah satu atau lebih

menara pengawas pada hakikatnya meningkatkan jaminan keamanan pada suatu fasilitas dengan dijaga oleh seorang penjaga.

2.2.1.8 Alat Komunikasi (*Communications*)

Menurut pendapat Mc. Crie (2001:326) bahwa pengoperasian sekuriti yang efektif harus mengijinkan komunikasi diantara menejer, *supervisor*, staf personel, dan orang lain. Hal ini adalah suatu kebutuhan selama operasi berjalan normal. Selama keadaan darurat, kebutuhan akan komunikasi lebih besar lagi. Karena satu sistem tunggal dapat mengkompromikan keadaan darurat, pemikiran perencanaan sekuriti dalam bentuk yang sangat berarti dimana personelnnya dapat saling terhubung selama itu.

2.2.1.9 CCTV (*Closed Circuit Television*)

Menurut Mc. Crie (2001:317) bahwa televisi yang tidak menampilkan siaran televisi melainkan menampilkan sinyal melalui rangkaian tertutup melalui kabel listrik atau kabel *fiber optic* dinamakan sistem *closed circuit television* (*CCTV*). Sistem *CCTV* melibatkan desain khusus untuk bekerja dengan rangkaian tertutup.

Dengan demikian pengertian sekuriti fisik dalam penelitian ini adalah mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun dengan menggunakan ukuran fisik yang didesain untuk menjaga orang-orang, mencegah akses yang tidak sah keperalatan, fasilitas, material dan dokumen-dokumen dan untuk melindungi mereka dari kerusakan dan kerugian. Fokusnya adalah penggunaan akses kontrol, *Barrier*, *Fances*, kunci, penerangan, tenaga sekuriti, alat komunikasi dan *CCTV*.

2.2.2 Konsep Pengamanan Proyek Usaha

Hadiman (2010) mengatakan bahwa dalam pengamanan proyek usaha diperlukan upaya taktis dengan urutan kegiatannya meliputi :

- a. pengamanan parimeter, terbagi atas :
 1. zona bebas (*free zone*) yang diperuntukkan bagi,
 - a) orang yaitu : karyawan dengan menggunakan surat PAS, tamu dengan menggunakan surat izin, rekanan dengan menggunakan surat PAS, petugas pembersih dengan menggunakan surat izin,

- b) kendaraan angkut dengan menggunakan surat izin angkut,
 - c) kendaraan pribadi dengan menggunakan surat izin.
2. zona diawasi (*controled zone / area*), yang diperuntukkan bagi tempat parkir dan alat PAR,
 3. zona terbatas (*limited zone (area)*), berisi gudang, genset dan panel listrik. Untuk dapat memasuki area tersebut harus menggunakan surat izin dari direksi,
 4. zona terlarang (*exclusive zone / area*), untuk lokasi pabrik, EDP dan ruang data. Untuk memasuki area tersebut hanya diperuntukkan secara selektif dan diperlukan surat izin khusus.
- b. penyelamatan masa depan proyek / usaha, berisi tentang unsur-unsur kehidupan perusahaan,
1. rangkaian kegiatan,
 2. prioritas penyelamatan,
 3. cara evakuasi,
 4. siapa yang melaksanakan,
 5. kemana dievakuasi.
- Dalam setiap kegiatan mulai dari nomor 1 dan 5 pada point “b” ini akan ditemui unsur-unsur personel, peralatan, fasilitas, bangunan, keuangan dan administrasi.
- c. penerimaan sumber daya manusia (SDM) di proyek itu, berupa cakupan manajemen SDM meliputi tahap penyaringan, pendidikan, penempatan dan pemeliharaan,
 - d. asuransi adalah suatu persetujuan dimana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan mendapatkan sejumlah premi untuk mengganti kerugian karena kehilangan kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak dapat diketahui lebih dahulu,
 - e. alternatif pengembangan dan kemampuan kekuatan,
 1. pengembangan sendiri,
 2. gabungan kekuatan seprofesi ,
 3. gabungan dengan masyarakat lingkungan,

4. koordinasi dengan aparat dan instansi terkait.
- f. pemanfaatan kemampuan supranatural yang merupakan teknologi tradisional dengan penggunaan tenaga dalam untuk alternatif pengamanan pencegahan terjadinya kerugian.

2.2.3 Konsep Upaya Sekuriti

Gigliotti dan Jason (1984) mengategorikan upaya sekuriti sesuai dengan tingkatan-tingkatan penyelenggaraan sekuriti. Ada 5 kevel dari sistem sekuriti, seperti diuraikan di bawah ini :

- a. *level 1* adalah tingkatan *minimum security* yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi / merintangangi beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah dengan peralatan pokoknya berupa :
 1. *simple physical barrier,*
 2. *simple lock.*
- b. *level 2* adalah *low level security* yaitu suatu sistem sekuriti yang dirancang untuk menghalangi / merintangangi dan mendeteksi beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah dengan peralatan pokoknya berupa :
 1. *basic local alarm security,*
 2. *simple security lighting,*
 3. *basic security physical barrier,*
 4. *high security locks.*
- c. *level 3* adalah *medium security* yaitu suatu sistem yang harus dirancang untuk menghalangi atau merintangangi, mendeteksi dan menaksir atau menilai aktivitas gangguan dari dalam yang tidak sah seperti pencurian yang mengarah kepada konspirasi untuk melakukan sabotase dengan peralatan pokoknya berupa:
 1. *advance remote alarm system,*
 2. *high security physical barrier at parimeter,*
 3. *guard dogs,*
 4. *watchmen with basic communication.*

- d. *level 4* adalah *high level security* yaitu sistem pemisahan yang dirancang untuk menghalangi atau merintang, mendeteksi dan menaksir atau menilai gangguan besar yang berasal dari dalam maupun dari luar dengan peralatan pokoknya berupa :
1. *CCTV,*
 2. *parimeter alarm system,*
 3. *highly trained alarm guards with advance communication,*
 4. *access controls,*
 5. *high security lighting,*
 6. *local law enforcement coordination,*
 7. *Formal contingency plans.*
- e. *level 5* adalah *maximum security* yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi atau merintang, mendeteksi dan menaksir atau menilai serta menetralsir semua gangguan baik dari luar maupun aktivitas dari dalam dengan peralatan pokoknya berupa :
1. *on site armed response force,*
 2. *sophisticated alarm system.*

2.2.5 Konsep Hubungan Industrial

Hubungan Industrial masuk ke dalam konteks sekuriti industri karena unjuk rasa, pemogokan, pencurian dan lainnya menimbulkan kerugian bagi perusahaan (Djamin 2008, hlm, 8). Lebih lanjut Djamin menjelaskan, "...di mana buruh dan pengusaha adalah mitra (*partner*) yang rukun, tidak hanya mencegah kerugian (*loss prevention*), bahkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan."

Sementara itu, menurut Payaman J. Simanjuntak (2009, hlm. 1), adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa disuatu perusahaan. Pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) atau biasa juga disebut sebagai pemangku kepentingan dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. perusahaan atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili manajemen,
- b. para pekerja dan serikat pekerja,

- c. para perusahaan pemasok,
- d. masyarakat konsumen,
- e. perusahaan pengguna,
- f. masyarakat sekitar,
- g. pemerintah,
- h. para konsultan perusahaan dan atau pengacara,
- i. para arbitrator, konsilator, mediator, dosen,
- j. hakim-hakim Pengadilan Hubungan Industrial.

Berikut gambar pemangku kepentingan :



Gambar 2.2 Pemangku Kepentingan Perusahaan

Sumber Data : Simanjuntak (2009:3), Manajemen Hubungan Industrial

Hubungan industrial sangat diperlukan dalam suatu perusahaan dan relevansinya dengan penyelenggaraan sekuriti fisik di perusahaan. Salah satu *output* dari hubungan industrial adalah peraturan (*role*), peraturan ini berguna untuk mengendalikan dan menjamin sekuriti fisik serta melindungi sumber daya manusia. Adapun prinsip hubungan industrial tersebut diantaranya (Simanjuntak, 2009:9) adalah :

- a. kepentingan bersama antara pengusaha, masyarakat, dan pemerintah,
- b. kemitraan dan ketergantungan antara pekerja dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan saling membutuhkan,

- c. hubungan fungsional dan pembagian tugas,
- d. hubungan kekeluargaan,
- e. penciptaan ketenangan dan ketentraman bekerja,
- f. upaya peningkatan produktivitas,
- g. peningkatan kesejahteraan bersama.

Pemangku kepentingan (*Stakeholders*) menurut Solihin (2008) adalah orang dan kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.

Jones dalam Solihin (2008) mengklasifikasikan pemangku kepentingan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

- a. *inside stakeholders*, terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Yang termasuk ke dalam kategori *Inside Stakeholders* adalah pemegang saham, menejer, dan karyawan,
- b. *outside stakeholders*, terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat lokal dan masyarakat secara umum.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kepada 3 pelaku penting dari 10 pelaku dalam pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam kaitannya dengan sekuriti, yaitu perusahaan dalam hal ini diwakili oleh pihak manajemen dan dapat digolongkan sebagai *inside stakeholders*, pemerintah daerah dalam hal ini diperankan oleh kepolisian setempat yang dapat digolongkan sebagai *outside stakeholders*, dan masyarakat sekitar dalam hal ini yang berdekatan dengan lokasi perusahaan yang dapat digolongkan sebagai *outside stakeholders*.

Simanjuntak (2009:3-7) menjelaskan bahwa pemerintah, pengusaha dan masyarakat memiliki kepentingan, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan adalah sebagai kepentingan bersama. Kepentingan pengusaha diantaranya menjaga dan mengamankan aset serta mengembangkan aset agar memberikan

nilai tambah. Kepentingan pemerintah dan masyarakat adalah sebagai sumber kesempatan kerja dan devisa sedangkan dukungan yang diberikan diantaranya keamanan dan stabilitas. Imbalan dan kontribusi pemangku kepentingan diantaranya :

Tabel 2.1 Imbalan dan Kontribusi Pemangku Kepentingan

Stakeholders (pemangku kepentingan)	Kontribusi ke perusahaan	Imbalan dari perusahaan
<u>Inside Stakeholders</u>		
Pemegang Saham	Uang dan modal	Deviden dan peningkatan harga saham
Para menejer	Kemampuan dan keahlian	Gaji, bonus, status, dan kekuasaan
Para karyawan	Kemampuan dan keahlian	Upah, gaji, bonus, promosi, dan pekerjaan yang stabil
<u>Outside Stakeholders</u>		
Pemerintah	Peraturan	Pajak

Sumber data : Solihin (2008:4), *Corporate Social Responsibility*.

2.2.6 Konsep Pemolisian Komunitas (*Community Policing*)

Menurut Trojanowicz dan Bucqueroux sebagaimana dikutip oleh Bailey dalam buku Ensiklopedia Ilmu Kepolisian Edisi Bahasa Indonesia, pemolisian komunitas dideskripsikan sebagai berikut :

Pemolisian Komunitas merupakan pembaharuan besar pertama dalam kepolisian sejak aparat kepolisian menganut prinsip manajemen ilmiah lebih dari setengah abad lalu. Hal ini merupakan perubahan yang cukup drastis dalam konteks interaksi polisi dengan masyarakat. Sebuah falsafah baru yang memperluas misi kepolisian dari yang semula cenderung hanya terfokus pada kriminalitas berubah menjadi kewajiban yang mendorong kepolisian untuk mendayagunakan solusi kreatif bagi berbagai persoalan dalam masyarakat termasuk kriminalitas, kecemasan masyarakat, ketidaktertiban, dan terganggunya kerukunan warga. Pemolisian komunitas bersandar pada kepercayaan bahwa hanya dengan bekerjasamalah masyarakat dan polisi akan mampu meningkatkan mutu kehidupan di dalam masyarakat, dengan polisi diharapkan untuk dapat berperan tidak hanya sebagai penasehat, fasilitator, dan pendukung gagasan baru dengan basis masyarakat serta disupervisi oleh polisi (Bailey, 1995:112)

Dalam konsep pemolisian komunitas, polisi menempatkan masyarakat sebagai mitra. Dengan kemitraan polisi bersama-sama dengan masyarakat memikul tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Tujuannya adalah mencegah kejahatan, memelihara ketertiban, dan meningkatkan kualitas memiliki kehidupan di lingkungan masyarakat. Pemolisian komunitas memiliki orientasi yang lebih luas dibanding program hubungan masyarakat. Polisi dan publik menjadi partner dalam menentukan peran polisi dan mengidentifikasi solusi masalah sosial seperti kejahatan dan ketidakteraturan sosial.

Pelaksanaan pemolisian komunitas (*community policing*) untuk di Provinsi Aceh dititipkan perannya kedalam Tuhapeut atau perangkat adat desa / gampong sesuai dengan MoU dengan pimpinan Muspida tingkat Propinsi Aceh yang ditindaklanjuti hingga tingkat kabupaten dan kota.

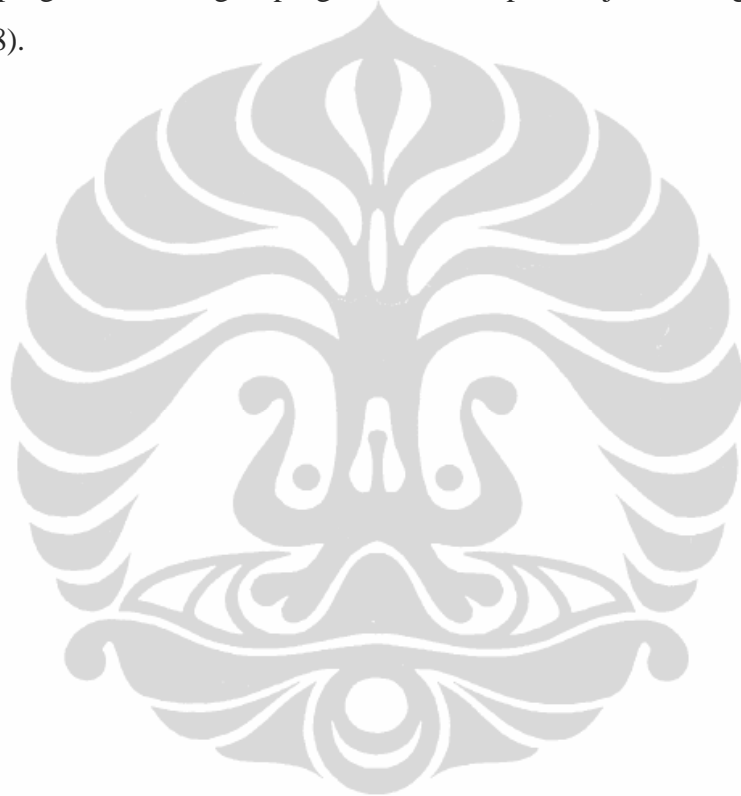
2.2.7 Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Hadiman (2010) CSR adalah bisnis yang peduli pada lingkungan atau itikad baik / uluran tangan dari perusahaan oleh tanggung jawab terhadap lingkungan yang berkepentingan / berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

Kewajiban atau tanggung jawab sosial dari perusahaan bersandar kepada keselarasan dengan tujuan dan nilai-nilai dari suatu masyarakat. Kedua hal yaitu keselarasan dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat merupakan dua premis dasar tanggung jawab sosial. Premis pertama, perusahaan bisa mewujud dalam suatu masyarakat karena adanya dukungan masyarakat. Oleh sebab itu, perilaku perusahaan dan cara yang digunakan perusahaan saat menjalankan bisnis harus berada dalam bingkai pedoman yang ditetapkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, seperti halnya pemerintah, perusahaan memiliki kontrak sosial yang berisi sejumlah hak dan kewajiban. Kontrak sosial itu akan mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kondisi masyarakat. Namun, apa pun perubahan yang terjadi, kontrak sosial tersebut tetaplah merupakan dasar bagi legitimasi bisnis. Premis kedua, yang mendasari tanggung jawab sosial adalah bahwa pelaku bisnis bertindak sebagai agen moral (Bowen dalam Solihin:2008:1-2).

Untuk memenuhi kontrak sosialnya terhadap masyarakat, perusahaan dihadapkan pada tanggung jawab sosial secara simultan. Tanggung jawab sosial masyarakat (*corporate social responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa

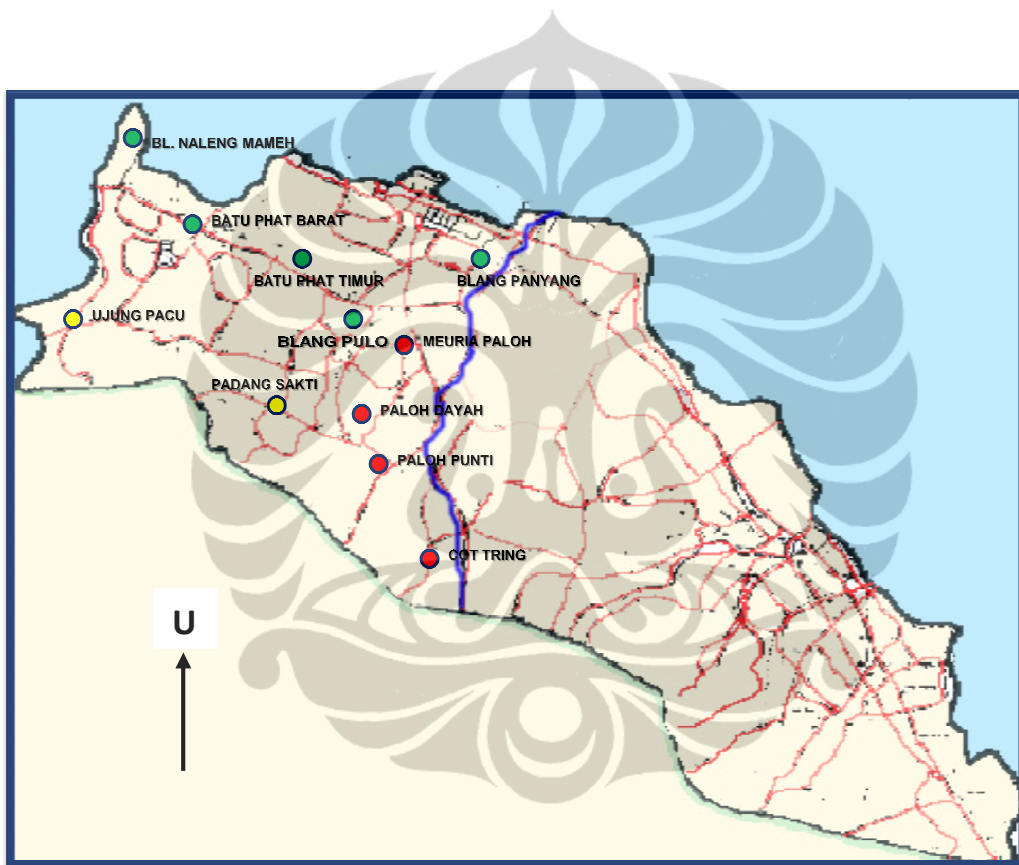
tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam perencanaan *CSR* harus melibatkan melibatkan kerjasama perusahaan dengan pihak lain diantaranya pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak-pihak calon penerima manfaat *CSR* misalnya masyarakat lokal. Oleh sebab itu, perencanaan *CSR* merupakan perencanaan yang terintegrasi dan bukan semata-mata perencanaan yang dibuat oleh perusahaan, tetapi dalam hal ini perusahaan pun harus melibatkan pihak-pihak lain yang akan terlibat dalam pelaksanaan program *CSR* agar program *CSR* dapat berjalan dengan efektif (Solihin: 2008).



BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Kecamatan Muara Satu adalah salah satu kecamatan dalam wilayah pemerintahan daerah Kotamadya Lhokseumawe Provinsi Aceh. Berikut peta Kecamatan Muara Satu :



Gambar 3.1 Peta Kecamatan Muara Satu

Sumber data : Laporan Intel Dasar Polsek Muara Satu Tahun 2011

3.1 Gambaran Umum Polsek Muara Satu

Lokasi PT Arun NGL berada di wilayah hukum Polsek Muara Satu. Koordinasi yang dilakukan antara pihak manajemen PT Arun NGL dengan Polsek Muara Satu umumnya terkait dalam hal penyelesaian gangguan keamanan khususnya tindak pidana yang penanganannya ditangani awal oleh unit investigasi

PT Arun NGL berdasarkan TKP pada PT Arun NGL baik untuk wilayah *plansite* dan *community* termasuk kegiatan pembinaan kamtibmas maupun patroli oleh unit pada Polsek Muara Satu. Berikut gambaran umum Polsek Muara Satu mengacu dari laporan Intel Dasar Polsek Muara Satu Tahun 2010 sebagai berikut :

3.1.1 Situasi Wilayah

Wilayah hukum Polsek Muara Satu adalah salah satu wilayah jajaran Polres Lhokseumawe dan sebagai salah satu wilayah Kotamadya Lhokseumawe yang memiliki peran cukup strategis dimana tumbuh dan berkembang industri – industri baik yang bertaraf internasional maupun nasional sehingga mengharumkan nama Propinsi Aceh dalam sejarahnya. Polsek Muara Satu membawahi 2 kemukiman dan 11 desa atau *gampoeng*. Berikut akan digambarkan situasi wilayah Polsek Muara Satu.

3.1.1.1 Geografi

a. Letak Wilayah

Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Dua, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nisam Aceh Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dewantara.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Muara Satu adalah 55,90 Km² terbagi atas dua mukim yaitu Mukim Paloh Barat dan Timur.

1. Mukim Paloh Barat,

- (a) Desa Ujung Pacu,
- (b) Desa Blang Naleung Mameh,
- (c) Desa Batuphat Barat,
- (d) Desa Batuphat Timur,
- (e) Desa Blang Pulo.

2. Mukim Paloh Timur,

- (a) Desa Padang Sakti,
- (b) Desa Cot Trieng,
- (c) Desa Paloh Punti,

- (d) Desa Meuria Paloh,
- (e) Desa Mns. Dayah,
- (f) Desa Blang Panyang.

c. Iklim

Daerah Kecamatan Muara Satu beriklim tropis, angin barat yang berhembus pada bulan September sampai dengan Januari. Terdapat 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan September angin bertiup dari arah Barat ke Timur dengan kecepatan 12,5 Km/jam sampai dengan 7 Km/jam. Pada bulan Februari sampai dengan Agustus, angin bertiup dari Utara ke Selatan dengan kecepatan 9 sampai dengan 5 Km/jam. Suhu pada musim panas berkisar 28 – 35 °C.

d. Kondisi Wilayah

Wilayah Kecamatan Muara Satu sebelah utara merupakan daerah yang rendah, pantai, lokasi pemukiman penduduk dan proyek vital, adapun bagian selatan merupakan daerah pegunungan yang dimanfaatkan sebagai lahan peladangan / pertanian dengan perincian sebagai berikut :

1.	Pekarangan / bangunan	:	2.125	Ha
2.	Sawah	:	700	Ha
3.	Tegalan / kebun	:	2.110	Ha
4.	Ladang / Huma	:	1.900	Ha
5.	Tanah yang tidak termanfaatkan	:	300	Ha
6.	Tambak	:	350	Ha
7.	Kolam / empang	:	200	Ha
8.	Rawa – rawa	:	800	Ha
9.	Lain-lain	:	22	Ha

3.1.1.2 Demografi

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Muara Satu berdasarkan data Pemilu tahun 2009 sebagai berikut :

- 1. WNI : 35.862 Jiwa, terdiri dari laki-laki 17.470 Jiwa dan perempuan 18.392 Jiwa. Dengan

Universitas Indonesia

konsentrasi atau padat penduduk pada Kecamatan Batuphat Barat 7.571 Jiwa, Desa Batuphat Timur 6.489 Jiwa dan Desa Blang Pulo 5.162 Jiwa.

2. WNA : Nihil

b. Pertambahan penduduk Kecamatan Muara Satu

Pertambahan penduduk di Kecamatan Muara Satu tidak ada, hal ini disebabkan karena penduduk pendatang yang selama ini tinggal di Kecamatan Muara Satu sebagian besar telah pindah dan penduduk asli banyak yang pindah untuk mencari pekerjaan ke daerah lain.

Komposisi penduduk juga terdiri dari berbagai suku diantaranya suku Minang, Jawa, Batak dan Melayu, disamping penduduk asli Aceh.

Adapun mata pencaharian penduduk Kecamatan Muara Satu yaitu 50 % bertani, 5 % perikanan, 10 % peternakan, 15 % pedagang, 4 % buruh atau nelayan, 6 % pengrajin, 10 % lain-lain.

c. Tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di Kecamatan Muara Satu yaitu:

1. Tgk. H Ramli Amin, selaku Kepala Mukim Paloh Timur,
2. Tgk. H. M. Ali Adami selaku Kepala Mukim Paloh Barat,
3. Tgk. H. Hamdani selaku pimpinan Pesantren yang beralamat di Desa Batuphat Timur,
4. Tgk. Subhan selaku Imam Syik Mesjid Polres Lhokseumawe,
5. Tgk. Hasan Jalil, pensiunan KUA Batuphat Timur,
6. Tgk. H. Sanusi selaku pimpinan Pesantren Ujung Pacu,
7. Tgk. H. Khatib Zarbani selaku Imam Syik desa Paloh Punti,
8. Tgk. Abd Rajab selaku Imam Syik desa Batuphat Timur,
9. Tgk. H. Nasir selaku pimpinan Pesantren desa Batuphat Barat,

3.1.1.3 Sumber Daya Alam

a. Topografi

1. Dataran tinggi : 35,5 % ,
2. Dataran rendah : 21,5 % ,

3. Rawa-rawa : 7,5 %,
4. Sawah : 15 %,
5. Tambak : 17 %,
6. lain-lain : 3,5 %.

b. Pertanian dan perkebunan

1. Pertanian

Pertanian hasilnya tidak menentu, hal ini disebabkan lahan sawah tanpa pengairan yang tetap atau sawah tadah hujan.

2. Jenis-jenis hasil perkebunan

Hasil perkebunan diantaranya kelapa, pinang, sawo, pisang, papaya, ubi kayu, dan sirsak.

3. Hasil laut

Hasil laut diantaranya ikan, udang dan kepiting.

3.1.1.4 Panca Gatra

a. Aspek Ideologi

Pancasila sebagai ideologi negara belum sepenuhnya dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara bahkan terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang menyalahartikan ataupun tidak merasa cocok dengan Pancasila.

b. Aspek Politik

1. Pada zaman orde baru, panggung politik telah dikuasai oleh Golkar, namun setelah adanya era reformasi, partai politik baru banyak bermunculan serta partai lokal sesuai perjanjian yang termuat dalam MoU antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki Swiss yang ikut mengambil bagian dalam Pemilu Legislatif.

2. Kebijakan Pemerintah RI dalam menyelesaikan Konflik Aceh melalui perundingan yang menghasilkan perjanjian di Helsinki disambut positif oleh masyarakat Aceh, namun kelompok kriminal bersenjata masih ada yang tidak mematuhi isi perjanjian tersebut.

a) adanya MoU antara Pemerintahan RI dengan GAM dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak

Universitas Indonesia

menyurutkan tekad GAM untuk memisahkan Aceh dari NKRI karena penafsiran yang berbeda oleh pihak GAM terhadap isi MoU tersebut,

- b) setelah terbentuknya partai lokal di masing-masing wilayah, sangat mempengaruhi suhu politik di wilayah hukum Polsek Muara Satu,
- c) terpilihnya kepala daerah dari calon independen yang berasal dari GAM berpengaruh terhadap kebijakan politik dalam pemerintah daerah.

3. Kegiatan ekstrim

- a) ekstrim kiri G 30 S/PKI tetap merupakan suatu gerakan bahaya laten bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan roda pembangunan. Oleh sebab itu sangat memerlukan kewaspadaan yang tinggi bagi semua pihak-pihak yang terkait. Tidak tertutup kemungkinan menunggangi kelompok-kelompok tertentu dalam gerakannya,
- b) kelompok KPA (Komisi Peralihan Aceh) pada dasarnya merupakan ancaman utama terhadap integritas bangsa dan telah berhasil melumpuhkan roda pemerintahan sipil berikut dengan aksi terornya berhasil pula membungkam masyarakat. Bahkan kelompok ini disinyalir telah berhasil menggalang tokoh-tokoh intelektual muda, LSM, sebagian ulama termasuk media cetak serta tokoh-tokoh masyarakat dengan menurunkan para pejabat pemerintahan tingkat desa selanjutnya menggantikannya dengan kader-kader yang berasal dari mantan kelompok GAM.

4. Tokoh-tokoh politik di Kecamatan Muara Satu :

- a) Partai Aceh : Pon Pang
- b) Partai Amanat Nasional : Surjadi, SE
- c) Partai Demokrat : T. Sofianus, A.md

c. Aspek Ekonomi

1. Dana *recovery* ekonomi di NAD yang disalurkan oleh pemerintah

pusat melalui pemerintah daerah belum mampu mengatasi masalah rakyat kecil dan belum menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat.

2. Kehidupan perekonomian daerah sangat berpengaruh oleh bencana alam tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004.
3. Industri / perusahaan besar yang ada di daerah wilayah Polsek Muara Satu seperti pengelolaan Gas Alam Cair PT Arun NGL yang sudah mulai menurun aktivitasnya akibat menipisnya pasokan gas dari *Exxon Mobile* di Kabupaten Aceh Utara, pabrik Aromatik dan perusahaan air minum mineral seperti *Mount Aqua* dan *Aini Aqua* dirasakan belum berperan untuk membantu penduduk miskin.
4. Aksi pemerasan terhadap pengelola obyek vital / proyek vital dan pungutan liar terhadap masyarakat baik di rumah, pertokoan dan di jalan raya dengan modus untuk pajak nanggroe.
5. Sebagai tindak lanjut MoU antara pemerintahan RI dengan GAM akan dilakukan pemberdayaan ekonomi kepada mantan GAM berupa pemberian modal dan lahan pertanian, namun berujung pada timbulnya permasalahan.
6. Sektor Pertanian
Program dibidang pertanian dengan menggunakan sistem tumpang sari dan pergantian musim tanam, hal ini disebabkan karena areal persawahan umumnya adalah sawah tadah hujan.
7. Sektor Perkebunan
Perkebunan masih bersifat perkebunan rakyat atau tradisional, sedangkan perkebunan besar atau modern baik yang dikelola oleh swasta maupun BUMN tidak ada, hal ini disebabkan karena terbatasnya ketersediaan lahan, sedangkan perkebunan rakyat / tradisional sebagian besar sudah banyak menghasilkan seperti pinang, umbi-umbian dan lain sebagainya.
8. Sektor Pertenakan
Pternakan pada umumnya belum dikelola oleh masyarakat secara

profesional dikarenakan usaha di bidang peternakan merupakan usaha sampingan masyarakat yang mayoritas petani dan pedagang.

9. Prasarana

a) Hubungan darat

- 1) Panjang jalan negara beraspal : 15,5 Km,
- 2) Panjang jalan desa yang beraspal : 8,3 Km,
- 3) Panjang jalan desa belum beraspal : 82,3 Km.

b) Hubungan laut

Untuk keperluan khusus, Kecamatan Muara Satu mempunyai satu pelabuhan khusus yaitu pelabuhan khusus yang terletak di PT Arun NGL yang khusus digunakan oleh perusahaan tersebut.

c) Hubungan udara

Kecamatan Muara Satu tidak memiliki lapangan terbang tetapi memiliki 2 buah *Helipad* atau tempat pendaratan heli yaitu di perumahan (*community*) PT Arun NGL yang terletak di desa Bathupat Barat yang dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan maupun dapat dipakai untuk kepentingan khusus.

10. Sarana

Antara satu tempat dengan tempat lainnya dalam wilayah hukum Polsek Muara Satu semuanya sudah dapat dilalui dengan menggunakan kendaraan bermotor. Rincian jumlah kendaraan bermotor tahun 2010 sebagai berikut :

- a) Mobil Jeep, STWG, Mini Bus dan sejenisnya : 33 unit,
- b) Mobil sedan, sedan stasion dan sejenisnya : 300 unit,
- c) Bus, Micro bus dan sejenisnya : 211 unit,
- d) Pick up, truck, *deliverivan*, *cabin*, *dump truck* : 310 unit,
- e) Alat berat : 30 unit,
- f) Sepeda motor roda dua, roda tiga, scuter : 3.000 unit.

11. Perbankan

Data Perbankan yang berada di wilayah Kecamatan Muara Satu

- a) Bank Mandiri : 1 unit,
 - b) Bank Rakyat Indonesia : 2 unit,
 - c) Bank Pembangunan Daerah : 1 unit,
 - d) Bank Syariah : 1 unit.
12. Pariwisata
- a) Sarana penginapan umum hanya terdapat di *Guest House* yang terletak di wilayah perumahan (*community*),
 - b) Tempat wisata
 - 1) Pantai Pusong Baroh di desa Blang NI Mameh
 - 2) Pantai Rancong di desa Rancong.
- d. Aspek Sosial Budaya
1. Kondisi masyarakat Lhokseumawe di wilayah Kecamatan Muara Satu sangat fanatik dengan ajaran agama Islam dan taat kepada pemimpin agama (*Informal Leader*). Hal ini dapat dimungkinkan untuk dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan tertentu untuk menggiring masyarakat masuk kedalam kelompoknya.
 2. Ekses dari operasi militer menumbuhkan trauma dan sikap dendam dari korban dan keluarganya terhadap aparat keamanan.
 3. Pelaksanaan syariat Islam yang belum dapat terdukung sepenuhnya dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman sering menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan sering muncul implementasi yang berlebihan seperti main hakim sendiri di masyarakat.
 4. Keagamaan
 - a) Pemeluk agama

Tingkat kerukunan hidup beragama cenderung mengarahkan kepada peningkatan yang positif namun secara tersamar masih dirasakan adanya oknum-oknum dari golongan ekstrim tertentu yang sengaja merongrong kerukunan hidup beragama yang mengarah kepada SARA dan memerlukan kewaspadaan dari segenap lapisan masyarakat. Perincian pemeluk agama di Kecamatan Muara

Satu sebagai berikut :

- 1) Islam : 99 %,
- 2) Kristen Katolik : 0,03 %,
- 3) Kristen Protestan : 0,02 %,
- 4) Budha : 0,05 %.

5. Kesenian

Masyarakat secara umum masih cenderung kepada kesenian tradisional antara lain :

- a) Tari Seudati,
- b) Tari Teater,
- c) Rapai Pase.

e. Aspek Pertahanan dan Keamanan

1. Kesatuan – kesatuan TNI / Polri

- a) Koramil 0103 Muara Satu,
- b) Koramil 0103 Muara Dua,
- c) Polsubsektor Muara Dua,
- d) Kompi Kaveleri Serbu / IM,
- e) Pos Marinir Rancung.

2. Integrasi antara kesatuan TNI / Polri sudah berjalan dengan baik, tetapi pada waktu tertentu masih dijumpai kesenjangan khususnya para anggota dilapangan yang mengarah pada timbulnya perkelahian antar oknum, namun berkat koordinasi serta kerjasama yang baik antar kesatuan maka semua masalah dapat dinetralisir.

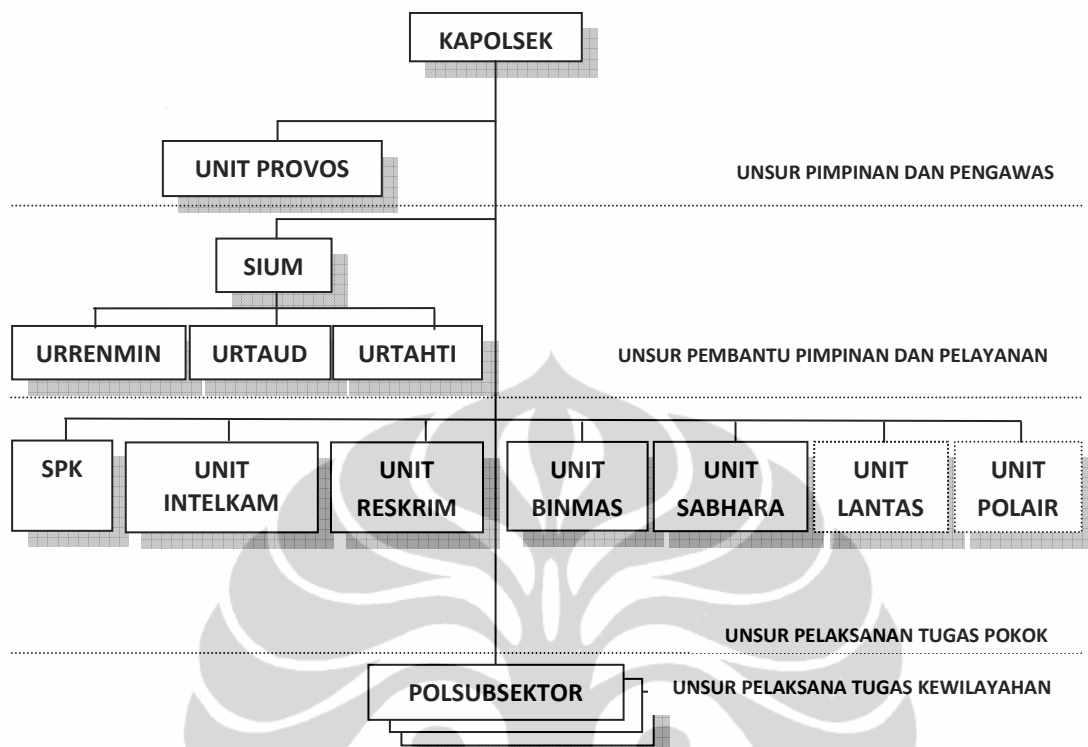
3. Polsek Muara Satu luas wilayahnya terdiri dari 28 desa, terbagi dalam 2 buah kecamatan yaitu Kecamatan Muara Satu yang membawahi 11 desa dan Kecamatan Muara Dua yang membawahi 17 desa yang dilayani pelayanan kepolisian setingkat Polsubsektor.

3.1.2 Situasi Kesatuan

3.1.2.1 Organisasi

Struktur organisasi Polsek Muara Satu berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 366 / VI / 2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan – Satuan Organisasi Polri dapat digambarkan sebagai berikut :

Universitas Indonesia



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Polsek Muara Satu (Tipe Pra Rural)

Sumber data : Laporan Intel Dasar Polsek Muara Satu Tahun 2011

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dalam wilayah hukum Polsek Muara Satu, Polsek Muara Satu memiliki anggota berjumlah 18 orang sedangkan untuk Polsubsektor Muara Dua sebanyak 6 orang jadi total 24 orang. Sampai dengan selesainya penelitian lapangan sampai dengan bulan Maret 2011, para pejabat yang melaksanakan tugas di Polsek Muara Satu adalah sebagai berikut :

- a. Kapolsek Muara Satu dijabat oleh Iptu Ichsan,
- b. Ka Unit Provos dijabat oleh Brigadir Tarmizi,
- c. Ka Sium dijabat oleh Briпка Fakri Muhammad,
- d. Ka SPK “A” Polsek Muara Satu dijabat oleh Brigadir Eko Susanto,
- e. Ka SPK “B” Polsek Muara Satu dijabat oleh Aipda M. Nasir,
- f. Ka SPK “C” Polsek Muara Satu dijabat oleh Brigadir M. Yamin,
- g. Ka Unit Intelkam dijabat oleh Aiptu Susrizal Veri,

- h. Ka Unit Reskrim dijabat oleh Brigadir M. Fadli,
- i. Ka Unit Binmas dijabat oleh Aiptu H. Agus Salim.
 1. Babinkamtibmas Desa Blang Panyang dengan status sebagai desa binaan dijabat oleh Aipda M. Nasir Ali (sudah memiliki Skep Babinkamtibmas),
 2. Babinkamtibmas Desa Ujung Pacu dengan status sebagai desa binaan dan Desa Blang Naleung Mameh dengan status sebagai desa sentuhan dijabat oleh Brigadir Hasrul Fuady (belum memiliki Skep Babinkamtibmas),
 3. Babinkamtibmas Desa Batuphat Timur dengan status sebagai desa binaan dan Desa Batuphat Barat dengan status sebagai desa sentuhan dijabat oleh Briptu Khairil Azmi (sudah memiliki Skep Babinkamtibmas),
 4. Babinkamtibmas Desa Meuria Paloh dengan status sebagai desa binaan dan Desa Meunasah Dayah dengan status sebagai desa sentuhan dijabat oleh Briptu Firdaus Yupisa (sudah memiliki Skep Babinkamtibmas),
 5. Babinkamtibmas Desa Padang Sakti dengan status sebagai desa binaan dan Desa Blang Pulo dengan status sebagai desa sentuhan dijabat oleh Briptu Fathur A. Pramana (sudah memiliki Skep Babinkamtibmas),
 6. Babinkamtibmas Desa Paloh Punti dengan status sebagai desa binaan dan Desa Cot Trieng dengan status sebagai desa sentuhan dijabat oleh Briptu Fauzi (belum memiliki Skep Babinkamtibmas).

Berikut data Petugas Polmas, FKPM dan BKPM pada Polsek Muara Satu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Petugas Polmas dan BKPM

NO	DESA / KEL	JUMLAH			KET
		PETUGAS POLMAS	FKP M	ANGGOT A FKPM	
1	Blang Panyang	Aipda M. Nasir Ali	8 orang	15 orang	-
2	Blang Naleung Mameh	Brigadir Hasrul Fuady	10 orang	17 orang	-
3	Batuphat Timur	Briptu Khairul Azmi	8 orang	15 orang	-
4	Meuria Paloh	Briptu Firdaus. Y	10 orang	17 orang	-
5	Blang Pulo	Briptu Fatur A. Pramana	8 orang	15 orang	-
6	Paloh Punti	Briptu Fauzi	10 orang	17 orang	-

Sumber data : Laporan Kegiatan Polmas Polsek Muara Satu Tahun 2011

- j. Ka Unit Sabhara dijabat oleh Aiptu Zulhelmi Koto.
- k. Kapolsubsektor Muara Dua dijabat oleh Ipda Ramli Ishak.

Jabatan pada Polsek yang masih belum terisi oleh personel adalah jabatan Ka Urrenmin, Ka Urtaud dan Ka Urtahti. Sedangkan personel Polsek Muara Satu yang masih rangkap jabatan antara lain :

- a. Aiptu Zulhelmi Koto yang menjabat sebagai Kanit Sabhara namun merangkap jabatan sebagai anggota Sabhara.
- b. Aipda M. Nasir yang menjabat sebagai KA SPK "B" namun merangkap jabatan sebagai Babinkamtibmas / Petugas Polmas Desa Blang Panyang termasuk merangkap jabatan sebagai anggota Sabhara.
- c. Brigadir Asrul Fuady yang menjabat sebagai Babinkamtibmas / Petugas Polmas Desa Blang Naleung Mameh namun merangkap jabatan sebagai anggota unit Reserse Kriminal Polsek Muara Satu.
- d. Briptu Adi Saputra yang menjabat sebagai anggota Sabhara namun merangkap jabatan sebagai anggota unit Reserse Kriminal Polsek Muara Satu.
- e. Briptu Fatur A. Pramana yang menjabat sebagai Babinkamtibmas / Petugas Polmas Desa Blang Pulo namun merangkap jabatan sebagai anggota Sabhara.

Universitas Indonesia

- f. Briptu Fauzi yang menjabat sebagai Babinkamtibmas / Petugas Polmas Desa Paloh Punti namun merangkap jabatan sebagai anggota Sabhara.

Bila dijumlahkan personel Polsek Muara Satu dengan Polsubsektor Muara Dua maka dibandingkan jumlah penduduk di wilayah jajaran Polsek Muara Satu adalah 1 Polisi membina 246 Jiwa serta mengawasi wilayah seluas 113,70 Km². Berikut pernyataan Kapolsek Muara Satu Iptu Ichsan :

Polsek Muara Satu saat ini belum dapat bekerja secara maksimal, akibat minimnya jumlah personel yang tersedia, untuk DSSP Polsek Muara Satu berjumlah 50 orang sedangkan yang riil atau terpenuhi baru 24 orang, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat. Ada beberapa jabatan yang masih kosong atau belum diisi personel bila menyesuaikan dengan struktur organisasi yang baru dan ada juga personel yang masih rangkap jabatan.

Selain terbatasnya jumlah personel, Polsek Muara Satu juga dilibatkan dalam pengamanan obyek vital antara lain :

- a. Komplek perumahan (*community*) karyawan PT Arun NGL sebanyak 2 personel.
- b. Komplek Universitas Malikulsaleh Bukit Indah sebanyak 2 personel
- c. PT Jaratex sebanyak 2 personel.
- d. Pengamanan BRI sebanyak 1 personel.
- e. Pengamanan tower alat komunikasi Polri sebanyak 1 personel.

3.1.2.2 Tugas dan Wewenang Polsek Muara Satu

Tugas pokok Polsek Muara Satu pada dasarnya mengacu kepada pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat (Kelana, 2002:59).

Dalam rangka meningkatkan etos kerja dan perilaku petugas Polri dalam hal ini Polsek Muara Satu dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Polari tersebut, maka Polsek Muara Satu beserta jajarannya mengupayakan kegiatan pembinaan dan operasional meliputi :

- a Bidang pembinaan
 1. Penampilan individu / perorangan. Aspek yang ditingkatkan

meliputi:

- a) sistem, berusaha mencukupi piranti lunak,
- b) fisik. Meliputi latihan kesamptaa jasmani, senam kesegaran jasmani, dan pemeriksaan kesehatan,
- c) sikap tampang, pakaian dan perlengkapan dinas secara rutin dilakukan pemeriksaan oleh Kapolsek Muara Satu,
- d) pengadaan ceramah Binrohtal dari luar,
- e) untuk peningkatan kemampuan perorangan dilaksanakan pelatihan fungsi Lantas, Intel, Reserse, Binmas dan Samapta,
- f) melaksanakan latihan fungsi tehnik kepolisian terpadu pra operasi.

2. Penampilan kesatuan. Aspek yang ditingkatkan meliputi:

- a) ketertiban dan kebersihan,
- b) terlaksananya P.U.D,
- c) pembinaan kewibawaan markas,
- d) ketertiban ruangan kerja,
- e) terpeliharanya buku-buku penjagaan ketertibannya,
- f) tertib anggota jaga,
- g) tertib penyimpanan senpi,
- h) tertib dan bersih ruangan kerja,
- i) tertib dan bersih ruangan tahanan,
- j) terselenggaranya manajemen satuan,
- k) adanya rencana kegiatan tahunan, bulanan dan harian,
- l) terselenggaranya sistem pelaporan.

b. Bidang operasional

1. Sistem, pencukupan piranti lunak operasi antara lain rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi dan perkiraan khusus.
2. Pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.
3. Melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan.
4. Melaksanakan bimbingan masyarakat.

5. Penyelenggaraan operasi khusus dan operasi rutin dengan kendali Polres Lhokseumawe.

Disamping melaksanakan tugas pokok tersebut, Polsek Muara satu juga melaksanakan Peningkatan Pelayanan Masyarakat di era reformasi dalam upaya menjadikan Polri yang PEEM (Profesional, Efektif, efisien, dan Modern), antara lain :

- a. meningkatkan keamanan dan ketertiban umum didalam menunjang kegiatan Pemerintahan Daerah maupun didalam kehidupan masyarakat,
- b. meningkatkan pengungkapan masalah kamtibmas yang ada kaitannya dengan kegiatan kelompok separatis bersenjata, sindikat narkoba atau ganja serta berupaya mengungkap kasus penembakan, penculikan serta kasus-kasus yang berintensitas tinggi lainnya,
- c. meningkatkan Siskamswakarsa di lingkungan masyarakat.

3.1.2.3 Pelaksanaan Tugas

Dalam pelaksanaan tugas terbagi menjadi 2, yaitu

- a. Pelaksanaan tugas kedalam, meliputi :
 1. Pembinaan kekuatan
 - a) Pembinaan personel
 - 1) Pembinaan jasmani dan rohani
 - (a) pada hari Rabu, setelah apel pagi melaksanakan kegiatan pembinaan fungsi satuan,
 - (b) pada hari Kamis, setelah apel dilanjutkan dengan jam pimpinan dan sore harinya beladiri / karate sedangkan malam harinya dilaksanakan kegiatan Wirid Yasin atau ceramah agama.
 - b) Pembinaan prasarana dan material
 - 1) Melaksanakan perawatan dan pengecekan kantor.
 - 2) Melaksanakan korve setiap hari selama 15 menit untuk menjaga kebersihan kantor.

- 3) Mengadakan pemeliharaan dan kebersihan senjata api.
- 4) Mengadakan pemeliharaan dalam hal ini perbaikan komunikasi elektronik.
- 5) Mengadakan pengecekan atau perbaikan terhadap kendaraan bermotor sehingga siap pakai sewaktu-waktu.

c) Pembinaan kemampuan fungsi teknis.

2. Penggunaan kekuatan

Dengan menerapkan asas selektifitas prioritas dan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategi, proyeksi sumber daya, maka ditetapkan prioritas sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatkan upaya deteksi dini dan pencegahan dalam rangka menekan laju perkembangan atau kerawanan kriminalitas.
- b) Meningkatkan angka penyelesaian perkara.
- c) Meningkatkan upaya kemampuan penertiban masyarakat.
- d) Meningkatkan upaya penegakan hukum.
- e) Meningkatkan upaya Binluh terhadap masyarakat serta kesadaran hukum.
- f) Meningkatkan kemampuan terhadap penindakan gangguan keamanan.
- g) Meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
- h) Meningkatkan kemampuan pembinaan potensi masyarakat.

b. Pelaksanaan tugas keluar, meliputi :

1. Pelayanan masyarakat (yanmas) dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) yang mempunyai tugas :
 - a) Menerima laporan.
 - b) Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).
 - c) Membantu atau menolong korban.
 - d) Pelayanan SKCK.

2. Fungsi Samapta

Melaksanakan tugas :

- a) Pengaturan.
- b) Penjagaan.
- c) Pengawalan.
- d) Patroli.

3. Fungsi Intelkam

a) Menekan gangguan kamtibmas di jajaran Polsek Muara Satu dengan upaya meningkatkan kemampuan penginderaan secara cepat, tepat dan tajam.

b) Memonitor gangguan kriminalitas, meliputi :

- 1) Kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dan meresahkan masyarakat.
- 2) Kisaran suara yang negatif terhadap kebijaksanaan pemerintah.
- 3) Kerawanan-kerawanan daerah lainnya seperti orang asing maupun imigran gelap.

c) Melakukan pengamanan terhadap

- 1) Orang-orang VIP.
- 2) Rombongan pejabat pemerintah baik daerah maupun pusat yang berkunjung ke wilayah hukum Polsek Muara Satu.
- 3) Upacara-upacara.
- 4) Kegiatan pemerintahan.
- 5) Proyek-proyek vital.

d) Melakukan penggalangan terhadap

- 1) Tokoh-tokoh masyarakat.
- 2) Golongan intelektual atau para ilmuwan.
- 3) Sumber-sumber informasi.
- 4) Pemuda, pelajar dan mahasiswa.

4. Fungsi Reskrim

a) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap

- 1) Kasus-kasus yang meresahkan masyarakat dalam wilayah hukum Polsek Muara Satu.
 - 2) Pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan yang terlibat dalam kasus di wilayah Polsek Muara Satu.
 - 3) Meningkatkan kring serse sebagai sarana upaya penyelidikan dalam rangka pengungkapan kasus.
 - 4) Meningkatkan patroli serse yang dilaksanakan di daerah-daerah rawan kriminalitas di jajaran Polsek Muara Satu.
 - 5) Memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang pengaduan.
 - 6) Melaksanakan pengolahan data administrasi operasional maupun data informasi.
 - 7) Melaksanakan data koordinasi dan hubungan kerjasama dengan aparat penegak hukum yang terkait.
5. Fungsi Binmas
- 1) Bin Ramarda
Melaksanakan sambang desa dan tatap muka, penerangan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, pembinaan pramuka, latihan badan keamanan lalau-lintas, karang taruna dan BRC.
 - 2) Bin Tibmas
Memberikan rekomendasi, penyuluhan, bantuan masyarakat dan pengamanan atau penertiban pelaksanaan peraturan serta pembinaan pendidikan pengemudi kendaraan bermotor.
 - 3) Bin Kam Swakarsa
Mengadakan pembinaan Kamra, Satpam dan inventarisasi proyek vital atau pengamanan provit serta penyuluhan siskamling.
 - 4) Bin Kor Polsus

Melakukan pembinaan koordinasi Polsus yang merupakan kegiatan bimbingan teknis dan pengadaan rapat koordinasi.

3.1.2.4 Dukungan Sarana dan Prasarana

Adapun dukungan sarana dan prasarana yang ada di Polsek Muara mengacu kepada laporan kesatuan Polsek Muara Satu Tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Data Sarana dan Prasarana Polsek Muara Satu

NO	JENIS	JML	KONDISI			KET
			B	R	RB	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kendaraan Roda 4	2	2	-	-	
2	Kendaraan Roda 2	4	3	-	1	
3	Senpi ganggam	16	16	-	-	
4	Senpi AK 47	3	3	-	-	
5	Senpi AK 56	1	1	-	-	
6	Senpi SS1	3	3	-	-	
7	Senpi Sp2	5	5	-	-	
8	Borgol	2	2	-	-	
9	Tongkat karet	5	5	-	-	
10	Senter	2	2	-	-	
11	Mesin tik elektronik	1	1	-	-	

Tabel 3.2 Data Sarana dan Prasarana Polsek Muara Satu (Sambungan)

1	2	3	4	5	6	7
12	Mega Phone	2	2	-	-	
13	Komputer	3	3	-	-	

Sumber data : Laporan Kesatuan Polsek Muara Satu Tahun 2010

3.1.2.5 Gangguan Kamtibmas Polsek Muara Satu

Gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Muara Satu selama 2 tahun yaitu tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Data Gangguan Kamtibmas Polsek Muara Satu Tahun 2009 dibanding Tahun 2010

NO	JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN 2009		TAHUN 2010		KET
		LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7
1	KDRT	2	2	0	0	-2
2	CURAT	10	7	14	7	+4
3	CURI BIASA	2	2	0	0	-2
4	CURAS	2	2	4	2	+2
5	ANIAYA RINGAN	8	8	13	6	+5
6	ANIAYA BERAT	1	1	2	0	+1
7	CURANMOR	12	2	11	5	-1
8	NARKOTIKA	1	1	4	2	+3
9	PERKOSA/CABUL	2	2	4	2	+2
10	PERBUATAN TDK MENYENANGKAN	1	1	1	1	0
11	PENGGELAPAN	4	0	2	0	-2
12	PENIPUAN	0	0	4	0	+4
13	TEMU MAYAT	1	1	0	0	-1

Tabel 3.3 Data Gangguan Kamtibmas Polsek Muara Satu Tahun 2009 dibanding Tahun 2010 (Sambungan)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

14	JUDI / MAISIR	1	1	0	0	-1
15	PENGEROYOKAN	2	1	0	0	-2
16	UU NO 12/1951	1	1	0	0	-1
17	PEMERASAN	0	0	1	1	+1
18	PEMALSUAN	0	0	1	0	+1
19	PENGRUSAKAN	0	0	2	2	+2
20	LAIN-LAIN	2	1	0	0	-2
JUMLAH		53	33	63	28	

Sumber data : Laporan Intel Dasar Polsek Tahun 2011

Dari data gangguan kamtibmas Polsek Muara Satu Tahun 2009 dibandingkan Tahun 2010 terdapat kenaikan 10 kasus kejadian atau 18%.

Sedangkan untuk data gangguan kamtibmas yang terjadi di areal *plansite* dan *community* PT Arun NGL untuk tahun 2010 tidak ada yang dilaporkan.

3.2 Gambaran Umum Kecamatan Muara Satu.

Kecamatan Muara Satu dengan ibu kotanya Batuphat. PT Arun NGL berada diwilayah Desa Batuphat Barat yang merupakan daerah administrasi pemerintahan Kecamatan Muara Satu. Berikut gambaran umum Kecamatan Muara Satu mengacu kepada Katalog BPS Kecamatan Muara Satu dalam Angka 2010 sebagai berikut :

3.2.1 Geografi

3.2.1.1 Luas Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Muara Satu adalah 55,90 Km². Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Luas Wilayah Kecamatan Muara Satu Tahun 2009

N	GAMPONG / DESA	LUAS (Km ²)	KEPALA GAMPONG
---	----------------	-------------------------	----------------

0			
1	COT TRIENG	6,50	BADARUDDIN
2	PALOH PUNTI	6,00	HUSNAINI YUSUF
3	MEUNASAH DAYAH	7,50	M. ALI ISMAIL
4	BLANG PANYANG	3,50	M. KASEM KADIR
5	MEURIA PALOH	3,50	MUHAMMAD, S.Ag
6	BLANG PULO	5,00	SYEH AHMAD
7	BATUPHAT TIMUR	3,00	ABD. KARIM
8	PADANG SAKTI	2,70	ALI MURTALA
9	UJONG PACU	7,40	TARMIZI ISMAIL
1	BLANG NALEUNG MAMEH	1,00	MAKSUM IDRIS
0			
1	BATUPHAT BARAT	9,80	SYAMSUDDIN
1			
	JUMLAH	55,90	

Sumber data : Muara Satu dalam Angka tahun 2010

3.2.2 Demografi

Jumlah penduduk menurut Gampong dan Jenis Kelamin tahun 2009 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk menurut Gampong dan Jenis Kelamin

N O	GAMPONG	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	COT TRIENG	287	342	629
2	PALOH PUNTI	790	751	1.541

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk menurut Gampong dan Jenis Kelamin (Sambungan)

1	2	3	4	5
3	MEUNASAH DAYAH	476	436	912
4	BLANG PANYANG	909	918	1.827
5	MEURIA PALOH	1.214	1.233	2.447
6	BLANG PULO	2.294	2.357	4.651

7	BATUPHAT TIMUR	3.328	3.267	6.595
8	PADANG SAKTI	1.127	1.162	2.289
9	UJONG PACU	624	631	1.255
10	BLANG NALEUNG MAMEH	1.236	1.237	2.473
11	BATUPHAT BARAT	3.392	3.478	6.870
JUMLAH		15.677	15.812	31.889

Sumber data : Muara Satu dalam Angka tahun 2010.

Jumlah penduduk menurut lapangan usaha utama kepala keluarga tahun 2009 :

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk menurut Lapangan Usaha Utama Kepala Keluarga Tahun 2009

N O	GAMPONG	PETA NI	PEDAGAN G	INDUSTR I	PEGAW AI NEGERI	BURUH / PEG SWASTA
1	2	3	4	5	6	7
1	COT TRIENG	220	15	3	3	18
2	PALOH PUNTI	648	125	2	5	44
3	MNS. DAYAH	123	40	8	15	94
4	BLANG PANYANG	232	103	10	48	189

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk menurut Lapangan Usaha Utama Kepala Keluarga Tahun 2009 (Sambungan)

1	2	3	4	5	6	7
5	MEURIA	7156	149	9	49	230
6	BLANG PULO	10	85	13	20	519
7	BATUPHAT TIMUR	125	1.340	21	45	575
8	PADANG SAKTI	411	43	3	38	158
9	UJONG PACU	543	47	2	7	43
10	BLANG NALEUNG	57	47	6	19	92

MAMEH						
1	BATUPHAT	95	72	14	149	640
1	BARAT					
JUMLAH		3.179	215	91	398	2.602

Sumber data : Muara Satu dalam Angka tahun 2010

3.2.3 Bidang Pembangunan

Jumlah sekolah umum menurut tingkat pendidikan tahun 2009

Tabel 3.7 Jumlah Sekolah Umum menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009

N O	GAMPONG	SD	SMP	SMU	PT
1	2	3	4	5	6
1	COT TRIENG	0	0	0	0
2	PALOH PUNTI	1	0	0	0
3	MNS. DAYAH	0	0	0	0
4	BLANG PANYANG	1	0	0	0
5	MEURIA	0	0	0	0
6	BLANG PULO	1	1	0	1

Tabel 3.7 Jumlah Sekolah Umum menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009 (Sambungan)

1	2	3	4	5	6
7	BATUPHAT TIMUR	0	1	1	0
8	PADANG SAKTI	1	0	0	0
9	UJONG PACU	1	0	0	0
10	BLANG NALEUNG MAMEH	2	0	0	0
11	BATUPHAT BARAT	2	2	1	0
JUMLAH		9	4	2	1

Sumber data : Muara Satu dalam Angka tahun 2010

Jumlah sarana peribadatan tahun 2009 sebagai berikut :

Universitas Indonesia

Tabel 3.8 Jumlah Sarana Peribadatan Tahun 2009

N O	GAMPONG	MESJI D	MEUNASA H	GEREJA	PURA	VIHARA
1	2	3	4	5	6	7
1	COT TRIENG	1	1	0	0	0
2	PALOH PUNTI	1	1	0	0	0
3	MNS. DAYAH	0	1	0	0	0
4	BLANG PANYANG	0	1	0	0	0
5	MEURIA	2	1	0	0	0
6	BLANG PULO	0	1	0	0	0
7	BATUPHAT TIMUR	1	1	0	0	0
8	PADANG SAKTI	0	1	0	0	0
9	UJONG PACU	1	1	0	0	0
1 0	BLANG NALEUNG	0	1	0	0	0

Tabel 3.8 Jumlah Sarana Peribadatan Tahun 2009 (Sambungan)

1	2	3	4	5	6	7
1 1	BATUPHAT BARAT	1	1	0	0	0
	JUMLAH	7	11	0	0	0

Sumber data : Muara Satu dalam Angka tahun 2010.

Jumlah sarana kesehatan menurut Gampong tahun 2009

Tabel 3.9 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Gampong Tahun 2009

N O	GAMPONG	RUMA H	KLIN IK	RMH BERSAL	POLIN DES	PUSKESM AS
--------	---------	-----------	------------	---------------	--------------	---------------

Universitas Indonesia

		SAKIT		IN		
1	COT TRIENG	0	0	0	1	1
2	PALOH PUNTI	0	0	0	1	0
3	MNS. DAYAH	0	0	0	1	0
4	BLANG PANYANG	0	0	0	0	0
5	MEURIA	0	0	0	1	0
6	BLANG PULO	0	0	0	1	1
7	BATUPHAT TIMUR	0	3	0	1	0
8	PADANG SAKTI	0	0	0	1	0
9	UJONG PACU	0	0	0	1	0
1 0	BLANG N. MAMEH	0	0	0	1	0
1 1	BATUPHAT BARAT	1	7	0	1	0
JUMLAH		1	10	1	10	2

Sumber data : Muara Satu dalam Angka tahun 2010

3.3 Gambaran Umum PT Arun NGL

Gambaran Umum PT Arun NGL ini mengacu kepada buku *profile* PT Arun NGL

3.3.1 Sejarah PT Arun NGL

PT Arun NGL adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bertindak sebagai operator Nirlaba (*at actual cost*) kilang pengolah gas bumi di Arun. Sebagai pemegang saham adalah PT Pertamina (55%) mewakili pemerintah Indonesia, Mobil LNG Inc (30%) dan JILCO (15%). Lokasi PT Arun berada di Blanglancang Lhokseumawe.

Awalnya pada tahun 1971, Exxon Mobil Oil berhasil menemukan ladang gas alam yang membentang lebih dari seratus dua puluh kilometer persegi, berbentuk oval terhampar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Syamtalira Bayu, Tanah Luas dan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara selanjutnya Exxon Mobil Oil. Gas alam Arun terdapat pada kedalaman sekitar tiga kilometer dari permukaan

bumi, yang terperangkap dalam batuan kapur sepanjang 18,5 kilometer dengan lebar 6,5 kilometer serta ketebalan 0,3 kilometer. Cadangan awal diperkirakan sebesar 17,1 triliun standar kubik kaki dengan tekanan 7.100 psi (490 km/cm²) dan suhu 352 F (117°C). Antara lokasi operasi ladang gas Arun dengan kilang LNG berjarak 30 Kilometer dengan menggunakan pipa penyalur yang berdiameter 42 inch untuk gas, 16 inch untuk kondensat dan 20 inch untuk LPG Propan.

PT Arun NGL menerima pasokan gas alam cair yang berasal dari ladang gas Arun yang dioperasikan oleh Exxon Mobil Oil (EMOI) yang berlokasi di Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Exxon Mobil Oil yang dulunya bernama Mobil Oil Indonesia Inc merupakan mitra usaha PT Pertamina atas dasar kontraktor bagi hasil dan bertindak selaku pelaksana operasi yang bertanggung jawab atas pengembangan ladang gas Arun yang menyediakan bahan baku untuk kilang LNG Arun (konsensi). Alasan PT Pertamina menggandeng Exxon Mobil Oil adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari calon konsumen karena pada awal dikenalnya teknologi pengolahan gas cair, Indonesia belum memiliki teknologi tersebut terlebih PT Pertamina belum begitu dikenal di dunia perminyakan dunia.

Arun adalah sebuah desa di Kecamatan Syamtalira tempat ditemukannya cadangan gas alam pada tahun 1971 oleh *Mobil Oil* Indonesia Incorporation yang merupakan salah satu sumber gas alam yang terbesar di dunia pada saat itu. Dengan mengabadikan nama desa tersebut maka dibangunlah LNG Arun yang terletak di Blang Lancang Lhokseumawe, Aceh.

Pembangunan 6 train pencairan gas alam di kilang LNG Arun melalui beberapa tahapan. Untuk train 1, 2 dan 3 (Arun Project I) dibangun pada awal tahun 1974 dan selesai pada akhir tahun 1974 oleh BECHTEL Inc. Bulan Februari tahun 1982 kilang Arun dikembangkan lagi dengan menambah 2 train (4 dan 5), perluasan proyek ini (Arun Project II) diserahkan kepada *Chiyoda Chemical Engineering* dan *Construction Co, Ltd* bekerjasama dengan *Mitsubishi Corporation* dan PT Purna Bina Indonesia. Pengembangan proyek dilanjutkan dengan pembangunan train 6 (Arun Project III) yang dikerjakan oleh *JGC Corporation*. Pembangunan sarana LPG dimulai pada bulan Februari 1987 dan selesai pada tahun 1989. Proyek ini termasuk pembangunan sarana ekstraksi LPG

di lapangan gas Arun dan di kilang LNG Arun. Disamping itu dibangun juga tangki penyimpanan LPG dan sarana pemuatan tersendiri di kilang LNG Arun. Proyek ini dikerjakan oleh *JGC Corporation* dan selesai pada bulan Oktober 1988. Dengan demikian PT Arun NGL memiliki 6 *process train* dalam mengolah gas alam cair atau LNG, 1 unit pemisahan Kondensat, dan 1 unit untuk kilang LPG.

Fasilitas pengolahan kilang LNG diawali dari sarana pemurnian gas, pada tahap ini gas dan cairan dicampur kembali sebelum diproses menjadi LNG dan kondensat. Tahap berikutnya adalah melalui sarana pemisahan kondensat, pada tahap ini gas dipisahkan kembali dari kondensat dengan jalan mengalirkan campuran gas dan kondensat tersebut pada dua bejana pemisah dengan tekanan yang semakin rendah. Kondensat kemudian diolah dalam menara stabilisasi, kemudian didinginkan dan dikirim ke tangki penyimpanan. Hasilnya adalah kondensat yang siap dipasarkan. Gas dari menara stabilisasi dan dari bejana pemisah bertekanan rendah dimampatkan kembali untuk dicampur dengan aliran utama gas umpan, kemudian diolah dan dicairkan menjadi LNG. Tahap berikutnya adalah melalui sarana pemurnian gas umpan, pada tahap ini sebelum gas dicairkan terlebih dahulu harus dimurnikan dari zat-zat yang tidak diinginkan (*impurities*). Air raksa yang terkandung didalamnya dipisahkan dari gas. Karbondioksida dan hidrogen sulfida dipisahkan dalam unit pengolahan yang mengandung larutan karbonat dan Amine. Uap air juga dibuang kemudian hidrokarbon berat dipisahkan dengan penyulingan di *scrub tower*. Tahap berikutnya adalah sarana pencairan gas, pada tahap ini pencairan gas terjadi dalam sebuah alat pendingin utama dengan menggunakan bahan pendingin multi komponen (MCR) yang terdiri dari nitrogen, metana, etana dan propana. MCR digunakan untuk mencairkan gas alam. MCR itu sendiri didinginkan oleh sistem pendingin propana. Sistem pendingin propana didinginkan oleh air laut.

Fasilitas pengolahan LPG Arun diawali dari sarana pemisahan LPG, pada tahap ini gas dari sarana pemurnian LNG dialirkan ke- 3 buah sarana pemisahan LPG untuk mengeluarkan komponen LPG nya. Gas lalu diekspansi dalam mesin ekspansi turbo. Proses ekspansi akan menurunkan suhu gas dan mengembunkan sejumlah cairan. Cairan yang mengembun kemudian dialirkan ke alat fraksinasi

etana untuk mengeluarkan etana yang masih tersisa. Propana dan cairan yang lebih berat kemudian dialirkan ke unit fraksinasi. Gas sisa didinginkan dan dikembalikan ke fasilitas kilang LNG alat pendingin utama LNG. Tahap berikutnya adalah melalui sarana fraksinasi dan pemurnian, pada tahap ini fraksinasi dilakukan dalam 2 unit, satu menerima umpan dari unit pemisah LPG di kilang Arun dan satu lagi menerima umpan dari unit pemisah NGL di ladang gas Arun. Pada kedua unit fraksinasi tersebut, propana dan butana dipisahkan secara bergiliran pada 2 menara fraksinasi. Pada unit fraksinasi NGL, propana dan butana yang dihasilkan kemudian dimurnikan untuk menghilangkan kandungan senyawa belerang. Tahap berikutnya melalui sarana penyimpanan dan pengapalan LPG, pada tahap ini propana dan butana yang dihasilkan kemudian didinginkan dan disimpan. Dua buah tangki penyimpanan propana mempunyai kapasitas total sebesar 167.000 meter kubik, dan dua tangki butana dengan kapasitas total 135.000 meter kubik. Pemuatan propana dan butana ini dapat dilakukan secara tersendiri atau bersamaan melalui 4 tangan pemuat. Dermaga LPG yang terletak di sebelah timur dari dermaga LNG, dapat menampung kapal-kapal LPG yang berbobot mati sampai 65.000 ton.

Produksi kondensat dimulai pada bulan Mei tahun 1977. Gas umpan dialirkan ke kilang LNG untuk pertama kalinya pada bulan Maret tahun 1978 dan mulai menghasilkan LNG pada bulan Agustus tahun 1978 dengan menggunakan Train 1. Train 2 pada bulan September tahun 1978 dan Train 3 pada bulan Februari tahun 1979. Awal tahun 1981, unit pemurnian gas dari Train 1, 2 dan 3 kilang LNG Arun mengalami modifikasi untuk peningkatan kapasitas produksi menjadi 115% dari rancangan kapasitas semula 1,7 juta ton LNG per train per tahun. Train 4 mulai berproduksi pada bulan Oktober 1983 dan train 5 pada bulan Januari 1984 untuk peningkatan kapasitas produksi sebesar 3,4 juta ton per tahun. Selanjutnya pada bulan Oktober 1986, Train 6 mulai difungsikan.

Pengapalan pertama LPG dilakukan pada bulan Agustus 1988 dari kilang Arun yang memuat 1,4 juta ton gas LPG.

Pada tahun 1972 ditemukan sumber gas alam lepas pantai diladang *North Sumatera Offshore* (NSO) yang terletak di Selat Malaka pada jarak sekitar 107,6 Km dari kilang PT Arun NGL di Blanglancang. Selanjutnya pada tahun 1998

dilakukan pembangunan proyek NSO “A” yang diliputi oleh unit pengolahan gas untuk fasilitas lepas pantai (*offshore*) dan di PT Arun. Fasilitas ini dibangun untuk mengolah 450 MMSCFD gas alam dari *plant from offshore* sebagai bahan baku gas alam dari ladang arun di Lhoksukon. Proses LNG dalam proyek NSO ini sedikit berbeda dari pasokan gas yang dialirkan dari Exxon Mobil Oil di Lhoksukon. Gas alam di ladang NSO ini memiliki kandungan H₂S dan CO₂ yang tinggi sehingga diperlukan proses pemisahan terlebih dahulu sebelum masuk ke Train LNG. Upaya ini dilakukan untuk menurunkan kadar H₂S dari 1,59 % menjadi 80 ppm dan CO₂ dari 33,21% menjadi 25,54% mol, sehingga sesuai dengan spesifikasi rancangan Train LNG. Ladang gas NSO ini beroperasi sebelum tahun 2000. Sumber gas baru ini akan mencukupi catu gas untuk memenuhi kontrak penjualan LNG sampai dengan tahun 2015.

Luas Area PT Arun NGL total 1.897 Ha yang terbagi atas area pabrik (*plansite*) 594 Ha dan perumahan (*Community*) 1.303 Ha. Antara lokasi pabrik dan perumahan berjauhan dan terpisah oleh jalan negara. Untuk area *plansite* dilengkapi dengan 2 pelabuhan khusus atau 4 dermaga.

Visi perusahaan adalah berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang handal dan memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan manfaat secara maksimal kepada pemangku kepentingan perusahaan (*stakeholders*) dengan cara :

1. Memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada *producers*.
2. Memenuhi permintaan dan harapan *producers*.
3. Mengajukan anggaran yang wajar untuk mencapai target yang ditetapkan *producers*.
4. Mengatur pertemuan umum pemegang saham.
5. Membuat laporan tahunan tentang pencapaian dan pertanggung jawabannya.
6. Mendorong pemerintah daerah untuk mengelola aset perusahaan dimasa mendatang.
7. Mematuhi peraturan pemerintah.
8. Membina hubungan baik dengan pemerintah.
9. Mengadakan program pendidikan dan pelatihan.
10. Menjaga kelangsungan CMC dari proses penglihatannya.

11. Mengembangkan argo-industri sesuai kondisi lingkungan.
12. Memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan masyarakat dan dialihkan sesuai sasaran.
13. Menciptakan iklim dan budaya mendorong motivasi.
14. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan.
15. Meningkatkan standar manajemen untuk kerja.
16. Memberikan imbalan, kesejahteraan dan fasilitas yang kompetitif dan adil.
17. Meningkatkan kompetensi pekerja agar lebih kompetitif.
18. Menjaga kebersihan lingkungan sesuai standar.
19. Mempertahankan sistem perlakuan yang adil.
20. Meningkatkan sistem administrasi dan komunikasi.
21. Mendidik local vendor agar profesional dan mandiri.
22. Mengoperasikan kilang dengan aman, handal dan efisien.
23. Mengirim produk sesuai spesifikasi, kuantitas, waktu dan kesepakatan.

Keberhasilan PT Arun telah terkenal luas dan saat ini kilang LNG Arun merupakan salah satu sarana pengolahan LNG terbesar di dunia.

Pada tahun 1990, PT Arun NGL dikenal sebagai perusahaan penghasil LNG terbesar di Indonesia dan didunia, dan pada tahun 1994 PT Arun NGL mencapai puncak peningkatan aktivitas produksi yang mencapai 26,2 juta ton LNG atau 224 kargo LNG yang dipasarkan kepada konsumen yang terikat kontrak selama 20 tahun yaitu Negara Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Selain LNG PT Arun juga mengelola Kondensat yang digunakan sebagai bahan baku kilang minyak atau industri petrokimia dan LPG yang pemasarannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

Karena LNG memiliki peranan yang besar bagi pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional dan memegang peran terhormat diantara pendapatan negara lainnya, maka PT Arun NGL dihadapkan pada berbagai tantangan. Diantara tantangan-tantangan tersebut adalah pengembangan sumber daya manusia, penguasaan teknologi mutakhir, pertumbuhan dalam persaingan pasar, tanggap dalam memenuhi tuntutan operasi dengan tingkat keamanan dan keselamatan kerja yang tinggi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan

produksi, serta peningkatan kehandalan operasi kilang.

Pengiriman LNG yang handal kepada pembeli adalah faktor penting dari keberhasilan PT Arun NGL dalam perdagangan LNG. Kunci keberhasilan ini adalah dengan cara mempertahankan produksi tinggi disertai kondisi operasi yang handal dan aman.

PT Arun NGL telah menerapkan konsep pencegahan kerugian sejak dalam tahap rancang bangun sampai pabrik beroperasi dan pengapalan. Program tersebut dimaksudkan untuk mendidik karyawan, juga semua pihak yang terlibat dalam usaha peningkatan kesadaran keselamatan kerja dan membuat keselamatan kerja sebagai falsafah hidup mereka. Konsep ini terbukti telah berhasil mempertahankan tingkat keselamatan kerja sangat baik. Pada tahun 1994, PT Arun NGL telah menerima Pedang Kehormatan yang ke-10 dari *British Safety Council* dan penghargaan keselamatan kerja lainnya dari Badan-Badan Keselamatan Kerja Internasional, yang tidak hanya dinilai dari jumlah kecelakaan tapi juga atas dasar swaperiksa yang dilaksanakan sendiri oleh pimpinan perusahaan.

Demikian halnya dibidang lingkungan, PT Arun NGL dinilai sebagai salah satu industri yang sangat memperhatikan lingkungannya. Ini dibuktikan dengan perolehan penghargaan lingkungan “Sahwali Award” dari Pusat Informasi dan Pengelolaan Lingkungan Indonesia (PIPLI) pada bulan November 1991. Penghargaan lainnya dibidang lingkungan adalah penghargaan “Proper Green” di akhir tahun 2010 dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait prestasi lingkungan hijau, bahkan di tahun 2011 telah dicanangkan akan mendapatkan penghargaan “*Proper Green*” untuk kategori emas.

Pada tahun 2000 produksi LNG pada PT Arun NGL mulai mengalami penurunan seiring menurunnya pasokan gas EMOI. Hingga tahun 2007 produksi kondensat tinggal 9.000 barel per hari atau 7% dari desain awal sedangkan LNG trains saat ini tinggal 2 train yang berfungsi dengan produksi 18.000 M3/hari atau 24% dari kapasitas terpasang sedangkan kilang LPG dihentikan sejak tahun 2000. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap organisasi perusahaan akibat jumlah karyawan yang harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Hal ini sesuai

dengan wawancara penulis kepada *Supervisor HRD* bapak Ardiansyah yang mengatakan :

Perusahaan saat ini sudah mengalami penurunan aktivitas produksi akibat menurunnya pasokan gas dari Exxon, yang semula 6 train, kini hanya berfungsi 2 train saja. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pengurangan jumlah karyawan. Untuk PHK Massal sudah dilakukan empat kali yaitu pada tanggal 31 Maret 2002 sejumlah 230 orang, tanggal 31 Desember 2004 sejumlah 261 orang, tanggal 31 Desember 2007 sejumlah 20 orang dan terakhir 2009 sejumlah 26 orang dan pada tahun 2014, struktur organisasi saat ini juga tidak sebanyak dahulu dimana jenjang jabatan masih banyak.

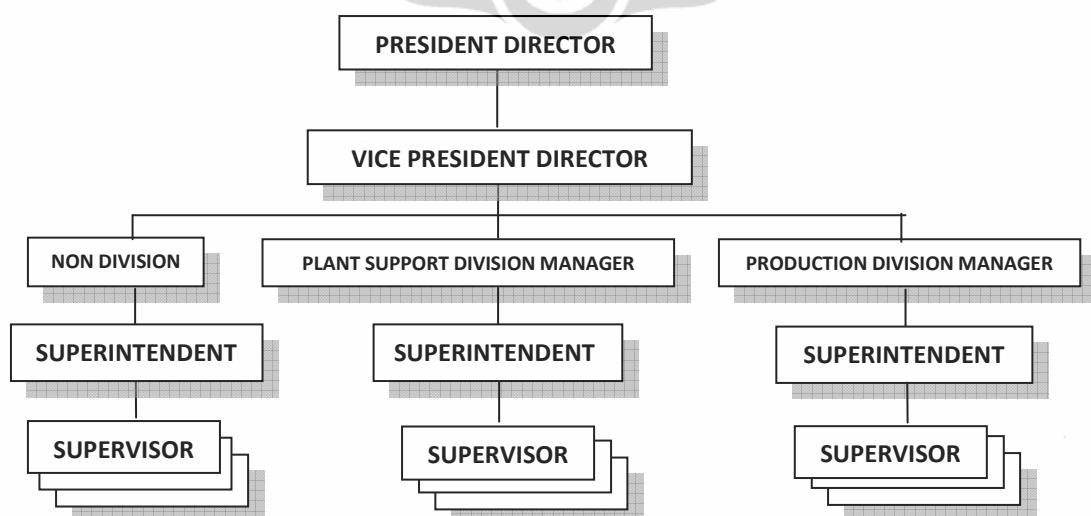
Mengacu dari data Bag HRD PT Arun NGL, sejak beroperasi tahun 1977 hingga tahun 2011 telah dihasilkan sebanyak 750 juta barel kondensat, 500 juta meter kubik LNG (4.086 kargo) dan 14 juta metrik ton LPG telah dikapalkan.

3.3.2 Lokasi

PT Arun NGL terletak di Blanglancang Kotamadya Lhokseumawe, Aceh dengan alat komunikasi yang dapat dihubungi di nomor telepon 0645-652910 dan Faksimil : 0645-43922, 41312 sedangkan kantor perwakilannya di Jakarta beralamat Wisma Nusantara lantai 11 Jalan M.H Thamrin No. 59 Jakarta dengan nomor telepon 021-3143107 dan Faksimil : 021-330351.

3.3.3 Organisasi PT Arun NGL

Berikut struktur organisasi umum PT Arun NGL sebagai berikut :



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Umum PT Arun NGL

Sumber data : Bag HRD PT Arun NGL

Struktur organisasi pada PT Arun NGL adalah *President Director* yang saat ini dijabat oleh Ir. Fauzi Husein dengan tugasnya bertanggung jawab terhadap produser dalam hal ini pemegang saham atas keseluruhan aktivitas kilang Arun dan berkedudukan di Jakarta. Adapun pelaksana tugas sehari-hari Presdir PT Arun dilaksanakan oleh wakil direktur atau yang diistilahkan dengan sebutan *Vice President Director (VPD)* yang berkedudukan di Lhokseumawe Aceh. VPD membawahi divisi dan tiap divisi dikepalai oleh manajer, rinciannya adalah *non division, plant support division & production division* dan masing-masing divisi membawahi *superintendent* dan masing-masing *superintendent* membawahi beberapa *supervisor*.

Berikut adalah *Job Description VPD* yang dijabat oleh Bapak Ir Fuad Buchari :

Tanggung jawab utama VPD adalah untuk mengelola dan mengarahkan tujuan organisasi, strategi dan aktivitas-aktivitas pelayanan serta divisi atau pengembangan yang mencakup sumber daya manusia, layanan fasilitas, urusan hukum, kesehatan, serta keamanan termasuk mengarahkan layanan unggulan untuk keselamatan kerja didukung oleh staf dalam organisasi dalam mencapai target produksi yang aman dengan biaya yang ekonomis sesuai dengan ketentuan *PSM, P&P Guides* serta peraturan pemerintah dan standar ketentuan lainnya. Wewenang VPD adalah :

1. Merumuskan / menetapkan divisi untuk tujuan jangka panjang dan jangka pendek serta strategi keselamatan kerja organisasi sesuai dengan visi perusahaan, untuk memastikan pencapaian prestasi kerja dalam memberikan standar pelayanan.
2. Merencanakan dan mengorganisir aktivitas - aktivitas divisi berdasarkan pada strategi yang telah ditetapkan, termasuk dengan kebijakan mengenai anggaran.
3. Memonitor dan memelihara iklim dalam bekerja serta kondisi kualitas pelayanan serta dinamis untuk memastikan iklim positif dalam bekerja didalam perusahaan sesuai dengan visi perusahaan.

Universitas Indonesia

4. Mengorganisir dan mengkoordinir aktivitas-aktivitas bagian-bagian serta memberikan fasilitas manajemen / menjembatani dalam mengaudit sistem baik internal maupun eksternal perusahaan.
5. Mengembangkan desain organisasi, perencanaan rangkaian perubahan dan strategi efisiensi sebagai bagian dari manajemen termasuk memastikan dan mendukung prestasi kinerja perusahaan.
6. Mendorong dan memberikan fasilitas mengubah manajemen serta tim kerjasama untuk mendukung kepentingan perusahaan dan menciptakan iklim yang positif dalam bekerja sejalan dengan visi perusahaan.
7. Memberikan motivasi, mengevaluasi kemampuan dan kinerja pegawai agar selaras dengan tujuan perusahaan dan persyaratan posisi yang sudah ditentukan.

Job Description para manajer PT Arun NGL sebagai berikut :

- a. *Non Division Manager* yang dijabat oleh Bapak Ir. Fuad Buchari yang merangkap jabatan sebagai VPD PT Arun NGL.
Tanggung jawab utamanya adalah bertanggung jawab terhadap pengelolaan kilang Arun dalam hal ini produksi dalam hal pencapaian target.

Wewenang *Non Division Manager* adalah sebagai berikut:

1. Membawahi audit manajemen dalam rangka menjamin dinamisasi organisasi agar sesuai dengan tujuan perusahaan.
2. Restrukturisasi organisasi perusahaan termasuk kebijakan dibidang SDM antara lain mengatur dan mengawasi proses rekrutmen karyawan, pembinaan karir hingga pengurangan jumlah karyawan, mengatur dan mengawasi proses pelatihan.
3. *Public Relation* dalam hal ini program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan hubungan kemasyarakatan dan pemerintah.
4. Mengolah keuangan perusahaan bidang SDM, *Public Relation* serta program *CSR*.
5. Pengolahan data.

Universitas Indonesia

b. *Plant Support Division Manager* yang dijabat oleh Bapak Delyuzar. Tanggung jawab utamanya adalah manajemen dan pemeliharaan (*maintenance*) kilang Arun, keselamatan kerja karyawan, perumahan (*Community*) karyawan termasuk gedung, perkantoran dan pabrik (*plansite*) termasuk dibidang sekuriti perusahaan.

Wewenang *Plant Support Division Manager* adalah sebagai berikut:

1. Mengolah keuangan perusahaan bidang pemeliharaan untuk mendukung aktivitas perusahaan dan karyawan.
2. Menyelenggarakan kebijakan mengenai bidang pemeliharaan untuk fasilitas kantor, gedung, perumahan (*community*) dan pabrik (*plansite*).
3. Kebijakan dibidang keselamatan kerja.
4. Kebijakan dibidang teknologi komunikasi dan pembinaan jaringan.
5. Mengatur dan mengawasi bagian keamanan atau satpam.

c. *Production Division Manager* yang dijabat oleh Bapak Zulkifli. A. Bakar Tanggung jawab utamanya adalah merencanakan, mengatur dan mengawasi proses produksi dan fungsi-fungsi pendukungnya agar memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dengan tepat waktu dan dengan biaya yang seefisien mungkin.

Uraian tugas *Production Division Manager* adalah :

1. Mengembangkan dan menjalankan program kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan proses produksi agar berkualitas, mengusahakan keuntungan yang maksimal termasuk anggaran belanja atau kebutuhan dibidang proses produksi.
2. Pengawasan terhadap aktivitas pelabuhan khusus dan pengapalan produksi.
3. Mengolah keuangan perusahaan dibidang proses produksi.

3.3.4 Bisnis

Bisnis utama PT Arun NGL adalah berfungsi sebagai operator yang diberikan kewenangan untuk mengolah LNG, Kondensat dan LPG. Adapun penjualan hasil produksi PT Arun NGL hanya diberikan kepada konsumen yang terikat kontrak selama 20 tahun dan sejauh ini pemasaran yang dilakukan oleh PT

Universitas Indonesia

Arun NGL adalah Negara Jepang, Korea Selatan dan Taiwan.

Bahan baku utama adalah gas alam yang dipasok dari ladang gas yang dikelola oleh Exxon Mobil Oil (EMOI) yang terletak di Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

Kilang LNG Arun dimiliki dan dibangun oleh PT Pertamina di Blanglancang Lhokseumawe yang terletak di pantai utara Sumatera. Lokasi tersebut dipilih mengingat kemudahan sarana transportasi laut dan dekat dengan ladang gas Arun sehingga biaya dapat ditekan sekecil mungkin. Pelaksanaan promosi ataupun pameran dalam memperluas produk usaha dan *marketing* semua dilakukan oleh PT Pertamina divisi gas. Sedangkan harga untuk satuan produksi perusahaan juga ditentukan oleh PT Pertamina dan disesuaikan dengan harga fluktuatif minyak bumi.

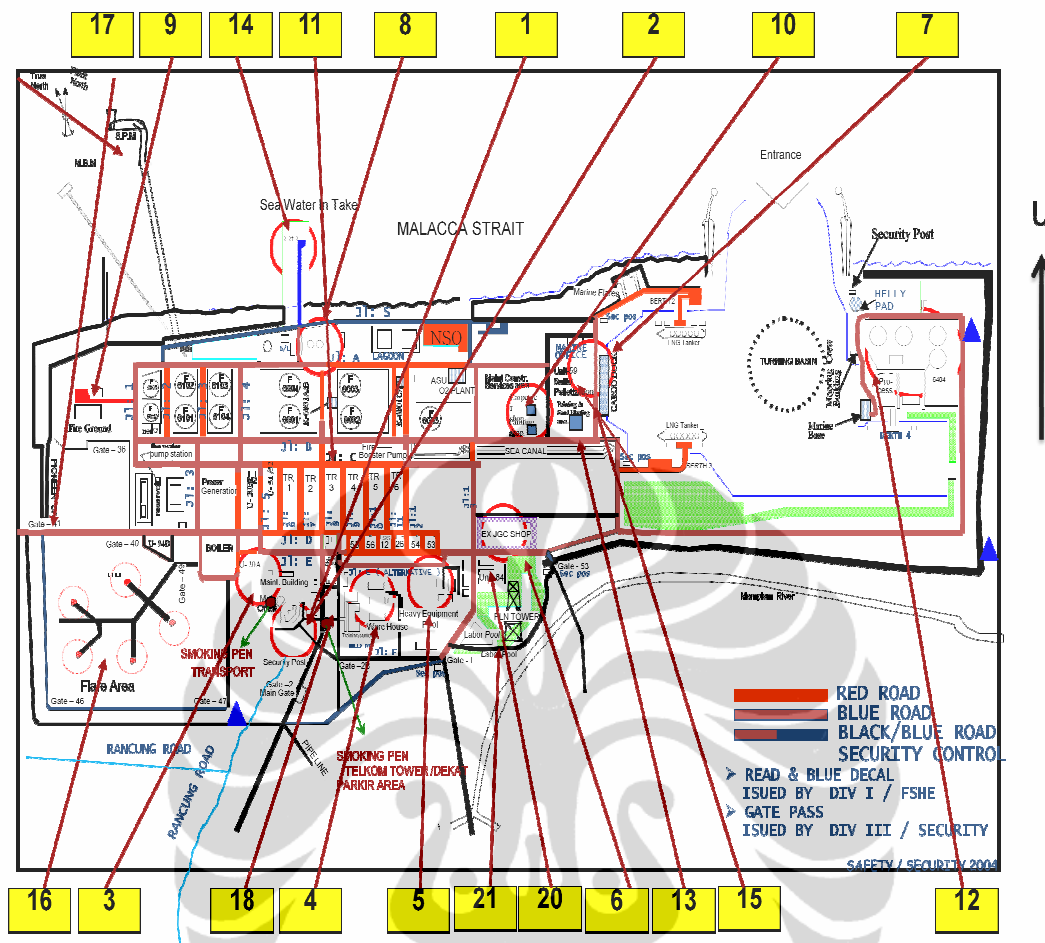
Data tahun 2011 tercatat untuk menunjang aktifitas produksi PT Arun NGL didukung oleh karyawan tetap PT Arun NGL yang berjumlah 423 orang dan perusahaan kontraktor sebanyak 31 perusahaan dengan jumlah total tenaga kontraktor dari berbagai keahlian sebanyak 912 orang.

Tahun 2011 ini, PT Arun NGL hanya dapat memproduksi LNG sebanyak 30 kargo dan masa akhir kontrak dengan konsumen berakhir pada tahun 2014. Selanjutnya untuk kilang Arun akan di alih fungsi menjadi terminal gas (*LNG Receiving Terminal*). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan VPD Bapak Ir Fuad Buchari:

Untuk opsi kilang Arun berkaitan dengan akan berakhirnya kontrak dengan konsumen dan terhentinya pasokan gas adalah dialihfungsikan menjadi terminal gas sebagaimana yang telah kita usulkan kepada pihak Pertamina.

3.3.5 Denah *Plansite Area* PT Arun NGL dan Aset-Asetnya.

Denah perusahaan PT Arun NGL dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.4 Peta Lokasi Kilang Arun (*Plansite*)

Sumber data : Peta Sekuriti PT Arun NGL Tahun 2010 (catatan : telah diolah kembali)

Beberapa fasilitas utama untuk area *plansite* PT Arun NGL yang menjadi aset untuk diamankan adalah :

1. *Main office* adalah gedung utama tempat pusat administrasi dihuni oleh VPD, *manager*, *superintendent*, dan staf bagian administrasi.
2. Gedung *Technical*, adalah tempat berkantor seluruh *engineer*.
3. Gedung *Mechanic Shop* adalah tempat seluruh perbaikan barang-barang pabrik (bengkel).
4. *Ware house* adalah gudang tempat penyimpanan barang-barang pabrik. Gudang ini sering menjadi sasaran pencurian oleh pelaku kejahatan.
5. Gedung *IT/ Telkom* tempat pusat informasi dan komunikasi.

6. *Welding shop* adalah gedung pabrikasi alat-alat pabrik / pembuatan barang-barang pabrik.
7. PKK (Pelabuhan Kebandaran dan Komunikasi) adalah ruangan pengendali yang mengendalikan keluar masuk kapal dan pengisian LNG, Kondensat dan LPG.
8. *Storage loading* adalah pabrik tempat penyimpanan dan pengisian gas.
9. Gedung *Fire & Safety* adalah tempat *basecamp* karyawan pemadam kebakaran.
10. *Control Room* adalah tempat pengontrolan seluruh aktivitas pemasukan dan pengeluaran gas LNG, Kondensat dan LPG.
11. *Train 1, 2, 3, 4, 5, 6* adalah pabrik tempat memasak gas menjadi LNG dan Kondensat.
12. *Train LPG* adalah pabrik tempat memasak gas menjadi LPG.
13. Pabrik *SRU (Sulfur Recovery Unit)* adalah tempat pemisahan Sulfur.
14. Pabrik *SWI (See Water Intace)* tempat penyedot air untuk mendinginkan pabrik.
15. Lokasi tempat pembuangan limbah sulfur.
16. *Flare Area* adalah tempat lokasi pembuangan limbah besi-besi bekas dan plastik termasuk tempat pembuangan gas.
17. *Pioneer camp* adalah lokasi yang dialihfungsikan yang semula lokasi perumahan tenaga ahli dari orang asing dialihkan menjadi lokasi Pabrik AINI Aqua dan Pabrik Garmen.
18. *Training Center* adalah gedung pelatihan bagi karyawan PTA, *out sourcing*, OJT, magang, dll.
19. *Painting Shop* adalah gudang penyimpanan cat pabrik.
20. *Heavy equipment shop* adalah gudang peralatan penyimpanan alat-alat berat.
21. *Labour Shop* adalah *base camp* pekerja kasar.

3.4 Gangguan Keamanan Sebelum dan Sesudah Mou Helsinki

Penandatanganan MoU Helsinki atau nota kesepakatan damai antara

pemerintahan RI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dilakukan tanggal 15 Agustus 2005. Mengacu dari data Biro Operasi Polda Aceh, data gangguan keamanan Provinsi Aceh periode 1 Januari 2003 s/d 16 Desember 2004 sebagai berikut :

Tabel 3.10 Gangguan Keamanan Periode 1 Januari 2003 s/d 16 Desember 2004

N O	JENIS KASUS	OPS	OPS	OPS	OPS	OPS	JUMLAH TOTAL 1 JAN 03 S/D 16 DES 2004
		CINTA DAME (1 JAN 03 S/D 18 MEI 2003)	TEG AK REN- I (19 MEI 03 S/D 18 NOP 2003)	TEG AK REN -II (19 NOP 03 S/D 18 MEI 2004)	SADA R MEUN ASAH- I (19 MEI 04 S/D 18 NOP 2004	SADAR MEUN ASAH- II (19 NOP 04 S/D 16 DES 2004)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyalahgunaan Senpi, amunisi dan Handak						
	a. Serang Mako	30	31	11	4	0	76
	b. Kontak / Tembak	90	208	166	265	80	809
	c. Penembakan	65	156	93	97	14	425
	d. Peledakan	7	22	8	3	1	41
2	Pembunuhan	43	228	89	55	17	432
3	Penculikan	61	76	48	48	6	239
4	Teor / Intimidasi	36	3	4	6	2	51
5	Penganiayaan	6	6	6	6	1	25

Tabel 3.10 Gangguan Keamanan Periode 1 Januari 2003 s/d 16 Desember 2004 (Sambungan)

	2	3	4	5	6	7	8
Pemerasan	6	11	11	5	3	38	
Jatanras dan gangguan kamtibmas lainnya :							
a. Curas	19	24	11	5	1	60	
b. Curat	1	0	4	0	0	5	
c. Curanmor	25	13	5	3	0	46	
d. Sweeping massa	14	19	2	2	1	38	
e. Rampas/hilang senpi	3	3	1	1	2	10	
f. Rampas KTP	0	26	3	0	1	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Luka	2 0	50	41	51	7	16 9
		Hilang / culik	0	0	2	0	1	3
2	POLRI	Meningg al dunia	7	22	13	16	3	61
		Luka	2 4	75	34	45	5	18 3
		Hilang / culik	2	0	0	0	0	2
3	GAM	Meningg al dunia	7 0	52 2	333	282	77	1. 28 4
		Luka	5	5	19	6	3	38
4	Masyarakat	Meningg al dunia	1 0 4	43 0	190	129	24	87 7
		Luka	4 1	14 1	131	95	25	43 3
		Hilang / culik	1 3 4	16 0	112	87	6	49 9

Sumber data : Bag Ops Polda Aceh

Tabel 3.11 menunjukkan bahwa korban meninggal dunia akibat konflik paling tinggi ada pada pihak GAM dengan jumlah 1.284 orang, disusul masyarakat 877 orang, TNI 123 orang dan Polri sebanyak 61 orang. Sedangkan korban luka akibat konflik jumlah tertinggi adalah pada masyarakat dengan 433 orang, Polri 183 orang, TNI 169 orang dan pihak GAM sebanyak 38 orang. Korban penculikan tertinggi dari pihak masyarakat dengan jumlah 499 orang, TNI 3 orang dan Polri 2 orang.

Situasi dan kondisi keamanan pasca MoU Helsinki secara umum sudah lebih stabil meskipun pada kasus tertentu terjadi kenaikan. Berikut data gangguan keamanan 11 bulan sebelum dan sesudah MoU Helsinki :

Tabel 3.12 Perbandingan Gangguan Keamanan 11 Bulan Sebelum dan Sesudah MoU

N O	JENIS KASUS	JML	TR E N D (%)	N O	JENIS KASUS	JM L
1	Penyalahgunaan Senpi, amunisi dan Handak			1	Penyalahgunaan Senpi, amunisi dan Handak	
	a. Serang Mako	6	- 83		a. Serang Mako	1
	b. Kontak / Tembak	382	- 99		b. Kontak / Tembak	1
	c. Penembakan	84	- 92		c. Penembakan	2
	d. Peledakan	6	- 67		d. Peledakan	7
	e. Rampas/Hilang Senpi	3	- 67		e. Rampas/Hilang Senpi	2
2	Pembunuhan	75	- 60	2	Pembunuhan	30
3	Penculikan	74	- 77	3	Penculikan	17
4	Jatanras dan gangguan kamtibmas lainnya :			4	Jatanras dan gangguan kamtibmas lainnya :	
	a. Curas	26	13 8		a. Curas	62
	b. Curat	0	10 0		b. Curat	68
	c. Curanmor	6	3.2 33		c. Curanmor	20 0
	d. Ancam / Intimidasi	6	30 0		d. Ancam / Intimidasi	24
	e. Penganiayaan	9	73 3		e. Penganiayaan	75
	f. Pemerasan	8	16 3		f. Pemerasan	21
	g. Sweeping massa / GAM	7	- 71		g. Sweeping massa / GAM	2
	h. Kutip Pajak Nanggroe	0	10 0		h. Kutip Pajak Nanggroe	3
5	Lain-lain			5	Lain-lain	
	a. Ke/Pembakaran	19	28 9		a. Ke/Pembakaran	74
	b. Bakar Ranmor	2	0		b. Bakar Ranmor	2
	c. Unjuk rasa	3	2.0 00		c. Unjuk rasa	63
	d. Narkotika	50	12 2		d. Narkotika	11 1
	e. Rapat gelap	0	10		e. Rapat gelap	5

JUMLAH	828	JUMLAH	96
			9

Sumber data : Bag Ops Polda Aceh

Dari Tabel 3.12 terlihat bahwa jenis kasus penyalahgunaan senpi, amunisi dan bahan peledak sudah menurun namun pada jenis kasus tertentu justru naik seiring dengan mulai membaiknya stabilitas keamanan khususnya gangguan bersenjata api. Kasus yang cenderung mengalami kenaikan adalah kasus konvensional diantaranya pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor sangat luar biasa angka kenaikannya, pengancaman, penganiayaan, pemerasan dan pembakaran.

Terkait dengan gangguan keamanan pada PT Arun NGL khususnya kasus menonjol sebelum dan sesudah MoU Helsinki, berikut hasil petikan wawancara penulis kepada Bpk Syafrullah selaku *site koordinator* PT Bina Nanggroe :

Sebelum Mou, banyak aparat keamanan yang ditugaskan disini dan satu paket pengamanannya dengan Exxon Mobil karena perusahaan tersebut saling berhubungan. Pengancaman terhadap karyawan utamanya yang sering dilakukan oleh mantan kombatan tersebut. Perbedaannya adalah dulu (Pra/masa konflik) adalah meminta uang atau pajak nanggroe kepada manajemen perusahaan, tetapi sekarang (Pasca Mou/selesai konflik) adalah meminta proyek tender / pemerasan dan pengancaman.

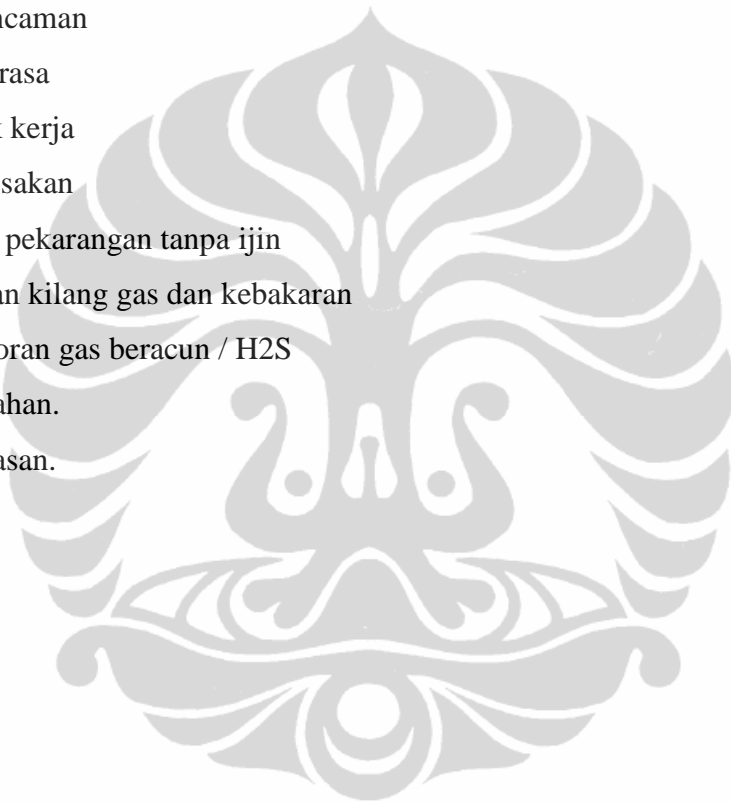
3.5 Potensi Ancaman pada PT Arun NGL

Pengertian ancaman menurut pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/4/2005 tentang Pengamanan Obyek Vital, adalah setiap usaha dan kegiatan dalam segala bentuknya baik yang berasal dari dalam maupun luar yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan obyek vital industri. Hadiman (2010) mengatakan “dalam penyelenggaraan sekuriti kita harus memperhatikan : ancaman apa yang mungkin timbul, kapan akan terjadinya, dibagian mana kemungkinan timbul, siapa kemungkinan pelaku-pelakunya, dan bagaimana proses peristiwanya. Hal ini berarti upaya penyelidikan masa depan atau kegiatan memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi”. Dengan demikian mendasari dari uraian gambaran umum khususnya kondisi PT Arun NGL maka

Universitas Indonesia

beberapa aspek yang sangat potensial menimbulkan ancaman terhadap sekuritinya adalah :

- a. Pencurian
- b. Sabotase
- c. Pemalsuan dokumen
- d. Membocorkan rahasia perusahaan
- e. Penyerobotan lahan
- f. Pengancaman
- g. Unjuk rasa
- h. Mogok kerja
- i. Pengrusakan
- j. Masuk pekarangan tanpa ijin
- k. Ledakan kilang gas dan kebakaran
- l. Kebocoran gas beracun / H₂S
- m. Penjarahan.
- n. Pemerasan.



BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:2) bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang fokusnya pada etnografi, pendekatan yang digunakan adalah yuridis manajerial artinya cara pandang yang digunakan pada aspek manajemen dan hukum. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis yang dapat diartikan sebagai penggambaran dan penganalisaan. Setelah dianalisa selanjutnya disimpulkan. Penulis akan menggambarkan dan menganalisa aplikasi manajemen sekuriti fisik yang diterapkan oleh perusahaan.

Metode kualitatif menurut Craswell (2002:1) adalah :

Sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran *holistik* lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Alasan penulis menggunakan metode kualitatif yang fokusnya pada etnografi dalam penelitian ini karena penelitian berfokus pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem pengamanan fisik meliputi Satpam dengan perlengkapan perorangan dan sarana penunjang pengamanan berikut fasilitas pengamanan fisik yang terpasang guna mencegah terjadinya gangguan keamanan di PT Arun NGL. Dengan metode etnografi maka, *pertama* penulis dapat menyajikan diskripsi atau gambaran tentang kegiatan Satpam dan fasilitas pengamanan fisik yang terpasang secara mendalam dan lengkap serta informasi yang disampaikan nampak hidup. *Kedua*, penulis memberikan informasi tentang kegiatan anggota Satpam, kondisi pengamanan fisik yang terpasang terkait dengan konteks pengamanan fisik PT Arun NGL. *Ketiga*, penulis dapat menyampaikan informasi tentang kegiatan Satpam secara utuh sesuai dengan temuan yang

Universitas Indonesia

didapatkan dan disampaikan dalam bahasa biasa.

Penelitian ethnografi juga merupakan suatu kegiatan sistematis untuk memahami cara hidup suatu masyarakat menyangkut apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ketahui dan benda apa yang mereka gunakan serta berbeda dengan yang kita miliki (Suparlan, 2008). Oleh karena itu, dengan penelitian ethnografi, penulis akan dapat memahami apa yang dilakukan, apa yang diketahui dan alat yang digunakan oleh Satpam terkait dengan sistem pengamanan fisik perusahaan.

Sumber data penulis, diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara yang merupakan data primer :

- a. Informan kunci yaitu *Vice President Direktur* PT Arun NGL
- b. Informan penting meliputi karyawan, satpam perusahaan dan anggota Satuan Brimobda Polda Aceh.
- c. Informan tambahan meliputi mantan karyawan, Kabag HRD, *Security Supervisor*, pengurus BUJP PT Bina Nanggroe, Geuchik Gampong Batuphat Barat, Tuhapeut Batuphat Barat, masyarakat sekitar, institusi kepolisian seperti Kasubdit Bin Satpam Dit Binmas Polda Aceh, Wadir Pam Obvit Polda Aceh, Kapolres Lhokseumawe, Kasat Binmas Polres Lhokseumawe, Kasat Samapta Polres Lhokseumawe, Kapolsek Muara Satu, Kanit Patroli Polsek Muara Satu, Kanit Reskrim Polsek Muara Satu.

Adapun sumber data sekunder bersumber pada buku-buku, literatur, Surat Keputusan Kapolri, Surat Keputusan Menteri Perindustrian, Laporan Kesatuan Polsek Muara Satu Tahun 2010 dan sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada.

Pengumpulan data yang penulis lakukan dengan menggunakan metode pengamatan, metode pengamatan terlibat, metode wawancara dengan pedoman dan metode kajian dokumen.

Metode pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara menurut Suparlan (1994:25) sebagai berikut :

- a. metode pengamatan adalah mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti,

- b. metode pengamatan terlibat adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan si peneliti melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai maknanya dengan yang diberikan atau dipahami oleh para warga masyarakat yang ditelitinya,
- c. wawancara dengan pedoman adalah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi dari para anggota masyarakat mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya yang bebas yang tujuannya adalah memperoleh informasi dan bukannya memperoleh pendapat atau *respons*.

Dengan metode pengamatan, penulis mengamati kegiatan-kegiatan satuan pengamanan, personel Brimob Polda Aceh dalam melaksanakan tugas pengamanan fisik perusahaan. Dengan metode pengamatan terlibat, penulis akan melibatkan diri di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan pengamanan. Dengan metode pengamatan terlibat ini penulis dapat melihat, mendengar dan merasakan sendiri kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh satuan pengamanan.

Wawancara (*interview guide*) dengan pedoman, penulis lakukan kepada *Vice President Director (VPD) PT Arun NGL, Security Officer PT Arun NGL, Kasubdit Bin Satpam Dit Binmas Polda Aceh, Wadir Pam Obvit Polda Aceh, Petugas Polres dan Petugas Polsek* dengan maksud untuk mengetahui pelaksanaan manajemen sekuriti fisik pada PT Arun NGL terlebih kebijakan yang dilakukan antara pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik pada PT Arun NGL. Sedangkan wawancara terhadap tokoh masyarakat dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sekitar oleh perusahaan dan kegiatan pemolisian komunitas yang telah diprogramkan oleh kepolisian setempat, selanjutnya implementasi dari program yang telah dilakukan oleh masyarakat sebagai wujud penciptaan rasa aman dilingkungan perusahaan.

Sedangkan kajian dokumen yang akan penulis lakukan adalah mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan produk-produk yang dihasilkan berkenaan dengan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan pada tingkat Polda dan internal PT Arun NGL yang berkaitan dengan penyelenggaraan

manajemen sekuriti fisik.

Proses analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini, diawali dengan:

- a. menelaah seluruh data yang tersedia,
- b. mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi yang merupakan usaha membuat rangkuman inti,
- c. penyusunan data dalam satuan-satuan,
- d. pengkategorian data,
- e. pemeriksaan keabsahan data,
- f. penafsiran data yang dilakukan dengan cara dari temuan yang didapatkan peneliti dibandingkan dengan sumber literatur konseptual, sehingga dapat memberikan masukan kepada peneliti sebagai arah dalam membuat kesimpulan akhir dari penelitian tersebut.

4.2 Operasionalisasi Faktor-Faktor yang Akan Diteliti

Berikut ini tabel operasionalisasi faktor-faktor yang akan diteliti :

Tabel 4.1 Operasionalisasi Faktor-Faktor Yang Akan Diteliti

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG AKAN DITELITI	DATA PRIMER	DATA SEKUNDER	INFORMAN
1	2	3	4	5
1	Kebijakan sekuriti pada obyek vital oleh pemangku kepentingan	<i>Security Supervisor</i> PT Arun NGL PNS DIT Binmas Polda Aceh Kasat Sabhara Polres Lhokseumawe BUJP PT Aceh <i>Security Service</i>	Perkap Nomor 24 tahun 2007 tentang SMP Hubungan Industrial	VPD PT ARUN NGL Kasubdit Bin Satpam Dit Binmas Polda Aceh Wadir Pam Obvit Polda Aceh

Tabel 4.1 Operasionalisasi Faktor-Faktor Yang Akan Diteliti (Sambungan)

1	2	3	4	5	
2	Kerjasama antara satker Dit Binmas dengan Dit Pam obvit Polda Aceh terkait tugas koordinasi, pembinaan teknis dan pengawasan pada obyek vital	PNS Binmas Aceh	Dit Polda	Perkap Kapolri No. 738/X/2005 tentang Obyek vital	Kasubdit Bin Satpam Dit Binmas Polda Aceh dan Wadir Pam Obvit
3	Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik pada PT Arun NGL (<i>Plansite Area</i>)	Satpam Bina Nanggroe	PT	<i>CPTED</i> Program <i>Community Development</i>	VPD PT Arun NGL Kasubdit Bin Satpam Dit Binmas Polda Aceh.
	a. Potensi ancaman pada kilang Arun	Personel Brimob Kompi Jeulikat	4	Laporan bulanan	
	b. Dampak keberadaan kilang Arun	Mantan karyawan PT Arun NGL	PT	kamtibmas Polsek Muara Satu	Wadir Pam Obvit Polda Aceh
	c. Persepsi perusahaan terhadap penciptaan rasa aman.	Masyarakat penjual besi bekas		Laporan kejadian PT Arun NGL	Kapolres Lhokseumawe
	d. Penyelenggaraan keamanan pada kilang Arun.	Karyawan PT Arun NGL	PT		<i>Security Supervisor</i> PT Arun NGL
	1) Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik oleh manajemen PT Arun NGL	Masyarakat penjual warung nasi. Tuhapeut			<i>CSR Supervisor</i> PT Arun NGL
	2) Akses kontrol	Batuphat			
	3) <i>Barrier</i>				
	4) <i>Fances</i>				
	5) Kunci	Kanit Patroli,			
	6) Penerangan	Kanit Reskrim Polsek			
	7) <i>CCTV</i>	Muara Satu			
	8) Pos Jaga	dan			
	9) Alat Komunikasi	Babinkamtibmas Polsek			
	e. Peran Polsek Muara Satu dalam menciptakan rasa aman di PT Arun NGL	Muara Satu			

Tabel 4.1 Operasionalisasi Faktor-Faktor Yang Akan Diteliti (Sambungan)

1	2	3	4	5
4	Penerimaan SDM PT Arun NGL	Pegawai PT Arun NGL	Administrasi personel	HRD Superintendent

4.3 Pedoman Wawancara

Berikut tabel yang berisi pedoman wawancara yang digunakan penulis

Tabel 4.2 Pedoman Wawancara

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG AKAN DITELITI	INFORMAN	PEDOMAN WAWANCARA (<i>INTERVIEW GUIDE</i>)
1	2	3	4
1	Kebijakan sekuriti oleh pemangku kepentingan	VPD PT Arun NGL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada permintaan yang dilakukan PT Arun kepada Polda Aceh dalam hal Bintehnis dan pengawasan pada obyek vital? 2. Kebijakan bapak terhadap staf dibidang manajemen sekuriti?
		Kasubdit Bin Satpam Dit Binmas Polda Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada kebijakan dari Kapolda Aceh terkait tugas Dit Binmas dalam melaksanakan tugas Korwasbintehnis pada obyek vital? 2. Acuan yang digunakan dalam melakukan pembinaan tehnis? 3. Pelaksanaan tugas pembinaan tehnis dan pengawasan? 4. Kendala yang ditemukan? 5. Sosialisasi Perkap Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan?
		Wadir Dit Pam Obvit Polda Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas Dit Pam Obvit pada PT Arun NGL? 2. Laporan giat pengamanan? 3. Kendala dalam melaksanakan tugas?

Tabel 4.2 Pedoman Wawancara (Sambungan)

1	2	3	4
		<i>Security Supervisor</i> PT Arun NGL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan VPD / manajemen PT Arun terhadap sekuriti? 2. Impelementasi Korwas-bintechnis oleh Polda Aceh dan jajarannya?
		PNS Binmas Aceh Dit Polda Aceh	Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengawasan BUJP dan PT Arun NGL?
		Kapolres Lhokseumawe	Pelaksanaan koordinasi dan Bintechnis oleh Polres pada PT Arun NGL?
		Kasat Samapta Polres Lhokseumawe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dari Polda terkait dengan pengamanan pada obyek vital? 2. Kendala dalam pelaksanaan tugas?
		Kasat Binmas Polres Lhokseumawe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dari Polda terkait dengan pengamanan pada obyek vital? 2. Acuan dalam melakukan pembinaan teknis?
2	Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik pada PT Arun NGL	VPD PT Arun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi bapak tentang keamanan bagi perusahaan? 2. Hal yang mengganggu aktivitas perusahaan? 3. Keberadaan PT Arun NGL bagi masyarakat sekitar?
		Kasubdit Bin Satpam Binmas Aceh Dit Polda Aceh	Apakah menerima laporan kejadian dari PT Arun NGL?
		Wadir Pam Obvit Polda Aceh Dit	Apakah menerima laporan kejadian dari PT Arun NGL?
		<i>Security Supervisor</i> PT Arun NGL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas satpam?

Tabel 4.2 Pedoman Wawancara (Sambungan)

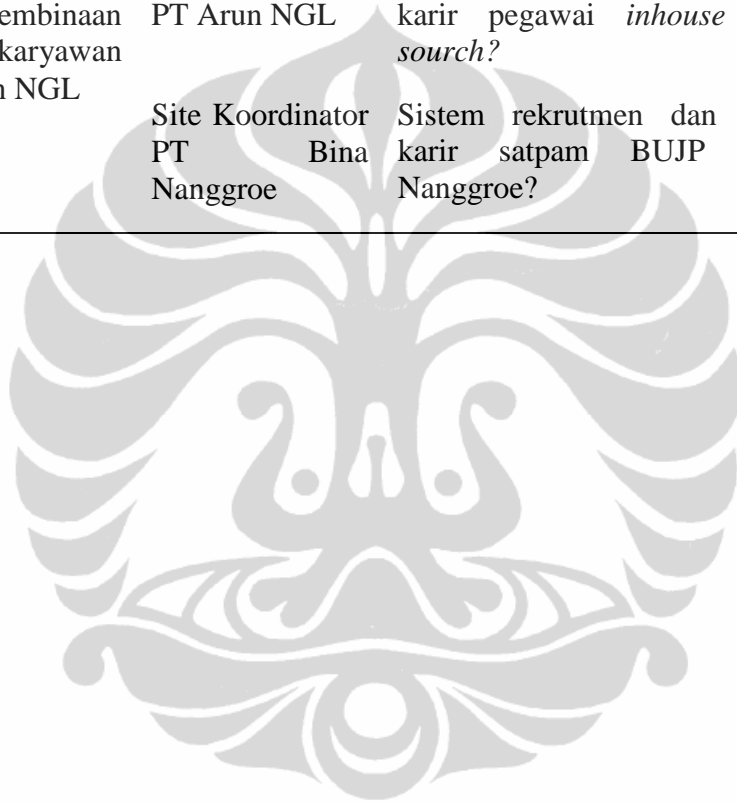
1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Kendala dalam pelaksanaan tugas? 3. Implementasi Polmas? 4. Peran serta masyarakat dalam pengamanan Kilang Arun? 5. Personel yang dilibatkan dalam pengamanan selain satpam dan pelaksanaan tugasnya?
	<p><i>CSR</i> <i>Supervisor</i> PT Arun NGL</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Implemenstasi <i>CSR</i>? 2. Kendala yang dihadapi? 3. Peran serta masyarakat dalam perencanaan program?
	<p>Satpam PT Bina Nanggroe</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas penjagaan, patroli, dan investigasi? 2. Kendala dalam pelaksanaan tugas?
	<p>Danru Brimob Kompi 4 Jeulikat</p>		<p>Pelaksanaan tugas pengamanan di Kilang Arun?</p>
	<p>Pegawai PT Arun NGL</p>		<p>Persepsi tentang keamanan?</p>
	<p>Mantan pegawai PT Arun NGL</p>		<p>Permasalahan sekuriti pada Kilang Arun NGL</p>
	<p>Site Koordinator BUJP PT Bina Nanggroe</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas satpam 2. Prosedur pengurusan BUJP? 3. Biaya pengurusan?
	<p>Masyarakat penjual warung nasi Desa Batuphat Barat</p>		<p>Dampak keberadaan PT Arun bagi masyarakat sekitar?</p>

Tabel 4.2 Pedoman Wawancara (Sambungan)

1	2	3	4
	Tuhapeut Desa / Gampong Batuphat Barat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program <i>CSR</i> oleh perusahaan? 2. Implementasi Polmas? 3. Dampak keberadaan PT Arun bagi masyarakat sekitar?
	Masyarakat penjual besi bekas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga jual dan beli besi atau kabel bekas? 2. Asal barang, apakah diketahui? 3. Tehnis transaksi?
	Kanit Patroli Polsek Muara Satu		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tehnis pelaksanaan patroli? 2. Kendala dalam pelaksanaan tugas?
	Babinkamtibmas Polsek Muara Satu Desa Batuphat Barat	Implementasi Polmas?	
	Kanit Reskrim Polsek Muara Satu		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi bidang penegakan hukum dengan unit investigasi PT Arun NGL?
	Kapolsek Muara Satu		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas bidang preventif dan penegakan hukum? 2. Kendala dalam pelaksanaan tugas?
	PNS Dit Binmas Polda Aceh	Pelaksanaan audit BUJP dan SMP?	
3	Kerjasama antara Dit Binmas Polda Aceh dengan Dit Pam Obvit terkait tugas Korwasbintechnis pada obyek vital	Kasubdit Bin Satpam Dit Binmas Polda Aceh	Keterlibatan satker lain dalam tugas korwasbintechnis oleh Dit Binmas Polda Aceh?

Tabel 4.2 Pedoman Wawancara (Sambungan)

1	2	3	4	
		Wadir Obvit Aceh	Pam Polda	Kerjasama antara Dit Binmas terkait pelaksanaan tugas Korwasbintechnis pada obyek vital?
		PNS Dit Binmas Polda Aceh		Keterlibatan satker lain dalam tugas Korwas-bintechnis Dit Binmas?
4	Sistem rekrutmen dan pembinaan karir karyawan PT Arun NGL	Pegawai HRD PT Arun NGL		Sistem rekrutmen dan pembinaan karir pegawai <i>inhouse</i> dan <i>outsourch</i> ?
		Site Koordinator PT Nanggroe	Bina BUJP PT Bina	Sistem rekrutmen dan pembinaan karir satpam BUJP PT Bina Nanggroe?



BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Dampak Keberadaan PT Arun NGL

Berikut dampak positif dan negatif keberadaan PT Arun NGL bagi pemangku kepentingan yang berhasil penulis rekapitulasikan

5.1.1 Dampak Positif

5.1.1.1 Timbulnya Lapangan Pekerjaan

Untuk mengetahui dampak positif keberadaan PT Arun NGL terkait dengan kesempatan lapangan pekerjaan bagi warga setempat, penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat di Desa / gampong Batuphat Barat, salah seorang warga yang membuka usaha warung makan sehubungan dengan keberadaan perusahaan di wilayah Desa Batuphat Barat dan mantan karyawan PT Arun NGL.

Bapak Drs. Hasbi umur 55 tahun selaku Tuhapet (ketua adat) gampong Batuphat Barat menjelaskan bahwa :

Sejak keberadaan PT Arun NGL ini hingga sekarang, PT Arun NGL tidak banyak memberikan dampak yang signifikan khususnya bagi masyarakat Gampong Batuphat Barat dalam artian lapangan pekerjaan karena untuk PT Arun NGL kebanyakan pekerjanya berasal dari luar Gampong Batuphat Barat ini, itulah yang saya katakan sebelumnya bahwa hanya memberikan keuntungan bagi pihak tertentu saja, tetapi untuk bidang usaha kerja lain menjadi tumbuh dan berkembang seperti kedai-kedai / warung nasi, pusat perbelanjaan, toko-toko elektronik dan bahan bangunan.

Ibu Upi, 45 tahun mengatakan :

Saya bukan orang disini pak, saya pendatang tepatnya dari Banda Aceh, saya memiliki usaha kedai nasi ini sejak perusahaan ini berdiri dulunya saya jualan minuman sekarang sudah beralih kekedai nasi. Lokasi kedai saya ini tidak jauh dari lokasi perumahan karyawan PT Arun dan bisa bapak lihat sendiri, selain kedai saya baik di kanan dan kiri kedai ini banyak orang buka usaha kedai nasi juga selain itu toko-toko lain dengan jenis usaha yang berbeda. Dulunya kedai saya ini ramai pak, tetapi dengar-dengar sejak banyaknya orang di PHK di PT Arun NGL jadi sekarang sudah mulai agak sepi adapun pelanggan saya sudah tidak tetap lagi hanya orang yang melintas antar daerah kebanyakan.

Bapak H. Syafrullah selaku mantan karyawan PT Arun NGL yang saat ini bekerja di PT Bina Nanggroe :

Awalnya pak pembangunan disini tidak begitu signifikan karena bapak tahu sendiri bahwa ini daerah konflik, jadi perkembangan relatif lambat meskipun PT Arun NGL berada disini. Saya bekerja sebelum PT Arun NGL ini beroperasi yaitu tahun 1978 sejak perusahaan *Bethel* dari Amerika yang membangun fasilitas kilang ini. Dulunya sebelum diberlakukannya undang-undang otonomi daerah hanya berapa persen dikembalikan kembali oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kini 70% sejak diberlakukannya otonomi daerah diserahkan kembali kepada pemerintah daerah. Pembangunan yang bapak lihat di Kota Lokseumawe itu adalah baru-baru saja dilakukan.

Inti wawancara dari beberapa informan diatas adalah bahwa keberadaan PT Arun NGL belum banyak membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi warga Desa Batuphat Barat karena tenaga kerja yang digunakan oleh PT Arun NGL lebih banyak berasal dari luar daerah. Namun lapangan usaha lain tumbuh dengan baik seperti usaha warung nasi dan toko-toko dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan daerah khususnya di Kota Lhokseumawe mulai berjalan baik setelah pemberlakuan undang-undang otonomi daerah yang mengatur pembagian anggaran kepada daerah oleh pemerintah pusat.

Adapun beberapa lapangan pekerjaan yang tumbuh seiring dengan keberadaan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan sebagai karyawan *In-house* atau *out-sourch* perusahaan.
2. Harlan atau kuli lepas yang bekerja sebagai kuli bongkar muat barang material perusahaan.
3. Menumbuhkan usaha lapangan kerja baru seperti mini market, bank, SPBU, pasar tradisional, warung, toko-toko, penjual besi bekas, dan jenis usaha-usaha lainnya.

5.1.1.2 Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Arun NGL

PT Arun NGL juga berpartisipasi terhadap pembangunan di 12 desa binaan yang berada di sekitar kawasan PT Arun NGL maupun wilayah lainnya. Ke-12 desa binaan dimaksud diantaranya Desa Ujung Blang, Desa Blang Panyang, Desa Paloh, Desa Blang Pulo, Desa Batuphat Barat, Desa Bathupat Timur, Desa Cot Trieng, Desa Pintu Makmur, Desa Blang Mee, Bantuan kepada

Universitas Indonesia

Ikatan Keluarga Besar Blang Lancang (IKBAL) pecahan dari 4 desa, Desa Ujung Pacu, Desa Paniga. Bentuk partisipasi yang dilakukan perusahaan kepada desa binaan tersebut adalah dengan melakukan program CSR. Wujud CSR yang dilakukan oleh perusahaan adalah bidang fisik (gedung, fasilitas sekolah, sarana peribadatan dan rumah sakit) maupun non fisik (bantuan dana). Terkait implementasi CSR oleh perusahaan berikut hasil wawancara penulis dengan CSR Supervisor PT Arun NGL, Tuhapeut Gampong Desa Batuphat Barat dan VPD PT Arun NGL

Bapak Irwanda selaku CSR supervisor PT Arun NGL :

Hampir semua dunia bisnis yang beroperasi ditengah masy yang bervariasi jenis bisnisnya seperti PT Arun 1977 dengan produk pertama 1978 melaksanakan program *Community Development (CD)*. Produk sosial tersebut sdh ada dalam rencana dan aksi. CD dalam perjalanan dan dinamika dunia bisnis mulai pasang surut pro kontra karena ada perubahan mendasar dibidang konsep. Pembangunan sebenarnya bukan tanggung jawab utama dunia bisnis tp kita partisipasi dalam mendorong perubahan ke usaha perubahan menjadi pengembangan itu pertimbangannya. Memang kita lihat bahwa CD tidak memiliki alokasi anggaran khusus hanya sifatnya disisihkan dari operasional saja, walaupun dalam perkembangannya pemerintah memiliki kebijakan agar perusahaan menyisihkan keuntungannya tapi yang perlu diketahui bahwa PT arun bukan *profit company* tapi dia diciptakan sebagai *operating company*. Berkenaan dengan CD dananya disisihkan berdasarkan dengan tuntutan dinamika perubahan, misal dalam masy memiliki problem pendidikan maka kita bangun sekolah contohnya SMP Paloh yang kita bangun itu, kemudian masy menghadapi persoalan-persoalan kesehatan kita siapkan rumah sakit dan poliklinik dengan biaya pengobatan yang gratis, bidang keagamaan namun sifatnya partisipasi bukan membangun mesjidnya, dibidang sosial kita bukan utama melainkan *back bone* artinya pendukung dan bukan utama misal pemerintah daerah canangkan wajib belajar, maka kita himbau karyawan disini untuk menyisihkan pendapatan mereka selanjutnya disumbangkan program belajar anak asuh, juga dirikan BDI (Badan Dakwah Islamiah) utk galang zakat sadakah, bangun rumah dengan maksud agar PT Arun NGL tidak terikat karena sifatnya partisipasi, dibidang ekonomi kita buat bina lingkungan mereka kita pinjamkan dana kecil utk peningkatan usaha, kemudian kita kembangkan PUKK (Program Usaha Kredit Kemitraan) itu program pemerintahan, kita hanya siapkan *budget*. Dulu juga kita terlibat sarana fisik asrama IAIN, asrama putri di UI Depok, Bandung, Malang kemudian Jogja utk jawab masalah sosial. Ternyata dalam perkembangan dinamika dunia bisnis dan tuntutan transparansi publik, perusahaan-perusahaan jenis nirlaba ini cenderung dijadikan sebagai sapi perah oleh banyak pihak, karena kita sulit merespon persoalan-persoalan masalah sosial yang bukannya semakin berkurang justru semakin meningkat dan bila mengacu kepada dunia Internasional yang sudah menerapkan CSR dana yang disalurkan ke *community development* termasuk penyimpangan umum, bukan pt arun saja juga perusahaan-perusahaan di Indonesia, artinya menjadi sapi perah dan tidak memberikan dampak bagi jangka panjang atau *sustainable* bagi perusahaan. Pada akhirnya melalui keputusan

Universitas Indonesia

pemerintah utk perusahaan agar menerapkan CSR melalui Kepmen No. 11. Sebenarnya konsep CSR untuk perusahaan dinegara-negara maju bertujuan memperkuat posisi mereka dgn menekankan aspek transparansi, lalu gerakan penyelamatan manajemen *resources* dengan memperkuat konsep pada aspek pembangunan berkelanjutan. Aspek yang ditekankan berdasarkan aspek iklim global. CSR memiliki 2 sasaran pokok yang pertama adalah internal dan eksternal. Ternyata CSR ini luas sekali dan modelnya tidak seperti CD intinya CSR adalah *partnership*. Hanya permasalahannya peraturan pemerintah sendiri tentang konsep CSR ini belum ada sehingga banyak perusahaan memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam menjalankannya. Tapi bagaimana kita mau merubah kearah sana karena yang kita alami adalah permasalahan kemiskinan jadi saya menghadapi tantangan untuk mengimplementasikan CSR ini. Dulu masyarakat merasakan ada sunat massal yang dibayar, hari raya kita kasih kain sarung ke kampung, sekarang karena sudah CSR itu maka kegiatan tersebut sudah tidak ada lagi karena sebenarnya hal itu membahayakan karena sistem CD hasil riset ternyata menciptakan *dependensi* masyarakat atau bertambah ketergantungan.

Mengenai implementasi CSR oleh PT Arun NGL ini, berikut tanggapan dari Bapak Drs. Hasbi Tuhapeut Gampong Batuphat Barat :

Saya sangat kecewa dengan bantuan yang diberikan PT Arun saat ini, karena bantuan yang diberikan tidak dilakukan secara transparan lagi berapa jatah desa sebenarnya. Bukan saja itu keinginan kami pun tidak dipenuhinya, mereka ada kita undang tapi lebih banyak tidak datangnya dan hanya catat - catat saja dan sampai sekarang tidak ada realisasinya satupun. Orang yang datang dari Humasnya dan seperti yang saya katakan sebelumnya mereka hanya catat-catat saja. Apalagi dengan programnya yang namanya CSR benar-benar tidak memberikan manfaat dan kepala desa pernah diundang ikut sosialisasi tentang CSR tapi setelah bagi - bagi uang selesai dan bapak bisa lihat sms di *hand phone* saya ini yang isinya tentang keluhan masyarakat mengenai program CSR.

Bapak Ir Fuad Buchari selaku VPD PT Arun NGL :

Selama ini dibenak masyarakat adalah keberadaan PT Arun tidak memberikan manfaat, menurut saya itu persepsi yang salah, apa tidak melihat gaji-gaji pegawai negara itu juga dari hasil pajak dari kita, bukan hasil dari gas adalah milik yang harus dibagi-bagikan, itu tidak seperti itu dan tanggung jawab sosial pun bukan begitu juga. Tanggung jawab kita adalah bagaimana supaya mereka itu bisa berusaha, kita fasilitasi, bukan tanggung jawab kita bagi-bagi uang pada setiap desa konsep CSR bukan begitu.

Dalam perencanaan program CSR ini, PT Arun NGL mengacu kepada visi perusahaan dan personel yang dilibatkan dalam perencanaan tersebut hanya melibatkan para *officer CSR* dan Badan Dakwah Islamiah (BDI) yang pejabatnya adalah karyawan PT Arun NGL sendiri. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Irwanda selaku *supervisor CSR* PT Arun NGL :

CSR sebenarnya *everybody* bisnis, Karena kita dibawah *Public Relation* jadi ruang gerak kita terbatas karena kalau dibawah *PR* tentu saja membawa misi *image*, jadi yang menyusun konsepnya hanya dari *officer CSR* saja dan *officer* lainnya. Sebenarnya perlu dari beberapa latar belakang yang berbeda.

Inti wawancara dari beberapa informan diatas adalah bahwa program CSR adalah program yang masih tahap sosialisasi sebagai proses transisi dari program *Community Development (CD)* kepada program CSR. Program CSR saat ini masih dianggap belum dapat diterima oleh masyarakat karena mulai lebih fokus pada kepentingan perusahaan dengan prinsip *partnership* tidak seperti program lama yaitu CD yang fokusnya kepada masyarakat. Pihak manajemen merasa program CD hanya sebagai obat penenang saja dan menimbulkan ketergantungan. Program tidak melibatkan masyarakat.

Berikut tabel implementasi CSR oleh PT Arun NGL dari berbagai bidang untuk masyarakat sekitar :

Tabel 5.1 Laporan Singkat Kegiatan CSR PT Arun NGL Tahun 2008

NO	JENIS BANTUAN	KET
1	2	3
A	Bidang Prasarana	
1	Bantuan pemeliharaan gedung asrama Mahasiswa /i di Universitas Syahkuala, IAIN-Arraniry Banda Aceh, asrama mahasiswa di Jakarta (Depok), Bandung, Yogyakarta.	
2	Partisipasi bantuan dana pembangunan, sekolah, TK, SMP, dan SMA dilingkungan kilang LNG Arun.	
3	Bantuan dana untuk pembangunan mesjid, meunasah dan mushalla untuk kepentingan masyarakat di berbagai daerah di Aceh.	
4	Membantu dana pengembangan ruang belajar di beberapa perguruan tinggi di Aceh, Universitas Malikullsaleh dan STAIN di Lhokseumawe.	
5	Pembangunan 200 unit rumah fakir miskin dan kaum dhuafa di 12 desa lingkungan atas partisipasi dari perusahaan dan karyawan.	

Tabel 5.1 Laporan Singkat Kegiatan CSR PT Arun NGL Tahun 2008 (Sambungan)

1	2	3
B	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahap II	
6	Melanjutkan penanaman serta pemeliharaan 22.000 batang	

Universitas Indonesia

- bibit lada unggul yang dikembangkan oleh BALITRI-Bogor di 50 pesantren/HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh).
- 7 Membantu pengembangan proyek-proyek usaha mikro melalui fasilitasi akses dana perbankan, dan pengembangan kapasitas *entrepreneurship* bagi para pemuda di wilayah desa lingkungan PT Arun NGL.
 - 8 Membantu pengembangan sektor pertanian hultikultura di 12 desa lingkungan untuk beberapa jenis tanamana unggulan, berbasis lahan di desa dan program tersebut membantu masyarakat untuk akses pasar ke berbagai tempat antara lain Kota Bireun dan Banda Aceh
 - 9 Membantu masyarakat lingkungan dalam bentuk usaha pengembangan sektor peternakan antara lain ternak sapi dan perikanan darat melalui program pendampingan melalui kerjasama Dompot Dhuafa Republika, *Micro Economic Empowerment Program (MEEP)*
- C Bidang Pendidikan**
- 10 Memberi kesempatan sekitar 1200 siswa SMA/SMK, Mahasiswa dan Sarjana melakukan On Job Training (OJT) di kilang PT Arun NGL.
 - 11 Memberikan dana bantuan kegiatan pendidikan kepada 5.000 siswa tingkat SD dan SMP di lingkungan kilang LNG Arun dalam rangka mensukseskan program wajib belajar 9 tahun.
 - 12 Membantu dan berpartisipasi dalam memberikan dukungan dana pembangunan fisik serta fasilitas pendukung lain untuk 200 lembaga pendidikan Pesantren, Balai Pengajian di Aceh.
 - 13 Mengadakan pelatihan keterampilan kepada siswa putus sekolah melalui kerjasama dengan *Rahmania Foundation* dan Yayasan GAS (Gerbang Anak Sejahtera) antara lain menseponsori lokakarya keterampilan / pemeliharaan otomotif dan elektronika.

Tabel 5.1 Laporan Singkat Kegiatan CSR PT Arun NGL Tahun 2008 (Sambungan)

1	2	3
14	Mendukung pemberian dana beasiswa kepada 250 mahasiswa yang berprestasi di 5 Universitas Negeri di Aceh, Unsyiah, IAIN-Arraniry, Unimal, Staim Lhokseumawe, Politeknik Negeri Lhokseumawe.	
15	Mengadakan kerjasama dengan berbagai Universitas / Politeknik dalam rangka pengembangan SDM dan sistem akademis dalam bidang Migas.	
16	Memfasilitasi program magang khusus bagi para alumni Fakultas Teknik Unsyiah dan Unimal untuk melakukan	

program magang selama satu tahun. Fasilitas tempat tinggal peserta ditempatkan di perumahan PT Arun NGL.

D Bidang Keagamaan

- 17 Membantu dana pembangunan Pondok-pondok Pesantren, Mesjid, Mushalla, Taman Pendidikan Al-Qur'an, termasuk pengadaan fasilitas pendukung seperti genset listrik, sound system, bantuan sarana, dll
 - 18 Membantu pengembangan perpustakaan dengan memberikan buku-buku dan kitab-kitab dan Al-Qur'an untuk santri.
 - 19 Membantu keterampilan dalam hal *management* dakwah dan *management* pengelolaan mesjid, termasuk juga memberikan dana ONH para imam mesjid di 12 desa lingkungan.
 - 20 Menyelenggarakan pelatihan khusus manasik haji untuk karyawan, masyarakat serta jamaah yang tinggal di sekitar kota Lhokseumawe.
 - 21 Kerjasama dengan Badan Dakwah Islam (BDI) dalam penyusunan dan implementasi program CSR terpadu.
-

Sumber data : Laporan Singkat CSR PT Arun NGL Tahun 2008

5.1.2 Dampak Negatif

5.1.2.1 Munculnya Lapak-Lapak Tempat Penjualan Hasil Kejahatan

Penulis menilai bahwa ada hubungan antara keberadaan lapak-lapak tempat penjualan besi bekas dengan kejahatan pencurian yang terjadi di PT Arun NGL. Untuk meyakinkan hal ini, penulis mewawancarai Bpk Wan selaku mantan warga desa Batuphat yang saat ini bekerja sebagai karyawan PLN cabang Banda Aceh.

Bapak Wan, umur 37 tahun, selaku karyawan PLN cabang Banda Aceh :

Yang nampung besi bekas disini namanya Doyok dengan bang Mur, mereka biasa menampung barang dari pabrik, yang kecil-kecil saja kabel yang pendek-pendek yang potong-potong karena barang itu nampak tidak ada lain itu barang Arun. Nah yang dekat jembatan dekat SD blang nuluh mameh itu yang namanya bang Mur, dia biasa beli yang falep-falep bekas semua ada disitu. Dia ini pembeli saja bukan pelaku yang mengeluarkan barang dari Arun, apa yang dijual maka dia beli. Masalah keluar barang, itu teknis orang dalam. Biasa yang bawa keluar adalah mobil sampah, kadang didalamnya diselipkan barang yang dicurinya itu. Kadang main juga dengan orang dalam, saya tahu karena saya pernah melakukannya juga. Mainnya sama orang pos negoisasi berapa pembagiannya. Di Arun itukan sudah banyak barang yang tidak digunakan lagi meskipun teorinya aset tidak boleh dibawa keluar. Kalau besi harganya sekitar 3.500 rupiah sampai

Universitas Indonesia

dengan 4.000 rupiah perkilonya kalau dari Arun rata-rata besinya dari stainless atau kadang-kadang dia beli bahan yang kira-kira masih bisa dipakai seperti falep atau besi pipa karena barang itu langka dan adanya ya di proyek seperti Arun itu. Kadang barang itu dioper ke Medan atau ada orang yang butuh tinggal cari disitu maksudnya dijual lokal seperti pipa, kadang orang butuhnya hanya semeter kan nda mungkin dia pergi ke toko beli yang panjang. Kalau kabel kuningan menurut harga berapa pasarannya perkilo. Kadang transaksi dilakukan melalui telepon, ini saya ada barang bagaimana bisa dijual ditempat anda.

Penulis melakukan wawancara dengan Muslimin, umur 33 tahun pengusaha penampungan besi bekas :

Kalau besi kita beli 3.000 rupiah dan kita jual 3.700 rupiah perkilonya kalau kabel tembaga itu kita belinya 45.000 rupiah dan kita jual 55.000 rupiah perkilonya. Saya tidak tahu kalau itu barang curian atau tidak karena kita hanya nampung saja jadi apa yang dijual orang ke kita, kita beli. Kadang dibawa pakai becak untuk bawa barang itu kemari. Pemasarannya kita ke Medan tergantung dari modal. Kalau tidak cukup modal paling lokalan saja. Mengenai kejadian 20 lembar seng bekas yang dijual kemari itu tahun 2010 saya sangat terkejut sekali karena saya tidak tahu kalau itu adalah barang hasil curian milik PT Arun karena orang yang datang membawa 20 lembar seng bekas ini awalnya menitip barang itu kesaya. Orang itu datang kembali bersama 2 orang berpakaian preman dan orang itu menunjukkan bahwa barang itu dititip kesini.

Penulis melakukan wawancara dengan Aiptu Susrizal Veri, Kanit Intelkam Polsek Muara Satu :

Untuk pemilik lapak besi bekas di Desa Batuphat Barat ini antara lain Ely Suryani dan Muslimin yang lapaknya di Dusun "A" sedangkan Alamsyah, Ahmad dan Tukimin bermukim di Dusun Blangpulo.

Inti wawancara dari beberapa informan diatas adalah berdirinya PT Arun NGL tidak menutup kemungkinan bermunculan usaha jenis lain seperti penjualan lapak besi bekas di sekitar PT Arun NGL. Barang-barang yang dijual adalah bekas seperti kabel dan besi-besi yang dijual lokal atau dibawa keluar daerah. Pemilik lapak bekas tidak mengetahui asal-usul barang yang dijual oleh penjual barang.

5.1.2.2 Gangguan Keamanan pada PT Arun NGL

Gangguan menurut pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/4/2005 tentang Pengamanan Obyek Vital, adalah tindakan yang sudah

nyata dan menimbulkan kerugian. Data gangguan keamanan PT Arun NGL untuk *plansite area* 1 Januari 2010 hingga Maret 2011 sebagai berikut :

Tabel 5.2 Data Gangguan Keamanan 1 Januari 2010 s/d Maret 2011

NO	TANGGAL	JENIS KASUS	KET
1	2	3	4
1	13 Januari 2010	Pengrusakan Petugas patroli barat menemukan di areal tanggul tepatnya dari pos 54 dan pos 56. Pagar yang sambungannya antara brc dengan harmonika terlepas dari ikatannya tepatnya antara tiang lampu 39 dan 40. Dilokasi belum ditemukan laporan terjadi kehilangan.	
2	10 Maret 2010	Pencurian Telah terjadi kehilangan 1 unit sentry Halon No. 1211 model portable diarea LNG process dekat cold box antara pole 6 dan 7 unit 55 yang sedang tidak beroperasi yang diketahui hilang sekitar pukul 08.00 wib. Ditemukan oleh petugas unit fire seccion saat pengecekan dan pengisian yang dilakukan setiap 6 bulan sekali.	Pelaku tidak tertangkap

Tabel 5.2 Data Gangguan Keamanan 1 Januari 2010 s/d Maret 2011 (Sambungan)

1	2	3	4
3	6 April 2010	Pengrusakan Ditemukan oleh petugas patroli wilayah timur pada saat patroli ke daerah tanggul antara pos 53 dan 54 tepatnya ditiang lampu no 23 ditemukan satu ruas pagar brc yang baut pengikatnya sudah putus tinggal 1 baut lagi yang mengikat. Selain putus juga pagar brc tersebut terpotong selanjutnya oleh petugas sekuriti diikat kembali dengan kawat.	
4	20 Mei 2010	Gangguan jala ikan nelayan Petugas rubber boat terpaksa memotong pelampung jala ikan nelayan di area pelabuhan khusus PT Arun. Hal ini dilakukan oleh petugas sekuriti untuk membersihkan jalur kapal LNG Hyundai Euthopia yang akan masuk ke pelabuhan khusus.	

5	16 Juni 2010	Pemalsuan dokumen Pelaku tertangkap atas nama Sdr Muslihadi pekerja kontraktor. Pelaku memanipulasi data pengusul PTA 364 A (02-08) untuk penawaran pembelian barang bekas PT Arun.	
6	24 Juni 2010	Unjuk Rasa Lanjutan unjuk rasa dilakukan dari massa IKBAL (Ikatan Keluarga Besar Blanglancang) melakukan aksi pemblokiran jalan protokol pada pintu 2 plansite sehingga menyulitkan karyawan utk masuk / keluar <i>plansite</i> .	
7	2 Juli 2010	Pencurian Telah terjadi kehilangan 1 unit Fire Exstingusher DP Ansul 8,1 Kg di area SRU Plant Unit 27 On Box D-120 & Box D-121. Diduga pelaku mengambil barang tersebut pada tanggal 30 Juni 2010 karena ditemukan oleh petugas pada saat pengecekan dan pengisian rutin yang dilakukan per-bulan dan per-enam bulan. Tidak ada tanda-tanda bekas terjadi kekerasan.	Pelaku tidak tertangkap
8	10 Agustus 2010	Unjuk Rasa Unjuk rasa dilakukan dari massa IKBAL (Ikatan Keluarga Besar Blanglancang) dengan tuntutan isu lama tentang pembebasan tanah	

Tabel 5.2 Data Gangguan Keamanan 1 Januari 2010 s/d Maret 2011 (Sambungan)

1	2	3	4
9	15 Agustus 2010	Sabotase Pelaku atas nama Sdr Hendrik pekerja kontraktor. Pelaku memotong Fan Belt di train 5 unit 35 dan tertangkap tangan oleh karyawan PTA. Pelaku memotong Fan Belt dengan tujuan agar diganti yang baru.	
10	26 Agustus 2010	Pencurian Telah terjadi curanmor milik Ramadhani pekerjaan Magang ciri-ciri supra NF 125 TD No. Pol BL-5564-NI TKP areal parkir R2 depan Pos Main Gate.	Pelaku tidak tertangkap
11	8 Sept 2010	Pencurian Mengeluarkan barang material berupa seng bekas sebanyak 20 lembar oleh Sdr Marhalim pekerjaan kontraktor. Pelaku mengeluarkan material dengan menggunakan truk dan tidak diperiksa secara teliti oleh sekuriti di pos main gate maupun pos depan PT Arun	Pelaku tertangkap
12	13 Sept 2010	Pencurian Pelaku memotong kabel ground diarea 61 namun tidak sempat mengambil kabel ground tersebut. Hasil lidik pelaku diperkirakan adalah orang yang pernah bekerja di PT Arun NGL	Pelaku tidak tertangkap
13	9 Januari 2011	Masuk pekarangan tanpa ijin Telah terjadi masuk pekarangan tanpa ijin di area PG 84 oleh saiful dan faisal alamat paloh muria.	

14	9 Januari 2011	<p>Masuk melalui pagar BRC yang baut pengikatnya sudah lapuk karena usia tepatnya ditiang 04. Total 4 lari 2 ditemukan oleh patroli barat (penyisiran diareal kebun kelapa PG-84) saat sedang mengupas kelapa.</p> <p>Pengrusakan</p> <p>Pada areal kanal labour shop ditemukan gembok pintu gerbang dipaksa dibuka dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi. Di areal kanal tersebut tidak ada lampu penerangan sehingga menyulitkan untuk petugas melakukan pengecekan.</p>	
----	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabel 5.2 Data Gangguan Keamanan 1 Januari 2010 s/d Maret 2011 (Sambungan)

1	2	3	4
15	14 Januari 2011	<p>Pencurian</p> <p>Telah terjadi pencurian 5 batang besi tiang pagar pada area luar pos-53. 5 batang besi tiang pagar tersebut ditemukan setelah dilakukan penyisiran disekitar area luar pos-53 dan kearah timur rumah kosong milik M. Nur Pattimura, disekitar TKP juga ditemukan gergaji potong dan 1 buah senter. Antara pos-53 dan pos-54 disebelah luar pagar terdapat caffe, diduga pelaku memanfaatkan kelengahan petugas karena jam 03.00 Wib saat itu dilaksanakan patroli.</p>	Pelaku tidak tertangkap
16	19 Januari 2011	<p>Korsleting (arus pendek listrik)</p> <p>Telah terjadi korsleting pada gedung training sebelah selatan berbatasan dengan annex 1 building. Berhasil ditangani oleh unit safety.</p>	
17	25 Januari 2011	<p>Pencurian</p> <p>Sdr Muhammad Abubakar pekerjaan operator kontraktor PT New Tamita Mengeluarkan barang material tanpa dilengkapi MRA berupa 4 ikat kayu valet, 30 potong plat besi petak, 4 buah mata gerenda dengan menggunakan alat transport DUMP TRUCK sampah PTA-429.</p>	Pelaku tertangkap
18	20 Februari 2011	<p>Pencurian</p> <p>Telah ditemukan tumpukan stainless bekas oleh patroli timur di area kebun kelapa Ex PLPP. Barang tersebut ditutupi oleh rumput dan diperkirakan akan dibawa keluar setelah pelaku mendapatkan kesempatan.</p>	Pelaku tidak tertangkap
19	14 Februari 2011	<p>Pencurian</p> <p>Telah terjadi pencurian sepeda di area Information Teknologi Maint. Sepeda merk Poligon saat diparkir, sepeda dalam keadaan terkunci dan dirantai. Saat korban kembali mengambil sepeda ternyata sepeda sudah hilang sedangkan kunci dan rantai dalam kondisi rusak</p>	Pelaku tidak tertangkap
20	18 Februari 2011	<p>Kebakaran</p>	

Telah terjadi kebakaran Pkl 19.50, di pengisian sulfur di unit-59. Api berhasil dipadamkan oleh 2 orang karyawan CKM.

Tabel 5.2 Data Gangguan Keamanan 1 Januari 2010 s/d Maret 2011 (Sambungan)

1	2	3	4
21	21 Februari 2011	Mogok kerja Telah terjadi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja kontraktor di pintu main gate yang menuntut pembayaran bonus seperti halnya yang diterima oleh karyawan PT Arun, namun tuntutan tidak dipenuhi oleh pihak manajemen perusahaan karena pemberian bonus tidak tercantum didalam PKWT.	
22	2 Maret 2011	Pencurian Diduga dilakukan oleh orang dalam. Telah terjadi pencurian kabel <i>ground</i> sepanjang 3 meter TKP belakang sebelah barat kantor Safety, disekitar TKP ditemukan alat pemotong jenis <i>cutter</i> dalam ruang AC sentral sentral OSO	Pelaku tidak tertangkap

Sumber data : Laporan Bulanan BUJP PT Bella Prayatama Tahun 2010 dan BUJP PT Bina Nanggroe Tahun 2010 dan 2011 (catatan : sudah diolah kembali)

Dari Tabel 5.2, selama Tahun 2010 hingga Maret 2011 kasus pencurian adalah kasus terbanyak atau frekwensinya lebih tinggi dibanding dengan kasus lainnya. Berikut modus kasus pencurian yang terjadi pada PT Arun NGL untuk *plansite area* :

- a. Pelaku masuk *plansite area* lewat laut dengan menggunakan perahu, mengendap di area semak luar pagar, memanjat tembok dan pagar dengan menggunakan tangga (sebelah utara *plansite*).
- b. Pelaku memanjat pagar dan masuk *plansite area*, memanfaatkan rumput yang telah setinggi orang dewasa serta sarana penerangan lampu yang padam / gelap (sebelah barat *plansite*).
- c. Pelaku pekerja kontraktor yang bekerja di area tertentu, memanfaatkan kelengahan pengawas dari *in-house* PT Arun NGL dan satpam *out-sourch* untuk mengambil material tanpa ijin.
- d. Pelaku pekerja kontraktor mengeluarkan material dengan menggunakan

- truck. Barang bukti disimpan pada bak yang ditutupi oleh sampah atau disimpan dalam kabin ruang sopir pada kendaraan.
- e. Pelaku menyimpan sementara hasil curian di kebun kelapa dan ditutupi oleh rumput.
 - f. Pelaku mengambil kendaraan bermotor milik orang lain secara ilegal dengan memanfaatkan kelengahan petugas satpam.

Pelaku melakukan aksi kejahatan antara pukul 07.00 s/d 15.00 Wib dan pukul 23.00 s/d 07.00 Wib. Hasil kejahatan dijual di lapak besi bekas mengacu dari keterangan pelaku yang berhasil ditangkap. Dari 10 kasus pencurian yang terjadi selama tahun 2010 hingga Maret 2011, hanya 2 kasus yang berhasil diungkap dan tertangkap pelakunya.

Salah satu kendala yang ditemukan oleh Satpam mengacu dari kasus pencurian yang terjadi khusus TKP yang berada dijalur merah, bahwa sesuai ketentuan yang diatur didalam Peraturan Perjanjian Pemborongan Nomor 1003-017-6 tidak diberikan kewenangan untuk masuk ke jalur merah kecuali ada izin dari otoritas yang berwenang. Hal ini menyulitkan satpam dalam melaksanakan tugas pengamanan aset perusahaan utamanya mencegah kesempatan pelaku kejahatan yang pelakunya berasal dari orang dalam perusahaan. Berikut beberapa informasi gangguan keamanan yang berhasil dihimpun oleh penulis mendasari dari data primer dan sekunder selama tahun 2010 hingga Maret 2011:

- a. Unjuk Rasa dan Mogok Kerja

Kilang Arun yang dibangun pada tahun 1974 menempati lahan penduduk eks Desa Blanglancang. Sebelum dibangun telah dilaksanakan proses ganti rugi oleh Pertamina disamping itu sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah Daerah Istimewa Aceh kepada penduduk eks Desa Blanglancang saat itu telah dijanjikan lahan pemukiman pengganti (*resetlement*) disamping itu Gubernur Daerah Istimewa Aceh meminta kepada Pertamina agar menyiapkan fasilitas umum bagi masyarakat eks Desa Blanglancang. Namun hingga kini janji tersebut belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Aceh. Pada akhirnya massa yang menamakan dirinya sebagai Ikatan Keluarga Besar Blanglancang (IKBAL) melakukan unjuk rasa dengan sasaran Kilang Arun. Tentu saja hal ini berimplikasi

kepada rasa aman dalam bekerja karyawan PT Arun NGL yang di salah satu sisi menjadi sasaran pelampiasan masyarakat atas janji yang belum dapat terpenuhi oleh pemerintah, padahal PT Arun NGL hanyalah sebuah operator yang ditunjuk oleh Pertamina untuk mengelola LNG. Berikut hasil wawancara dengan *security supervisor, superintendent HRD* dan *VPD* PT Arun NGL.

Bapak Syamsul selaku *security supervisor* PT Arun NGL :

Menurut saya unjuk rasa IKBAL adalah hal yang mengganggu bagi kami, karena jiwa kita terancam, kita tidak bisa bebas keluar dan masuk ke PT Arun karena rasa khawatir itu, kita tidak bisa ngomong, yang dikejar itu PT Arun termasuk personelnnya. Padahal kita sudah sampaikan kita ini kuli Pertamina, kulinya *Exxon*. Yang paling brutal itulah karena mereka anarkis akibatnya pagar pos depan hampir dirusak, permasalahannya bukan dengan PT Arun, permasalahannya itu antara Gubernur dulu (kebijakan dan surat pernyataan tentang akan diberikan lahan) dengan masyarakat Blanglancang. Unjuk rasa itu hampir 2 bulan, jadi dikejar-kejar kami pokoknya tidak boleh masuk atau keluar, semua diblokir. Terpaksa lewat depan, dijamin oleh polisi tapi dikejar-kejar juga kita. Jadi tidak nyaman begitu, kita pulang tidak boleh, masuk juga tidak boleh. Itulah saya bilang tadi kenapa pemerintah tidak cepat menyelesaikan masalah ini. Tujuan mereka supaya mengganggu PT Arun agar tanah itu dapat.

Hasil wawancara dengan Bapak Kertasih selaku *HRD Superintendent* pada PT Arun NGL :

Sejauh ini unjuk rasa IKBAL yang mengganggu di PT Arun, tanah yang dijanjikan untuk mereka secara hukum agak susah terealisasi, bahkan kemarin sampai dibawa ke Komnas HAM. Infonya dulu sudah dikasih lahan di Embang tetapi mereka tidak mau. Kita berharap saja kepada pemerintah daerah karena sudah mengakomodir hal ini dan mudah-mudahan bisa selesai. Sebenarnya mereka mengganggu terhadap perasaan saja maksudnya ketidaknyamanan dalam bekerja tetapi untuk aktivitas produksi tetap berjalan, mereka sebenarnya hubungannya dengan pemerintah daerah hanya kita kena imbasnya. Jelas PT Pertamina akan berbuat kalau ada siap lahan dari pemerintah daerah. Menurut saya, dulu itu waktu mereka banyak uang dari ganti rugi yang diberikan PT Pertamina, mereka juga sudah ditunjukkan lahan oleh pemerintah daerah tetapi mereka tidak mau, nah sekarang mereka menuntut kembali janji itu dan mereka maunya dilokasi kita dan hal itu tidak mungkin kita berikan. Jadi disitu lucunya. Kalau toh mau dikasi uang maka uang apa karena dulu ganti rugi sudah dibayar, kalau minta ganti kompensasi tanah yang dijanjikan ya kepada Pemerintah Daerah, nah dia minta tidak usah dikasih uang tanah tapi uang untuk kerja saja, nah itu tidak bisa karena Pertamina maunya dalam bentuk barang bukan uang, barangnya ya mesjid, puskesmas, lagian kalau dikasih uang sekarang nanti anak cucunya lagi mengatakan saya belum terima jadi tidak pernah selesai. Dan ada bukan rahasia umum lagi bahwa sudah ada pertemuan di Jakarta dan sudah ada perjanjian di akta notaris akan diberikan

pengacaranya 15% dari keuntungan bila berhasil tembus tuntutan ini. Kalau dihitung 121 H kali 10.000/meter sudah berapa Milyar itu dari 15%.

Berikut hasil wawancara dengan VPD PT Arun NGL Bapak Ir. Fuad Buchari atas tanggapannya dengan unjuk rasa terhadap PT Arun NGL :

Unjuk rasa IKBAL saya rasa yang menjadi beban kita saat ini, terlebih dengan tujuan mengangkat isu lama tentang pembebasan tanah yang pada dasarnya PT Arun tidak ada kaitannya dengan hal ini karena sebenarnya yang memiliki aset ini bukan PT Arun melainkan PT Pertamina, adapun permasalahannya itu sebenarnya ada pada pada Pejabat Pemerintah Daerah dulu dan menurut saya kegiatan unjuk rasa Ini sangat mengganggu dan saya dengar akhir bulan ini ada ancaman besar-besaran bahkan ada rencana mereka akan tutup pelabuhan untuk menghalangi kapal masuk kalau hal itu terjadi maka menjadi masalah besar karena PT Pertamina akan dikena denda dan dapat berdampak luas karena menyangkut hubungan dengan luar negeri, selain itu pintu-pintu masuk ke PT Arun juga mereka akan tutup dengan manusia baik pagi dan siang mereka akan menghalangi karyawan.

Inti dari wawancara dari beberapa informan diatas adalah bahwa unjuk rasa adalah kebebasan hak setiap individu atau kelompok yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan terlebih di era demokrasi ini, dimana kebebasan menyampaikan aspirasi sudah terjamin, namun permasalahannya adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh massa IKBAL tersebut tidak memperhitungkan keamanan Kilang Arun, karena massa ada melakukan pembakaran ban bekas padahal Kilang Arun adalah unit pengolahan gas yang penanganannya memerlukan penanganan khusus dan berisiko tinggi yaitu mudah meledak dan terbakar karena sifat alamiah gas tersebut PT Arun NGL tidak terlibat permasalahan dengan masyarakat karena hanya ditunjuk oleh Pertamina untuk mengelola gas, adapun tuntutan massa yang menuntut ganti rugi pembebasan tanah adalah kaitannya dengan Pertamina dan Pemerintah Daerah baik tingkat Propinsi dan Kotamadya karena aset Kilang Arun adalah milik Pertamina sedangkan penunjukan lahan oleh pemerintah daerah adapun biaya fasilitas bangunan disiapkan oleh Pertamina. Unjuk rasa tersebut sifatnya mengganggu dari aktivitas kerja karyawan PT Arun dan kontraktor.

Merujuk dari Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 672/3-17 tanggal 3 April 1974 Perihal Pemindahan Penduduk dalam rangka Pembangunan Proyek LNG Pertamina (*Resettlement*) yang

Universitas Indonesia

ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara dan Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2882/1-585 tanggal 9 November 1974 Perihal Pembebasan Tanah Untuk Proyek LNG Pertamina di Kabupaten Aceh Utara yang ditujukan kepada Sdr Tgk Saleh (Anggota DPR-RI Fraksi Persatuan Pembangunan) berisi janji pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh kepada masyarakat untuk dilakukan pembebasan tanah (ganti rugi) dan penyediaan lahan baru untuk lokasi pemukiman di daerah Mbang Kecamatan Syamtalira Baru dan Matangraya Kecamatan Matangkuli dengan maksud agar masyarakat tidak akan kehilangan mata pencahariaannya sehari-hari. Adapun untuk mendukung resettlement ini, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh mewajibkan kepada PT Pertamina untuk membuat prasarana dan sarana penunjang seperti sekolah, jalan, irigasi, mesjid, puskesmas dan lain-lain. Selain itu pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang saat itu Gubernurnya dijabat oleh A. Muzakkir Walad telah mengeluarkan instruksi yang menetapkan, bahwa penduduk tidak boleh dipindahkan (meskipun ganti rugi sudah dibayar), jika pemukiman baru belum selesai dikerjakan secara wajar.

Proses ganti rugi sudah dilakukan oleh PT Pertamina kepada masyarakat eks Blanglancang sebagaimana dalam Surat Laporan Misi Konsultasi Masyarakat Tergusur (MKMT) Tahun 1974 Blanglancang dan Rancong. Namun *resettlement* atau janji pemerintah Provinsi hingga saat ini belum terealisasi, karena pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara yang saat ini sebagian kecamatannya termasuk sengketa masyarakat dan lokasi PT Arun NGL sudah beralih status menjadi wilayah pemerintahan Daerah Kotamadya Lhokseumawe karena pemekaran wilayah. Sehingga tanggung jawab itu beralih kepada pemerintah daerah Kotamadya Lhokseumawe.

Surat tuntutan dari MKMT sudah dilayangkan sekian kali kepada pemerintah daerah Kotamadya Lhokseumawe termasuk Pemerintah Provinsi Aceh yang berujung kepada unjuk rasa di PT Arun NGL (*plansite area*) menuntut janji pemerintah (*resettlement*) untuk segera di realisasikan. Unjuk rasa tersebut telah merugikan bagi pihak PT Arun NGL karena PT Arun NGL tidak tersangkut paut sama sekali dengan masalah yang terjadi karena hanya selaku operator yang ditunjuk untuk mengelola Kilang Arun berikut asetnya. Kerugian tersebut berupa

perasaan tidak nyaman dalam bekerja atau melakukan aktivitas sehari-hari karena masyarakat menutup / memblokir jalan masuk pabrik yang tentu saja mengganggu aktivitas karyawan meskipun jalur alternatif / pintu ada dimiliki oleh PT Arun NGL. Peristiwa unjuk rasa dapat dilihat dari Tabel 5.2 yang dilakukan oleh massa IKBAL.

Bentuk penyelesaian sudah dilakukan antara Pemerintah Daerah Kotamadya Lhokseumawe, Pemerintah Provinsi Aceh, PT Pertamina, Menteri Keuangan diantaranya :

- a. Mengacu dari Memorandum Pertamina tanggal 29 September 2009 Nomor 569/110100/2009-SO perihal upaya penyelesaian tuntutan masyarakat *resettlement* Blanglancang Rancong dimana surat berasal dari Dirum dan SDM Pertamina kepada *VP Asset Management* yang berisi tentang :
 1. Penyelesaian tuntutan *resettlement* sudah berlarut-larut sejak tahun 1971. Permasalahan utamanya adalah ketidakmampuan Pemerintah Kotamadya Lhokseumawe menyediakan lahan sebagaimana perjanjian *resettlement* untuk dibangun fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh PT Pertamina.
 2. PT Pertamina memberikan opsi salah satunya menggunakan aset milik PT Pertamina yang ada dekat lokasi.
 3. Walikota Lhokseumawe telah melayangkan surat kepada Menteri Keuangan RI dengan pokok surat agar menghibahkan tanah yang ada di Ujung Pacu milik PT Pertamina.
 4. Menanggapi surat Walikota Lhokseumawe, Menteri Keuangan RI berpendapat bahwa proses pelepasan aset yang sudah menjadi penyertaan modal PT Pertamina, mekanismenya melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina dan bukan menjadi kewenangan Menteri Keuangan RI.
 5. PT Pertamina memberikan saran cara menyerahkan aset lahan desa Ujung Pacu seluas 121,9 Ha dengan memproses terlebih dahulu perjanjian penghapusbukuan dan pemindahtanganan kepada Menteri Negara BUMN selaku RUPS dengan terlebih dahulu melakukan rekomendasi dari Dewan Komisaris Pertamina.

Universitas Indonesia

- b. Penyelesaian melalui jalur perundingan / rapat :
1. Hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 bertempat di *Op Room* Kantor Walikota Lhokseumawe, materi rapat tentang musyawarah penanganan masalah tuntutan masyarakat Blanglancang dan Rancong. Kesimpulan rapat adalah pemerintah daerah akan mengirim 2 surat yaitu kepada Menteri Keuangan RI dan Direktur Utama Pertamina untuk penyelesaian tuntutan masyarakat *Resettlement* Blang Lancang Rencong dan pemerintah daerah akan mengusahakan percepatan proses pelepasan hak dari pemerintah pusat agar segera berjalan.
 2. Pada bulan Februari 2011, dilaksanakan musyawarah dan pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Walikota Lhokseumawe yang dihadiri oleh Muspida Kota Lhokseumawe, Ketua DPRD, MA, PT Pertamina, PT Arun NGL, Muspika Muara Satu dan Perwakilan warga masyarakat Desa Eks Blanglancang dan Pusong dan hasil pertemuan tersebut dirumuskan untuk dilakukan pertemuan pada tingkat pusat di Jakarta.
 3. Pada Bulan Maret 2011 dilaksanakan pertemuan di Jakarta yang dihadiri oleh Muspida Kota Lhokseumawe, Pihak Pertamina, PT Arun NGL, MA, anggota DPR RI asal Aceh. Dari hasil pertemuan tersebut dirumuskan bahwa Pemerintah Aceh menyediakan lahan / tanah yang terletak di Desa Ujung Pacu Kecamatan Muara Satu dengan menggunakan dana Otonomi Khusus yang berkisar antara 25 s/d 30 Milyar.
 4. Pada Bulan April 2011 bertempat di kantor Walikota Lhokseumawe dilaksanakan rapat pertemuan untuk menyampaikan hasil pertemuan di Jakarta kepada perwakilan IKBAL dan menunggu proses kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh untuk merespon hal tersebut.
 5. Pada akhir Bulan April 2011 bertempat di Hotel Harnes Banda Aceh perwakilan IKBAL bertemu dengan Gubernur Aceh dan anggota DPR RI asal Aceh. Hasil pertemuan tersebut adalah suatu

keputusan bahwa *resettlement* akan direspon melalui suatu keputusan dan kebijakan sesuai dengan ketentuan dan disalurkan melalui mekanisme yang akan dibahas pada akhir Bulan Juni atau awal bulan Juli 2011.

Hingga saat ini warga masyarakat tergusur Blang Lancang dan Rancong masih sabar menunggu keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, apabila hingga batas waktu yang dijanjikan tidak juga ada hasilnya maka warga masyarakat akan melakukan aksi unjuk rasa kembali dan memboikot PT Arun NGL.

Selain peristiwa unjuk rasa oleh IKBAL, juga pernah terjadi mogok kerja yang terjadi tanggal 21 Februari 2011 yang dilakukan oleh tenaga kontraktor yang bekerja di PT Arun NGL dengan menuntut hak yang sama dengan karyawan PT Arun (*In-house*) untuk diberikan bonus yang dibayarkan setiap akhir tahun. Terkait dengan mogok kerja kontraktor, berikut petikan wawancara dengan *security supervisor* PT Arun NGL

Bapak Syamsul selaku *Security Supervisor* PT Arun NGL :

Sebenarnya mereka menuntut mendapat bonus seperti yang didapatkan oleh karyawan PTA dimana setiap tahunnya rutin dilakukan pembayarannya (bonus akhir tahun). Setelah dihitung produksi berhasil maka keuntungan tersebut dibagi dan rupanya informasi tersebut bocor ke *outsourcing* atau kontraktor. Sekitar 100 orang unras, dan ada yang takut untuk melakukannya namun PTA berpegang kepada kontrak yang sudah dibuat sebelumnya karena apapun yang namanya bonus tidak ada didalam kontrak tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan anggota unit identifikasi PT Bina Nanggroe Bapak Firdaus Boang :

Orang PT Arun akan mendapatkan bonus 3 bulan gaji setiap akhir tahun, maksud orang kontraktor agar dibagikan karena untuk pekerjaan adalah sama persisnya malah lebih berat orang kontraktor tapi ternyata tdk dibagi/disisihkan, mereka makan sendiri istilahnya. Sedangkan gaji kontraktor itu kecil – kecil pak, untuk golongan terendah karyawan PT Arun saja diatas 10 juta sedangkan untuk kontraktor minimal disesuaikan dengan UMP sebesar Rp 1.350.000,- paling tinggi 2 sampai dengan 3 juta. Jadi sudah terjadi kesenjangan sosial pak disini. Mereka mogok kerja selama 2 hari selanjutnya Perintah VPD, catat namanya, cabut bednya, panggil perusahaannya kalau tidak sanggup urus anak buahmu maka saya pulangkan anak buah anda dan jangan kerja disini lagi (tidak usah kerja lagi). Otomatis perusahaan menyampaikan kepada kontraktornya. Orang bilang PTA ini tidak ada perikemanusiaan. Asal bapak tahu saja setiap tahun gaji

Universitas Indonesia

PTA selalu naik dan darimana sumber gaji itu, otomatisakan *budget* kontraktor yang dikurangi makanya kontraktor tidak pernah naik gaji begitu saja tiap tahun. Rusak PT Arun ini. Bagi saya lebih baik ditutup saja PTA ini supaya sama-sama punah. Terlalu angkuh. Mereka tidak tahu siapa kita darimana kita, mentang-mentang.

Bapak Yus selaku *Supporting* PT Bina Nanggroe :

Sebenarnya pak disini terjadi kesenjangan sosial antara *outsourcing* dan karyawan PTA. *Outsourcing* diberikan gaji minimal standar UMP sebesar Rp1.350.000 dengan *skill* yang sama. Kalau dibandingkan antara gaji *outsourcing* dengan PTA antara siang dan malam padahal tanggung jawab dan *skill*nya sama bahkan tingkat resiko yang dialami lebih tinggi *outsourcing* atau kontraktor. Sedangkan karyawan PT Arunnya hanya kontrol saja.

Inti wawancara dari beberapa informan diatas tentang mogok kerja oleh karyawan kontraktor dilatarbelakangi oleh perbedaan perlakuan utamanya dibidang pendapatan dan pemberian bonus antara karyawan *in-house* dan *out-sourch* oleh pihak manajemen PT Arun NGL dimana gaji karyawan *in-house* dengan *out-sourch* sangat jauh selisih pendapatannya meskipun karyawan *out-sourch* diberikan pendapatan besarnya minimal dari standard UMP, adapun pemberian bonus akhir tahun tidak diberikan kepada karyawan *out-sourch* karena tidak termasuk di dalam perjanjian kontrak atau PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).

b. Pencurian Pada Aset Perusahaan

Pencurian pada aset perusahaan selama tahun 2010 hingga Maret 2011 mengacu kepada Tabel 5.2 sebanyak 10 kasus dan yang tertinggi dari kasus lainnya. Berikut petikan wawancara terkait dengan kasus pencurian pada aset perusahaan.

Bapak Syafrullah selaku *Site Koordinator* PT Bina Nanggroe :

Tidak signifikan, kecuali yang dipotong kabel yang menyebabkan pabrik langsung mati. Pencuri biasa mengambil kabel grounding dan tidak sebabkan pabrik mati, cuma kalau kena petir bisa terbakar dia. Karena yang mencuri tahu kabel grounding itu kabel yang warna hijau, dia tidak berani potong yang hitam karena dia tahu itu ada arusnya. Kabel grounding itu untuk menjaga petir diteruskan ketanah agar netral, kalau ada petir tidak ada penangkal perusahaan bisa terbakar. Kabelnya gemuk dan mahal.

Bapak Syamsul selaku *Security Supervisor* PT Arun NGL :

Pada prinsipnya tidak signifikan karena kalau besi atau material lain umumnya adalah bekas atau tidak terpakai sedangkan kabel yang diambil juga tidak langsung mematikan pabrik karena mereka tahu mana kabel yang harus di potong dan aman untuk diambil dan tentu saja pelakunya dari orang dalam yang tahu persis situasi aset kita. Tetapi itu adalah kejahatan karena mengeluarkan barang material tanpa ijin dan perbuatan yang salah.

Penulis mendapati dalam berkas laporan tertanggal 8 September 2010 tentang keterlibatan satpam *out-sourch* dalam pencurian aset perusahaan dimana 20 lembar seng bekas dengan dibawa menggunakan truk oleh karyawan kontraktor melewati pintu *main gate* dan pos depan. Mengenai hal ini tanggapan dari Bapak Syamsul selaku *security supervisor* PT Arun NGL

Petugas sekuriti itu langsung kita periksa / BAP dan selanjutnya kita tidak perpanjang kontrak dengan PT berikutnya.

Inti wawancara dari beberapa informan diatas adalah pencurian yang terjadi umumnya dilakukan oleh orang dalam perusahaan karena mengetahui situasi dan kondisi perusahaan termasuk sasaran atau obyek yang akan diambil secara *illegal* tetapi tidak bersifat prinsip atau mematikan langsung aktivitas perusahaan namun tetap merugikan karena segala aset pada Kilang Arun dipertanggungjawabkan kepada Pertamina. Pelaku yang berasal dari luar perusahaan tidak menutup kemungkinan terjadi, sedangkan keterlibatan petugas satpam meloloskan material tanpa ijin adalah indikasi mental satpam yang rendah.

c. Sabotase dan Tebar Jala Ikan

Peristiwa sabotase terjadi pada tanggal 25 Februari 2011 yaitu kasus pemutusan *funbelt* pada train 5 yang berfungsi sebagai pendingin *train*, dan tebar jala oleh nelayan tanggal 20 Mei 2010 di mulut pelabuhan khusus bagi kapal tanker yang akan masuk. Terkait hal ini tanggapan dari Bapak Syamsul selaku *Security Supervisor* PT Arun NGL :

Peristiwa itu kami golongan pada tindakan sabotase karena awalnya kita curigai kenapa *funbelt* atau tali kipas ini sering putus dan putusnya adalah seperti bekas dipotong lalu setelah ditelusuri siapa *vendornya* dan kontraktornya akhirnya dapat di akui oleh kontraktor bahwa dia disuruh oleh *vendor* bayangkan harga *funbelt* itu kurang lebih 25 juta nah kalau diganti terus tentu banyak habis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Adapun kegunaan *funbelt* itu bukan perangkat yang utama karena walaupun putus, mesin

Universitas Indonesia

produksi tetap jalan dan tidak ada hubungannya sama sekali, sedangkan kasus tebar jala oleh nelayan di mulut pelabuhan khusus itu kami anggap bukan kejahatan tetapi gangguan yang dapat kami tangani karena kami di *back up* oleh pengamanan provit dalam hal ini Brimob yang standby 1X24 jam disini dan selama ini semua dapat tertangani dengan baik, dalam kasus-kasus tertentu diluar jangkauan kami, mereka akan turun dan untuk pelabuhan khusus ini sudah diberlakukan *ISPS Code* dan setiap tahunnya dilakukan pelatihan gabungan untuk penyegaran dalam rangkaantisipasi teroris dan teror – teror lainnya.

Inti wawancara kepada *security supervisor* PT Arun NGL adalah bahwa pemutusan kabel *fun belt* dikategorikan sebagai sabotase khususnya terkait kepentingan keuntungan oknum perusahaan kontraktor dalam pengadaan barang material perusahaan. Adapun peristiwa jala ikan nelayan di mulut pelabuhan khusus dapat diatasi dengan baik dibantu oleh personel Brimob.

5.2 Persepsi Perusahaan Terhadap Penciptaan Keamanan

5.2.1 Persepsi Pihak Karyawan Terhadap Penciptaan Keamanan

Penulis melakukan beberapa wawancara terhadap beberapa informan yang merupakan karyawan perusahaan. Adapun hasil wawancaranya dapat digambarkan sebagaimana diuraikan dibawah ini

Bapak Irwansyah, 54 tahun selaku karyawan PT Arun NGL bagian *Training* menyatakan :

Penciptaan keamanan di lingkungan pabrik sangat dibutuhkan sekali mengingat perusahaan memiliki banyak aset yang harus dilindungi. Bagi kami yang sangat mengganggu adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh IKBAL kemarin dan saya dengar akan terjadi bulan ini karena membuat perasaan tidak menjadi nyaman.

Bapak Imam selaku Kepala bagian perencanaan bidang pemeliharaan PT Arun NGL :

Aman itu penting pak, kalau tidak aman tentu tidak nyaman untuk bekerja, kalau untuk kejadian di area maintenance ini dulu waktu jamannya pak roby banyak tapi setelah ada tindakan dari sekuriti ditambah kita berikan arahan alhamdulillah pak sudah lebih baik karena barang-barang disini cukup rawan dan laris manis mulai dari besi, kabel banyak macam. Biasa yang lakukan kontraktor dengan alasan pendapatan kurang, saya bilang ya itu harus disyukuri dari pada diluar sana sulit cari kerja. Saya juga pernah disogok oleh orang untuk bisa mengeluarkan barang tapi saya tidak mau meskipun saya bisa melakukannya.

Universitas Indonesia

Inti wawancara dari beberapa informan diatas bahwa keamanan sangat penting bagi aktivitas karyawan di perusahaan.

Keamanan memang penting bagi perusahaan, namun penulis menemukan kejadian kelalaian karyawan yaitu meninggalkan ruangan dalam posisi tidak terkunci.

Tabel 5.3 Kelalaian Karyawan Meninggalkan Ruangan Tanpa Mengunci Pintu Tahun 2010

NO	KELALAIAN	KET
1	2	3
1	Pada tanggal 15 Januari 2010 pukul 23.05 Wib. Patroli barat cek diarea divisi II Departemen Pam/civil section di depan welding shop. Ada menemukan pintu gerbang disebelah timur tidak dalam keadaan terkunci. Sehingga tembus ruangan yang mengarah keselatan tempat gudang penyimpanan besi.	
2	Pada tanggal 18 Juni 2010 pukul 18.15 Wib. Petugas jaga main office lapor ke posko tepatnya dari pintu utama mengarah kesebelah kiri pintu paling ujung di depan kantor M. Halil Ar ditemukan pintu tidak terkunci.	
3	Pada tanggal 14 Juni 2010 selesai jam kerja, Petugas main office lapor ke posko ditemukan 2 pintu ruangan di <i>main office</i> tdk terkunci (lantai 2).	
4	Pada tanggal 14 September 2010 selesai jam kerja Petugas main office temukan satu pintu ruangan yang tidak terkunci di lantai 2.	
5	Pada tanggal 14 September 2010 selesai jam kerja Petugas main office temukan satu pintu ruangan yang tidak terkunci di lantai 2.	
6	Pada tanggal 6 Juli 2010 pukul 00.30 Wib. Petugas jaga saat cek di area pioner camp tepatnya di gedung gearment arah selatan. Pintu jerjak besi lantai 2 juga terbuka dan posisi gembok tersangkut di pintu	
7	Pada tanggal 8 Juli 2010 pukul 23.20 Wib. Petugas main gate cek pintu utama training center tidak terkunci. Lapor ke posko selanjutnya PKD untuk mengecek kebenaran berita ternyata benar pintu tidak terkunci.	
8	Pada tanggal 21 September 2010 pukul 19.50. Petugas jaga <i>main gate</i> temukan pintu kantor di <i>main office</i> yang tidak terkunci dilantai 1, ruangan kantor milik karyawan PTA.	
9	Pada tanggal 5 September 2010 pukul 01.05. ditemukan di area utilities ada menemukan pintu kantor yang tidak terkunci sebelah barat <i>power plant</i> .	

Tabel 5.3 Kelalaian Karyawan Meninggalkan Ruangan Tanpa Mengunci Pintu Tahun 2010 (Sambungan)

1	2	3
10	Pada tanggal 2 september 2010 pukul 23.30 Wib. Patroli barat plant lapor ke posko temukan gerbang pintu gerbang barat welding shop tidak dikunci.	
11	Pada tanggal 25 September 2010 pukul 23.00 Wib. Petugas jaga lama lapor ditemukan ruangan instrument technical tidak terkunci. Selanjutnya posko hubungi OSS untuk minta petunjuk.	
12	Pada tanggal 30 september 2010 pukul 17.05 Wib. Petugas jaga PKK lapor ke posko, ada menemukan pintu utama kantor yang tidak terkunci. Selanjutnya PKD meluncur	

Universitas Indonesia

- ke lokasi.
- 13 Pada tanggal 24 September 2010 pukul 18.10 Wib. Patroli barat temukan pintu utama sebelah utara maintenance tidak terkunci. Satpam patroli barat lapor ke posko.
 - 14 Pada tanggal 26 September 2010 pukul 23.00. Petugas jaga lama info ke baru bahwa ruangan instrument technical tidak terkunci. Lapor ke OSS. Dijawab monitor area tsb.
-

Sumber data : Laporan Harian Insidentil BUJP PT Bella Prayatama tahun 2010 (catatan : sudah diolah kembali)

Mendasari Tabel 5.3 bahwa selama tahun 2010 terdapat 14 kali karyawan lalai untuk mengunci pintu ruangan selesai jam kerja dan 1 kasus karyawan meninggalkan kunci dalam posisi masih berada di kunci kontak kendaraan bermotor. Posko hanya menyimpan kunci tertentu seperti kunci gudang dan pintu gerbang. Artinya kesadaran karyawan untuk menciptakan rasa aman dilingkungan perusahaan masih kurang utamanya menjaga aset perusahaan agar tidak terjadi kehilangan atau kerugian.

5.2.2 Persepsi Pihak Manajemen Terhadap Penciptaan Keamanan

Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa informan dari pihak manajemen perusahaan.

Bapak Ir Fuad Buchari selaku VPD PT Arun NGL :

Keamanan penting bagi perusahaan, sejak era reformasi masyarakat saat ini cenderung bersikap bebas sesuka hatinya dan hal tersebut berdampak juga pada kilang. Masyarakat bebas melakukan kehendak sesuka hatinya dengan alasan demokrasi dan yang menjadi permasalahan adalah mereka merasa sesuka hatinya ingin masuk ke kilang Arun ini. Dikatakan mengganggu aktivitas produksi tidak juga tetapi kalau kebebasannya lebih longgar tentu saja dapat membahayakan kondisi kilang. Karena kita tahu fasilitas kilang ini sangat berbahaya. Kilang Arun ini adalah industri vital yang semua areanya berbahaya karena kita mengelola gas yang sifatnya mudah terbakar.

Bapak Syamsul selaku *security supervisor* PT Arun NGL :

Aman itu penting pak, aset ini begitu besar dan sekuriti pasti dibutuhkan, meskipun beberapa kejadian pencurian tidak kritikal tetapi tetap saja merugikan. Namun yang saya kecewakan kepada pihak manajemen adalah mereka sebenarnya kurang mendukung kegiatan sekuriti, apa-apa yang ada inovasi atau usulan tidak boleh, apa-apa semua tidak boleh sehingga sulit yang dibawah ini untuk berkembang. Semua ide dari pimpinan artinya istilah demokrasi itu hanya untuk pimpinan bukan dibawah. Apa-apa ide dari atas istilahnya *top down*. Saya

Universitas Indonesia

pernah menyampaikan bahwa saya untuk memberikan motivasi anggota satpam saya berikan *reward* tetapi mereka diam saja.

Inti dari wawancara dari beberapa informan diatas bahwa keamanan sangat penting bagi karyawan dalam menjalankan aktivitasnya di perusahaan.

5.3 Kondisi Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik Pada PT Arun NGL (Internal PT Arun NGL)

PT Arun NGL adalah aset negara yang mahal, untuk itu harus dilindungi dan perlu mendapatkan sekuriti sesuai dengan standar pengamanan yang telah ditentukan. Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis maka elemen-elemen yang mendapatkan perhatian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sekuriti fisik itu sendiri adalah :

5.3.1 Sekuriti Fisik

5.3.1.1 Manajemen Satuan Pengamanan

Mengacu dari UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimana setiap perusahaan memiliki hak untuk melakukan *out-sourch* untuk mendukung aktivitas produksinya maka pada bulan Mei 2004 melalui BUJP PT Protecom mulailah babak baru satuan pengamanan yang semula *in-house* kini beralih kepada *out-sourch*. Pada bulan Oktober 2010 untuk BUJP yang telah memenangkan tender dari PT Arun adalah PT Bina Nanggroe yang beralamat di Jl. Tgk Chik Ditiro Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Kode Pos 244454 dengan nomor telepon yang bisa dihubungi adalah 0646-21063 dan faximile dengan nomor 0646-21064, alamat Email : bina_nanggroe@yahoo.com.

Berikut kegiatan manajemen satuan pengamanan dan implementasinya oleh personel satpam terkait dalam proses manajemen pada satuan pengamanan PT Arun NGL

a. Perencanaan

Perencanaan adalah awal dari proses manajemen dimana program sudah direncanakan dalam rangka pencapaian sasaran atau tujuan yang diinginkan. Beberapa program dalam kegiatan perencanaan diantaranya :

1. Sistem Administrasi

Sistem administrasi penting untuk mendukung kegiatan dalam proses manajemen selanjutnya.

a) Sumber Satpam.

Sumber Satpam pada PT Arun NGL ada 2 macam yaitu *in-house* dan *Out-Sourch*. *In-house* adalah karyawan PT Arun NGL yang ditugaskan mengawasi pelaksanaan tugas *out-sourch*, sedangkan *Out-Sourch* adalah tenaga kontrak yang digunakan untuk menjaga aset pada Kilang Arun yang dioperasikan oleh PT Arun NGL. Satpam *Out-Sourch* berjumlah 188 orang terdiri dari staf dan pelaksana lini terdepan (penjagaan, patroli, tugas investigasi, deteksi dini, support, dan logistik). Satpam *Out-sourch* saat ini berada dalam naungan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) PT Bina Nanggroe. Meskipun demikian satpam *out-sourch* dapat juga dikatakan sebagai satpam permanen. Dikatakan sebagai satpam permanen karena eks satpam *in-house* PT Arun NGL yang tetap dipekerjakan sebagai satpam PT Arun NGL setelah diberlakukan tenaga *out-sourch* dimana satpam tersebut setiap pergantian BUJP yang dilakukan pada setiap tender setahun sekali, satpam permanen dititipkan pada BUJP tersebut. BUJP hanya dijadikan sebagai lambang, dan dipergunakan sebagai wadah penyaluran kebijakan manajemen PT Arun NGL terkait kualitas tugas pengamanan khususnya satpam *out-sourch*, termasuk pembayaran gaji karyawan kontrak. Mengenai sumber satpam ini, berikut hasil wawancara penulis kepada Kasubdit Bin Satpam Dit Binmas Polda Aceh, *Site Koordinator* PT Bina Nanggroe, dan Satpam PT Bina Nanggroe.

AKBP Isfar selaku Kasubdit Bin Satpam Dit Binmas Polda Aceh :

Universitas Indonesia

Kebiasaan yang sering terjadi dan digunakan, BUJP hanya sebagai lambang saja sedangkan satpamnya adalah permanen. Rata-rata di Aceh begitu. Seharusnya sesuai hasil pelatihan kita di Cipayung tahun 2010 lalu bahwasanya penyedia tenaga pengamanan pada saat menang tender seharusnya satpamnya masuk untuk menggantikan satpam lama dan selanjutnya bertugas di provit itu, tetapi di Aceh ini satpamnya tetap tidak berganti cuma BUJP saja yang berganti.

Bapak Syafrullah selaku *Site Koordinator* PT Bina Nanggroe :

Penggunaan satpam yang permanen sebenarnya untuk mempermudah saja pak, karena dari perusahaan pasti meminta persyaratan seperti pengalaman kerja karena yang mengetahui situasi perusahaan adalah satpam lama kemudian sudah mengikuti pendidikan dasar dan lain sebagainya. Yang jelas agar penggunaan satpam permanen juga dilakukan dengan maksud supaya tidak ada terjadi pengangguran. BUJP yang pernah dikontrak dan lagi berjalan oleh PT Arun adalah dari PT Protecom yang hanya setahun karena kita nilai gagal, kemudian PT Nawakara, PT Bella Prayatama dan terakhir ini PT Bina Nanggroe, rata-rata satpam lama yang digunakan bahkan yang pernah dulunya bekerja di PT Arun termasuk saya.

Bapak Abdul Razak selaku satpam *out-sourch* pada pos depan *plansite area* :

Saya disini sudah 5 tahun pak bekerja di PT Arun selaku sekuriti akhir tahun 2006 tepatnya mulai dari PT Nawakara lalu PT Bella Prayatama dan terakhir ini PT Bina Nanggroe.

Bapak T. Iskandar selaku *Shift Leader "A" out-sourch* BUJP PT Bina Nanggroe :

Kita sekarang sudah *out-sourch*, manajemen kontaktor sekuriti saat in PT Bina Nanggroe, kami karyawan PT Binananggroe, naungannya saja atau ganti lain PT/BUJP saja namun kerjanya kami terus sejak *out-sourch* tahun 2004, mulai dari PT Protecom, PT Nawakara, PT Bela prayatama dan PT Bina nanggore. Saya bekerja di bidang sekuriti, sebelum *out-sourch* kami bekerja di yayasan PT Arunnya selama 12 tahun sebagai sekuriti permanen juga namun setelah tahun 2004 saya bekerja

dengan status kontrak dengan berbagai PT / BUJP dibidang sekuriti.

Inti wawancara pada beberapa informan tentang sumber satpam adalah bahwa sumber satpam berasal dari satpam eks *in-house* PT Arun NGL yang saat ini sudah di *out-sourch* oleh PT Arun NGL. Satpam *out-sourch* berada dibawah naungan PT Bina Nanggroe. Satpam *out-sourch* PT Arun NGL dapat dikatakan juga sebagai satpam permanen karena setiap habis kontrak BUJP maka akan diperpanjang oleh PT Arun NGL dan dititipkan kepada pemenang tender BUJP berikutnya.

Satpam *out-sourch* yang berjumlah 188 orang tersebut di menejemen oleh Deputi Operasional BUJP PT Bina Nanggroe untuk mengawasi aset Kilang Arun yang dikelola oleh PT Arun NGL dengan total luas 1.897 Ha dengan rincian 594 Ha untuk area pabrik (*plansite area*) dan area perumahan karyawan (*community area*) 1.303 Ha. Untuk area pabrik sebanyak 14 pos penjagaan, antara lain pos depan, pos *main gate*, pos *main office*, pos *new loading*, pos PKK, *gate-1*, pos *warehouse*, pos-52, pos-54, pos-56, pos LPG, pos-41, pos-61, pos *Bert-3*, selanjutnya posko dan regu patroli (patroli barat dan timur). Beberapa program yang dibuat oleh Deputi Operasional untuk memenejemen sumber satpam terkait perencanaan dalam proses manajemen diantaranya :

(1) Rencana Penempatan Satpam

Rencana penempatan personel satpam *out-sourch* adalah tugas dan tanggung jawab Deputi Operasional BUJP PT Bina Nanggroe dengan maksud untuk penyegaran personel. Penempatan personel diantaranya secara berkala tukar posisi penugasan area pada lokasi pabrik dengan lokasi perumahan. Selanjutnya sehari-hari penempatan

Universitas Indonesia

satpam pada pos baik yang berlokasi di area pabrik maupun perumahan didelegasikan kepada *Shift Leader* masing-masing. Khusus petugas patroli yang saat ini bertugas dilokasi pabrik, penempatannya oleh *Shift Leader* dilakukan setiap seminggu sekali.

Mengenai rencana penempatan satpam, berikut wawancara penulis dengan *Deputi Operasional BUJP PT Bina Nanggroe, Shift Leader "B" BUJP PT Bina Nanggroe dan Site Koordinator BUJP PT Bina Nanggroe.*

Bapak Darisman, selaku Deputi Operasional BUJP PT Bina Nanggroe :

Untuk personel satpam out-sourch pengaturannya oleh kita, dan pelaksanaannya saya serahkan kepada Shift Leader masing-masing. Untuk petugas satpam yang bertugas di pos penjagaan, setiap hari di tukar posisinya khusus petugas patroli dilakukan setiap seminggu sekali. Kalau satpam pada community, pergantiannya tidak dilakukan setiap hari karena area perumahan sangat luas dan satpam yang bertugas pada pos perlu penyesuaian, minimal 1 minggu baru dilakukan pergantian.

Bapak Amir, selaku *Shift Leader "B" out-sourch* PT Bina Nanggroe :

Pengaturan satpam pada pos penjagaan kita lakukan satu hari sebelumnya dan masing - masing satpam pada pos penjagaan dapat melihat posisi dirinya di absen yang mereka isi setiap apel pergantian jaga baru.

Bapak Syafrullah, selaku *Site Koordinator* BUJP PT Bina Nanggroe :

Untuk pengaturan posisi satpam, dari manajemen PT Arun NGL menyerahkannya kepada kita, bagi mereka yang penting pos jangan sampai kosong atau tidak ada orang. Karena mereka mengacu kepada Peraturan Pemborongan Pekerjaan atau perjanjian kontrak antara PT Arun NGL dengan BUJP PT Bina Nanggroe.

Inti wawancara dari beberapa informan diatas bahwa rencana pengaturan satpam adalah tugas dan tanggung jawab sepenuhnya manajemen PT Bina Nanggroe. Pengaturannya dilakukan sesuai bidang tugas satpam.

Namun pengaturan personel tersebut tidak tercatat dalam rencana kegiatan unit dan sejauh ini berdasarkan pengamatan penulis tidak ada rencana kegiatan yang terpampang dalam bentuk panel data pada masing-masing ruangan bahkan ruangan Deputy Operasional.

Mengenai hal ini, berikut hasil wawancara penulis kepada Bapak Syafrullah selaku *Site Koordinator* PT Bina Nanggroe :

Kami tidak ada menyusun rencana kegiatan tahunan, jadi cukup dilaporkan dalam bentuk laporan bulanan. Kegiatan rutin itu sudah baku mengacu kepada perjanjian kontrak kerja kita sedangkan kegiatan insidental biasanya melalui perintah lisan ataupun tertulis dari manajemen PT Arun NGL dan itu diluar perjanjian kontrak selanjutnya kita susun rencana pengamanannya.

- (2) Pengisian Buku Jurnal dan Register.
 - (a) Di Posko terdapat 1 buku mutasi / jurnal berisi laporan kegiatan perjamnya yang ditandatangani oleh *Shift Leader* lama dan *Shift Leader* baru dan diketahui oleh *Deputi Operasional*. Pengarsipan MRA (*Material Removal Authorization*) namun buku tamu tidak disediakan.
 - (b) Di Pos depan terdapat 1 buku mutasi / jurnal, buku catatan / register bagi karyawan yang terlambat masuk kerja, daftar pekerja *call out*, catatan / register kendaraan keluar /

masuk.

- (c) *Pos main office*, *pos new loading*, PKK, *pos-1*, *pos warehouse*, *pos-52*, *pos-54*, *pos-56*, *pos LPG*, *pos-41*, *pos-61* masing - masing memiliki buku jurnal yang harus diisi. Untuk patroli barat dan timur tidak mengisi buku jurnal.

b) Ijin Operasional BUJP

BUJP PT Bina Nanggroe sudah melaksanakan operasional pengamanan terhitung sejak bulan Oktober 2010. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, bahwa setiap BUJP sebelum melaksanakan tugas pengamanan pada obyek vital untuk diwajibkan mengantongi ijin operasional BUJP oleh instansi yang berwenang dalam hal ini kepolisian. Terkait dengan hal ini berikut wawancara dengan PNS Dit Binmas Polda Aceh dengan Direktur PT Aceh *Security Service*.

Terkait dengan ijin operasional BUJP PT Bina Nanggroe berikut hasil wawancara penulis dengan PNS Dit Binmas Polda Aceh dan Direktur PT Aceh *Security Service*

Hasil wawancara dengan Bapak Rantau, PNS Dit Binmas Polda Aceh :

BUJP PT Bina Nanggroe sama seperti dengan BUJP PT Srikandi dimana rekomendasi dari Polda sepertinya masih dalam proses di Polda dan surat ijin dari Kapolri belum ada.

Hasil wawancara dengan Bapak Fadil, Direktur PT Aceh *Security Service* dan *Site Koordinator* PT Bina Nanggroe :

Memang benar bahwa sebelum mendapatkan kerja, BUJP wajib mengurus surat rekomendasi ke Polda yang berlaku selama 6 bulan untuk pengurusan ke Mabes Polri guna mendapatkan surat ijin Kapolri. Perusahaan kami ini *join operational* dengan PT Bina Nanggroe dan

Universitas Indonesia

saya yang bertindak pengawas dilapangan. Awalnya kita kesulitan dalam pengurusan itu karena baru dulu saja lama pengurusan bisa 2 sampai 3 bulan baru bisa selesai kalau sekarang hanya seminggu saja sudah selesai karena sudah kenal. Rata-rata permasalahan BUJP disini pak adalah pengusaha tidak paham tentang manfaat rekomendasi yang dikeluarkan Polda jadi rekomendasi Polda itu diperpanjang terus padahal kalau sudah ada surat ijin Kapolri itu maka rekomendasi Polda itu sudah tidak berlaku lagi. Untuk pengurusan rekomendasi di Polda kita dikenai biaya lebih kurang 5 sampai 6,5 juta rupiah untuk masa 6 bulan, untuk pengurusan surat ijin Kapolri kita dikenakan biaya 20 sampai 22,5 juta rupiah untuk masa 2 tahun, sedangkan untuk surat ijin Migas yang berlaku untuk lingkungan Migas sebesar 40 sampai dengan 60 juta rupiah untuk masa 3 tahun. Kalau untuk awal pengurusan di Polda maka perusahaan kita dilakukan pengecekan sedangkan untuk berikutnya diserahkan ke Polres masing-masing untuk itu kita dimintai untuk melapor ke Polres juga. Adapun peralatan sekuriti dan kelengkapannya pada saat dicek kita hanya memperlihatkan dengan sampel saja ke orang Polda, nanti seandainya kita dapat kontrak baru semua itu dipenuhi.

Inti dari wawancara dengan beberapa informan terkait ijin operasional BUJP adalah bahwa BUJP PT Bina Nanggroe belum memiliki ijin operasional BUJP dari Kapolri. Dalam pengurusan surat ijin operasional BUJP pengusaha BUJP dikenai biaya yang besarnya berbeda pada masing-masing instansi.

2. Sarana dan prasarana tugas yang mendukung
 - a) Di Posko terdapat 1 buah pesawat telepon, 1 buah dispenser dengan aqua galon, 2 *flesh light*, 9 layar monitor *CCTV*, 2 HT, kotak kunci, 2 buah senter, tongkat dan 3 helm sekuriti, jam dinding, *peta plansite* PT Arun, komputer.
 - b) Di pos depan terdapat 3 buah helm PKD warna putih dan 3 buah jaket rompi, 1 buah jam dinding.
 - c) Di pos *main gate* terdapat *Moveable Walk Through Metal detector* yang sudah dalam kondisi rusak, 3 buah helm, 1 pemanas air, 1 buah telpon, 3 buah helm sekuriti

- warna biru, 1 unit sepeda, 2 unit *look view mirror*, 1 unit *hand held metal detector*.
- d) Di pos *new loading* terdapat 1 buah senter, 1 buah tongkat, 1 helm sekuriti warna biru, 1 unit sepeda.
 - e) Di pos PKK terdapat 3 buah helm sekuriti warna biru, 1 buah senter, 1 unit sepeda, 1 buah tongkat, 1 buah *mirror detector*. Selain itu terdapat 2 unit *speed boad* yang digunakan oleh petugas *marine patrol* untuk menjaga pelabuhan.
 - f) Di pos-1 terdapat 1 buah helm sekuriti warna biru dan 1 buah tongkat.
 - g) Di pos *warehouse* terdapat 1 buah helm sekuriti warna biru dan 1 buah tongkat, 1 unit sepeda.
 - h) Di pos-52 terdapat terdapat 1 buah helm sekuriti warna biru dan 1 buah tongkat.
 - i) Di pos-53 terdapat 1 buah helm sekuriti warna biru, 1 buah tongkat, 1 buah senter dan 1 unit R2.
 - j) Di pos-54 adalah pos menara dengan ketinggian 4 meter yang memudahkan satpam mengawasi pagar sebelah utara yang berbatasan dengan pantai dan memonitor SWI. Peralatan yang dimiliki adalah terdapat 1 buah helm sekuriti warna biru dan 1 buah tongkat.
 - k) Di pos-56 terdapat 1 buah helm sekuriti warna biru, 1 buah senter, 1 buah lampu tembak, 1 buah alat pemanas, 1 buah telepon.
 - l) Di pos LPG terdapat 1 buah helm sekuriti warna biru, 1 buah tongkat, 1 unit R2.
 - m) Di pos-41 terdapat 1 buah helm sekuriti warna biru, 1 buah senter dan 1 buah tongkat, 1 unit R2.
 - n) Di pos-61 adalah pos dengan ketinggian 8 meter dilengkapi dengan lampu tembak yang memudahkan satpam untuk mengawasi areal timur dan selatan yang

berbatasan dengan desa ujung blang. Terdapat pemanas air, 1 buah helm sekuriti warna biru, 1 buah senter, 1 buah tongkat, 1 unit sepeda.

- o) Di pos *bert- 3*, terdapat 1 unit sepeda, 1 buah helm sekuriti warna biru dan 1 buah tongkat.
- p) Patroli dilengkapi dengan kendaraan patroli R4 sebanyak 3 unit dengan rincian 1 unit untuk patroli barat, 1 unit untuk patroli timur dan 1 unit yang ditempatkan di Posko.

Mengenai peralatan yang disiapkan oleh BUJP PT Bina Nanggroe berikut wawancara dengan Bapak Syafrullah selaku *Site Koordinator* PT Bina Nanggroe :

Mengenai peralatan dan kelengkapan sekuriti itu pak sebenarnya muaranya adalah PT Arun mengapa saya katakan demikian karena pada proses tender itu PT Arun menyiapkan lembar formulir kelengkapan dan peralatan sekuriti mulai dari baju, peluit, sepatu, helm, tali pinggang dan lain-lain meskipun barang inventaris juga ada yang dititipkan kepada kita dengan maksud sudah tidak dibeli lagi seperti HT, tongkat, pisau, kendaraan dan sebagainya jadi kita tinggal menawarkan saja. Rata-rata yang menang tender adalah penawaran harga yang logis dan wajar. Semua itu ada di perjanjian kontrak kerja dan itu nanti saya berikan ke bapak.

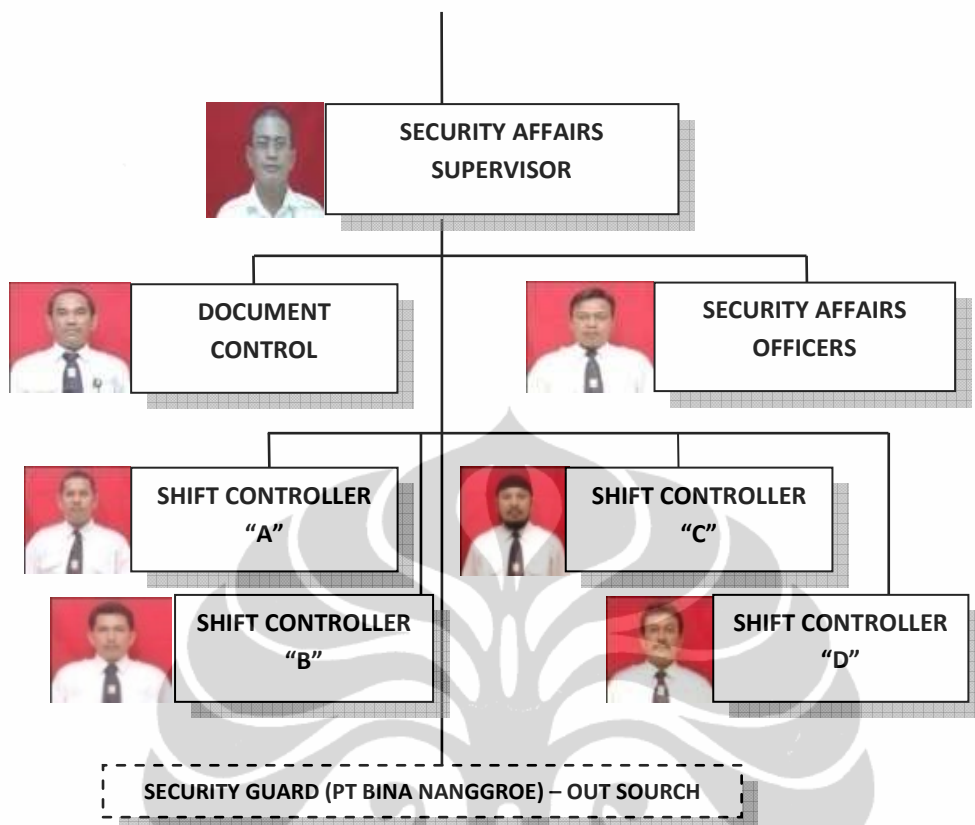
b. Pengorganisasian

1. Struktur Organisasi

- a) Struktur Organisasi Sekuriti *In-House* PT Arun NGL.

Jumlah satpam *in-house* berjumlah 7 orang, dimana tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan tugas satpam *out-sourch* dan menjembatani kepentingan manajemen.

Secara organisasi, satpam sekuriti PT Arun NGL dibawah struktur *Facilities Support & Security Superintendent (FSSS)* yang dijabat oleh Bapak Agus Nuryasin. Berikut struktur organisasi dan *job description* sekuriti *in-house* PT Arun NGL mengacu dari Bag. HRD PT Arun NGL.



Gambar 5.1 Struktur Organisasi *Security In-House* PT Arun NGL

Sumber data : Bag HRD PT Arun NGL Tahun 2011

Job description dalam struktur organisasi sekuriti PT Arun NGL adalah sebagai berikut :

- 1) *Facilities Support & Security Superintendent (FSSS)* dijabat oleh Bapak Agus Nuryasin. Tanggung jawab utama *FSSS* adalah untuk merencanakan, mengorganisir, mengelola, memelihara dan mengendalikan semua fasilitas pada / di pabrik PT Arun dan perumahan karyawan, transportasi darat dan udara, fasilitas bandara dan perusahaan tenaga kontrak untuk memastikan semua layanan berjalan dengan baik sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan.

Universitas Indonesia

Wewenang *FSSP* adalah :

- (a) Merencanakan dan mengembangkan strategi jangka panjang serta jangka pendek untuk memastikan strategi apakah sudah berjalan secara obyektif sesuai dengan visi perusahaan.
- (b) Mengelola, mengkoordinir dan memonitor pemeliharaan fasilitas, bangunan dan kegunaan untuk memastikan bahwa area yang menjadi lingkup tanggung jawabnya sudah sesuai dengan perencanaan sejalan dengan anggaran yang telah dikeluarkan.
- (c) Merencanakan, mengatur pembelanjaan aktivitas-aktivitas tenaga kontrak mencakup bidang pemeliharaan, jasa katering, dan transportasi guna memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh tenaga kontrak bisa memberikan pelayanan yang maksimal dengan biaya yang murah sejalan dengan anggaran perusahaan.
- (d) Monitoring berkenaan dengan permintaan biaya dan proses perjanjian kepada pihak ketiga.
- (e) Menerapkan ataupun mengubah program manajemen, mendukung peningkatan program yang berkelanjutan dan menciptakan iklim positif dalam bekerja sejalan dengan tujuan perusahaan.
- (f) Mengembangkan dan mengevaluasi kemampuan, kinerja dan pelatihan termasuk monitoring karyawan yang memiliki keahlian yang baik selaras

Universitas Indonesia

dengan tujuan perusahaan termasuk pengisian jabatan sesuai yang dipersyaratkan.

- 2) *Security Affairs Supervisor (SAS)* dijabat oleh Bapak Syamsul.

Tanggung jawab utama SAS adalah untuk mengelola dan mensupervisi aktivitas - aktivitas keamanan mencakup pencegahan kejahatan, dampak dari kejahatan, pendeteksian dan penyelidikan serta memastikan lokasi perusahaan, aset, karyawan dan dokumen adalah dijamin aman.

Wewenang SAS adalah :

- (a) Mengevaluasi dan mengembangkan sistem sekuriti & prosedur-prosedur yang diperlukan sebagai syarat-syarat keamanan termasuk rencana kontijensi, SOP, operasionalisasi pos keamanan dan teknik patroli untuk memastikan bahwa pencegahan terhadap kerugian sudah berjalan dengan baik.
- (b) Mengevaluasi, meneliti data keamanan, mengintegrasikan data kedalam laporan untuk disajikan kepada pihak manajemen.
- (c) Merencanakan dan mengembangkan kemampuan bawahan.
- (d) Mengkomunikasikan / menjembatani informasi untuk karyawan dan pihak ketiga termasuk memberikan pelayanan secara profesional, arahan menyangkut keamanan, perlindungan, memiliki kewenangan terbatas terkait pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kepada

Universitas Indonesia

pelaku kejahatan.

- (e) Berkaitan dengan keamanan, melakukan koordinasi secara aktif kepada Pertamina, Polri dan TNI.
- (f) Mengevaluasi, meneliti syarat-syarat keamanan, mengubah, mengintegrasikan sumber - sumber daya agar senantiasa memberikan kualitas pelayanan sekuriti secara maksimal.
- (g) Memastikan bahwa sistem manajemen sekuriti berjalan dengan baik.
- (h) Mengevaluasi terhadap kinerja kontraktor dan memastikan agar senantiasa tunduk terhadap PPP dengan PT Arun untuk mengamankan aset dan properti PT Arun.

3) *Security Affairs Officer (SAO)* dijabat oleh Bapak Khatab.

Tanggung jawab utama *SAO* adalah untuk melakukan aktivitas - aktivitas keamanan mencakup tetapi tidak terbatas pada pencegahan kejahatan, pendeteksian dan penyelidikan untuk memastikan lokasi perusahaan, aset, karyawan dan dokumen dijamin aman.

Wewenang *SAO* adalah :

- (a) Menemukan, mengumpulkan, mendukung dokumen untuk tujuan penyelidikan.
- (b) Mengevaluasi hasil penyelidikan, membuat rumusan ringkasan laporan untuk disajikan kepada manajemen.
- (c) Meneliti kasus kecelakaan, menyiapkan grafik kecelakaan, menaksir kerugian perusahaan sesuai dengan PPG.

Universitas Indonesia

- (d) Mengembangkan pemandu sistem keamanan.
- (e) Mengkaji *ID*, *PASS* berbasis regulasi perusahaan dan keamanan tertentu.
- (f) Berkomunikasi dengan pihak ketiga seperti asisten keamanan dan komunitas sekitarnya, kepolisian, TNI dan aparat keamanan lainnya.

4) *Document Control* dijabat oleh Bpk Bambang.

Tanggung jawab utama *Document Control* adalah untuk melakukan aktivitas – aktivitas yang berhubungan dengan dokumentasi dalam rangka untuk membantu dan memastikan pabrik berjalan kegiatan keamanannya termasuk menyediakan dukungan administrasi serta memelihara semua dokumen, catatan, kecenderungan, berkas dalam rangka untuk mendukung kantor dan operasi bisnis untuk aktivitas-aktivitas kepegawaian.

Wewenangnya adalah :

- (a) Memelihara dan memverifikasi berkas data personal baik reguler maupun karyawan kontraktor.
- (b) Memverifikasi lencana *ID* serta tertib administrasi *ID* untuk semua orang termasuk kepada pihak ketiga berikut pembayarannya.
- (c) Kendali penggunaan lencana *ID* / penertibannya.

5) *Shift controller* “A” adalah M. Hasan, *Shift controller* “B” adalah M. Ali Afan, *shift controller* “C” adalah Agus, *shift controller* “D” adalah M. Nasir. Tanggung jawab *Shift Controller*

Universitas Indonesia

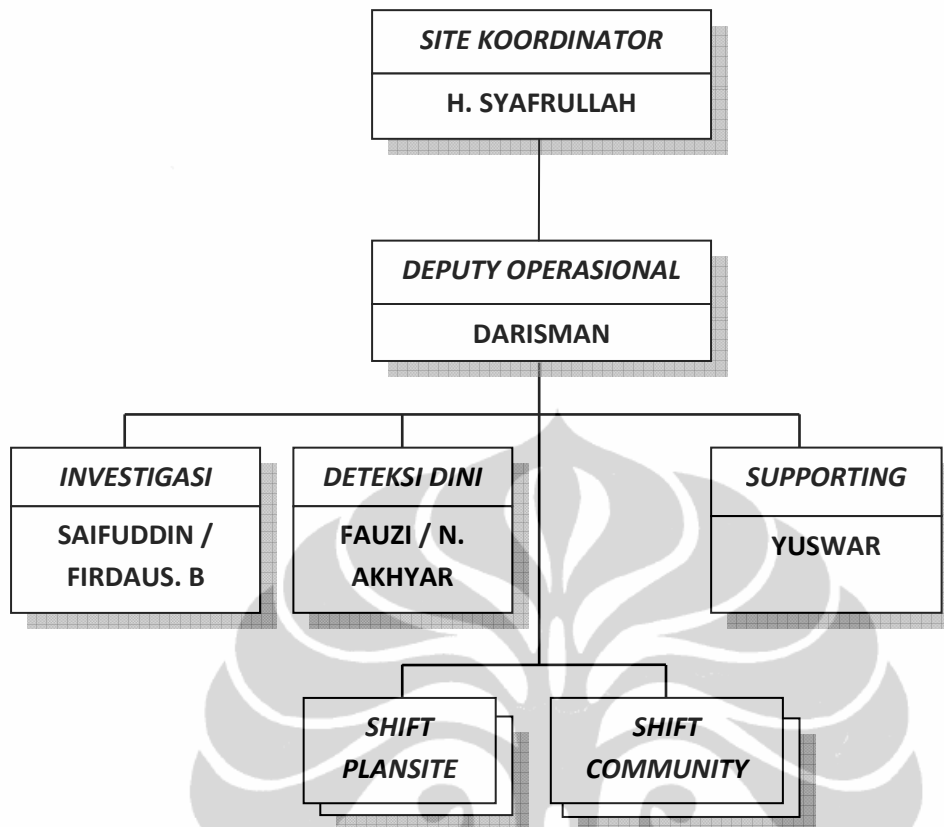
adalah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan keamanan fisik dalam rangka untuk memastikan keamanan pabrik dan keamanan komunitas berjalan dengan baik.

Wewenangnya adalah :

- (a) Membuat analisis, informasi dan data dan melakukan penyelidikan dengan segera dan mengambil tindakan yang diperlukan seperti mengambil gambar sketsa di TKP.
- (b) Menyiapkan analisa dan membuat ringkasan untuk laporan serta laporan khusus termasuk mendistribusikannya.
- (c) Mengambil langkah - langkah yang diperlukan atas bahaya / ancaman yang terjadi.
- (d) Menyusun aktivitas - aktivitas perlindungan untuk orang penting dan lalu lintas alat berat diatas jalan umum.
- (e) Memelihara data terbaru, mengintegrasikan data ke dalam informasi untuk tujuan keamanan lebih lanjut.

Sekuriti PT Arun NGL membawahi sekuriti *out-sourch* dalam hal ini satpam pada BUJP PT Bina Nanggroe yang bertugas sebagai pelaksana dilapangan.

- b) Struktur Organisasi Sekuriti *Out-Sourch* PT Arun NGL.



Gambar 5.2 Struktur Organisasi *Security Out-Sourch* PT Arun NGL

Sumber data : Site Koordinator BUJP PT Bina Nanggroe

Job Description Security Out-Sourch PT Arun NGL :

- 1) *Site Koordinator* dijabat oleh Bapak Syafrullah tugasnya adalah menjembatani kepentingan manajemen PT Arun NGL dengan manajemen BUJP PT Bina Nanggroe terkait dengan kebijakan dan administrasi.
- 2) *Deputi Operasional* dijabat oleh Bapak Darisman, tugas utamanya adalah :
 - (a) Memonitor masalah pengamanan.
 - (b) Melakukan pengaturan jaga harian.
 - (c) Bilamana ada kejadian tindakan kejahatan yang merugikan perusahaan maka

Universitas Indonesia

mengambil keputusan untuk menugaskan unit investigasi atau deteksi dini selanjutnya meneruskan kepada *user*.

- (d) Memeriksa laporan kerja hari sebelumnya.
 - (e) Menyusun laporan secara tertulis berkaitan dengan kejadian menonjol kepada *user*.
 - (f) Membuat rekapan laporan kerja bulanan untuk diteruskan ke *user*.
 - (g) Melakukan kontrol ke pos-pos penjagaan yang ada.
 - (h) Melakukan evaluasi kinerja satpam.
 - (i) Memberikan pengarahan dan mengingatkan kembali tugas-tugas anggotanya pada saat-saat tertentu.
 - (j) Menjalankan tugas operasional dan administrasi ke dalam berkaitan dengan sekuriti dan bertanggung jawab kepada *site koordinator*.
- 3) Investigasi dijabat oleh H. Saifuddin dan Firdaus M. Boang tugas utamanya dibidang penyelidikan dan penyidikan terbatas.
 - 4) Deteksi dini dijabat oleh Fauzi dan Akhyar tugas utamanya dibidang intelijen.
 - 5) *Support* dijabat oleh Yuswar tugas utamanya dibidang sarana pendukung peralatan sekuriti.
 - 6) Logistik dijabat oleh Muhadar tugas utamanya dibidang operasionalisasi kendaraan.
 - 7) *Shift leader* selaku komandan regu bertugas memimpin regu dan mengatur jaga personel harian dan memimpin apel jaga baru.
 - 8) *Deputi leader* selaku wakil komandan regu yang bertugas mewakili tugas - tugas *Deputi*

leader dalam hal berhalangan, mengisi buku mutasi dan registrasi surat.

9) Petugas Keamanan Dalam (PKD) selaku penegak aturan disiplin terhadap karyawan, mengontrol CCTV, mengamankan TPTKP, mengawal tugas khusus, menghubungi tim bantuan, unit investigasi, deteksi dan *user*.

10) Anggota satpam melaporkan kegiatannya kepada *shift leader* dengan tanggung jawab utamanya adalah keamanan diwilayah perusahaan. Uraian tugasnya adalah

(a) Melaksanakan perintah tugas dari *Shift Leader*.

(b) Melakukan pengamanan pada lokasi tugas jaga di pos yang sudah ditentukan.

(c) Mengatur dan memeriksa keluar masuk tamu, karyawan, kendaraan dan barang secara rutin.

(d) Melaksanakan tugas patroli

(e) Mengatur arus lalu lintas pada saat terjadi bahaya kebocoran gas maupun kebakaran.

(f) Melaksanakan razia / penertiban kendaraan.

(g) Menegakan disiplin terhadap penggunaan *ID Badge*, dan tanda pengenal lainnya.

2. Kualitas dan legalitas kompetensi SDM

Kualitas dan legalitas kompetensi SDM diperlukan oleh menejer untuk membantu pencapaian pada sasaran atau tujuan organisasi. Berikut kualitas dan legalitas kompetensi SDM Satpam BUJP PT Bina Nanggroe mengacu kepada data personel satpam pada Staf *Side Koordinator* BUJP PT Bina Nanggroe (terlampir).

- a) Usia satpam :
 - 1) Usia antara 20 – 30 tahun sebanyak 58 orang,
 - 2) Usia antara 31 – 40 tahun sebanyak 81 orang,
 - 3) Usia antara 41 – 50 tahun sebanyak 46 orang,
 - 4) Usia diatas 51 tahun sebanyak 3 orang.
 - b) 42 Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam yang kadaluarsa.
 - c) 2 Satpam belum memiliki KTA Satpam.
 - d) 1 Satpam berasal dari mantan anggota Polri namun belum mengikuti Pendidikan Dasar (Diksar) Satpam.
 - e) 2 Satpam belum mengikuti Diksar Satpam (Gada Pratama)
 - f) 7 Satpam sudah mengikuti Diksar Marinir.
 - g) 8 Satpam sudah mengikuti Pendidikan Lanjutan Satpam (Gada Madya), dengan rincian 5 Satpam sudah ditempatkan pada jabatan *level supervisor* dan 3 satpam belum ditempatkan pada jabatan *level supervisor*.
3. Pembagian Tugas Satpam.
- Pengamanan Kilang Arun yang dikelola oleh PT Arun NGL terbagi menjadi 4 regu, yaitu regu A, regu B, regu C, & regu D. Masing-masing regu terdiri dari *Leader Shift, Deputy Leader, PKD, Patrol & Co Patrol, Marine Patrol* dan anggota. Masing-masing regu berjumlah 25 orang. Pembagian tugasnya dibagi menjadi 4 regu / *shift* yang melaksanakan tugas di 14 pos yang telah ditentukan. Adapun pembagian *Shiftnya* sebagai berikut :
- a) *Shift 1*, bertugas dari pukul 07.00 – 15.00 Wib. Dalam pelaksanaan tugasnya diawasi oleh *shift controller* dari satpam *in-house* PT Arun NGL.
 - b) *Shift 2*, bertugas dari pukul 15.00 – 23.00 Wib. Dalam pelaksanaan tugasnya diawasi oleh *shift controller* dari satpam *in-house* PT Arun NGL.
 - c) *Shift 3*, bertugas dari pukul 23.00 – 07.00 Wib. Dalam pelaksanaan tugasnya diawasi oleh *shift controller* dari

satpam *in-house* PT Arun NGL.

d) *Shift* 4, regu cadangan.

Dengan demikian masing-masing *shift* memiliki waktu istirahat selama 24 jam. Macam pos, *job description*, *Standar Operasional Prosedure (SOP)* mengacu pada Peraturan Pemborongan Pekerjaan Nomor 1003-017-6 yang ditandatangani antara PT Bina Nanggroe dengan PT Arun NGL pada tanggal 21 Oktober 2010 (terlampir). Hal ini dipertegas oleh Bpk Syafrullah selaku Site Koordinator PT Bina Nanggroe :

Semua kegiatan terkait pengamanan sudah diatur didalam Peraturan Pemborongan Pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan oleh PT Arun NGL saat perjanjian kontrak dengan BUJP PT Bina Nanggroe.

Berikut ini jenis pos dan patroli serta jumlah personel satpam yang mengisi pada tugas tersebut

a) Jenis Pos

1) Pos khusus.

Pos khusus adalah pos yang diisi sementara oleh personel satpam pada saat jam dinas (hari Senin s/d Jumat) antara pukul 07.00 Wib s/d 16.00 Wib dan hari Jumat pukul 07.00 Wib s/d 17.00 Wib. Personel ini tidak dimasukkan kedalam *shift* jaga rutin. Pos ini hanya 1 yaitu di *Main Office* sebagai tempat pusat administrasi pejabat utama PT Arun NGL. Personel yang mengisi pos ini sebanyak 3 orang.

2) Pos pemantau situasi

(a) Posko adalah pos yang berfungsi sebagai pusat pengendali untuk *plansite area* selain sebagai tempat pengendali dan pusat administrasi sekuriti (pengaturan pemberian *Visitor Badge & Vehicle Pass*

untuk tamu, *vendor*, kontraktor dll). Posko satu bangunan dengan kantor sekuriti yang digunakan sebagai tempat berkantor pejabat sekuriti dari PT Arun NGL dan pejabat sekuriti dari BUJP PT Bina Nanggroe berikut staf untuk wilayah *project* PT Arun NGL. Di posko berjumlah 3 orang yaitu *Shift leader, Deputy Leader & PKD*.

- (b) Pos depan adalah pengendalian akses keluar masuknya orang, kendaraan dan barang yang akan masuk ke area perkantoran karyawan dan sarana pelatihan. Pos depan diawasi oleh 3 personel satpam.
- (c) Pos *main gate* adalah pengendalian akses setelah pos depan utamanya yang akan masuk ke area pabrik, gudang, pelabuhan dan lain - lain. Pos depan diawasi oleh 3 personel satpam.
- (d) Pos – 1 adalah pengendalian akses yang berada di sebelah selatan PT Arun NGL. Pos – 1 hanya digunakan sebagai jalur alternatif masuk dan keluar area pabrik dalam lingkungan pabrik termasuk menjaga pintu alternatif yang aksesnya keluar dari area PT Arun NGL, karena aktivitas orang, kendaraan dan barang yang masuk ke fasilitas pabrik melalui satu pintu yaitu pos *main gate*. Pos – 1 diawasi oleh 1 personel satpam.
- (e) Pos *warehouse* adalah pengendalian akses

yang berada di sebelah selatan PT Arun NGL, merupakan bagian dari area pabrik. *Warehouse* adalah gudang penyimpanan barang - barang pabrik. Pos *warehouse* diawasi oleh 1 personel satpam.

(f) Pos Pelabuhan Kebandaran dan Komunikasi (PKK) adalah pengendalian akses yang berada di sebelah utara PT Arun NGL, merupakan bagian dari area pabrik. PKK adalah lokasi pelabuhan tempat kapal tangker memuat LNG dan Kondensat. Pos PKK diawasi oleh 3 personel satpam dengan catatan 1 orang satpam berasal dari *marine patrol* yang *standby* di pos tersebut.

(g) Pos-41 *pioneer camp* adalah pengendalian akses yang berada disebelah barat PT Arun NGL, merupakan area yang terpisah dari PT Arun NGL dan bukan masuk area pabrik tetapi lokasinya masih satu area dengan PT Arun NGL (berdekatan). *Pioneer Camp* adalah area yang dialih fungsikan yang semula area perumahan bagi tenaga ahli dari orang asing kini dijadikan sebagai area Pabrik AINI Aqua dan Pabrik Garmen. Pos-41 diawasi oleh 2 personel satpam.

(h) Pos *New Loading* adalah pos yang menjaga tempat penyimpanan dan pengisian gas. Terletak disebelah utara PT Arun NGL dan merupakan area dari pabrik. Pos *New Loading* diawasi oleh 1 personel satpam.

- (i) Pos-53 adalah pengendali akses / pos yang menjaga pintu alternatif masuk dan keluar area pabrik. Berada disebelah selatan PT Arun NGL, letaknya antara pos-1 dengan pos-54. Pintu tersebut saat ini tidak digunakan karena aktivitas orang, kendaraan dan barang terpusat pada pengendali akses pada pos *main gate*. Pos-53 diawaki oleh 1 personel satpam.
- (j) Pos-54 adalah pengendali akses / pos yang menjaga pintu alternatif masuk ke area pabrik. Berada disebelah selatan PT Arun NGL tepatnya bagian sudut PT Arun NGL. Pos-54 berbentuk pos menara. Sama seperti pos-1 dan pos-53, pada pos-54 terdapat pintu alternatif masuk dan keluar area pabrik. Berada disebelah selatan PT Arun NGL. Pintu tersebut saat ini tidak digunakan karena aktivitas orang, kendaraan dan barang terpusat pada pengendali akses pada pos *main gate*. Pos-54 diawaki oleh 1 personel satpam.
- (k) Pos-56 adalah pos yang berada disebelah utara PT Arun NGL. Pos ini berada pada pinggir mulut masuk pelabuhan khusus. Pos-56 diawaki oleh 1 personel satpam.
- (l) Pos LPG adalah adalah pengendali akses / pos yang menjaga pintu alternatif masuk ke area pabrik. Berada disebelah utara tepatnya bagian sudut PT Arun NGL. Sama seperti pos lainnya, pada pos LPG terdapat pintu alternatif masuk dan keluar

area pabrik namun saat ini pintu tersebut tidak digunakan karena aktivitas orang, kendaraan dan barang terpusat pada pengendali akses pada pos *main gate*. Pos LPG diawasi oleh 1 personel satpam.

(m) Pos-61 adalah pos yang berbentuk menara, terletak di sebelah utara PT Arun NGL. Pada pos ini diawasi oleh 1 personel satpam.

(n) Pos *Bert-3* adalah pos pengendali akses yang masuk dalam area pabrik. Pada Pos *Bert-3* ini terdapat pelabuhan ke -3 yang dijaga oleh 1 personel satpam. Pelabuhan ke-3 ini tidak difungsikan lagi, jadi tugasnya hanya menjaga aset. Aktivitas pelabuhan terfokus pada pelabuhan ke-2 yang dijaga oleh pos PKK.

b) Patroli terbagi atas

- 1) Patroli wilayah barat dan timur diawasi oleh masing - masing satu orang Satpam senior. Pelaksanaan patroli dilaksanakan baik siang dan malam hari sedangkan untuk malam hari, petugas patroli di back up oleh *co patrol* sebanyak 1 orang yang posisinya bisa bersama patroli barat atau timur untuk siang hari *co patrol* berada di posisi *main gate*.
- 2) *Marine Patrol* diawasi oleh 1 orang satpam.

c. Menggerakkan

Menggerakkan adalah salah satu proses manajemen yang fokusnya kepada pemberian motivasi dan pengarahan dengan maksud agar para anggota menyukai pekerjaan mereka.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dilaksanakan apel setiap pergantian jaga baru yang berisi *safety talk*, pengarahan atau *briefing*, latihan penyegaran seperti PBB. Pelaksanaan apel bersifat formal tanpa dihadiri oleh petugas satpam jaga lama. Pelaksanaan apel dipimpin oleh *Shift Leader* namun terkadang pada sekali waktu diambil oleh Deputi Operasional.

Terkait dengan pemberian motivasi yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Arun NGL, berikut wawancara kepada *security supervisor* PT Arun NGL

Bapak Syamsul selaku *security supervisor* PT Arun NGL :

Saya sudah berusaha dengan cara yang terbaik untuk menyampaikan, menegur agar mereka mau bertugas dengan baik. Meskipun saya punya kewenangan menentukan nasib mereka dan perusahaannya karena setiap hari kinerja mereka saya nilai. Kalau bermasalah maka yang saya tegur perusahaannya dengan cara pinalti misal terjadi kecurian dan itu tentu saja menjadi catatan dan mengurangi keuntungan mereka. Untuk BUJP Bella Prayatama sudah saya lakukan pinalti tetapi untuk PT Bina Nanggroe ini belum saya lakukan. Untuk memotivasi mereka salah satunya adalah memberikan *reward* kepada shift yang berhasil menangkap pelaku kejahatan paling besarnya lima ratus ribu rupiah itupun dari kantong saya.

Inti wawancara dari *security supervisor* PT Arun NGL adalah agar anggota termotivasi untuk bekerja maka diberikan *reward* yang berasal dari pribadi *security supervisor* PT Arun NGL.

Berikut ini pelaksanaan tugas satpam *out-sourch* PT Bina Nanggroe meliputi tugas patroli, penjagaan, investigasi, dan logistik.

1. Patroli

Patroli dilakukan di dalam dan di luar lingkungan perusahaan. Patroli yang dilakukan oleh personel satpam yang berada di pos dilaksanakan setiap 2 jam sekali baik dengan radius 500 meter dari area pengawasannya baik dilakukan dengan berjalan kaki, ataupun menggunakan R2 atau sepeda. Menggunakan R2 diwajibkan memiliki SIM yang dikeluarkan oleh perusahaan. Karena keterbatasan personel, tidak semua pos melaksanakan patroli, seperti halnya pada pos-56.

Hasil wawancara penulis dengan Nasir usia 28 tahun anggota Satpam *Shift B Plansite* :

Universitas Indonesia

Saya bertugas di pos gate-56, kemarin pos saya di gate-53 tergantung dari posko jadi setiap hari berganti. Tugas saya mengawasi seputaran mulut pelabuhan khusus, menjaga aset perusahaan seperti dibelakang ini, lampu-lampu. Yang melaksanakan patroli adalah biasa dilakukan oleh patroli timur ataupun yang dari pos LPG yang datang dengan R2. Saya tidak bisa melaksanakan patroli karena saya mengawasi mulut pelabuhan khusus ini khususnya oleh nelayan yang tarik pukat supaya tidak masuk.

Mengenai patroli yang dilakukan diluar lingkungan perusahaan, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sayuti, umur 40 tahun patroli barat :

Kami seminggu bertukar posisi, untuk personel setiap hari, alat kelengkapan dikendaraan kami seperti dongkrak, fire, radio portable, untuk tabung oksigen sebagai alat pengaman satpam terhadap kebocoran gas beracun tidak ada. Sistem patroli acak menurut sikon tapi bertanggung jawab secara keseluruhan. Misalnya dari Posko-Humas sambil jalan- Warehouse- Maingate-Pos 61 – Pos 41-Pos 30. Adapun Standby kami berada di pos yang dianggap rawan seperti di Pos 52 area utilities alasan akses kriminianilitas pelaku dalam hal ini keluar lompat pagar. Sudah pernah ada kejadian 2 kali dengan target kabel ground kita tidak dapat pelakunya, sekitar tahun 2006 dan 2008. Mereka potong pagar pakai gunting masuk kedalam. Kejadian biasa malam sekitar jam 3-an. Saya tugas di patroli ini sudah 5 tahun sebelumnya di pos juga. Dari hasil penilaian pimpinan untuk bisa jabat di patroli salah satu persyaratannya adalah senior. Pos dibawah pengawasan juga. Bisa masing - masing pos area yang melapor atau patroli atau sekali waktu dia lapor ke patroli. Hasil patroli lapor ke posko. Dalam sehari bisa lapor tergantung keadaan. Paling 1 jam sekali minimal. Kewajiban lain bertanggung jawab keseluruhan area dan anggota yang bertugas mengisi pos dilapangan. Itu tidak ada buku jurnal yang harus diisi hanya saya inisiatif mencatat kejadian lewat buku saku saya. Saya pribadi punya catatan tersendiri jam sekian saya patroli antar jemput aplusan, lampu mati dilapangan, barang titipan di pos untuk pertanggungjawaban ke posko. Memang dianjurkan buat catatan tapi ada juga yang tidak melaksanakan. Untuk tugas patroli dilakukan baik ring luar dan dalam perusahaan. Lampu padam lapor ke posko kadang sebulan juga bisa diperbaiki. Untuk wilayah tanggul sebelah timur untuk 2 hari yang lalu entah sudah diperbaiki atau belum. Ada yang perlu saya catat kalau tidak maka saya tidak catat. Patroli luar jalan protokol, aset perusahaan sampai rancang sana. Masalah pendapatan 2 juta tidak cukup apalagi ekonomi sekarang, beras saja 140 ribu satu sak. Kalau ganti perusahaan gaji pokok baik tapi disunat dari yang lain seperti uang makan, transpor dll yah kembali kesitu lagi. Kalau terjadi pencurian tetap ujungnya kami tetap yang salah (*warning*) bekerja dengan tekanan. Prosedur laporan melalui HT tujuan posko – PKD atau leader ke TKP – buat laporan berdasarkan laporan melalui keterangan patroli. Kalau bocor gas cari posisi aman bendera hijau, beda arah angin, tugas paling atur lalu-lintas. Rawan

Universitas Indonesia

kebocoran di area SRU, kalau ada kejadian maka back up juga. Kita bertugas hanya di area aman area main gate atau pos depan saya arahkan karyawan ke posisi bendera hijau. Adapun karyawan yang pingsan ditolong dari *respon team*. Kita hanya amankan lalin tapi amankan diri kita dulu. Ditiang-tiang SRU ada *breating asparatus* (semacam tabung oksigen) Sebenarnya petugas pos area perlu dilengkapi dengan *breating asparatus* itu seperti SWI, loading, PKK juga harus dilengkapi dengan *breating asparatus* karena mereka bertugas di area yang rawan terjadi kebocoran gas.

Inti wawancara dari beberapa informan diatas bahwa pelaksanaan tugas patroli tidak saja dilakukan oleh petugas patroli tetapi diemban juga oleh satpam yang berada di pos penjagaan, namun tidak semua pos penjagaan melaksanakan patroli seperti pada pos-56 karena minimnya jumlah personel. Sistem patroli yang dilaksanakan oleh petugas patroli yang menggunakan R4 dilakukan secara acak. Petugas patroli adalah satpam senior dibebankan juga untuk melaksanakan pengawasan pada Satpam yang bertugas di pos penjagaan. Petugas patroli tidak dibebankan mengisi buku jurnal.

Penulis mendapatkan kasus pencurian besi tiang pagar tanggal 14 Januari 2011 yang memanfaatkan kelengahan satpam dimana satpam yang bertugas di *gate-53* meninggalkan pos untuk melaksanakan patroli gabungan dengan satpam pos lain.

Rute patroli yang dilaksanakan sesuai standar yang ada adalah :

- a) Patroli Timur pelaksanaan patrolinya mulai dari Pos 1 – Pos 53 – Pos 56 – wilayah LPG dan pelabuhannya – Pos *new loading* – Pos PKK – Pos *Bert 2* – Pabrik Sulfur – Pos *Warehouse* – Pos 1.
- b) Patroli Barat pelaksanaan patrolinya mulai dari Pos *main gate* – *Maintanance building* - *Train* – Pos 49 – *Area scrab* – SWI – Tangki Kondensat – Tangki LNG – Pembuangan limbah air laut – *Main gate*.

Untuk patroli barat dan timur tidak ada tempat khusus untuk *standby* sehingga harus bergerak terus. Adapun istirahat satpam tersebut menempati pos rawan. Umumnya untuk patroli barat berada di *SWI* dan patroli timur berada di pos-56.

Terkait dengan pelaksanaan tugas patroli yang menggunakan R4 berikut hasil wawancara dengan Bapak Syamsul selaku *security supervisor* PT Bina Nanggroe :

Patroli yang saya monitor juga tidak dilakukan secara profesional karena dapat dilihat dari kilometer laporan patroli.

2. Penjagaan

Dalam hal tugas penjagaan penulis mencoba mengamati beberapa pos dan situasi sistem pengamanan pada *plansite area*. Pada pos depan, penulis mendapatkan bahwa satpam pada pos depan hanya melakukan pengeledahan secara selektif dan seperlunya bahkan untuk pintu masuk pejalan kaki tidak dilakukan pemeriksaan sama sekali. Terkait dengan hal ini, penulis melakukan wawancara dengan salah satu satpam yang bertugas di pos depan tersebut.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Abdul Razak, 26 tahun, selaku satpam *out-sourch* BUJP PT Bina Nanggroe yang bertugas pada pos depan *plansite* :

Kami mengenal kendaraan itu pak, dia menjemput istrinya karena istrinya karyawan disini, pemeriksaan pada kendaraan juga kita selektif dan sesuai kebutuhan saja.

Selain di pos depan, penulis pada suatu kesempatan diajak berkeliling di area pabrik oleh Bapak Khatab selaku *security controller* PT Bina Nanggroe. Saat masuk ke pos main gate, Bapak Khatab meminta penulis turun dan masuk ke pintu *metal detector*. Penulis turun dari kendaraan dan mengikuti petunjuk Bapak Khatab dan ternyata pintu *metal detector* itu memang berbunyi namun tidak ada satupun yang menggeledah penulis baik itu *handphone*, pematik api dan lain-lain padahal barang - barang tersebut dilarang masuk ke area pabrik. Mengenai hal ini, penulis

Universitas Indonesia

bertanya kepada Bapak Syamsul selaku *security supervisor* PT Arun dan menjawab :

Pada prinsipnya saya menginginkan mereka bekerja secara profesional. Saya memaklumi kalau gaji mereka kurang layak. Mengenai penggeledahan itu kita lakukan sesuai kebutuhan saja, dan pintu *metal detector* itu sudah rusak sebenarnya.

Pada saat penulis selesai mengikuti pelatihan H2S, penulis menyempatkan mewawancarai Bapak Irwansyah selaku staf HRD di bagian *training* PT Arun NGL :

Saya pada suatu kesempatan pernah ke *Exxon*. Disitu luar biasa ketat sekali pengawasan yang dilakukan oleh satpamnya. Pernah suatu ketika saya masuk dan diperiksa setelah diijinkan masuk ternyata tengah jalan ada barang saya yang tertinggal dan saya terpaksa harus balik ternyata diperiksa lagi dari awal oleh sekuritanya saat saya akan masuk kembali.

Terkait personel pada pos dan luas area pengawasan, berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Syafrullah selaku mantan karyawan PT Arun NGL yang saat ini bekerja sebagai *Site Koordinator* BUJP PT Bina Nanggroe :

Personelnya satpam terlampau sedikit dengan alasan anggaran termasuk kurang justifikasi dari pihak manajemen. Menurut pendapat saya tindakan yang mereka ambil itu salah pak karena didalam sispam kilang ini banyak kosong artinya orang yang bekerja tidak ada otomatis aset ini harus dijaga (logika terbalik) seperti LPG yang sekarang ditinggalkan oleh pekerja, dulu sekuriti dipinggir sekarang karena kosong otomatis harus masuk kedalam untuk menjaga aset yang berada di dalam. Disitu ada Pos 55,56, 54, dulu 24 jam ada orang operation lampunya sudah mati sedangkan mesin itu perlu dijaga. Dulu justifikasi saya kuat bahkan saya pernah dikritik oleh orang audit mereka menyampaikan pa Saprullah ini banyak sekuriti, saya jawab bapak salah karena orang pekerja sudah kosong justru sekuriti harus banyak. Karena kalau ada pekerja pencuri pasti urung niat untuk mencuri, nah ini sudah kosong jadi pasti banyak peluang untuk melakukan pencurian disitu. Salah satu argumentasi saya adalah okelah kita hemat anggaran tapi yang perlu diingat kalau aset kilang Arun ini hilang maka jauh lebih besar kerugian dari anggaran yang kita hemat. Saya juga sampaikan pagar PTA tidak memenuhi standar migas, tapi sekarang sudah tidak mungkin lagi diganti pagar karena PT Arun sudah mau habis, yang ideal karena saya sudah mengikuti pelatihan dan melihat langsung PT Badak Migas pagar itu harus dari besi khusus, kita sentuh pagar itu saja sudah bunyi alarm, seharusnya ada pagar, lalu parit, lalu pagar lagi lalu caranya bagaimana *manpower* kita perkuat. Kalau kita lihat ngeri ini pak kita harus

Universitas Indonesia

hati-hati. Komuniti juga kita kewalahan karena sudah banyak rumah kosong / tidak dihuni lagi. Saya sudah mengikuti pendidikan pak, saya tahu bahwa standar sekuriti di PT Arun masih belum dapat, bagaimana tidak kita disuruh perang tapi tidak ada senjata itu sama saja bunuh diri namanya. Saya tahu tidak mungkin 1 pos itu diisi oleh 1 orang minimal 2 orang, kalau 1 dibunuh tidak ada saksi, kalau 2 bisa lapor dan sebagainya. Sekuriti ini diberikan kewenangan kepolisian terbatas, otomatis kita diberikan standar, kalau kita ikuti standar maka jumlahnya 500. Karena saya orangnya bertanggungjawab dan dulu saya diberikan kewenangan penuh jadi saya bisa berbuat.

Inti wawancara dari beberapa informan diatas bahwa personel satpam pada pos tidak sesuai dengan standar sekuriti berikut dengan fasilitas pengamanan fisiknya. Pihak manajemen masih menganggap sekuriti sebagai *cost* dan bukan sebagai investasi.

3. Investigasi

Terkait dengan tugas investigasi, berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Firdaus Boang selaku Investigasi BUJP PT Bina Nanggroe :

Permasalahan dibidang tugas pak. Saya berdua dengan pak Haji Saifuddin tapi bisa bapak lihat sendiri tugas-tugas investigasi dari Deputi Operasi itu lebih banyak dibebankan kepada saya padahal pekerjaannya sama, dia hanya buat laporan bulanan itupun dua bulan sekali dibuatnya. Kalau H.Saifuddin yang buat pak sering ditolak BAP-nya dari pak Syamsul jadi terpaksa saya juga yang buat, makanya kalau hari libur saya biasa tidak ditempat biar beliau yang kerja juga kalau ada kejadian. Saya sudah laporkan hal ini kepada pimpinan saya pa Syafrullah tetapi tidak ada tindak lanjutnya.

Inti wawancara dengan Bapak Firdaus adalah Deputi operasi tidak memberdayakan personel investigasi dengan baik, hal ini menyebabkan beban tugas berlebih dan belum ada tindak lanjut dari peristiwa tersebut.

4. Logistik

Unit logistik ini terkonsentrasi pada penyiapan dukungan BBM bagi kendaraan dinas patroli dan pemeliharannya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syamsul selaku *security supervisor* PT Bina Nanggroe :

Saya kecewa dengan unit logistik karena tugasnya yang saya monitor hanya menyiapkan BBM kendaraan saja tanpa mau memberikan pelayanan pemeliharaan kendaraan seperti mengecek kondisi oli, ban, dan lain-lain padahal semuanya itu sudah dibayar oleh PT Arun. Harusnya pagi - pagi dia periksa kondisi kendaraan sebelum digunakan. Patroli yang saya monitor juga tidak dilakukan secara profesional karena dapat dilihat dari kilometer laporan patroli.

Inti wawancara dari *security supervisor* bahwa pelaksanaan tugas dari unit logistik tidak melaksanakan tugasnya secara *professional* termasuk yang dilakukan oleh unit patroli.

d. Pengawasan

Pengawasan dalam proses manajemen memegang peranan kunci dimana menejer melakukan fungsi kontrol terhadap anggotanya agar tercapai tujuan organisasi. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam pengendalian adalah :

1. Penilaian kinerja harian Satpam *out-sourch* oleh *Security Supervisor* PT Arun NGL

Setiap hari, Satpam *out-sourch* mendapatkan penilaian kinerja dan hal ini mempengaruhi kinerja BUJP PT Bina Nanggroe dan keuntungan yang diperoleh karena bilamana hasil penilaian buruk dan mendapatkan pinalti maka keuntungan bagi BUJP PT Bina Nanggroe akan dipotong. Maximal dalam setiap bulannya diberikan toleransi oleh *security supervisor* PT Arun NGL sebanyak 5 kali pinalti. Bila pelaku berhasil ditangkap berikut barang buktinya maka akan diberikan reward oleh security supervisor sedangkan bila pelaku tidak tertangkap berikut barang buktinya maka Satpam yang bertugas pada area tersebut akan diperiksa oleh tim investigasi BUJP PT Bina Nanggroe selanjutnya BUJP PT Bina Nanggroe akan dikenakan pinalti. Lembaran penilaian kinerja terlampir. Terkait dengan hal ini berikut hasil wawancara dengan *Site Koordinator* BUJP PT Bina Nanggroe, Bapak Syafrullah :

Penilaian kinerja terhadap perusahaan kami dilakukan secara harian dan itu tentu saja mempengaruhi keuntungan bagi

Universitas Indonesia

perusahaan. Setiap ada kejadian utamanya pencurian, bila tidak tertangkap maka kami diberikan pinalti. Maksimal 5 kali dalam satu bulan kami diberikan toleransi.

2. Pembuatan laporan bulanan

Gangguan keamanan pada PT Arun NGL di rekap dalam laporan bulanan yang dibuat setiap 2 bulan sekali. Namun laporan tersebut tidak tertib penyimpanannya termasuk pembuatannya, bahkan tidak dimanfaatkan dengan baik untuk penugasan pengamanan kedepan. Terkait dengan hal ini berikut wawancara dengan investigasi PT Bina Nanggroe dan *security controller* PT Arun NGL.

Hasil wawancara Bapak Firdaus Boang selaku investigasi PT Bina Nanggroe :

Kita tiap tahun ganti PT, saat ini PT Bina Nanggroe sebelumnya PT Bella Prayatama, PT Nawakara, PT Proteccom. Setiap tahun data kejadian dihapus oleh saya karena takutnya data tersebut dibawa oleh mereka karena data tersebut sifatnya rahasia. Saya merekap sendiri kasus-kasus itu sejak 2011 kalau kemarin saya tidak rekap. Pokoknya 2010 kebawah tidak ada, kalau bapak mau, ada pertinggal dengan pak Haji Saifuddin dalam bentuk laporan bulanan. Bapak bisa minta kalau itu diijinkan juga.

Bapak Khatab selaku *security controller* PT Arun NGL :

Kita tidak melakukan pendataan masalah kejadian, paling dalam bentuk laporan bulanan yang 2 bulan sekali dibuat. Untuk tahun 2010 saat itu yang pegang dari PT Bella Prayatama, administrasinya berantakan termasuk laporan kejadian jarang dibuatnya.

Inti dari wawancara terhadap informan tentang pembuatan laporan bulanan bahwa tidak tertib pelaksanaannya dan tidak disimpan dengan baik.

3. Laporan harian kegiatan satpam dan laporan kejadian insidentil.

Laporan harian kegiatan satpam dan laporan kejadian insidentil dibuat secara rutin oleh satpam yang mendapat tugas tersebut.

Laporan yang dibuat akan diteruskan kepada *user* dalam hal ini sekuriti *in-house* PT Arun NGL hingga manajemen PT Arun NGL.

4. Kontrol melalui alat komunikasi dan buku jurnal
Kontrol melalui alat komunikasi dan buku jurnal adalah sarana yang digunakan menejer untuk mengendalikan anggota pada organisasi.
5. Kontrol harian / melekat kepada *shift leader* BUJP PT Bina Nanggroe oleh *shift controller* PT Arun NGL.
Shift yang personelnya diawasi oleh Satpam *out-sourch* mendapatkan pengawasan dari *user* dalam hal ini PT Arun NGL melalui petugas *shift contoller* (Satpam *in-house* PT Arun NGL).

5.3.1.2 Pengendalian Akses

PT Arun NGL memiliki 10 akses kontrol yang merupakan akses masuk maupun keluar lingkungan perusahaan. Pengendalian akses pertama merupakan akses ke gedung perkantoran perusahaan sedangkan pengendalian akses yang kedua merupakan akses ke wilayah pabrik. Pada pengendalian akses pertama dijaga oleh pos dengan sebutan pos depan yang dijaga oleh 3 orang satpam setiap harinya. Pada pos pertama terdapat pintu gerbang untuk mengatur keluar masuk kendaraan dan pintu untuk masuk bagi pejalan kaki yang digunakan khusus untuk karyawan PT Arun, kontraktor dan pihak ketiga dan pintu berikutnya khusus untuk tamu yang akan mengurus *ID Badge*. Setiap tamu yang menggunakan kendaraan R4 dan R2, maka satpam yang berada di pos depan tersebut memperhatikan dan menanyakan maksud kedatangannya selanjutnya kendaraan R4 atau R2 yang digunakan oleh tamu tersebut dipersilahkan untuk parkir terlebih dahulu ditempat yang sudah disediakan tepatnya di kanan dan kiri luar area *plansite*, tamu tersebut diminta untuk masuk melalui pintu masuk khusus tamu yang dibuka setiap pukul 09.00 s/d 16.00 Wib untuk mengurus *ID Badge* di kantor sekuriti yang satu bangunan dengan posko sekuriti. Tamu menyerahkan kartu tanda pengenal untuk ditukarkan dengan *Bed Visitor* namun sebelum *ID Bedge* ditukarkan kepada tamu, satpam menghubungi orang yang akan ditemui oleh tamu tersebut, setelah mendapat persetujuan maka satpam memberikan *ID Badge Visitor* tergantung area mana yang dituju. Untuk *Main Office* diberikan

Universitas Indonesia

warna putih, *Supply Chain* warna kuning, *Plant Area* warna merah, *Warehouse* warna biru. *ID Badge* terbuat dari kertas karton yang dilaminating bertuliskan lokasi, masa waktu kartu (6 bulan sekali diperbaharui), logo dan tanda tangan *security supervisor*. Adapun non kendaraan PT Arun NGL yang akan masuk diwajibkan mengurus *Daily Vehicle Pass*. *Daily Vehicle Pass* ini terbuat dari kertas karton berwarna putih yang dilaminating berisi kode identitas, masa waktu, tanda tangan *security supervisor* dan diberikan cap.

Pengendalian akses yang kedua terdapat pada pos *Main Gate* yang dijaga oleh 3 yang bertugas untuk mengecek, memeriksa kendaraan, orang dan barang yang akan masuk dan keluar pabrik sedangkan orang diwajibkan masuk melewati pintu *metal detector* dan digeledah kembali oleh petugas satpam begitu juga bila akan keluar diwajibkan dilakukan pemeriksaan kembali. Pada pos ini diperiksa *MRA*.

Pengendalian akses yang ketiga yaitu pos *PKK* yang dijaga oleh 3 orang satpam yang bertugas untuk mengecek, memeriksa kendaraan, orang dan barang yang akan masuk dan keluar pelabuhan khusus. Pada pos ini, orang yang akan masuk diwajibkan menukarkan *ID Badge* dengan *Badge* khusus *ISPS Code*.

Pengendalian akses yang keempat yaitu pos *warehouse* yang dijaga oleh 1 orang yang bertugas untuk mengecek, memeriksa kendaraan, orang dan barang yang akan masuk dan keluar gudang material pabrik.

Pengendalian akses yang kelima yaitu pos-1 yang dijaga oleh 1 orang yang bertugas untuk mengecek, memeriksa kendaraan orang dan barang yang akan masuk dan keluar area dalam pabrik menuju area perkantoran. Tetapi jalur ini khusus digunakan oleh sekuriti dan hal-hal yang insidental.

Pengendalian akses yang keenam yaitu pos-41 *pioneer camp* yang dijaga oleh 2 orang yang bertugas untuk mengecek, memeriksa kendaraan orang dan barang yang akan masuk dan keluar area *pioneer camp*. Saat ini area tersebut dialihfungsikan yang semula untuk perumahan menjadi lokasi pabrik air minum AINI Aqua dan pabrik Garmen. Pengendalian akses ke-7 sampai dengan ke-10 yaitu (pos-53, pos-54, pos *LPG*, pos *Bert-3*) adalah pos yang dijaga masing-masing 1 orang satpam. Pada masing-masing pos terdapat pintu alternatif keluar

masuknya pabrik, tetapi saat ini pintu tersebut tidak digunakan karena fokus dari pintu masuk area pabrik melalui pos *main gate*.

5.3.1.3 *Barrier*

Barrier atau penghalang fisik yang digunakan untuk menghalangi pihak-pihak yang berkepentingan masuk kedalam areal perusahaan adalah *barrier* yang sengaja dibuat oleh perusahaan diluar pagar perusahaan. Yaitu sungai mamplang yang berbatasan dengan desa ujung blang, terletak disebelah timur perusahaan yang berfungsi untuk mengatur ketinggian air pada saat banjir maupun untuk saluran buangan pabrik. Sungai tersebut mengintari dan berakhir pada sisi sebelah selatan sebagian area *plansite* (tidak mengintari keseluruhan lokasi *plansite*) selain sungai tersebut juga dibuat tanggul dan diatas tanggul dipasang pagar dimulai dari sebelah timur dan terputus di pintu masuk pos-54 selanjutnya bersambung kembali dan berakhir di pintu masuk pos-53. Baik sungai dan tanggul adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk merintang orang yang akan masuk. Selain barrier ini, didalam lingkungan perusahaan juga ditumbuhi rumput ilalang yang tinggi dan pohon kelapa umumnya berada di sebelah selatan, sedangkan pada sebelah utara dekat LPG ditumbuhi rumput ilalang dan pohon kayu. Untuk yang berbatasan dengan pagar dalam lingkungan dalam perusahaan ditanam pohon cemara yang sudah menutupi pagar mulai dari sebelah timur hingga selatan sebagian *plansite* sisanya pohon kayu yang sudah menutupi pagar. Untuk diluar pagar sebelah selatan sebagian ditanam pohon kelapa sawit milik PT Arun yang dikelola oleh BDI (Badan Dakwah Islam). Sedangkan untuk sebelah utara untuk lokasi kilang dan *train* dibatasi oleh pagar yang langsung berbatasan dengan laut.

5.3.1.4 *Fances*

Fances atau pagar yang digunakan oleh perusahaan terbuat dari pagar brc dan harmonika, pada ujungnya terdapat kaitan kawat tajam. Ketinggian pagar bervariasi, demikian juga kaitan kawat tajam. Antara besi penyangga dan besi penyangga berikutnya untuk brc disambung dengan baut. Kaitan kawat pada bagian atasnya, ada yang terdiri dari 6, 7 dan 8 kaitan kawat berduri. Untuk pagar harmonika terpasang disebelah timur *plansite*. Tinggi pagar $\pm 2,4$ M. Untuk bagian

sebelah selatan atau dekat jalan rancang tinggi pagar berkisar ± 170 cm dengan tambahan kawat berduri setinggi 45 cm.

Mengenai pohon yang menutupi pagar, berikut tanggapan dari Bapak Yus selaku *Supporting* PT Bina Nanggroe :

Safety keselamatan sekuriti keamanan, pelaksanaan tugasnya sering bertolak belakang. Ada titik point pekerjaan yang berbeda, itu banyak kejadian dilapangan seperti itu. Contoh masalah penghijauan, mereka menanam pohon tujuan unit *safety* adalah untuk penghijauan, mencegah dampak pabrik berupa gangguan suara (meredam) dan lain-lain. Dari segi sekuriti itu menjadi hambatan mereka menanam terus contoh kebun kelapa sawit punya BDI (punya PT Arun) tapi program *safety*, dari sekuriti menyulitkan kita, untuk susah mendeteksi, malam hari gelap. Memudahkan jadi tempat persembunyian orang. Saran saya setiap ada giat *safety* tapi sekuriti dilibatkan. Menanam boleh tapi jaraknya karena ini jaraknya terlalu rapat. Kelapa sawit ini ditanam juga pas didepan dan pioneer camp, dan sepanjang laut ditanam pohon pandan liar maksudnya tidak terjadi abrasi air laut. Dari sekuriti menyulitkan untuk kontrol sepanjang pagar. Untuk pagar yang digunakan adalah jenis BRC hampir keliling dan Harmonika terpasang di perbatasan dengan ujung blang sungai mamplang sekitar 200 meter yang belum terganti). Kalau saya melihat ini program manajemen sejak dulu dibuat dengan maksud sengaja agar tidak ada jarak antara masyarakat dengan PT Arun. Tinggi pagar BRC ini sekitar 2,4 meter. Kalau namanya proyek vital tidak seperti ini bahkan ada dibagi ring 1, 2 dan 3. Pagar ini tinggal digergaji / dipotong lalu masuk.

Inti wawancara dari *supporting* ini adalah unit *safety* tidak melibatkan unit *security* dalam programnya sehingga beberapa program *safety* justru dianggap sebagai permasalahan dibidang *security* seperti halnya program penghijauan dimana program tersebut justru menyulitkan *security* dalam melakukan pengawasan area.

Penulis juga menemukan 2 kasus terkait lemahnya kualitas pagar yaitu tanggal 9 Januari 2011 dimana pelaku memanfaatkan baut pengait antara pagar yang sudah lapuk dan tanggal 14 Januari 2011 dimana pelaku memotong dan mencuri besi tiang pagar. Tanggal 20 Januari 2011 pelaku memanfaatkan area kebun kelapa untuk menyembunyikan sementara hasil curiannya.

5.3.1.5 Kunci

Pintu gerbang, bangunan berikut ruang-ruang yang berada didalamnya menggunakan kunci. Dari hasil pengamatan penulis :

- a. Pintu gerbang PT Arun NGL secara keseluruhan menggunakan kunci gembok yang dililit oleh rantai. Kunci gembok yang digunakan merk

Universitas Indonesia

snostar berwarna kuning.

- b. Pada bangunan untuk ruang tertentu menggunakan kunci pengaman yang biasa jenis kunci *box lock* dan pada ruang khusus telah dipasang *key electronic* diantaranya :
1. *Main Office*. Tepatnya pada ruangan kantor khusus VPD, Manager dan Superintendent. Terpasang 2 unit yaitu dipintu masuk dan dipintu tangga darurat dekat ruangan VPD.
 2. Ruang *Technical* tempat berkantor engineering PT Arun NGL sebanyak 2 unit.
 3. *Workshop* IT tempat material pabrik terpasang 1 unit.
 4. Ruang OSO atau pabrik sulfur / SRU terpasang 2 unit.
 5. *Maintenance* terpasang 2 unit.

Untuk kunci gembok pintu gerbang berikut kunci pada ruang-ruang tertentu penyimpanannya dititipkan pada posko setelah jam dinas adapun lainnya tersimpan atau dibawa oleh karyawan sedangkan *key electronic*, aksesnya hanya pada karyawan tertentu. Berkaitan dengan kunci gembok yang digunakan oleh PT Arun NGL, berikut wawancara penulis kepada Bapak Yus selaku *Support* PT Bina Nanggroe :

Gembok yang kita gunakan warna kuning, memang tidak sesuai dengan standar sekuriti.

Inti wawancara dari *supporting* ini adalah kunci pengaman yang digunakan diakuinya tidak memenuhi *standard* sekuriti.

Penulis menemukan selama tahun 2010 terdapat 2 kasus gembok yang rusak yaitu pada tanggal 11 November 2010 dan 25 Desember 2010 dimana gembok sudah tidak dapat berfungsi dengan baik tepatnya di portal sebelah utara *line* pipa (areal luar *plansite*) dan gembok di B3 *Bunker flare area*.

5.3.1.6 Penerangan

Lampu penerangan atau *lighting* sangat menunjang pelaksanaan tugas tenaga sekuriti. Dengan adanya lampu penerangan dapat membantu tenaga sekuriti melakukan pengawasan visual areal proyek pengamanan. Sistem penerangan listrik yang digunakan oleh PT Arun NGL sudah standar artinya

mempergunakan lampu jenis mercury yang memiliki daya 1.000 watt yang terpasang pada posisi dan jumlah lampu mulai dari 2 arah hingga 4 arah untuk menerangi areal dalam dan luar perusahaan, pemasangan alat otomatis untuk menyalurkan arus listrik, pembangkit listrik berasal dari generator yang berbahan baku gas yang dikelola sendiri oleh PT Arun NGL.

Hasil pengamatan penulis ditemukan pada siang hari sebagian lampu masih dalam kondisi menyala seperti untuk wilayah train LNG sebelah utara, area tengah *plansite*, sebelah timur, selatan pada umumnya dan barat bahkan gedung *training* yang terletak tidak jauh dari pos *main gate*. Mengenai hal ini berikut wawancara dengan Bapak Yuswar *Supporting* PT Bina Nanggroe :

Untuk lampu penerangan PT Arun sudah dipasang alat yang bisa menghidup dan mematikan secara otomatis namun alat tersebut diakui memang ada yang mengalami kerusakan sehingga lampu ada yang tetap hidup selama 1X24 jam.

Tanggal 19 Januari 2011 terjadi peristiwa korsleting pada lampu. Tidak saja kondisi lampu pada siang hari yang masih dalam kondisi menyala bahkan ada yang ditemukan lampu dalam kondisi rusak atau kacanya pecah. Bahkan ada bagian area tertentu yang tidak bisa dimonitor karena terbatasnya penerangan. Berikut wawancara dari Bapak Firdaus Boang selaku investigasi PT Bina Nanggroe :

Kendala ada juga dipenerangan karena ada pada bagian areal tertentu yang tidak bisa kita monitor karena terbatasnya penerangan. Karena areal *plansite* sangat luas jadi lampu hanya dipasang ditempat-tempat yang sangat rawan. Jadi dipasang lampu sorot 2 sampai 3 bahkan 4 arah namun ada bagian - bagian tertentu yang penerangannya kurang (ada penerangan tapi kurang). Atau yang bagian kedalam tidak ada lampu sorotnya atau kadang-kadang putus balonnya / mati karena faktor usia lampu. *Flare area*, gate-46 agak kurang sampai ke belakang transport, selain penerangan rumput ilalang tinggi menghalangi pandangan (kita tidak bisa lepas pandangan), area *pioneer camp*, gate 55 sampai 56, lampu ada namun karena pohonnya sudah tinggi - tinggi menghalangi cahaya lampu. Tidak berfungsinya LPG dan *pioneer camp*. Dengan tidak berfungsinya aktivitas manusia di area tersebut sehingga orang mencari tempat yang sepi untuk melakukan pencurian / gangguan itulah masuk. Ada juga dipotong pagar, mereka masuk. Patroli rutin dilakukan tapi mereka menunggu kita lengah, mereka yang pantau kita.

Inti wawancara dari beberapa informan tersebut diatas adalah untuk penerangan sudah dipasang alat otomatis yang bisa mengalirkan dan mematikan arus listrik secara otomatis, namun beberapa alat tersebut mengalami kerusakan

sehingga dibiarkan menyala selama 1 X 24 jam. Penerangan pada area tertentu seperti *flare area* dan *gate-46* dianggap kurang termasuk area LPG yang telah ditinggalkan oleh pekerja bahkan telah banyak ditutupi oleh semak belukar dan pepohonan mengakibatkan penerangan menjadi terhalang.

Penulis juga mendapatkan kasus tanggal 9 Januari 2011 dimana petugas sekuriti bersama PKD saat mengecek laporan percobaan buka paksa pintu gembok pada areal kanal *labour shop* tidak ada lampu penerangan sehingga menyulitkan petugas melakukan pengecekan di area tersebut.

5.3.1.7 CCTV (*Closed Circuit television*)

CCTV adalah sistem komunikasi gambar online yang diperuntukkan bagi suatu area tertentu. Untuk PT Arun NGL terdapat 15 unit CCTV yang tersebar dan terpasang pada titik-titik tertentu, diantaranya:

- a. *pioneer camp*, kondisi baik,
- b. pos-61, kondisi baik,
- c. *fire LPG*, kondisi baik,
- d. *flare LPG*, kondisi baik,
- e. pos-53, kondisi baik,
- f. *XPLLP project*, kondisi baik,
- g. *O2 plane*, kondisi rusak,
- h. jalan "B" kondisi baik,
- i. *main gate*, kondisi baik,
- j. *warehouse* sebelah utara, kondisi rusak,
- k. *warehouse* sebelah selatan, kondisi rusak,
- l. pos depan, kondisi baik,
- m. *main office*, kondisi baik,
- n. pos-1, kondisi baik,
- o. pos-49, kondisi rusak.

Mengenai kondisi CCTV yang mengalami kerusakan, berikut wawancara penulis dengan Bapak Syamsul selaku *security supervisor* PT Arun NGL :

Sebenarnya memperbaiki CCTV itu tidak mahal, itulah saya kecewa dengan orang yang memasang CCTV itu meskipun programnya orang IT kita tetapi

Universitas Indonesia

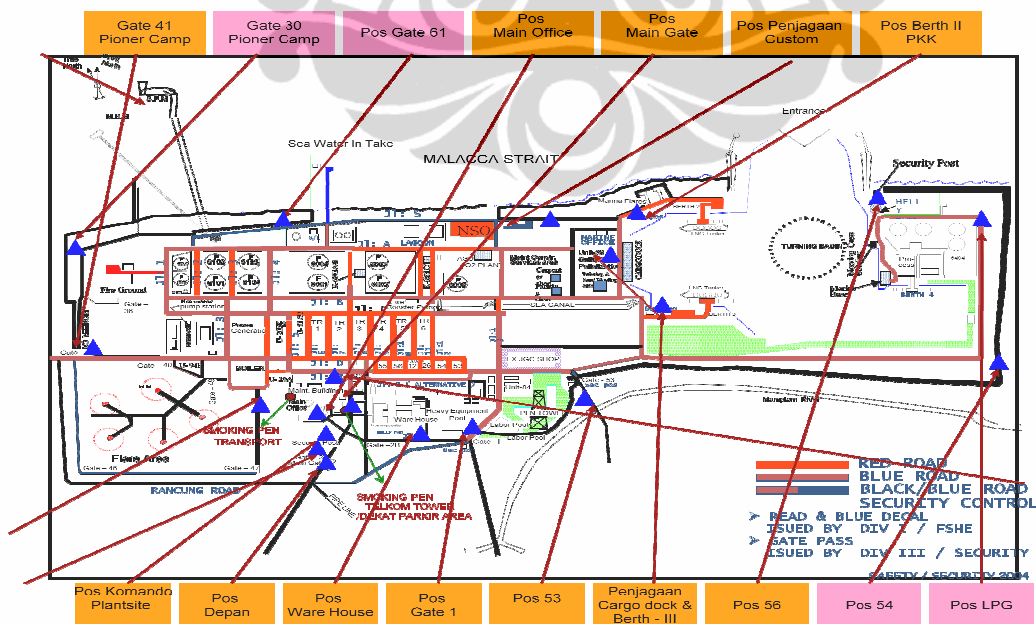
orang yang memasang *CCTV* adalah orang luar seakan meminta “V” dan barangnya cepat sekali rusak. Saya karena orang IT bisa saja saya cari usaha untuk memperbaiki alat itu tapi karena sistem atau aturan dan itu sudah ada yang menanganinya.

Inti wawancara dari *security supervisor* adalah pihak manajemen kurang serius dalam menanggapi permasalahan bidang sekuriti seperti halnya peralatan *CCTV* yang dibiarkan rusak dan tidak cepat dilakukan perbaikan.

5.3.1.8 Pos Jaga

Pos jaga digunakan untuk mengawasi wilayah-wilayah dilingkungan perusahaan. Hanya Pos LPG yang dibuat seadanya. Tidak semua pos jaga diisi oleh personel satpam, pos jaga dimaksud adalah Pos-30 dan Pos-52. Pos-30 adalah pos yang terletak di pojok sebelah utara *plansite* untuk menghalau pelaku yang akan masuk ke area SWI sedangkan pos-52 adalah pos dekat *flare area* tepatnya di sebelah selatan *plansite*. Dari keterangan petugas patroli sayuti bahwa area pengawasan pos-30 dan pos-52 sudah beberapa kali terjadi lolos pelaku pencurian. Untuk pos Pos-30 diawasi oleh Pos-41 sedangkan Pos-52 diawasi oleh patroli wilayah barat.

Berikut pos pengamanan PT Arun NGL untuk *plansite area* :



Gambar 5.3 Posisi Pos Pengamanan Pada Plansite Area

Sumber data : Site Koordinator BUJP PT Bina Nanggroe Tahun 2011

5.3.1.9 Alat Komunikasi

Alat komunikasi yang ada dilingkungan perusahaan adalah *HT*. Untuk *HT* total berjumlah 49 unit dengan rincian jenis MPX 88 berjumlah 30 unit dan *motorolla 960* berjumlah 19 unit. Untuk *plansite area* digunakan 20 unit *HT* yang pemanfaatannya sebagai berikut :

- a. Posko sebanyak 2 unit.
- b. *Main office* sebanyak 1 unit
- c. Pos depan sebanyak 1 unit.
- d. *Main gate* sebanyak 1 unit.
- e. *Pos new loading* sebanyak 1 unit.
- f. PKK sebanyak 2 unit.
- g. Pos-1 sebanyak 1 unit.
- h. *Warehouse* sebanyak 1 unit.
- i. Pos-53 sebanyak 1 unit.
- j. Pos-54 sebanyak 1 unit.
- k. Pos-56 sebanyak 1 unit.
- l. Pos LPG sebanyak 1 unit.
- m. Pos-41 sebanyak 1 unit.
- n. Pos-61 / *SWI* sebanyak 1 unit.
- o. *Marine patrol* sebanyak 1 unit.
- p. Patroli barat sebanyak 1 unit.
- q. Patroli timur sebanyak 1 unit.

Adapun kendala dalam pemanfaatan *HT* ini adalah *batrey* cadangan sehingga posisi *HT* selalu dalam kondisi *on* meskipun saat pengisian melalui *charger*. Ini dapat mengakibatkan usia pakai *batrey* menjadi lebih singkat. Terkait hal ini berikut wawancara peneliti dengan Bapak Yuswar selaku *support* PT Bina Nanggroe :

Cuma radio 80% pakai model lama, kesulitannya radio dipakai 1X24 jam, setelah 8 jam pemakaian mereka apllusan kapan ht di cas, solusi harus ada batrey cadangan. Sudah kita ajukan karena mahal sampai dengan sekarang belum dapat dipenuhi. Untuk radio HT on offnya tidak boleh nyala dalam kondisi di cas, karena mempendek usia pakai, bagaimana mau di cas sementara dari posko

Universitas Indonesia

sering memanggil. Harusnya standar perlengkapan petugas sekuriti melaksanakan patroli harus lengkap koperlanya termasuk sarana penerangannya. Untuk senter hanya pos-pos tertentu saja. Dikontrak hanya disediakan sekian biji, padahal sebenarnya harus lengkap dan melekat diperorangan. Program latihan komunikasi juga belum ada dilakukan.

Inti wawancara dari *supporting* ini baterai HT belum ada pengadaan baru sehingga dapat beresiko pada kesiapan tugas satpam adapun peralatan sekuriti yang melekat pada perorangan dan senter pada pos masih dianggap minim. Latihan komunikasi belum ada dilakukan.

Berikut *call sign* dari sekuriti *in-house* dan *out-sourch* :

Tabel 5.4 Data *Call Sign* Sekuriti PT Arun NGL

NO.	NAMA	JABATAN	CALL SIGN	KET
1	2	3	4	5
A	PT ARUN NGL			
1	Ir. FUAD BUCHARI	VICE PRESIDENT DIREKTUR	DELTA	

Tabel 5.4 Data *Call Sign* Sekuriti PT Arun NGL (Sambungan)

1	2	3	4	5
2	AGUS NURYASIN	FACILITIES SUPPORT & SECURITY SUPERINTENDENT	SYIWA	
3	SYAMSUL	SECURITY SUPERVISOR	GARUDA	
4	KHATAB	SECURITY OFFICER	BANGAU	
5	BAMBANG	DOCUMENT CONTROLLER	WALET	
6	M. HASAN	SHIFT CONTROLLER "A"	JAGUAR – 1	
7	M. ALI AFAN	SHIFT CONTROLLER "B"	JAGUAR – 2	
8	AGUS	SHIFT CONTROLLER "C"	JAGUAR – 3	
9	M. NASIR	SHIFT CONTROLLER "D"	JAGUAR – 4	
B	BUJP PT BINA NANGGROE			
1	H. SYAFRULLAH	SITE COORDINATOR	-	
2	DARISMAN	DEPUTY OPERASIONAL	MERPATI	
3	H. SAIFUDDIN	INVESTIGASI	CAMAR – 3	
4	FIRDAUS M. BOANG	INVESTIGASI	CAMAR – 4	
5	FAUZI	DETEKSI DINI	CAMAR – 1	
6	N. AKHYAR	DETEKSI DINI	CAMAR – 2	
7	YUSWAR	SUPPORT	CAMAR – 5	

Sumber data : unit *supporting* PT Bina Nanggroe Tahun 2011.

5.3.2 Lingkungan Fisik

5.3.2.1 Fasilitas Jalan dan Lingkungan Perusahaan

Kondisi jalan pada lingkungan perusahaan umumnya sudah cukup baik sebagian besar beraspal sedangkan untuk rute patroli sekuriti yang ada pada

sebelah timur yaitu Pos-56 sampai dengan sebelah selatan tepatnya Pos-53 sebagian masih ada yang jalan setapak. Pada kondisi cerah, dan cuaca hujan masih dapat dilalui dengan kendaraan.

5.3.2.2 Penataan Lingkungan

- a. Bagian timur perusahaan, tepatnya di area LPG dimana aktivitas produksi sudah tidak dilakukan sejak tahun 2000 atau ditinggalkan oleh pekerja. Rumput yang dibiarkan tumbuh tidak terawat dan pohon pinus yang berada didalam dan dekat pagar PT Arun telah menutupi pagar.
- b. Bagian selatan perusahaan, tepatnya pada bagian pagar dalam dan luar perusahaan terdapat rumput ilalang dan pohon cemara yang rimbun menutupi pagar dan menghalangi pandangan sampai dengan Pos-53. Didalam area perusahaan tepatnya mulai dari Pos-54 sampai di belakang area *bert-3* terdapat kebun kelapa dan rumput yang dibiarkan tumbuh tidak terawat.
- c. Bagian barat perusahaan, tepatnya dekat *flare area* pada bagian pagar dalam perusahaan terdapat pohon kayu yang menutupi pagar dan rumput ilalang ditambah lokasi tersebut dijadikan tempat pembuangan besi-besi bekas dan sampah plastik. Termasuk kebun kelapa yang tidak jauh dari lokasi *flare area*.

Penulis mendapatkan kasus pencurian tanggal 20 Februari 2011, dimana pelaku menyembunyikan hasil pencurian di lokasi kebun kelapa tepatnya di sebelah barat pabrik.

5.3.2.3 Sarana Parkir

Sarana parkir disediakan oleh perusahaan di tiga lokasi, untuk kendaraan roda empat yang tepatnya di area *main office* dan dekat pos *main gate* tidak jauh dari gedung *training centre* untuk lokasi parkir roda dua berada dekat pos *main gate* tidak jauh dari gedung *training centre* dan area luar *plansite*. Untuk ketiga lokasi parkir tersebut tidak ada petugas khusus satpam yang ditugaskan hanya dilakukan pantauan melalui patroli berjalan kaki.

Dari data kejadian yang ada sudah pernah terjadi pencurian sepeda motor tanggal 26 Agustus 2010 untuk ditahun 2009 pernah terjadi pencurian sepeda.

Penulis mengamati bahwa pengawasan terhadap sarana parkir belum dilaksanakan secara maksimal meskipun upaya yang sudah dilakukan itu sudah ada misalnya pemasangan spanduk untuk memasang kunci ganda dan pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh satpam pos *main gate* dan patroli barat.

5.3.3 *Level Security*

Upaya sekuriti yang diterapkan oleh PT Arun NGL adalah :

- a. CCTV terpasang pada 15 lokasi diantaranya *Pioneer Camp, Fire LPG, Flare LPG, Pos-61, Pos-53, XPLLP Project, Jalan "B", Main Gate, Warehouse* sebelah utara, *Warehouse* sebelah selatan, pos depan, *Main Office, Pos-1, Pos-49. O2 Plane*
- b. 6 (enam) pos pengendali akses diantaranya pos depan, pos *Main Gate, pos-1, pos Warehouse, pos PKK, pos-41*
- c. Koordinasi dengan kepolisian setempat.
- d. Rencana kontijensi diantaranya penanganan teroris pada pelabuhan melalui penerapan *ISPS code*, penanganan gas beracun dan kebakaran.
- e. Penerangan
- f. Back up kekuatan dari Sat Brimobda Kompi IV Jeulikat selaku pengamanan provit eksternal.
- g. *Simple physical barrier* berupa sungai mamplang pada sebelah timur perusahaan dan tanggul pada sebelah timur dan sebagian selatan perusahaan.
- h. *High security locks* berupa pemasangan 9 unit *Key Electronic* pada area tertentu diantaranya *Main Office 2 unit, Technical 2 unit, workshop IT 1 unit, SRU 2 unit* dan *Maintanance* terpasang 2 unit.

5.3.4 *Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)*

5.3.4.1 *Pembagian Area*

Pembagian area pengawasan sudah dilakukan diantaranya penempatan 15 pos penjagaan ditambah unit patroli barat dan timur termasuk *Marine Patrol* yang bertugas menjaga pelabuhan khusus guna mengantisipasi orang yang tidak berkepentingan masuk ke area secara *illegal*. 1 *Shift* setiap penugasan sebanyak 25

orang untuk mengawasi *plansite* PT Arun dengan luas 594 Ha. Berikut jumlah kekuatan personel dan penempatannya :

- a. posko sebanyak 3 orang terdiri dari *Shift Leader*, *Deputi Leader*, PKD,
- b. pos depan sebanyak 3 orang satpam,
- c. pos *Main Gate* sebanyak 3 orang satpam,
- d. pos *PKK* sebanyak 3 orang satpam,
- e. pos *New Loading* sebanyak 1 orang satpam,
- f. pos-1 sebanyak 1 orang satpam,
- g. pos *Warehouse* sebanyak 1 orang satpam,
- h. pos-52 sebanyak 1 orang satpam,
- i. pos-54 sebanyak 1 orang satpam,
- j. pos-56 sebanyak 1 orang satpam,
- k. pos LPG sebanyak 1 orang satpam,
- l. pos-41 sebanyak 1 orang satpam,
- m. pos-61 sebanyak 1 orang satpam,
- n. pos *Bert-3* sebanyak 1 orang satpam,
- o. patroli Barat sebanyak 1 orang satpam,
- p. patroli Timur sebanyak 1 orang satpam,
- q. *marine Patrol* sebanyak 1 orang satpam,

Penugasan satpam mengacu kepada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara BUJP PT Bina Nanggroe dengan PT Arun NGL, nomor : 1003-017-6 tanggal 21 Oktober 2010.

5.3.4.2 Pengawasan Lingkungan

Ada 7 pintu yang digunakan untuk akses masuk dan keluar *plansite* PT Arun NGL. Ke-7 pintu tersebut diantaranya :

- a. pintu pos-30 (tidak difungsikan),
- b. pintu pos-41 (difungsikan),
- c. pintu pos depan (difungsikan),
- d. pintu pos-1 (tidak difungsikan),
- e. pintu pos-53 (tidak difungsikan),

- f. pintu pos-54 (tidak difungsikan),
- g. pintu pos LPG (tidak difungsikan),

Dari ke-7 pintu tersebut hanya 2 pintu yang difungsikan yaitu pos depan dan *gate-41*, adapun lainnya hanya digunakan sebagai pintu alternatif atau dalam keadaan khusus pemanfaatannya. Jarak antara PT PIM dengan PT Arun berjauhan dan beda Kecamatan, lokasi PT Arun sendiri merupakan lokasi khusus yang agak berjauhan dengan pemukiman masyarakat, penggunaan alat *CCTV* pada area tertentu membantu penugasan sekuriti dalam hal pengawasan.

5.3.4.3 Citra / Image

Di areal dalam *plansite*, rumput dibiarkan tumbuh dan tidak terawat termasuk pohon-pohon yang rimbun menutupi pagar termasuk kebun kelapa yang tidak terawat, tumpukan besi-besi bekas dan sampah plastik dekat *flare area* menandakan penataan lingkungan belum dilakukan secara baik.

5.3.4.4 Lingkungan

Kasus bangunan liar yang dilakukan oleh masyarakat tanggal 11 Juni 2009 yaitu mendirikan bangunan diatas jalur line pipa air dan gas di desa Blang Mameh, bangunan liar di jalan Rancung tahun 2009 dan bangunan liar di Desa Lhoskala tanggal 15 Juli 2009. Bangunan liar tersebut didirikan diatas tanah yang masih menjadi aset perusahaan dan saat ini masih belum ada penyelesaian.

Idealnya perusahaan tidak memberikan ruang bagi pelaku yang membuat bangunan diatas tanah milik perusahaan.

Sistem komunikasi antara satpam dan hubungan dengan kepolisian sudah berjalan dengan baik (bantuan keamanan dalam keadaan darurat), adapun akses jalan keluar / masuk terbuka melalui pintu alternatif yang dijaga oleh pos-pos tertentu siap digunakan ketika memerlukan dalam kondisi darurat.

5.3.5 Upaya Taktis Pengamanan Proyek Usaha

5.3.5.1 Pengamanan Parimeter

Untuk wilayah kerja pengawasan sekuriti pada plansite PT Arun NGL mengacu kepada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara BUJP PT Bina Nanggroe dengan PT Arun NGL, nomor : 1003-017-6 tanggal 21 Oktober 2010.

Universitas Indonesia

- a. *buffer zone* (daerah penyangga), adalah daerah luar pagar *Plantsite* (*outer fence*) sebelah selatan sampai dengan rel kereta api,
- b. daerah terbatas, adalah daerah antara pagar sebelah luar dengan pagar *Plantsite*, serta daerah *Pioneer Camp*,
- c. daerah terlarang (Daerah Biru), adalah daerah di sebelah dalam pagar *Plantsite* dimana berlokasi perkantoran, perbengkelan, dan pergudangan,
- d. daerah tertutup (Daerah Merah), adalah daerah dimana peralatan utama/pendukung produksi berlokasi, seperti: *Train*; *Power Plant*; *LNG Tanks*; dan lain-lain. Daerah ini ditandai dengan tanda “*Battery Limit*” pada permukaan jalan masuk.

5.3.5.2 Penyelamatan Masa Depan / Proyek Usaha

- a. Unsur-unsur yang meliputi prioritas penyelamatan, cara evakuasi, siapa yang melaksanakan dan kemana dievakuasi.

Ditunjuk *fire warden* oleh pihak manajemen perusahaan disetiap area kerja perusahaan dengan maksud bila ada terjadi bencana / gangguan maka *fire warden* akan memberikan instruksi penyelamatan kepada karyawan yang bekerja diareal tersebut untuk mengevakuasi diri dengan segera ke titik berkumpul yang ditandai dengan bendera hijau, sebelumnya ditandai dengan sirine atau alarm tanda berbahaya. Selanjutnya tim evakuasi yang dijalankan oleh unit *safety* akan melakukan penyelamatan bila dijumpai korban dilokasi tersebut. Sedangkan pada setiap harinya untuk kontraktor dilakukan *safety talk* menyangkut keamanan dan keselamatan sedangkan untuk karyawan PT Arun dilakukan secara berkala. Prioritas penyelamatan adalah manusia.

- b. Penerimaan SDM

Berkaitan dengan proses penerimaan SDM untuk *inhouse* atau pegawai PT Arun NGL dan *out-sourch* berikut wawancara penulis dengan *HRD supervisor* PT Arun NGL dan *Site Koordinator* PT Bina Nanggroe.

Bapak Ardiansyah selaku *HRD Supervisor* PT Arun NGL :

Untuk rekrutmen saya ambil contoh dulu kami pernah rekrut operator untuk menjadi pegawai sebanyak 10 orang, awalnya pengajuan dari seksi tentang

Universitas Indonesia

rencana kebutuhan posisi jabatan yang kosong jadi disini ada namanya *form personal requisition* dalam formulir tersebut salah satunya berisi jabatan posisi yang kosong, berapa jumlahnya dll, dalam form tersebut harus ditandatangani dari seksi yang mengusulkan, kemudian divisi manajernya, *HR superintendent* dan VPD. Setelah itu dari HRD akan membuat proposal ke Presiden Direktur PT Arun di Jakarta mengenai alasan, sebab dan seterusnya karena menyangkut budget selama 1 tahun misalnya gajinya 3 juta bukan dihitung 3 kali 12 tetapi 3 kali 15 antara lain gaji, THR, PHK, cuti, kesehatan nah karena ada 10 orang yang diusulkan maka 10 dikali 15 artinya 150 juta itu perhitungan untuk setahun. Apakah ada uangnya kalau ada maka segera laksanakan tes. Setelah itu kami harus berhubungan dengan Disnaker. Koordinasi kepada Disnaker itu adalah melaporkan kalau kita ada mau terima pegawai karena di Disnaker itu ada bidang pengawasan tenaga kerja. Nanti mereka bertanya syaratnya apa saja lalu kita sebutkan, lalu ditanyakan pengumumannya dimana, dijawab oleh staf dari kami ditempat bapak pengumumannya, sedangkan yang melaksanakan tes adalah kita berkoordinasi dengan instansi, perguruan tinggi dan lain-lain. Adapun catatan persyaratan itu sudah ditentukan oleh PT Arun misal harus D3 Politeknik diutamakan yang telah memiliki sertifikat magang selama 1 tahun di PT Arun. Nanti semua hasil tes ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh PT Arun. Setelah oke maka dilaporlah hasilnya ke Disnaker selanjutnya Disnaker membuat pengumuman untuk dipanggil dan mendaftar ulang. Selanjutnya Disnaker dengan pegawai menandatangani kontrak yang namanya PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sesuai UU No. 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja yang berisi tentang hak dan kewajiban pegawai. Besok tinggal masuk kerja karena mereka sudah pernah dididik oleh PT Arun selama 1 tahun. Sedangkan pengembangan karir pegawai sudah diatur di PKB (Perjanjian Kerja Bersama) jadi pembinaan karir tergantung atasan masing-masing, saat ini pengembangan karir pegawai agak sulit tidak seperti dulu tetapi golongan tetap naik terus meski posisi jabatan tidak dapat, karena pengembangan karir itu disesuaikan dengan kondisi perusahaan. PT Arun berkembang pada tahun 1998 pada saat itu struktur organisasi besar, tetapi sekarang terbatas jabatan. Sedangkan untuk outsourcing itu ada tergantung dari perusahaannya dan kita tidak ada campur tangan mengenai hal itu. Yang jelas ada perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan kepada PT Arun dan perusahaan dengan pegawai.

Bapak Syafrullah selaku *Site Koordinator* PT Bina Nanggroe :

Untuk penerimaan Satpam saat ini tidak kita umumkan seperti yang dulu, berebut orang daftar satpam kalau ada satpam yang kita keluarkan. Saya paling hanya tes lari saja dilapangan.

Bapak Darisman selaku *Deputy Operasional* PT Bina Nanggroe :

Untuk naik *job* Satpam misalnya dari satpam jaga menjadi patroli.

Inti wawancara dari beberapa sumber informan diatas adalah untuk merekrut karyawan *in-house* terlebih dahulu diusulkan dari seksi yang membutuhkannya melalui *form personal requisition* yang berisi rencana

Universitas Indonesia

kebutuhan pengisian jabatan yang diperlukan, selanjutnya proposal tersebut diajukan ke manajemen untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan lalu dilakukan proses seleksi yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan beberapa komponen terkait adapun persyaratan kriteria calon ditetapkan oleh PT Arun NGL. Untuk pembinaan karirnya mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Adapun *out-sourch*, PT Arun NGL tidak mencampuri dalam proses seleksi penerimaan dan pembinaan karir SDM-nya.

c. Asuransi dan Supranatural

Berkaitan dengan asuransi dan penggunaan tenaga supranatural, berikut wawancara dengan *security controller* Bapak Khatab :

Aset PT Arun NGL adalah milik Pertamina, sedangkan untuk penggunaan tenaga supranatural belum ada diprogramkan di perusahaan ini termasuk latihan bersama antara karyawan dengan satpam belum ada termasuk antar Satpam perusahaan lain.

Penulis mengecek Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (PPP) antara BUJP PT Bina Nanggroe dengan PT Arun NGL, nomor : 1003-017-6 tanggal 21 Oktober 2010 bahwa untuk tenaga *out-sourch* sudah ada menyepakati mengikuti Jamsostek.

d. Alternatif Pengembangan dan Kemampuan Kekuatan

1. Alternatif pengembangan sendiri.
Program memobilisasi karyawan dalam menghadapi kontijensi belum ada dilakukan.
2. Alternatif gabungan kekuatan seprofesi
Menggabungkan kekuatan seprofesi satu proyek dengan proyek lain dalam menghadapi kontijensi dalam hal ini gabungan kekuatan satpam perusahaan lain belum ada dilakukan karena lokasi PT Arun dengan lokasi terdekat Perusahaan PT PIM berjauhan dan beda Kecamatan.
3. Gabungan dengan masyarakat sekitar.
Perlibatan masyarakat dalam pengamanan PT Arun NGL utamanya

dalam menghadapi kontijensi tidak ada dilakukan.

4. Koordinasi dengan instansi lain dalam hal ini kepolisian setempat

Berkenaan dengan hal tersebut berikut petikan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa informan.

Bapak Ir. Fuad Buchari selaku VPD PT Arun NGL :

Belum ada permintaan khusus untuk melakukan penilaian tentang efektifitas manajemen sekuriti fisik di perusahaan kami, karena kami sudah memiliki penilaian sendiri terhadap sekuriti *outsourcing*, namun hasil penilaian itu tidak sampai kepada saya mungkin hanya sebatas di forum manajer saja. Kalau untuk koordinasi tetap kita lakukan tapi untuk Kapolda yang baru ini belum dapat kita laksanakan karena bapak Kapolda saat itu lagi ada kegiatan, tetapi koordinasi dengan pak Kukuh Kapolres Lhokseumawe itu kita laksanakan. Kebijakan saya hanya melibatkan pengamanan eksternal dari Brimob untuk wilayah *plansite* untuk membantu penugasan sekuriti.

AKBP Kukuh, SH, S.Ik selaku Kapolres Lhokseumawe :

Hubungan koordinasi dengan PT Arun tetap berjalan dan saya sifatnya hanya melanjutkan dari Kapolres lama. Mereka bila ada permintaan pengamanan biasanya langsung disampaikan dan kita membantu seperti halnya unjuk rasa yang dilakukan oleh IKBAL tempo hari. Untuk masalah pembinaan kepada Satpam, kita sudah lakukan misalnya pelatihan terhadap satpam yang sudah diprogramkan oleh Polda.

Bripka Dali AB selaku Komandan Regu Brimob Pengamanan Obvit PT Arun NGL :

Kami berjumlah 10 orang untuk mengamankan aset PTA namun posisi kita standby 1X24 jam dan sifat penugasan hanya memback-up bila ada kejadian yang menonjol sesuai dengan permintaan dari sekuriti PTA. Adapun untuk di pos depan misalnya ada orang bandel yang tidak bisa ditertibkan oleh sekuriti maka kita yang turun untuk menertibkannya contoh tidak pakai helm, ID Bed dan seterusnya selain itu pada jam-jam tertentu seperti jam istirahat dan pulang kantor kita membantu sekuriti di mulut persimpangan antara jalan masuk / keluar PT Arun dengan jalan umum yang bertugas mengatur lalu-lintas atau sifatnya back - up keamanan saja. Untuk jasa kami diberi imbalan dari perusahaan satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah. Pengalaman yang telah lalu dan sekarang kami tidak pernah dibebankan untuk membuat laporan hasil penugasan pengamanan dari atasan kami. Selesai tugas ya sudah kami pulang untuk diganti regu yang baru.

Inti wawancara dari beberapa informan diatas terkait koordinasi kepada instansi terkait oleh pihak perusahaan adalah sudah terpelihara hubungan yang baik dengan manajemen puncak kepolisian setempat baik Kapolres dan Kapolda Khususnya termasuk melibatkan pengamanan provit sudah dilakukan, namun berkaitan dengan pembinaan teknis dan pengawasan oleh kepolisian kurang dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan.

5.4 Peran Kepolisian pada PT Arun NGL (Eksternal PT Arun NGL)

Peran kepolisian dalam hal ini dikaitkan dengan hubungan industrial dimana sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) perannya adalah dibidang stabilitas keamanan, menegakkan peraturan dan pembinaan serta pengawasan pada obyek vital.

5.4.1 Polsek Muara Satu

Polsek Muara Satu memberikan andil dalam penciptaan rasa aman dan keamanan dalam lingkungan perusahaan. Hal ini dikarenakan lokasi perusahaan berada di wilayah hukum Polsek Muara Satu sehingga dengan sendirinya apabila terjadi tindak kejahatan di lingkungan perusahaan maka pelaporannya ke Polsek Muara Satu. Penulis melakukan wawancara dengan Kapolsek Muara Satu Iptu Ichsan yang menjelaskan :

Saya baru menjabat menjadi Kapolsek di Kecamatan Muara Satu ini. Tetapi saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bila ada peristiwa kejahatan maka akan kami tindaklanjuti dengan laporan polisi selanjutnya melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan. Adapun penciptaan rasa aman di lokasi perusahaan pasti akan kami layani meskipun kemarin saya baru datang kesana dan bertemu dengan pak syamsul selaku security supervisor PT Arun NGL awalnya untuk silaturahmi. Untuk rencana unjuk rasa IKBAL ini, rencana sore hari ini akan saya kumpulkan diruang saya untuk membahas tindak lanjut kedepan agar pelaksanaan unjuk rasa berjalan damai. Saya sudah punya program untuk melakukan sambang ke PT Arun NGL. Untuk masalah pembinaan teknis dan pengawasan terhadap obyek vital itu bukan tanggung jawab Polsek, itu tanggung jawab Polres atau Polda.

Hal tersebut sesuai dengan beberapa upaya yang telah dilakukan Polsek Muara Satu demi terciptanya keamanan dilingkungan perusahaan. Upaya itu

Universitas Indonesia

meliputi tindakan preventif yang bersifat pencegahan sampai kepada tindakan represif yang bersifat penindakan. Adapun kedua tindakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1.1 Tindakan Preventif

Tindakan preventif atau tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Polsek Muara Satu antara lain :

a. Patroli rutin

Polsek Muara Satu dalam rangka mengamankan wilayah hukum Polsek Muara Satu pada umumnya dan PT Arun NGL pada khususnya dilaksanakan dengan melaksanakan patroli. Terkait dengan hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Kanit Polsek Muara Satu dan Kapolsek Muara Satu.

Aiptu Zuhelmi Koto selaku Kanit Patroli Polsek Muara Satu :

Kami melaksanakan patroli secara rutin utamanya dijalan utama Banda Aceh-Medan. Untuk masuk ke area perusahaan PT Arun tidak kita lakukan karena sudah ada pam provit yang bertugas disana walaupun kita punya kewenangan untuk masuk. Dalam pelaksanaan tugasnya hanya dilakukan oleh 2 orang menggunakan kendaraan patroli kijang.

Iptu Ichsan selaku Kapolsek Muara Satu :

Seperti yang saya sampaikan sebelumnya pak, bahwa kita memiliki keterbatasan dalam jumlah personel sehingga pelaksanaan patrolipun hanya dilakukan dua orang. Mengenai dukungan BBM dari dinas juga tidak mencukupi jadi kami lakukan selektif saja atau sesuai dengan kebutuhan.

Inti dari wawancara dari beberapa informan diatas berkenaan dengan tugas patroli Polsek Muara Satu adalah pelaksanaan tugas patroli dilaksanakan namun untuk masuk *plansite area* tidak dilakukan karena sudah ada petugas provit yang berada di PT Arun NGL dalam hal ini Brimob. Adapun dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada unit patroli terbatas termasuk jumlah personel yang akan melaksanakan tugas tersebut. Untuk itu pelaksanaan tugas patroli dilakukan secara selektif.

b. Implementasi Pemolisian Komunitas

Polsek Muara Satu dalam mengimplementasikan program pemolisian komuniti diwilayahnya sebagai berikut :

Briptu Khairil Azmi selaku Babinkamtibmas Polsek Muara Satu yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap Desa Batuphat Barat :

Untuk FKPM baru enam yang terbentuk di Kecamatan Muara Satu. Yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan Polmas oleh IOM baru Kanitnya. Saya agak sibuk pak karena saya juga bantu tugas di Serse. Sejauh ini untuk Desa Batuphat Barat sebatas kegiatan rapat desa. Untuk dari PT Arun kalau ada undangan dari Tuhapeut Desa Batuphat Barat diwakili oleh Humasnya.

Bapak Drs Hasbi selaku Tuhapeut Gampong Batuphat Barat :

Kegiatan lembaga adat ini biasa kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah ringan yang kiranya dapat kita tangani seperti masalah rumah tangga dan lain-lain. Setiap kegiatan kita undang dari PT Arun tetapi mereka kadang datang dan lebih banyak tidaknya, mereka diwakili pihak Humas PT Arun. Mereka tidak pernah menyampaikan permasalahan- permasalahan internal diperusahaan untuk diselesaikan di forum ini. Toh kalau ada masalah kita bantu untuk pecahkan.

Bapak Syamsul selaku *security supervisor* PT Arun NGL :

Ya, saya mengetahui Tuhapeut itu ada, tetapi kalau istilah Polmas itu baru saya dengar.

Inti wawancara dari beberapa informan diatas terkait dengan program pemolisian komunitas adalah program pemolisian komunitas belum berjalan didesa Batuphat Barat. Tidak semua memahami fungsi dan peranan pemolisian komunitas termasuk pihak perusahaan.

5.4.1.2 Tindakan Represif

Tindakan represif atau penindakan oleh kepolisian adalah langkah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan utamanya peristiwa yang terjadi di lingkungan perusahaan. Mengenai tindakan represif ini, penulis melakukan wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Muara Satu Brigadir M. Fadli yang mengatakan :

Untuk tahun 2010 dan 2011 kami tidak ada menerima laporan kejadian atau penyerahan kasus dari PT Arun NGL mereka secara kekeluargaan penyelesaiannya bahkan kalau bisa jangan sampai tahu orang luar, kasus bunuh diri yang di areal *community*-pun tidak ada mereka lapor ke kita. Kita saat minta data kasus bunuh diri itupun susah sekali mereka berikan padahal data yang diperlukan itu untuk melengkapi bahan laporan kami.

Bapak Firdaus Boang selaku investigasi PT Bina Nanggroe :

Universitas Indonesia

Selama tahun 2010 sampai 2011 tidak ada kejadian pak yang menonjol untuk dilaporkan atau diserahkan ke Polsek.

Wawancara dengan *security supervisor* PT Arun NGL Bapak Syamsul :

Pada prinsipnya saya membaca dan koordinasi dengan *superintendent* saya, pak apa perlu diantar ke polisi. Kalau semua masalah diserahkan ke polisi wah banyak sekali birokrasi. Dari polisi orangnya dipenjara, dan setelah dipengadilan kami harus pergi lagi kesana memenuhi undangan untuk menjadi saksi untuk memenuhi. Sebenarnya siapapun yang menangkap orang yang salah kasih polisi selesai. Takutnya sipelapor malah yang terikat dan kita terancam bila menjadi saksi. Oleh karena itu kalau masalahnya bisa diselesaikan secara internal maka lebih baik dipilih jalan itu dan benar-benar selektif bila akan diserahkan ke polisi.

Wawancara dengan Site Koordinator PT Bina Nanggroe, bapak Syafrullah:

Penanganan pencurian saat saya masih menjabat sebagai *security supervisor* tidak seperti sekarang ini. Kita sudah komitmen dengan Polsek untuk tidak melepas pelaku kejahatan, tetapi sekarang ini pihak manajemen bila ada masalah maka pelaku dilepas setelah tokoh masyarakat datang bersama keluarga untuk berdamai. Dampaknya tentu saja tidak memberikan efek jera dan mengundang pelaku yang akan berniat tidak baik pada perusahaan.

Inti wawancara dari beberapa informan diatas terkait koordinasi dan pelaporan kasus tindak pidana ke kepolisian setempat dalam hal ini Polsek Muara Satu adalah bahwa selama tahun 2010 hingga Maret 2011, belum ada kasus yang dilaporkan ke Polsek dengan alasan bahwa menyerahkan kasus pidana akan merepotkan pihak perusahaan terlebih bila menjadi saksi pelapor belum lagi ancaman yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

5.4.2 Polres Lhokseumawe

Berikut wawancara dengan Kasat Binmas Polres Lhokseumawe terkait tugas koordinasi, pembinaan teknis dan pengawasan oleh Polres.

AKP Ramli selaku Kasat Binmas Polres Lhokseumawe :

Belum ada kebijakan khusus yang diberikan oleh Polda terkait tugas Binmas. Laporan kejadian dari PT Arun NGL tidak ada ditembuskan kepada kita. Pelatihan satpam ada tapi baru dilakukan pada PT PIM.

Inti wawancara dari Kasat Binmas Polres Lhokseumawe adalah kebijakan dari Polda belum ada terkait tugas pembinaan teknis dan pengawasan. Laporan kejadian PT Arun NGL belum ada tembusan ke Polres.

Universitas Indonesia

5.4.3 Polda Aceh

5.4.3.1 Tugas Koordinasi, Pembinaan Tehnis dan Pengawasan pada PT Arun NGL

Berikut wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan terkait tugas Polda dalam melaksanakan tugas koordinasi, pembinaan teknis dan pengawasan pada PT Arun NGL

AKBP Isfar selaku Kasubdit Bin Satpam Dit Binmas Polda Aceh :

Saya akui belum pernah datang ke PT Arun, dan untuk audit SMP juga untuk propinsi Aceh belum bisa dilaksanakan karena menyangkut biaya yang tidak cukup dianggarkan di DIPA Polri dan masalah-masalah lainnya seperti KTA Satpam, pendidikan satpam yang harus ditanggung sendiri oleh BUJP itu. Kami juga tidak pernah mendapatkan tembusan apapun dari Mabes Polri tentang surat ijin Kapolri tentang BUJP yang sudah dikeluarkan termasuk BUJP yang dari luar Propinsi Aceh yang mungkin saja sudah diaudit oleh Mabes Polri jadi kita tidak bisa monitor. Adapun Perkap nomor 24 tahun 2007 tentang SMP juga belum disosialisasikan kalau saya diperintahkan untuk berangkat oleh Kapolri saya mau saja tapi gaji saya tidak cukup. Untuk acuan dalam melaksanakan pembinaan teknis hanya mengacu kepada Juklak dan Juknis, surat telegram dari Mabes. Dan untuk melibatkan satker lain dalam lingkungan polda untuk kegiatan pembinaan teknis dan anggaran juga tidak kita lakukan karena semuanya menyangkut anggaran, kebijakan khusus dari Kapolda Aceh terhadap tugas Dit Binmas menyangkut koordinasi, pembinaan teknis, dan pengawasan belum ada. Belum ada permintaan khusus dari PT Arun tentang pembinaan teknis atau pengawasan pada sekuritinya.

AKBP Heri Heriadi selaku Wadir Pam Obvit Polda Aceh :

Saya belum pernah ke PT Arun dan tentunya kita belum ada MoU dengan PT Arun, yang jaga dari Polres namun saat ini tidak ada laporan yang ditembuskan kepada kita padahal saya sudah sampaikan ke Kapolresnya karena kalau ada apa-apa yang ditegur ke Dit Pam Obvit juga karena PT Arun termasuk obvit yang harus diamankan. Karena keterbatasan anggaran dan sarana prasarana itulah kegiatan supervisi dan lain-lain belum sepenuhnya bisa dilaksanakan utamanya ke obyek vital karena anggaran kita masih belum penuh berdiri sendiri dan karena struktur baru inipun saya masih meraba-raba. Saya hanya dengan staf disini 10 orang dan personel yang mengamankan obvit berasal dari anggota Dit Samapta, Polres, Brimob, Pol Air dan TNI, selain keterbatasan dibidang anggaran dan personel adalah menyangkut sarana dan prasarana. Atensi dari Kapolda Aceh terkait tugas pam obvit belum ada. Mengenai melibatkan satker dari Dit Binmas juga belum ada, itulah saya bilang satpam yang bertugas di pam obvitkan perlu diberikan pengarahan tentang pam obvit juga oleh kita entah bagaimana tapi selama ini tidak pernah ada dari Dit Binmas untuk meminta kita melakukan itu. Rata - rata ini masalah perut, takut rejekinya diambil mungkin padahal inikan sebenarnya tanggungjawab bersama membina satpam.

Universitas Indonesia

Bapak Rantau selaku PNS Dit Binmas Polda Aceh :

Sejauh ini pak belum ada satker yang dilibatkan hanya dari kita saja, dulu kalau audit BUJP yang melaksanakan paling bertiga dari Dit Binmas juga.

Bapak Syamsul selaku *Security Supervisor* PT Arun NGL :

Orang Polda belum pernah datang untuk melakukan pembinaan ataupun pengawasan disini, kalau untuk orang Polres paling Kabag Binamitranya tapi untuk Kabag Binamitra yang baru ini belum pernah datang. Sudah sering kita sampaikan pak kalau mereka datang untuk bina kami tapi jawaban tindakan dari mereka juga tidak ada. Paling ulang tahun Satpam tet-tet-tet makan *snack* lalu pulang. Mana mungkin pak kita datang ke Polres untuk minta lakukan pembinaan karena kita ini dibawah polisi, mereka tinggal instruksikan dan kami tinggal laksanakan saja. Adapun PPG sekuriti tidak kita libatkan penyusunannya dari pihak kepolisian karena hal itu menyangkut rahasia perusahaan.

Bapak Firdaus Boang selaku Investigasi PT Bina Nanggroe :

Harapan saya polisi harus lebih proaktif, lebih tajam. Seharusnya binamitra harus punya tabulasi oh bulan ini PT Arun harus diberikan penyegaran pam swakarsa, bawa slide paparkan, bila terjadi suatu kasus maka penanganannya bagaimana, kalau begitu ada ikatan polri sehingga terkesan benar-benar bermitra.

Inti wawancara dari beberapa informan diatas terkait tugas koordinasi, pembinaan tehnik dan pengawasan pada PT Arun NGL oleh Polda Aceh adalah Polda Aceh belum pernah melakukan kegiatan supervisi, sambang, koordinasi yang dilakukan oleh Dit Binmas dan Obvit, audit Sistem Manajemen Pengamanan (SMP), laporan dari Polres tentang Obvit PT Arun juga tidak ada, koordinasi antara Dit Binmas dan Obvit belum dilakukan, surat tembusan dari Mabes Polri untuk ijin operasional BUJP tidak ada serta permasalahan KTA Satpam yang dinilai oleh Polda menjadi kendala untuk pengurusan (menyangkut biaya), sosialisasi Perkap 24 tahun 2007 tentang SMP belum dilakukan dan kendala dibidang dukungan anggaran dan sarana prasarana.

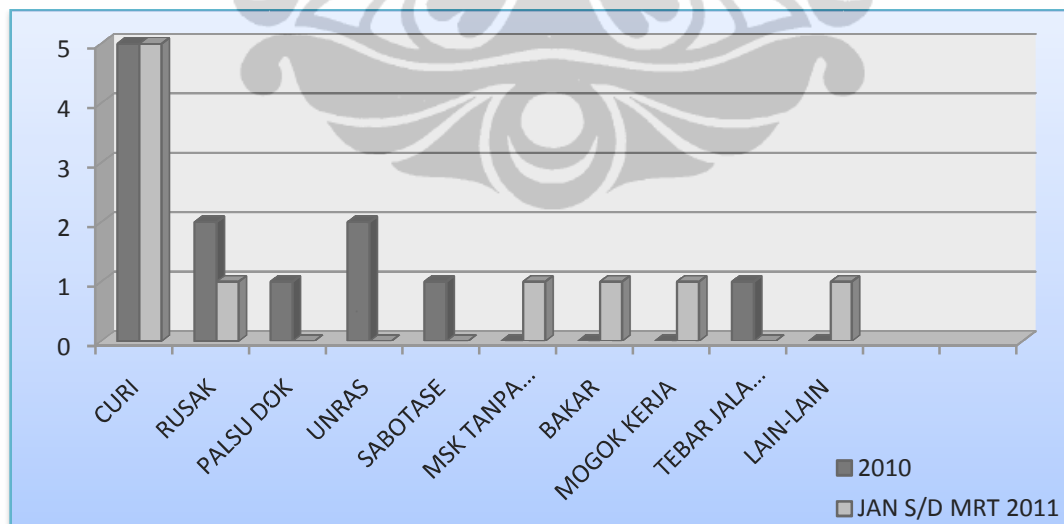
BAB VI

ANALISA DAN PEMBAHASAN

PT Arun NGL adalah obyek vital yang berisiko tinggi yang harus dilindungi dengan baik agar terhindar dari ancaman kerugian (*loss prevention*). Dikatakan berisiko tinggi karena selain bahan bakunya adalah gas alam cair yang mudah terbakar, juga bila aktivitas produksinya terganggu maka akan mempengaruhi banyak kepentingan. Salah satu sistem pengamanan yang diterapkan pada PT Arun NGL adalah sekuriti fisik.

6.1 Analisa Gangguan Keamanan

Dari Tabel 5.2 maka dibuat grafik gangguan keamanan untuk mempermudah dalam membaca data kejadian. Berikut grafik gangguan keamanan pada PT Arun NGL



Gambar 6.1 Grafik Gangguan Keamanan Tahun 2010 s/d Maret 2011 PT Arun NGL

Sumber data : Laporan Bulanan BUJP PT Bella Prayatama Tahun 2010 dan BUJP PT Bina Nanggroe Tahun 2010 dan 2011 (catatan : sudah diolah kembali)

Dari Gambar 6.1 terlihat bahwa data gangguan keamanan selama tahun 2010 terdapat 12 kasus sedangkan selama bulan Januari hingga Maret tahun 2011 terdapat 10 kasus. Kasus pencurian adalah kasus kejahatan yang frekwensinya tinggi dibanding kasus lainnya baik yang terjadi pada tahun 2010 maupun tahun 2011 dan grafik kasus pencurian menunjukkan jumlah kasus sama antara tahun 2010 dan tahun 2011, hal ini menandakan bahwa sistem pengamanan fisik dalam mencegah aset dari kehilangan belum optimal dilaksanakan. Gangguan keamanan yang terjadi secara tidak langsung menunjukkan kualitas dari penyelenggaraan sistem pengamanan suatu perusahaan. Kasus pencurian meskipun tidak mempengaruhi secara langsung kepada aktivitas produksi perusahaan namun tetap saja merugikan aset pada perusahaan karena pada prinsipnya semua aset pada Kilang Arun terdata dan milik Pertamina. Kasus unjuk rasa yang terjadi meskipun frekwensinya kecil, namun dari beberapa informan bahwa unjuk rasa tersebut justru mengganggu kenyamanan bekerja karyawan karena terhalang aktivitasnya untuk bekerja pada PT Arun NGL. Sejauh ini upaya penyelesaian sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Hasil keputusan akhir bahwa Gubernur Aceh memberikan janji kepada warga masyarakat tergusur Blanglancang dan Rancong bahwa *resettlement* akan direspon melalui suatu keputusan dan kebijakan sesuai dengan ketentuan dan disalurkan melalui mekanisme yang akan dibahas pada akhir Bulan Juni atau awal bulan Juli 2011.

Kasus tindak pidana yang terjadi selama kurun waktu 2010 hingga Maret 2011 belum ada dilaporkan kepada Polsek Muara Satu. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen PT Arun NGL tidak mematuhi Perkap Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan, pasal 48 ayat (2) yang menyebutkan bahwa apabila suatu peristiwa / kejadian sudah memenuhi unsur-unsur pidana umum, maka wajib pada kesempatan pertama dilaporkan kepada satwil kepolisian setempat dan membuat laporan selaku saksi pelapor. Hal ini juga telah diatur didalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 1003-017-6 pada kolom rincian pekerjaan yang menyebutkan melaporkan kasus yang terjadi pada kepolisian setempat setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab keamanan PT Arun NGL. Penegakan hukum kepada pelaku kejahatan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan. Kendala

pihak manajemen perusahaan (internal) untuk tidak melaporkan kepada kepolisian disebabkan oleh keyakinan bahwa pelayanan kepolisian yang diberikan kepada masyarakat belum maksimal khususnya perlindungan yang diberikan kepada saksi pelapor dan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh kepolisian kurang kepada masyarakat, sehingga permasalahan kasus pidana sepanjang dapat ditangani secara internal maka sebaiknya penyelesaian masalah dilakukan secara internal perusahaan.

Munculnya lapak-lapak besi bekas pada sekitar kawasan PT Arun NGL justru memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan *illegal* pada aset perusahaan karena lapak besi bekas menjadi motivasi untuk mencari uang dengan menjual hasil curian aset Kilang Arun. Menjadi potensi munculnya kejahatan karena tidak dilakukan penggalangan dengan baik. Dari beberapa kasus pencurian yang berhasil ditangkap, hasil curian rata-rata dijual ke lapak besi bekas tersebut. Namun sangat disayangkan penadah dalam hal ini penampung besi bekas tidak disentuh oleh hukum karena peristiwa tersebut tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat melainkan diselesaikan secara internal.

Idealnya gangguan keamanan pada PT Arun NGL seharusnya bisa ditekan karena PT Arun NGL adalah salah satu obyek industri yang berisiko tinggi bilamana terganggu. Sebagaimana target sekuriti dalam fungsi perusahaan yaitu nihil kejadian buruk (*zero incident*), nihil kecelakaan (*zero accident*), nihil kehilangan anggaran (*zero budget loss*), nihil kehilangan waktu (*zero time loss*), dan *full compliance* / sesuai.

6.2 Analisa Program CSR (Corporate Social Responsibility)

Umumnya program CSR (*Corporate Social Responsibility*) masih merupakan program CD (*Community Development*) atau transisi menuju program CSR (*Corporate Social Responsibility*). CSR sebagai salah satu program kontrak sosial dengan masyarakat belum melibatkan *outside stakeholders* dalam perencanaannya sehingga dianggap oleh sebagian masyarakat masih belum menyentuh sasaran yang diinginkan.

Dari beberapa informan perusahaan yang penulis wawancarai, pihak manajemen perusahaan menyadari bahwa program *CSR* adalah program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar, namun program ini dianggap sebagai pemborosan dan memberikan dampak ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan serta tidak memberikan manfaat ketika perusahaan mengalami permasalahan dibidang keamanan. Menurut penulis, peran serta masyarakat sekitar terhadap penciptaan rasa aman dilingkungan perusahaan melalui program *CSR* belum maksimal dilaksanakan sehingga ada kecenderungan program *CSR* dianggap oleh perusahaan hanyalah sebagai beban permasalahan yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Idealnya program *CSR* seyogyanya juga dapat menguntungkan perusahaan khususnya dibidang keamanan. Program *CSR* yang baik diantaranya perusahaan sudah mampu melakukan pemberdayaan kekuatan yang melibatkan masyarakat sekitar dengan indikatornya antara lain respon atau tanggap terhadap ancaman yang akan terjadi pada PT Arun NGL dengan melaporkan informasi kepada pihak manajemen, memberikan saran penciptaan rasa aman dilingkungan perusahaan maupun perumahan karyawan oleh masyarakat, ronda kampung menjaga lingkungan disekitar lokasi perusahaan dan perumahan karyawan, bersama manajemen perusahaan aktif menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi misalnya penanganan unjuk rasa melalui jalan perundingan dan bilamana memungkinkan membantu pengamanan saat unjuk rasa terjadi dan lain sebagainya.

6.3 Analisa Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik Pada PT Arun NGL

6.3.1 Manajemen Satpam

6.3.1.1 Perencanaan

Perencanaan mengidentifikasi komitmen-komitmen terhadap tindakan-tindakan yang ditujukan untuk hasil-hasil masa yang akan datang. Termasuk dalam perencanaan pada manajemen dalam penelitian ini antara lain sistem administrasi, sarana dan prasarana tugas yang mendukung.

a. Sistem administrasi

1) Sumber satpam

Satpam pada PT Arun NGL adalah satpam permanen namun statusnya adalah *out-sourch* yang berada dibawah naungan BUJP PT Bina Nanggroe, tetapi satpam permanen bukan bersumber dari personel BUJP PT Bina Nanggroe karena setelah masa kontrak dengan BUJP PT Bina Nanggroe maka secara otomatis akan dititipkan lagi oleh manajemen PT Arun NGL kepada BUJP yang menang tender berikutnya. Artinya BUJP hanya bersifat persyaratan administrasi. Secara aturan hukum tidak ada yang mengatur tentang satpam permanen yang dititipkan pada BUJP karena secara prosedur setiap personel Satpam *out-sourch* PT Arun NGL, saat pergantian BUJP juga diwajibkan untuk memenuhi syarat yang sudah ditentukan salah satunya membuat permohonan / lamaran kerja kembali pada BUJP pemenang tender. Perkap Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan pasal 54 ayat (5), hanya mendefenisikan BUJP yang bergerak dibidang Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (*Guard Services*) adalah memberikan jasa berupa penyediaan tenaga Satpam untuk melakukan pengamanan. Dapat diartikan bahwa sumber satpam berasal dari BUJP namun tidak menjelaskan rekrutmen satpam itu sendiri berasal dari mana. Penggunaan satpam permanen yang berstatus *out-sourch* memiliki keuntungan, selain murah, SDM sudah diketahui sehingga tidak perlu penyesuaian lagi, mengenal medan penugasan, tidak memerlukan biaya besar untuk mendidik satpam karena hampir keseluruhan sudah mengikuti pendidikan dasar, mengetahui modus operandi pelaku kejahatan, mengetahui titik-titik rawan yang harus diwaspadai. Namun secara rutin manajemen PT Arun NGL menyiapkan dukungan anggaran pendidikan dan latihan satpam *out-sourch* berikut peralatan sekuriti sebagaimana diatur didalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, lain halnya

bila satpam *out-sourch* murni berasal dari BUJP dimana biaya pendidikan dan pelatihan disiapkan oleh BUJP tersebut sedangkan pengadaan peralatan berasal dari BUJP yang bergerak dibidang jasa penyediaan peralatan.

Satpam yang bertugas untuk menjaga *plansite area* & *community area* dengan total luas 1.897 Ha (*plansite area* 594 Ha & *community area* 1.303 Ha) adalah sebanyak 188 orang. 188 orang tersebut dibagi menjadi 8 *shift* dengan rincian masing-masing *shift* terisi 25 orang untuk *plansite area* dan 20 orang *community area* setiap bertugas. Untuk *plansite area* dengan luas 594 Ha, dijaga oleh 25 orang adalah kondisi yang tidak ideal dilakukan. Idealnya adalah 1 Ha diawasi oleh 10 orang satpam, artinya $594 \text{ Ha} \times 10 \text{ orang} = 5.940$ satpam untuk menjaga aset *plansite area*. Menurut penulis, terbatasnya jumlah personel untuk menjaga aset adalah sebagai langkah penghematan (menekan *cost*). Namun terbatasnya jumlah personel satpam tentu akan mempengaruhi kinerja organisasi. Hal ini sudah dikategorikan sebagai proses yang tidak baik (tidak efisiensi) dalam perencanaan manajemen dimana jumlah personel yang ada tentu tidak sebanding dengan luas area yang diawasi. Tidak efisiensinya Satpam akibat minimnya jumlah Satpam yang ada, akan mempengaruhi dari efektifitas sistem pengamanan perusahaan. Kendalanya adalah dukungan anggaran sekuriti yang harus menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Saat ini perusahaan sudah mengalami penurunan aktivitas produksi akibat menurunnya pasokan gas dari *Exxon Mobile*. Dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah jumlah Satpam yang terus menurun. Idealnya jumlah Satpam harus memenuhi standar, tetapi kondisi tersebut tidaklah memungkinkan. Untuk itu disarankan agar jumlah satpam mendekati dari jumlah ideal. Perlu dilakukan penambahan jumlah Satpam sebanyak 16 orang untuk setiap Shiftnya. Pos yang perlu dilakukan penambahan personel sebanyak

1 orang diantaranya pos-53, pos-54, pos LPG, pos-56, pos-61, pos *warehouse*, pos-1, sedangkan pos yang perlu dilakukan penambahan personel sebanyak 2 orang yaitu pos-30, pos-53, pos baru (antara pos-53 dan pos-54), patroli wilayah barat, timur dan petugas parkir sebanyak 1 orang.

Penggunaan satpam *out-sourch* disamping memiliki kelebihan, juga memiliki kekurangan yaitu mental satpam. Seperti halnya yang terjadi pada tanggal 8 September 2010, dimana hasil dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelaku, bahwa anggota Satpam *out-sourch* terlibat dalam peristiwa pencurian tersebut (BAP terlampir). Menurut penulis penggunaan satpam *out-sourch* oleh manajemen PT Arun NGL adalah sebagai upaya menekan biaya (*cost*) atau langkah penghematan.

Agar satpam memiliki kinerja yang baik, maka Deputi Operasional menerapkan sistem manajemen melalui beberapa program. Program dimaksud adalah berupa perencanaan untuk menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan dapat dianggap juga sebagai suatu kumpulan keputusan - keputusan, dalam hubungan mana perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan-keputusan sekarang. Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur yang terbaik untuk mencapainya. Beberapa program tersebut diantaranya :

(a) Rencana penempatan satpam

Rencana penempatan satpam harian telah didelegasikan tugasnya kepada *Shift leader* oleh Deputi Operasional. Rencana penempatan satpam harian diberlakukan kepada satpam yang bertugas pada pos jaga dan petugas patroli, khusus patroli diberlakukan seminggu sekali. Adapun rencana penempatan satpam

Universitas Indonesia

untuk pergantian posisi area penugasan (*plansite area & community area*) adalah kewenangan dari Deputi Operasional. Secara ideal hal ini sudah cukup baik karena memiliki manfaat yaitu penyegaran untuk menghilangkan kejenuhan anggota, meningkatkan pengalaman kerja, tidak terbaca oleh lawan (pelaku kejahatan) sistem pengamanannya dan utamanya adalah menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh satpam. Namun rencana penempatan satpam ini tidak dimasukkan kedalam rencana kegiatan unit dimana rencana kegiatan satpam tersebut seharusnya dibuat dan tercantum dalam panel data baik harian, mingguan dan bulanan. Bukan penempatan satpam saja yang tidak disusun dalam rencana kegiatan unit satpam termasuk rute patroli oleh petugas patroli. Rencana kegiatan satpam ini berfungsi untuk membantu organisasi mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan selain itu juga berfungsi sebagai sarana kontrol pimpinan. Menurut penulis, tidak dibuatnya rencana kegiatan satpam akan dapat menyebabkan pemborosan sumber daya baik SDM dan logistik karena bekerja tanpa ada perencanaan kerja. Dampak yang ditimbulkan dengan tidak dibuatnya rencana kegiatan adalah satpam terjebak dalam kegiatan rutinitas, mematikan inovasi, tidak tercapai target pencapaian program, manajemen PT Arun NGL tidak memiliki data pendukung untuk mengontrol kegiatan satpam *out-sourch*. Artinya sudah terjadi proses yang tidak baik dalam perencanaan manajemen (tidak efisiensi). Tidak efisiensinya manajemen satpam maka berpengaruh pada efektifitas sistem pengamanan. Kendalanya adalah manajemen puncak belum memahami fungsi dari pembuatan rencana kegiatan dan analisa evaluasi. Idealnya program kegiatan direncanakan oleh menejer puncak PT

Arun NGL sebagai penentu kebijakan selanjutnya dijadikan pedoman bagi pelaksana dilapangan dalam hal ini satpam *out-sourch* yang dijabarkan dalam bentuk rencana kegiatan harian, mingguan, bulanan. Kewajiban membuat rencana kegiatan satpam adalah mengacu kepada Perkap Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan pasal 51 yang mengatur tentang ketentuan produk rencana kegiatan.

(b) Pengisian buku jurnal dan register

Pengisian buku jurnal dan register surat, orang dan barang adalah salah satu bagian dari proses perencanaan karena secara rinci semua kegiatan tercatat dengan baik selain itu sebagai bentuk kesiapan petugas yang akan melaksanakan tugas selama waktu yang sudah ditentukan termasuk acuan bagi petugas baru. Pengisian buku jurnal pada pos penjagaan dibuat, namun pada petugas patroli tidak dilakukan termasuk register tamu pada posko tidak dilakukan. Menurut penulis, tidak ditugaskannya petugas patroli mengisi buku jurnal termasuk tidak dilakukannya register tamu di posko adalah bentuk tidak tertibnya administrasi satpam. Secara tehnis, petugas patroli yang tidak membuat buku jurnal dan satpam pada posko yang tidak melakukan register tamu, termasuk di kategorikan sebagai proses yang tidak baik dalam perencanaan. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah tidak ada acuan bagi perencanaan tugas dimasa mendatang (anev) dan tidak ada bukti otentik bagi *supervisor* sebagai sarana fungsi kontrol. Idealnya pengisian buku jurnal diberlakukan juga kepada petugas patroli dan register tamu pada posko dilakukan.

2) Ijin operasional BUJP

Ijin operasional BUJP adalah salah satu bentuk ketentuan yang

Universitas Indonesia

diberlakukan oleh suatu instansi sebagai tanda pengakuan atau legalitas menjalani usaha karena sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan kepada suatu badan hukum yang bergerak dibidang usaha jasa pengamanan. Kenyataannya BUJP PT Bina Nanggroe belum memiliki ijin operasional BUJP dari Kapolri yang dikeluarkan oleh Dit Binmas Mabes Polri namun sudah melaksanakan aktivitas usaha sejak bulan Oktober 2010. Artinya menejer puncak PT Arun NGL tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dimana setiap BUJP diwajibkan memiliki surat ijin operasional dari instansi yang berwenang sebelum melaksanakan kegiatan operasional disuatu obyek industri. Kendala bagi pihak manajemen PT Arun NGL (internal) adalah belum memahami tentang fungsi surat ijin operasionalisasi BUJP, karena sosialisasi Perkap Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan khususnya pada pasal 52 perihal surat ijin operasional BUJP dari Kapolri belum dilakukan oleh Dit Binmas Polda Aceh. Idealnya BUJP paham tentang kewajibannya dan *user* mengetahui ketentuan yang sudah ditetapkan sehingga dalam proses tender, surat ijin operasional BUJP dijadikan sebagai syarat utama sebelum melaksanakan aktivitas pengamanan di PT Arun NGL. Ijin operasional terkait dengan administrasi sebagai wujud pengakuan atas legalitas kompetensi suatu badan usaha. Tidak memiliki ijin operasional maka kualitas manajemen yang diberikan kepada Satpam *out-sourch* tentu akan mempengaruhi kinerja Satpam tersebut. Proses yang sudah tidak benar (tidak efisiensi) akan mempengaruhi efektifitas sistem pengamanan fisik PT Arun NGL.

b. Sarana dan prasarana tugas yang mendukung.

Terbatasnya fasilitas pendukung pada pos maupun perlengkapan perorangan pada Satpam akan mempengaruhi kinerja satpam selain itu tingkat risiko / ancaman yang dihadapi oleh satpam akan lebih tinggi karena terbatasnya alat untuk mendukung tugas. Terbatasnya fasilitas pendukung pada pos maupun

perlengkapan perorangan sebagai akibat dari minimnya dukungan anggaran sekuriti. Dimana anggaran sekuriti harus menyesuaikan dengan anggaran umum perusahaan dimana perusahaan saat ini sudah mengalami penurunan aktivitas produksi. Idealnya sarana dan prasarana pada pos termasuk perlengkapan perorangan Satpam tercukupi karena hal tersebut sangat vital bagi kelancaran tugas Satpam. Acuanya pada Perkap Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan pasal 32 yang mengatur tentang kelengkapan lain satpam. Sarana dan prasarana pada pos termasuk kelengkapan perorangan pada Satpam disarankan untuk dicukupi secara bertahap dan dijadikan sebagai barang inventaris. Sarana dan prasarana pada pos termasuk kelengkapan perorangan Satpam yang terbatas adalah salah satu kelemahan dalam mendukung tugas Satpam, dimana Satpam tidak dapat bertugas secara maksimal. Ini terkait dengan metode kerja yang tidak baik (tidak efisiensi) sehingga mempengaruhi efektivitas sistem pengamanan fisik PT Arun NGL.

6.3.1.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah mengharmoniskan suatu kelompok orang-orang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan kemampuan-kemampuan kesemuanya kesuatu arah tertentu. Pengorganisasian adalah salah satu yang dilakukan oleh menejer dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kompetensinya guna mendukung pada tujuan organisasi. Beberapa kegiatan dalam pengorganisasian pada proses manajemen adalah :

a. Struktur Organisasi Satpam

Membagi tugas personel sesuai dengan kompetensinya kedalam posisi jabatan adalah penting untuk mempermudah pencapaian sasaran atau tujuan dari organisasi. Struktur organisasi adalah kunci jawabannya. Satpam *in-house* maupun *out-sourch* masing-masing memiliki struktur organisasi berikut job description masing-masing namun kapasitas satpam *in-house* yang berjumlah 7 personel tersebut lebih terfokus pada fungsi pengawasan dan perantara kebijakan manajemen PT Arun NGL sedangkan satpam *out-sourch* lebih terfokus kepada pelaksana operasional dan tugas staf. *Job descirption* satpam *out-sourch* tercantum pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.

b. Kualitas dan Legalitas Kompetensi SDM.

Berbicara tentang kualitas dan legalitas kompetensi SDM maka berhubungan dengan kinerja dan status hukum, oleh karena itu seorang menejer idealnya memperhatikan dan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah menjadi ketentuan yang baku karena pada dasarnya ketentuan yang sudah baku tersebut sudah melalui tahap kajian atau analisa dari berbagai pakar / ahli.

1. Kualitas Satpam

(a) 3 orang satpam sudah berusia diatas 51 tahun.

Usia mempengaruhi fisik / daya tahan tubuh, tingkat kewaspadaan, dan ketelitian. Idealnya 3 orang satpam yang masih berstatus pelaksana dilapangan dan bukan menjabat pada *level supervisor* seyogyanya sudah purna tugas. Menurut penulis, pihak manajemen PT Arun NGL sudah menyalahi ketentuan yang sudah baku dan tidak memiliki komitmen karena pemberlakuan batas usia satpam sudah diatur sendiri didalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 1003-017-6 halaman 5 bab Lingkup Pekerjaan-04 tentang syarat - syarat pekerja kontraktor mengatur tentang umur maksimal 50 tahun (kelahiran setelah 1 Januari 1960). Keberadaan 3 orang satpam yang sudah tidak memenuhi syarat tersebut adalah salah satu proses yang tidak baik dalam pengorganisasian manajemen (tidak efisiensi). Dapat berdampak pada kinerja organisasi dan pemborosan anggaran.

(b) 2 satpam belum mengikuti pendidikan dasar satpam (Gada Pratama).

Pendidikan menentukan kualitas dari SDM. Menurut penulis, 2 satpam yang belum mengikuti pendidikan dasar satpam adalah salah satu proses yang tidak baik dalam pengorganisasian manajemen (tidak

efisiensi), karena satpam yang belum terdidik secara formal dapat berdampak pada kinerja organisasi. Ideal / standarnya Satpam sebelum melaksanakan tugas pengamanan sudah mengikuti pendidikan dasar Satpam sehingga tidak menyulitkan manajer dalam memajemen sumber dayanya untuk mengarahkan pada sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan. Acuannya pada Perkap Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan pasal 14 ayat 1 dimana tujuan pelatihan Gada Pratama adalah menghasilkan satpam yang memiliki sikap mental kepribadian, kesemaptaan fisik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dasar sebagai pelaksana tugas satpam selain itu juga sudah diatur didalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 1003-017-6 yang mempersyaratkan satpam yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan dasar satpam.

- (c) 2 Satpam belum memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam dan 42 KTA Satpam sudah kadaluarsa. Salah satu persyaratan dalam mengemban tugas kepolisian terbatas adalah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam, karena KTA adalah sebagai identitas kewenangan. Ideal / standarnya seluruh satpam sudah memiliki KTA Satpam dan secara berkala memperpanjang secara rutin sebelum masa KTA berakhir. Menurut penulis legalitas kompetensi dalam melaksanakan tugas Satpam penting namun sejauh ini belum ada kajian tentang fungsi dari KTA Satpam itu sendiri berikut pengaturan sanksi hukum bila tidak memiliki KTA Satpam selain berfungsi hanya sebagai registrasi keanggotaan semata, lain halnya bila hal tersebut menyangkut salah satu syarat dalam bekerja di suatu perusahaan dan akan dikenai sanksi kepada perusahaan yang masih mempekerjakan karyawan yang

Universitas Indonesia

tidak memenuhi syarat administrasi pada saat dilakukan audit BUJP maupun audit Sistem Manajemen Pengamanan. Dalam hal tertangkap tangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), siapapun dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan.

Kemampuan dan legalitas kompetensi anggota satpam mengacu pada Perkap Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan, pasal 13 yang mengatur tentang kewenangan kepolisian terbatas serta kemampuan memberikan keselamatan dan keamanan lingkungan kerja dan pelatihan spesialisasi dibidang *industrial security*, pasal 36 ayat 1 tentang fungsi KTA Satpam adalah sebagai identitas kewenangan melaksanakan tugas pengemban kepolisian terbatas di lingkungan kerjanya.

- (d) 3 Satpam sudah mengikuti Pendidikan Lanjutan (Diklan) Satpam belum ditempatkan pada kualifikasi *supervisor* petugas satpam.

Satpam yang sudah mengikuti Diklan Satpam akan menguntungkan bagi organisasi namun pada kenyataannya 3 orang satpam belum ditetapkan pada posisi *supervisor* satpam. Idealnya penempatan satpam disesuaikan dengan kompetensi satpam. Menurut penulis, pihak manajemen satpam *out-sourch* dimulai dari manajemen (*Site Koordinator & Deputi Operasional*) belum memanfaatkan potensi SDM untuk kinerja organisasi. Acuannya kepada Perkap Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan pasal 15 dimana tujuan dilakukan pelatihan Gada Madya adalah memiliki kemampuan dan keterampilan manajerial tingkat dasar.

6.3.1.3 Menggerakkan

Menggerakkan adalah mengusahakan agar para anggota suatu perusahaan

Universitas Indonesia

bekerja sama secara lebih efisien, untuk menyukai pekerjaan mereka, mengembangkan *skill* serta kemampuan mereka dan menjadi anggota perusahaan yang baik. Dalam tahap menggerakkan pada proses manajemen ini, manajer harus memiliki pandangan progresif, maksudnya adalah para manajer harus menunjukkan melalui keputusan-keputusan mereka bahwa mereka mempunyai perhatian yang dalam untuk anggota-anggota organisasi mereka dan hal yang fundamental bagi sukses manajemen adalah mengusahakan agar para anggota melaksanakan pekerjaan yang disukai dan ingin dilakukan mereka (timbulkan kepercayaan dan keyakinan). Kegiatan menggerakkan dalam proses manajemen ini berupa :

1. *Security supervisor* memberikan *reward* kepada satpam *outsourch* yang dinilai berprestasi dalam mengungkap / menangkap pelaku pencurian. Idealnya pemberian *reward* dengan tujuan memberikan motivasi melalui anggaran pribadi memang tidak disalahkan namun kurang tepat karena menyangkut kepentingan organisasi. Menurut penulis, *reward* yang berasal dari *security supervisor* dan bukan sistem *reward* yang sudah terencana oleh manajemen PT Arun NGL adalah proses yang tidak benar dalam menggerakkan pada suatu manajemen (tidak efisiensi). Dapat diartikan bahwa perhatian manajemen puncak PT Arun NGL minim utamanya pemberian motivasi kepada anggota. Dapat berdampak pada iklim kerja pada suatu organisasi.
2. Pemberian arahan dan petunjuk oleh *Shift Leader* dan dalam waktu tertentu diambil oleh *Deputi Operasional* pada setiap pergantian *shift* jaga baru.

6.3.1.4 Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk mengusahakan agar komitmen-komitmen tersebut dilaksanakan. Beberapa kegiatan pengawasan diantaranya penilaian kinerja harian satpam mengacu kepada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, pembuatan laporan bulanan, laporan harian kegiatan satpam dan insidentil dan lain-lain. Yang menjadi permasalahan adalah pembuatan laporan bulanan yang

tidak tertib administrasi dimana 2 bulan sekali dibuat namun penyimpanan, pemanfaatannya untuk analisa dan evaluasi untuk dijadikan acuan bagi tugas dimasa mendatang tidak dilakukan. Menurut penulis, tidak tertibnya laporan bulanan dan tidak dilakukan analisa dan evaluasi adalah termasuk proses yang tidak baik dalam pengendalian manajemen (tidak efisiensi) Dapat berdampak pada pengelolaan sumber daya yang tidak proporsional dan profesional utamanya SDM, logistik dan anggaran. Hal ini disebabkan karena tidak ada data yang diolah untuk acuan bagi pelaksanaan tugas mendatang atau tidak ada data pendukung untuk pembenahan sistem sehingga tidak mengetahui prioritas ancaman dan rumusan cara bertindak. Idealnya laporan bulanan dibuat secara rutin dan sesuai jadwal sebagaimana diatur didalam Perkap Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan pasal 48 ayat (1) huruf “d” yang berbunyi macam laporan pelaksanaan yaitu laporan bulanan dan laporan pelaksanaan tugas. Laporan bulanan dibuat oleh setiap bagian / komponen organisasi satpam yang ditujukan kepada penanggung jawab satpam dan setelah dikompulir dan dievaluasi, diolah menjadi laporan kegiatan pengamanan kepada manajemen puncak.

6.3.2 Analisa Pengendalian Akses berdasarkan Konsep Sekuriti Fisik

Pengendali akses diprogramkan oleh perusahaan dengan maksud mempersulit upaya dengan penerapan sistem pengendalian pada orang, kendaraan dan barang yang akan masuk atau keluar obyek / fasilitas yang diamankan. Pengendalian akses merupakan program sekuriti fisik yang direncanakan. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penggunaan *Id Badge Visitor & vehicle Pass* bagi kendaraan yang masuk mudah dipalsukan. Mudah dipalsukan karena terbuat dari kertas yang dilaminating berisi data dan tanda dari otoritas yang berwenang termasuk mudah di *scan*.

Selain itu satpam yang bertugas pada pos jaga tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya karena melakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dimana satpam pada pos hanya melakukan pemeriksaan seperlunya dan selektif serta tidak memanfaatkan alat bantu yang ada. Permasalahannya adalah *security supervisor* PT Arun NGL memang sengaja telah menentukan kebijakan tersebut dimana hanya melakukan pemeriksaan secara selektif terhadap orang, kendaraan dan

Universitas Indonesia

barang. Sedangkan pintu *metal detector* pada pos *main gate* mengalami kerusakan dan hingga saat ini belum diperbaiki terkendala oleh masalah biaya. Idealnya *ID Badge & Vehicle Pass* tidak mudah dipalsukan dan satpam yang bertugas pada pos bertugas melakukan pemeriksaan dengan benar sebagaimana yang diatur didalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dan pintu *metal detector* seyogyanya diperbaiki.

Permasalahan yang dijumpai pada pengendalian akses adalah penerapan metode kerja yang tidak benar atau prosesnya tidak baik (tidak efisiensi), hal ini berdampak pada efektifitas sistem pengamanan pada PT Arun NGL.

6.3.3 Analisa *Barrier* berdasarkan Konsep Sekuriti Fisik

Barrier yang ada pada sebelah timur dan sebagian selatan Kilang Arun berupa sungai dan tanggul tidak sesuai dengan standar sekuriti. Dikatakan tidak memenuhi standar sekuriti karena pelaku dapat saja tidak masuk melewati sungai tetapi melewati arah lain sebelah selatan Kilang Arun, sedangkan tanggul hanya setinggi 3 meter mudah dilewati terlebih kualitas pagar pembatas yang tidak memenuhi syarat. Menurut penulis, *barrier* yang tidak sesuai standar sekuriti berdampak pada sistem pengamanan menjadi tidak efektif dan kendala yang ditemukan adalah program penghijauan oleh unit *safety* belum berdaya guna bagi sekuriti dan masih bersebrangan. Idealnya *barrier* adalah suatu kolam atau semak belukar yang sulit ditembus yang dapat membuat efek psikologis sebagai penghalang jarak. Untuk itu disarankan agar menejer puncak dalam menerapkan kebijakan program penghijauan yang dalam hal ini dijalankan oleh unit *safety* agar meminta unit *safety* berkoordinasi dengan sekuriti yaitu menanam pohon diluar area pagar pembatas dan berjarak sebagai *barrier* yang berfungsi sebagai penghalang dan memberikan efek psikologis kepada pelaku kejahatan namun program penghijauan juga terlaksana dengan baik.

6.3.4 Analisa *Fences* berdasarkan Konsep Sekuriti Fisik

Pagar yang mengintari perusahaan berbahan besi dengan model pagar *brc* dan harmonika. Ketinggian pagar bervariasi dengan lilitan kawat di atasnya. Kualitas pagar belum memenuhi standar sekuriti. Dikatakan belum memenuhi standar sekuriti karena dari beberapa kasus yang terjadi, pelaku berhasil melewati

pagar dengan modus yang digunakan pelaku adalah dipanjat dengan memanfaatkan pijakan pada model pagar, melewati pagar dengan menggunakan bantuan tangga, memotong pagar dengan menggunakan gergaji besi ataupun merusak baut pengikat penghubung pagar. Kasus yang terjadi pada tanggal 6 April 2010 dimana pelaku melakukan pengrusakan dengan memotong pagar brc meskipun pelaku tidak berhasil tertangkap, tanggal 9 Januari 2011 dimana pelaku masuk melalui pagar brc yang baut pengikatnya sudah lapuk. Kasus yang terbesar adalah kasus pencurian oli yang terjadi pada tanggal 9 Mei 2008 dengan sasaran *warehouse* modus operandinya adalah memanjat pagar sebelah selatan *plansite*. Menurut penulis, penggunaan pagar pembatas yang tidak standar sekuriti berdampak pada sistim pengamanan fisik menjadi tidak efektif. Idealnya pagar terbuat dari baja ataupun aluminium dengan ketinggian 8 kaki atau 2,4 meter yang terangkai rapi, dengan bagian pagar terdiri dari besi kawat yang terjalin rapi dan tembus pandang dengan bagian atasnya berbentuk huruf “v” dan dilapisi dengan tiga rangkai kawat berduri. Namun untuk mengganti pagar dengan standar sekuriti adalah tidak mungkin karena membutuhkan biaya yang sangat besar (luas area 594 Ha) untuk itu disarankan mengoptimalkan fungsi pagar yaitu membersihkan rumput ilalang yang telah menutupi pagar, memotong dahan pohon ataupun pohon yang menutupi pagar, sehingga dapat mempermudah tugas Satpam dalam menjalankan fungsinya mengawasi area dan mencegah pelaku kejahatan masuk dengan melewati pagar pembatas. Selanjutnya pagar dipasang oleh *alarm perimeter*.

6.3.5 Analisa Kunci berdasarkan Konsep Sekuriti Fisik

Sistem penguncian yang digunakan oleh PT Arun NGL untuk mengunci semua pintu pagar menggunakan rantai dan gembok. Cara penguncian seperti itu masih terbilang sangat sederhana dan ketinggalan jaman (masih tradisional). Terlebih gembok yang digunakan banyak dijual dipasaran dengan merk snostar yang berwarna kuning. Ini tidak standar sekuriti. Kualitas gembok dapat terlihat pada kasus yang terjadi 2 kasus gembok yang rusak yaitu pada tanggal 11 November 2010 dan 25 Desember 2010 dimana gembok sudah tidak dapat berfungsi dengan baik tepatnya di portal sebelah utara *line* pipa (areal luar *plansite*) dan gembok di B3 *Bunker flare area*. Kejadian pengrusakan kunci

Universitas Indonesia

dengan cara memotong rantai pintu pagar dengan menggunakan gergaji besi terjadi pada kasus pencurian oli tanggal 19 Mei 2008. Menurut penulis, penggunaan kunci yang tidak standar berdampak pada sistem pengamanan fisik menjadi tidak efektif. Idealnya kunci menggunakan standar sekuriti dan tidak menggunakan gembok yang dililit dengan rantai besi karena dapat saja pelaku masuk dengan cara merusak rantai besi tersebut. Bilamana menggunakan gembok maka gunakan gembok yang mempunyai *lever* lebih dari lima atau *shackle* dengan memastikan fungsi pengait, *stapler*, *locking bar* atau *lug*.

Kelalaian mengunci pintu ruangan oleh karyawan pada Tabel 5.3 adalah kurang disiplinnya karyawan terhadap penciptaan rasa aman dilingkungan perusahaan karena tidak semua kunci disimpan di Posko. Kunci yang ada pada posko diantaranya kunci pada pintu gerbang besi sedangkan lainnya seperti kunci ruangan kerja (kantor) disimpan oleh masing-masing karyawan.

6.3.6 Analisa Penerangan berdasarkan Konsep Sekuriti Fisik

Lampu penerangan yang berada di area *plansite* adalah lampu tembak dari 1 hingga 4 arah. Sistem penerangan sudah dilengkapi dengan alat otomatis yang dapat menyambung dan memutuskan aliran listrik secara otomatis. Namun beberapa alat otomatis tersebut sudah tidak berfungsi lagi sehingga lampu tetap dibiarkan menyala selama 1 X 24 jam selain itu ada area yang penerangannya kurang seperti pada *flare area* dan *gate-46* termasuk area LPG yang telah ditinggalkan oleh pekerja bahkan telah banyak ditutupi oleh semak belukar dan pepohonan mengakibatkan penerangan menjadi terhalang. Selain penerangan yang kurang juga ada area yang tidak ada lampu penerangannya yaitu areal kanal *labour shop*. Kasus pengrusakan yang terjadi pada tanggal 9 Januari 2011 di areal kanal *labour shop* adalah bukti bahwa pelaku memanfaatkan area yang penerangannya tidak ada. Menurut penulis, beberapa area yang masih kurang penerangan bahkan ada yang belum memiliki penerangan sama sekali akan mempengaruhi pengawasan area oleh Satpam sehingga berdampak pada sistem pengamanan fisik menjadi tidak efektif. Idealnya seluruh area terpasang lampu karena penerangan tersebut memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan atau dengan kata lain meningkatkan kemungkinan pengamatan terhadap tindak kejahatan dan memungkinkan suatu struktur kosong mudah diawasi. Untuk

Universitas Indonesia

itu disarankan agar area yang kurang mendapatkan penerangan ataupun yang belum mendapatkan sama sekali agar segera dipasang lampu.

6.3.7 Analisa CCTV berdasarkan Konsep Sekuriti Fisik

Dari 15 kamera *CCTV* yang terpasang, terdapat 4 dalam kondisi yang rusak. Idealnya 4 kamera *CCTV* yang rusak yaitu *O2 plane*, *Warehouse* sebelah utara, *Warehouse* sebelah selatan, dan Pos-49 sudah diperbaiki dan siap dioperasionalkan. Terlebih *warehouse* sebagai gudang penyimpanan alat-alat pabrik adalah aset yang menjadi sasaran pelaku kejahatan ditambah minimnya jumlah petugas jaga yang hanya 1 personel. Penggunaan *CCTV* akan lebih memudahkan tugas satpam dalam mengawasi area tertentu dari jarak jauh dan dapat direkam. Menurut penulis, 4 kamera *CCTV* dalam kondisi yang rusak berdampak pada sistem pengamanan fisik menjadi tidak efektif. Idealnya *CCTV* dalam kondisi siap operasional karena penggunaan *CCTV* selain memonitor area, juga dapat difungsikan sebagai alat perekam sehingga memudahkan mendeteksi pelaku kejahatan juga membantu tugas Satpam dalam melakukan pengawasan area karena jumlah Satpam terbatas.

6.3.8 Analisa Pos Jaga berdasarkan Konsep Sekuriti Fisik

Pos jaga yang tidak terisi adalah pos-30 dan pos-52, dari data yang ada bahwa pos-30 adalah pos yang terletak di pojok sebelah utara *plansite* untuk menghalau pelaku yang akan masuk ke area SWI sedangkan pos-52 adalah pos dekat *flare area* tepatnya di sebelah selatan *plansite*. Tidak terisinya personel tetap pada pos jaga akan mengurangi pengawasan pada area tersebut yang dapat dijadikan sebagai celah oleh pelaku kejahatan seperti halnya keterangan dari informan petugas patroli Bapak Sayuti. Selain itu dapat menjadi beban petugas satpam dengan sistem *back-up* karena meninggalkan tugas pokok untuk membantu pengamanan pada pos yang dianggap rawan. Idealnya setiap pos jaga terisi personel dengan jumlah personel minimal 2 orang.

Pos jaga merupakan tempat bagi anggota satpam dalam melakukan tugas penjagaan dan pengawasan wilayah perusahaan selain itu digunakan sebagai tempat konsolidasi maupun tempat bernaung. Fungsinya yang strategis ini menjadikan pos jaga sebagai penunjang pelaksanaan tugas satpam. Pos jaga yang

ideal adalah lengkap fasilitas seperti alat pemanas, dispenser, lampu senter, jas hujan, kendaraan patroli (R2 atau sepeda) dan lain-lain.

Menurut penulis, Pos yang tidak diisi oleh personel Satpam berdampak pada sistem pengamanan fisik menjadi tidak efektif, mendasari beberapa kasus pencurian yang berhasil lolos dan meninggalkan barang bukti disekitar area tersebut. Untuk itu disarankan agar pos-30 dan pos-52 diisi oleh personel tetap.

6.3.9 Analisa Alat Komunikasi berdasarkan Konsep Sekuriti Fisik

Penggunaan alat komunikasi adalah penting untuk memudahkan *supervisor* satpam monitoring kekuatan anggotanya termasuk penyampaian informasi cepat dengan biaya yang murah. Permasalahannya adalah penunjang alat komunikasi berupa bateray sangat terbatas bahkan yang saat ini digunakan sudah tidak memiliki cadangan bateray lagi. Bilamana digunakan dalam posisi aktif maka akan mengurangi usia pakai bateray. HT yang tidak memiliki bateray tentu tidak dapat dipergunakan dan hal ini dapat sewaktu-waktu menghambat pelaksanaan tugas satpam padahal usulan pengadaan barang sudah dilakukan oleh manajemen BUJP PT Bina Nanggroe namun hingga saat ini belum direalisasikan.

Program latihan komunikasi juga belum dilakukan oleh pihak manajemen PT Arun NGL dan BUJP PT Bina Nanggroe. Program latihan komunikasi yang belum direncanakan dan dilaksanakan tentu tidak memenuhi syarat dari organisasi yang baik. Idealnya program latihan komunikasi direncanakan dan dilaksanakan guna menjamin kualitas personel satpam dan sesuai dengan persyaratan organisasi yang baik.

Menurut penulis, permasalahan bidang komunikasi berdampak pada sistem pengamanan fisik menjadi tidak efektif. Untuk itu disarankan agar bateray HT agar dicukupkan secara bertahap, diinventarisir dan dalam periode tertentu dicek kelengkapannya dan latihan komunikasi direncanakan kegiatannya.

6.3.10 Analisa Lingkungan Fisik

6.3.10.1 Fasilitas Jalan dan Lingkungan Perusahaan

Jalur patroli pada sebelah timur (pos-56) sampai dengan sebagian sebelah selatan (pos-53) masih jalan setapak. Meskipun demikian pada kondisi cuaca hujan masih dapat dilalui oleh kendaraan. Menurut penulis tidak ada

permasalahan mengenai jalan setapak pada jalur patroli ini meskipun idealnya adalah jalur patroli secara keseluruhan seyogyanya teraspal.

6.3.10.2 Penataan Lingkungan

Program penghijauan oleh unit *safety* tidak dikoordinasikan dengan pihak sekuriti. Program penghijauan diantaranya penanaman pohon yang berada dalam area pabrik dan sebelah utara luar pagar dan rumput ilalang yang sebagian dibiarkan tumbuh menjadikan masalah bagi pihak sekuriti utamanya dibidang pengawasan. Menurut penulis, pohon yang berada dalam area pabrik dan tidak terawat dapat dimungkinkan menjadi tempat persembunyian pelaku kejahatan ataupun menyembunyikan sementara barang hasil curian. Ini tentu saja berdampak pada sistem pengamanan fisik menjadi tidak efektif. Untuk itu disarankan agar penataan lingkungan juga dapat memiliki manfaat bagi pengamanan perusahaan dengan cara unit yang bertanggungjawab melakukan program penghijauan agar berkoordinasi dengan unit sekuriti.

6.3.10.3 Sarana Parkir

Sarana parkir yang di alokasikan tanpa ada petugas jaga khusus dan tidak ada kartu parkir akan mengundang pelaku kejahatan untuk memanfaatkan situasi melakukan pencurian. Menurut penulis, sarana parkir yang tidak terencana dengan baik pengawasannya berdampak pada sistem pengamanan fisik menjadi tidak efektif. Idealnya sarana parkir termasuk salah satu tanggung jawab pengawasan Satpam dengan metode yang benar.

6.3.11 Analisa Level Security

Sekuriti fisik yang diaplikasikan di PT Arun NGL meliputi pendayagunaan tenaga satpam, penggunaan akses kontrol di 6 pintu masuk dan keluar perusahaan, penerapan *barrier* penghalang meskipun *barrier* tersebut tidak sepenuhnya mengelilingi lokasi perusahaan, pemagaran keliling walaupun tidak sesuai dengan konsep pagar menurut konsep sekuriti fisik, penggunaan kunci, penerangan lingkungan perusahaan, penggunaan alat kamera *CCTV*, pos jaga, alat komunikasi, rencana kontijensi dan alarm sistem, koordinasi dengan kepolisian. Dengan adanya bentuk-bentuk sekuriti tersebut penulis menganalisa bahwa manajemen sekuriti fisik yang diaplikasikan di PT Arun NGL sesuai dengan pendapat Gigliotti dan Jason merupakan upaya sekuriti tingkat 4 yaitu *high level*

Universitas Indonesia

security namun ada kekuarangannya yaitu *perimeter alarm system*, termasuk tidak adanya *guard dogs*, *high security barrier at parimeter* yang merupakan bagian dari upaya sekuriti level 3 namun lebihannya adalah *on site armed response force* dengan menyiapkan personel pengamanan eksternal dari satuan Brimob Kompi 4 Jeulikat sebanyak 10 orang bersenjata lengkap dengan keahlian khusus untuk penanganan pengamanan tingkat tinggi di kepolisian yang sebenarnya termasuk dalam kategori tingkat 5 yaitu *maximum security*.

Tingkat 4 atau upaya sekuriti tingkatan *high level security* sudah mencakup upaya sekuriti tingkat 1 (*minimum security*), tingkat 2 (*low level security*) dan tingkat 3 (*medium security*).

PT Arun NGL menurut upaya sekuriti sudah memasuki tingkat *high level security* meskipun belum dilengkapi dengan alarm parameter karena alarm yang ada hanya diperuntukkan bila terjadi kebakaran atau kebocoran gas. Idealnya *level 4* berarti sudah memenuhi syarat pada level 1 s/d 3 termasuk persyaratan pada *level 4* terpenuhi secara keseluruhan. Menurut penulis, permasalahan pada *level security* berdampak pada sistem pengamanan fisik menjadi tidak optimal.

6.3.12 Analisa CPTED

Permasalahan utama pada *CPTED* adalah permasalahan bangunan liar akibat penataan lingkungan yang tidak tepat sehingga menarik untuk tempat tinggal masyarakat dan mendirikan bangunan liar. Menurut penulis, permasalahan bangunan liar adalah proses yang tidak baik dalam perencanaan pengamanan yang melibatkan desain lingkungan. Idealnya hal tersebut tidak terjadi karena upaya perencanaan pengamanan yang melibatkan desain lingkungan adalah salah satu upaya pencegahan kejahatan demi menghindari terjadinya kerugian.

6.3.13 Analisa Upaya Taktis Pengamanan Proyek Usaha

6.3.13.1 Pengamanan Perimeter

Pengamanan perimeter yang dilaksanakan oleh perusahaan sangat jauh dari standar pengamanan, dengan tinggi pagar dan kualitas pagar yang tidak standar, pemeriksaan terhadap orang, kendaraan dan barang tidak profesional, *ID Badge* dan *Vehicle Pass* yang mudah dipalsukan berdampak pada sistem pengamanan fisik menjadi tidak efektif. Pembagian area dalam perusahaan yang

meliputi zona diawasi (*controlled zone/area*), zona terbatas (*limited zone/area*) dan zona terlarang (*exclusive zone/area*) sudah ada tetapi tidak membentuk pembagian wilayah yang proporsional dan profesional pengaturannya. Contoh zona terlarang yang langsung berbatasan dengan pagar pembatas yang membatasi area perusahaan dengan laut lepas. Idealnya sebelum memasuki zona terlarang maka terlebih dahulu harus melewati zona terbatas dan seterusnya.

6.3.13.2 Penerimaan SDM

Penerimaan SDM *In-house* PT Arun diselenggarakan oleh HRD bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja dan beberapa perguruan tinggi serta LSM. Sedangkan untuk penerimaan SDM *Out-Sourch* diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan kontraktor masing-masing. Penerimaan SDM Satpam tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan yaitu tidak mempersyaratkan calon untuk mengikuti tes psikologi, sehingga tidak dapat mendeteksi perilaku dan tabiat seseorang. Idealnya penerimaan SDM Satpam harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu diwajibkan mengikuti tes psikologi.

6.3.13.3 Asuransi

Aset Kilang adalah aset dari Pertamina, sedangkan karyawan PT Arun NGL sudah diasuransikan dengan Jamsostek dan menjadi persyaratan saat penerimaan SDM.

6.3.13.4 Supranatural

Perusahaan masih belum memanfaatkan aspek supranatural dalam pengamanan lokasi proyek. Padahal menurut penulis perusahaan dapat menggunakan tenaga dalam untuk mengamankan proyek usahanya. Tenaga dalam yang digunakan dapat mengamankan lokasi proyek dengan biaya yang murah karena bersumber dari pemanfaatan energi negatif dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang berupaya mengambil aset-aset perusahaan. Apabila ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencuri atau berniat jahat terhadap aset-aset perusahaan maka secara otomatis si pelaku dapat terpental dengan sendirinya jika perusahaan menggunakan kekuatan supranatural seperti tenaga dalam. Idealnya tenaga supranatural dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan PT Arun NGL untuk memperkuat sistem pengamanan fisiknya.

6.3.13.5 Pengembangan Kekuatan

- a. Pengembangan sendiri, merupakan mobilisasi kekuatan karyawan sendiri dalam mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Namun pada kenyataannya perusahaan belum mampu memobilisasi karyawan perusahaan guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Kejadian mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan *out-sourch* adalah bukti terpecahnya kekuatan karyawan perusahaan. Idealnya pengembangan kekuatan yang melibatkan kekuatan sendiri memiliki dampak positif bagi penguatan sistem pengamanan fisik perusahaan.
- b. Gabungan kekuatan seprofesi, dilakukan dengan menggabungkan kekuatan seprofesi satu proyek dengan proyek lain guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yaitu antara satpam PT Arun NGL dengan satpam obyek industri lain. Sampai dengan saat ini kegiatan tersebut belum ada dilakukan. Idealnya gabungan kekuatan seprofesi sudah diprogramkan, karena secara tidak langsung akan memberikan dampak positif bagi penguatan sistem pengamanan fisik perusahaan.
- c. Gabungan dengan masyarakat sekitar. PT Arun NGL belum ada melibatkan masyarakat sekitar untuk bersama-sama menciptakan rasa aman dilingkungan perusahaan. Terbukti dari unjuk rasa IKBAL, tidak ada satupun dari masyarakat sekitar yang membantu perusahaan terlibat mengamankan area perusahaan. Idealnya kekuatan yang berasal dari gabungan masyarakat sekitar akan memberikan dampak positif bagi penguatan sistem pengamanan fisik perusahaan.
- d. Koordinasi dengan instansi-instansi sekitar perusahaan
Koordinasi dengan pihak kepolisian hanya pada permasalahan tertentu seperti halnya unjuk rasa dan pengamanan pelabuhan. Namun untuk laporan kejadian tindak pidana yang TKP-nya pada PT Arun NGL selama tahun 2010 hingga 2011, belum ada dilaporkan ke Polsek Muara Satu. Manajemen PT Arun NGL belum memobilisasi peran kepolisian dalam memperkuat sistem pengamanan fisiknya. Idealnya manajemen PT Arun NGL memobilisasi peran kepolisian untuk sistem pengamanan

fisiknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk menjadi saksi pelapor.

6.4 Analisa Peran Kepolisian pada PT Arun NGL (Eksternal PT Arun NGL)

Tugas kepolisian sebagaimana diatur didalam UU No 2 tahun 2002 tentang Polri pasal 13 huruf (a), (b) dan (c) menyebutkan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14 ayat 1 huruf (e) dalam UU yang sama menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 maka Polri melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”.

Tugas Satpam pada obyek vital industri adalah mengemban tugas pengamanan swakarsa, sedangkan Polri sebagaimana kewenangan yang diatur oleh UU No 2 tahun 2002 adalah melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis kepada pengamanan swakarsa. Sehubungan dengan hal tersebut maka kepolisian setempat memiliki kewajiban kepada PT Arun NGL terkait dengan penyelenggaraan sistem pengamanannya. Berikut peran kepolisian setempat pada PT Arun NGL.

6.4.1 Polsek Muara Satu

Permasalahan utama pada Polsek Muara Satu adalah pemolisian komunitas pada Desa Batuphat Barat yang belum di sosialisasikan dan diimplementasikan. Dimana Desa Batuphat Barat adalah lokasi berdirinya keberadaan Kilang Arun. Secara tidak langsung fungsi dari pencegahan kejahatan dan pencegahan kerugian dalam suatu komunitas tidak berjalan dengan efektif karena pemberdayaan masyarakat belum dimaksimalkan perannya oleh kepolisian. Idealnya pemolisian komunitas berjalan sebagai wadah pemecahan masalah sosial disuatu komunitas.

6.4.2 Polda Aceh

Praktek pungutan biaya dalam pengurusan ijin operasional BUJP berkedok biaya administrasi, lemahnya fungsi pembinaan tehnik dan pengawasan oleh Dit Binmas Polda Aceh, tidak ada koordinasi antara Satker Dit Binmas dan Dit Pam Obvit dalam melaksanakan tugas pembinaan terhadap obyek vital, tidak tertib administrasi laporan kejadian obyek vital, sosialisasi Perkap Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan dan audit sistem manajemen pengamanan pada obyek vital belum dilakukan, hal ini menunjukkan tidak maksimalnya tugas kepolisian kepada obyek vital khususnya PT Arun NGL. Kendala yang ditemukan adalah anggaran yang terbatas untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan tehnik.

Idealnya pelaksanaan tugas Polri pada obyek vital dilaksanakan secara profesional dan hal ini menyangkut citra kepolisian khususnya pelayanan kepada masyarakat.

6.5 Analisa SWOT PT Arun NGL

Uraian analisa yang telah dibahas oleh penulis, akan dirangkum dalam analisa SWOT (*Strenght, Weakness, Oppurtunity, Threat*) guna mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang ada di PT Arun NGL.

6.5.1 Kekuatan

Sejumlah kekuatan yang dimiliki oleh PT Arun NGL meliputi :

- a. Sudah dibuat rencana harian penempatan Satpam yang bertugas pada pos jaga dan rencana mingguan penempatan Satpam pada petugas patroli oleh *Shift Leader*.
- b. Struktur organisasi Satpam baik *in-house* maupun *out-sourch* sudah ada, sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugas staf khususnya proses manajemen disamping itu sebagai salah satu syarat dari organisasai yang baik.
- c. Rute patroli dilakukan secara acak oleh petugas patroli dengan maksud agar lawan atau pelaku kejahatan tidak dengan mudah membaca pergerakan patroli Satpam.

- d. Sudah disusun Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak (PT Arun NGL dan BUJP PT Bina Nanggroe) sebagai kontrak kerja. Kontrak kerja tersebut memuat peraturan, *job description* Satpam *out-sourch*, kewajiban dan hak Satpam dll termasuk *SOP* dan hubungan tata cara kerja dengan instansi terkait.
- e. Penilaian kinerja Satpam harian oleh Satpam *in-house*. Penilaian kinerja ini memberikan manfaat sebagai motivator BUJP dalam melakukan perbaikan sistem manajemen Satpam *out-sourch*.
- f. Kontrol manajemen melalui penggunaan alat komunikasi. Call-sign yang sudah disusun akan memudahkan *user* maupun *Deputi Operasional* melakukan tugas pengawasan kepada Satpam *out-sourch*.
- g. Penggunaan *Key Electronic* pada ruang tertentu sangat membantu Satpam dalam melaksanakan tugasnya karena penggunaan *Key Electronic* lebih menjamin dibandingkan dengan menggunakan kunci manual yang tingkat pengamanannya lebih rendah. Kode untuk *Key Electronic* hanya diketahui oleh orang-orang tertentu sehingga lebih memudahkan Satpam dalam melakukan giat deteksi bila pelakunya berasal dari orang dalam.
- h. *ISPS Code* pada pelabuhan khusus adalah sistem pengamanan pelabuhan yang sudah mengikuti standar internasional. Hal ini sangat membantu tugas Satpam karena melibatkan instansi terkait yang tergabung dalam tim dalam menangani permasalahan gangguan keamanan pada pelabuhan khususnya penanganan teroris.
- i. Pembuatan laporan kejadian harian dan insidentil untuk *user* sangat membantu memonitor gangguan keamanan yang terjadi pada PT Arun NGL.
- j. Penggunaan satpam permanen yang statusnya *out-sourch* memiliki manfaat bagi PT Arun NGL karena selain biayanya yang murah, juga sudah berpengalaman karena mengetahui seluk beluk permasalahan keamanan pada PT Arun NGL.

6.5.2 Kelemahan

Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh PT Arun NGL meliputi :

- a. Dukungan manajemen dari menejer pimpinan terhadap peran sekuriti

masih kurang dapat terlihat dari jumlah Satpam yang terus menurun, program penghijauan yang tidak memperhitungkan manfaat sekuriti, peran kepolisian tidak dimanfaatkan dalam penguatan sistem pengamanan fisik perusahaan khususnya pembinaan teknis dan penegakan hukum, program CSR yang belum berorientasi pada pengembangan kekuatan yang melibatkan masyarakat sekitar, usia satpam yang sudah melewati batas usia pengabdian dan belum ada sistem *reward* untuk membangun iklim kerja yang lebih baik, memberikan kesempatan bekerja kepada BUJP PT Bina Nanggroe yang belum memiliki izin operasional BUJP dari Kapolri.

- b. Tidak ada petugas parkir termasuk penerapan kartu parkir.
- c. 42 KTA Satpam daluarsa, 2 Satpam belum memiliki KTA. KTA menunjukkan legalitas kompetensi Satpam.
- d. 2 Satpam belum mengikuti pendidikan dasar Satpam.
- e. Rencana kegiatan Satpam tidak dibuat. Tidak dibuatnya rencana kegiatan Satpam dapat diartikan bahwa Satpam bekerja tanpa ada perencanaan kerja.
- f. Satpam yang ditugaskan khusus untuk melaksanakan patroli tidak membuat buku jurnal.
- g. Tidak ada latihan komunikasi.
- h. Belum ada program pengembangan kekuatan antara lain kekuatan sendiri, kekuatan seprofesi, kekuatan gabungan masyarakat sekitar, penggunaan tenaga supranatural.
- i. Kelalaian karyawan dalam mengunci pintu ruangan.
- j. ID Badge, Vehicle Pass mudah dipalsukan dan tidak ada register buku tamu pada Posko.
- k. Penataan lingkungan belum baik sehingga memungkinkan peluang bagi masyarakat sekitar untuk mendirikan bangunan liar di aset Pertamina.
- l. Pengambilan kebijakan yang kurang tepat oleh security supervisor agar Satpam melakukan pemeriksaan secara selektif dan pengawasan penggunaan alat metal detector oleh Satpam kurang dan tidak tegas penegakan disiplin oleh *security supervisor*.
- m. Penerimaan SDM Satpam tidak mempersyaratkan uji psikologi sehingga

tidak dapat mendeteksi mental dan tabiat calon Satpam.

- n. Pos-30 dan pos-52 tidak diisi oleh personel tetap (Satpam).
- o. Minim fasilitas sarana dan prasarana pada pos termasuk perlengkapan perorangan Satpam.
- p. 4 kamera *CCTV* dan 1 unit *moveable walk through metal detector* rusak dan belum dilakukan perbaikan.
- q. Alat otomatis lampu rusak, *flare area* dan pos-46 kurang penerangan. *Kanal labour* tidak ada penerangan.
- r. Pagar pembatas, kunci pada gerbang dan barrier belum memenuhi standar sekuriti.
- s. Cadangan bateray HT minim.
- t. Belum terpasang alarm parimeter.

6.5.3 Kesempatan

Adapun kesempatan yang dimiliki oleh PT Arun NGL meliputi :

- a. Hubungan yang baik dengan kepolisian setempat.
- b. Program *CSR* sebagai program tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
- c. Personel *Brimob* yang ditugaskan membantu pelaksanaan tugas pengamanan pada kilang Arun.
- d. Keberadaan lembaga adat.

6.5.4 Ancaman

- a. PT Arun NGL masih dianggap sebagai peluang mendapatkan rejeki oleh pelaku kejahatan.
- b. Unjuk rasa *IKBAL* yang dapat memboikot aktivitas PT Arun NGL.
- c. Bahaya kebocoran gas beracun (*H2S*).
- d. Bencana alam.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik pada PT Arun NGL belum efektif. Dikatakan belum efektif karena kondisi manajemen sekuriti fisik jauh dari ideal konsep sekuriti fisik. Berikut kondisi manajemen sekuriti fisik pada PT Arun NGL :

- a. Jumlah satpam terbatas tidak sebanding dengan luas area penugasan. Selain itu ditemukan satpam yang berusia tua namun masih digunakan oleh manajemen perusahaan, beberapa satpam belum mengikuti pendidikan dasar satpam, fasilitas sarana dan prasarana pos minim terlebih kelengkapan perorangan satpam tidak tercukupi dengan baik.
- b. Fasilitas pengamanan fisik yang terpasang, meliputi pagar, *barier*, kunci pada gerbang tidak memenuhi standar sekuriti, termasuk beberapa area dalam pabrik tidak memiliki penerangan yang cukup bahkan ada area yang tidak memiliki penerangan sama sekali.
- c. Rencana kegiatan satpam tidak dibuat, analisa dan evaluasi juga tidak dibuat sehingga berdampak pada tidak ada pencapaian target sekuriti maupun perencanaan kerja Satpam.
- d. Beberapa alat sekuriti yaitu 4 kamera *CCTV* dan 1 unit *moveable walk through metal detector* mengalami kerusakan dan belum dilakukan perbaikan.
- e. Akses kontrolnya masih menggunakan kartu identitas yang mudah dipalsukan, terlebih petugas Satpam tidak melaksanakan pemeriksaan dengan benar termasuk penggunaan alat bantu *metal detector*.

Kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal disebabkan oleh anggaran sekuriti yang harus menyesuaikan dengan anggaran umum PT Arun NGL dimana

aktivitas produksi perusahaan saat ini terus mengalami penurunan. Sedangkan kendala eksternal adalah peran kepolisian pada PT Arun NGL dalam melakukan tugas pembinaan teknis dan pengawasan pada obyek vital yang ternyata belum dilaksanakan secara maksimal disebabkan oleh anggaran yang terbatas dan minim komitmen manajer puncak terhadap tugas pengamanan swakarsa khususnya pada obyek vital.

Idealnya penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik sesuai dengan standar sekuriti. Standar sekuriti mengacu kepada konsep sekuriti dalam tesis ini. Terbatasnya dukungan anggaran sekuriti maka pengambilan keputusan yang lebih bijak oleh manajer puncak menjadi hal yang utama bagi pembenahan dibidang sekuriti fisiknya, karena PT Arun NGL adalah salah satu obyek vital industri yang berisiko tinggi di Indonesia yang memerlukan sistem pengamanan fisik yang baik untuk melindungi aset perusahaan bagi kepentingan aktivitas produksi.

7.2 Rekomendasi

Rekomendasi penulis :

a. PT Arun NGL

Bilamana keamanan dianggap penting bagi aktivitas produksi perusahaan, maka manajer puncak perlu mengambil suatu kebijakan dibidang sekuriti berdasarkan skala prioritas yaitu mengalokasikan dukungan anggaran sekuriti secara *proporsional* dan *profesional* serta pembenahan pada aspek manajemen untuk memperkuat sistem pengamanan perusahaan.

1. Penambahan anggaran diperuntukkan untuk :

- a) Melakukan penambahan jumlah personel sekuriti agar mendekati dari jumlah yang ideal. Penambahan jumlah personel yang diusulkan oleh penulis adalah 16 (enam belas) orang untuk setiap shiftnya sehingga berjumlah total $(16+25) \times 4 = 164$ personel untuk menjaga *plansite area*.
- b) Pemenuhan fasilitas pada pos dan perlengkapan

Universitas Indonesia

perorangan satpam secara bertahap. Selanjutnya diinventarisir dan di cek secara berkala kelengkapan dan kondisi peralatan tersebut. Fasilitas pada pos yang perlu dilengkapi diantaranya senter dan kendaraan untuk patroli baik R2 maupun sepeda, sedangkan perlengkapan perorangan diantaranya tongkat, borgol, sangkur, helm pengaman dan sepatu pengaman (standar sekuriti).

- c) Optimalisasi fasilitas pengamanan fisik terpasang diantaranya anggaran untuk membersihkan rumput ilalang dan dahan pohon yang menutupi pagar selanjutnya dipasang *alarm perimeter*. Pemasangan 1 lampu pada area yang kurang atau belum mendapatkan sama sekali penerangan, penggantian kunci gembok pada pintu pagar perusahaan, serta pembuatan *barier* dengan penanaman pohon yang diberikan jarak dengan pagar pembatas perusahaan guna memudahkan pengawasan serta jalur patroli petugas Satpam.
- d) Perbaikan pada peralatan sekuriti yang mengalami kerusakan yaitu 4 kamera *CCTV* dan 1 unit pintu *metal detector* serta pengadaan baterai HT secara bertahap.
- e) Penerimaan SDM Satpam untuk mengganti Satpam yang sudah melewati batas usia pekerja, pengurusan KTA Satpam yang sudah daluarsa ataupun yang belum memiliki KTA Satpam.
- f) Program *reward* kepada Satpam untuk membangun iklim kerja yang lebih baik.
- g) *ID Badge* dan *Vehicle Pass* dibuat yang bagus sehingga tidak mudah dipalsukan termasuk dengan kartu parkir.
- h) Melibatkan pemangku kepentingan perusahaan untuk

memperkuat sistem pengamanan fisiknya dalam hal :

- 1) Perencanaan program CSR yang melibatkan Karyawan, masyarakat sekitar, dan kepolisian dengan maksud untuk pengembangan kekuatan bagi kepentingan perusahaan. Misalnya membentuk pos randa kampung oleh warga, pemberdayaan lembaga adat desa untuk menyelesaikan permasalahan sekuriti perusahaan (unjuk rasa, tebar jala ikan oleh nelayan, bangunan liar, masalah penjual lapak besi bekas, pencurian), program pelatihan kekuatan seprofesi maupun kekuatan sendiri, pengembangan kekuatan supranatural.
- 2) Melibatkan kepolisian untuk dapat memberikan :
 - (a) Saran pembinaan teknis untuk pembenahan atau penataan administrasi termasuk bidang manajemen sekuriti fisik melalui audit sistem manajemen pengamanan.
 - (b) Saran pembinaan teknis terhadap kualitas fasilitas pengamanan fisik yang terpasang (pagar, *barier*, kunci, penerangan) melalui audit sistem manajemen pengamanan.
 - (c) Seleksi BUJP pada pelaksanaan tender untuk menyeleksi BUJP yang telah memenuhi syarat operasional pengamanan bagi perusahaan.
 - (d) Program pembinaan dan pelatihan Satpam guna peningkatan kualitas Satpam.
2. Pembenahan aspek manajemen, berupa pembuatan rencana kegiatan Satpam yang dijabarkan dari program kerja tahunan oleh menejer puncak, pengisian buku jurnal patroli dan buku tamu pada

posko, melakukan kegiatan analisa dan evaluasi mendasari dari laporan kejadian, selanjutnya dibuat target pencapaian kinerja berikut penyusunan cara bertindaknya, Satpam yang belum mengikuti pendidikan dasar Satpam untuk segera diusulkan mengikuti pendidikan dasar. Adapun kelalaian karyawan dalam mengunci pintu ruangan dapat disiasati dengan mengumumkan melalui alat pengeras suara secara rutin setiap jam pulang bekerja untuk mematikan alat elektronik, mengunci pintu serta menyimpannya sesuai dengan ketentuan. Disamping itu manajer puncak sudah saatnya membentuk Departemen *Loss Prevention Management (LPM)* atau Departemen Sekuriti yang langsung dibawah menejer puncak atau setara dengan *divisi manager* lainnya. Struktur Departemen Sekuriti yaitu Direktur Sekuriti, Asisten Sekuriti, Kapten Sekuriti, Letnan Sekuriti, Sersan Sekuriti dan Petugas Sekuriti. Tugasnya adalah menganalisa kebutuhan proyek untuk selanjutnya mengembangkan program sekuriti secara menyeluruh. Maksud dibentuknya Departemen Sekuriti ini adalah membantu tugas menejer puncak terkait dengan peran sekuriti bagi keamanan aktivitas produksi dalam artian masalah pengamanan akan menjadi lebih fokus penanganannya karena segala sesuatu hal yang menyangkut dengan aktivitas produksi akan terkait dengan masalah sekuriti. Ada 7 (tujuh) manfaat yang akan diperoleh dengan dibentuknya Departemen Sekuriti diantaranya :

- a) Mengisolasi kerawanan / keterbukaan (*exposure*) dalam arti menyempurnakan kekurangan dengan jalan koreksi prosedur (*SOP*) yang membutuhkan kerjasama dengan Divisi lainnya dimana tanggung jawab tetap pada Departemen *LPM*.
- b) Audit pencegahan kerugian yang mengandalkan hasil penanganan program dengan audit secara teratur.

- c) *Internal training* pencegahan kerugian untuk mendapatkan dukungan dari karyawan dan *middle management* serta mendapatkan informasi yang lebih baik lagi tentang adanya keterbukaan (*exposure*).
- d) Patroli dan tindakan darurat *guard* dikembangkan untuk terus siap dan represif sehingga menjadi kekuatan yang diandalkan dan memegang peran kunci.
- e) Investigasi, dimana dituntut harus mengetahui prosedur yang ada dan harus mempunyai pengetahuan tentang prosedur yang setara dengan *divisi manager* lainnya.
- f) Kesadaran untuk selalu mutakhir (*up to date*) baik peralatan, metode, file / informasi.

Dengan dibentuknya Departemen *LPM* ini maka target sekuriti dalam fungsi perusahaan akan tercapai yaitu nihil kejadian buruk (*zero incident*), nihil kecelakaan (*zero accident*), nihil kehilangan anggaran (*zero budget loss*), nihil kehilangan waktu (*zero time loss*) dan *full compliance* / sesuai.

b. **Kepolisian**

Untuk memaksimalkan peran kepolisian kepada obyek vital yaitu tugas koordinasi, pembinaan teknis dan pengawasan pada obyek vital, maka Kapolda Aceh perlu mengambil suatu kebijakan utamanya dalam mensiasati terbatasnya dukungan anggaran pembinaan teknis dan pengawasan pada obyek vital serta memberikan perhatian bagi pelayanan kepolisian kepada masyarakat khususnya pengamanan swakarsa. Kegiatan tersebut diantaranya :

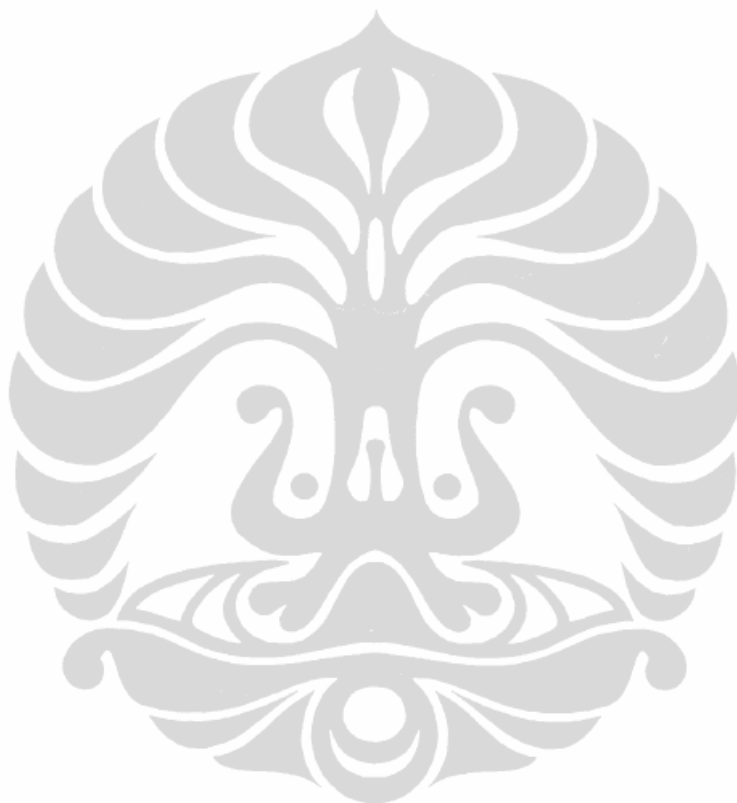
1. Membuat MoU kepada obyek vital khususnya kepada PT Arun NGL. Pelaksanaan MoU dimaksudkan untuk membantu kepolisian dibidang anggaran dalam hal melaksanakan sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan, pengiriman laporan kejadian obyek vital secara rutin untuk dijadikan sebagai salah satu bahan dalam penentuan

Universitas Indonesia

sasaran dan langkah bertindak dalam melakukan pembinaan teknis Satpam atau sistem pengamanan pada perusahaan, melibatkan kepolisian untuk ikut membantu menejer PT Arun NGL dalam seleksi BUJP yang baik dalam proses tender, sosialisasi di bidang hukum, dan audit Sistem Manajemen Pengamanan.

2. Kapolda Aceh agar mengeluarkan kebijakan tertulis tentang larangan atas pungutan pengurusan rekomendasi ijin operasional BUJP serta sanksi yang tegas bagi oknum kepolisian dan masyarakat yang terlibat. Dan untuk peningkatan pelayanan kepolisian pada obyek vital agar memberikan penekanan khusus melakukan kerjasama antara Satker Dit Binmas Polda dengan Satker Dit Pam Obvit dalam melakukan tugas pembinaan teknis dan pengawasan pada obyek vital.
3. Mengimplementasikan program pemolisian komunitas pada Desa Batuphat Barat oleh Polsek Muara Satu. Dengan cara sosialisasi tentang apa dan manfaat Pemolisian Komunitas kepada masyarakat, selanjutnya para tokoh adat yang sudah terbentuk agar diberikan pelatihan Pemolisian Komunitas. Program berikutnya adalah membentuk Pemolisian Komunitas yang dititipkan perannya melalui wadah lembaga adat masyarakat.
4. Mengusulkan pada Dit Binmas Mabes Polri agar merevisi Perkap Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan, untuk dilakukan :
 - a) Penambahan pasal yang mengatur biaya audit BUJP sehingga jelas siapa instansi yang dibebankan menanggung biaya selain itu menghindari terjadinya pungutan tidak resmi berkedok biaya administrasi oleh oknum kepolisian. Pungutan tidak resmi untuk kepentingan probadi dapat dikategorikan korupsi.
 - b) Penambahan pasal yang mengatur biaya pengurusan surat

ijin operasional BUJP dengan maksud menghindari terjadinya pemanfaatan celah hukum oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang berkedok biaya administrasi. Pungutan tidak resmi untuk kepentingan pribadi dapat dikategorikan korupsi.



DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Bailey, William G., (2005). *Ensiklopedi Ilmu Kepolisian*, diterj. Oleh Angkatan III dan IV KIK-UI bekerja sama dengan Rahayu Hidayat. Jakarta : YPKIK.
- Bhayangkara. (2008). *Audit Manajemen : Prosedur dan Implementasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Creswell, John W. (2002). *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches* (Terjemahan angkatan III dan IV KIK UI bekerjasama dengan Nur Khabibah). Eds. Aris Budiman, Bambang Hastobroto dan Chrysnanda DL. Jakarta : KIK Press.
- Clark, Ronald. (1997). *Situasional Crime Ptevention : Succesful Case Studies (2 end ed.)*. New York : Harrow and Heston.
- Djamin, Awaloedin. (2010). Makalah: *Polri dan Perkembangan Industrial Security di Indonesia*. Jakarta: PPSUI. Tidak diterbitkan.
- Darmawan, Mohammad Kemal. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.
- Friedman, Robert. (1992). *Community Policing*. Terjemahan Kunarto. Jakarta : PT Cipta Manunggal.
- Gigliotti, Richard J. dan Ronald C. Jason. (1984). *Security Design for Maximum Protection*. London : Butterworths.
- Hadiman. (2010). *Management Security*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan
- Mudjilin. (2010). *Pengamanan Industrial. Suatu Pengantar*. Jakarta : STIK-PTIK
- Manullang. (2005). *Dasar – Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- McCrie, Robert. (2001). *Security Operations Management*. Boston : Butterworth-Heinemann.
- Oliver, Eric dan John Wilson. (1999). *Security Manual. Pedoman Tindakan Pengamanan*. Jakarta : PT. Cipta Manunggal.
- O'Block., Robert. (1981). *Security and Crime Prevention*. London : The C.V Mosby Company.
- Ricks, Truett A. Dkk. (1994). *Principles of Security, Third Edition*. Ohio : Anderson Publishing Co.
- Simanjuntak, Payaman. (2009). *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Strauss, Sheryl. (1980). *Security Problems in a Modern Society*. Boston : Butterworth Publishers Inc.
- Sennewald, Charles A.. (1998). *Effective Security Management, Third ed*. Boston : Butterworth-Heinemann.
- Solihin, Ismail. (2008). *Corporate Social Responsibility : From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suparlan. (1994). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Program Kajian Wilayah Amerika Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Terry. (1986). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : Alumni.

II. DOKUMEN

- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 738 / X / 2005 tentang Pengamanan Obyek Vital.

Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Laporan Singkat Kegiatan Corporate Social Responsibility PT Arun NGL. 2008.

Public Releation PT Arun NGL

Muara Satu dalam Angka. 2010. Badan Pusat Statistik Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 03/M-IND/PER/4/2005
Tentang Pengamanan Obyek Vital Industri.

Polsek Muara Satu. 2010. *Intelijen Dasar Polsek Muara Satu Tahun 2011.*

PT Arun NGL. 2009. *Profile Tahun 2009.*

Republik Indonesia. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

-----Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



Foto No. 1
Papan perusahaan PT Arun NGL yang terletak
Di Blanglancang Lhokseumawe Aceh



Foto No. 2
lokasi *plansite* kilang Arun



Foto No. 3
Penulis menyampaikan Surat Ijin Penelitian dan diterima oleh Bapak Kertasih selaku Superintendent HRD PT Arun NGL



Foto No. 4
Pos depan *Plansite* kilang Arun sebagai *access control* dan disebelah kiri terdapat pintu untuk pejalan kaki



Foto No. 5
Posko dan kantor sekuriti PT Arun NGL
dan staf sekuriti PT Bina Nanggroe untuk *project* Arun



Foto No. 6
Fasilitas Posko sebagai ruang pengendali, penulis bersama PKD sekuriti PT Bina Nanggroe yang sementara mengoperasikan CCTV



Foto No. 7
Wawancara penulis dengan Leader Ship “B” Amir di ruang posko



Foto No. 8
Penulis selesai melakukan wawancara dengan Bpk Fadil selaku Direktur BUJP PT Aceh *Security Service* dan Bpk Syamsul selaku *Security Supervisor* PT Arun NGL.



Foto No. 9

Wawancara penulis dengan Bpk Syafrullah selaku Site Koordinator PT Bina Nanggroe untuk project Arun.



Foto No. 10

Wawancara penulis dengan personel sekuriti patroli barat PT Bina Nanggroe



Foto No. 11
Pelaksanaan apel untuk shift jaga baru



Foto No. 12
Wawancara penulis dengan Bpk Ir. Fuad Buchari selaku VPD PT Arun NGL



Foto No. 13

Tampak pagar yang sudah tertutup oleh rumput ilalang sebelah selatan berbatasan dengan sungai mamplang yang dapat memberikan potensi kerawanan terjadinya kejahatan



Foto No. 14

Wawancara penulis dengan Doyok selaku pengusaha lapak besi bekas



Foto No. 15

Rumput ilalang dan pohon kelapa didalam areal *plansite* yang dapat dijadikan tempat persembunyian pelaku kejahatan dan atau barang-barang hasil kejahatan.



Foto No. 16

Pagar brc bagian depan perusahaan yang berbatasan dengan kebun sawit. Kondisi pagar sangat memudahkan orang untuk memanjat atau memotong pagar



Foto No. 17
Pintu gerbang yang dikunci dengan menggunakan rantai dan gembok



Foto No. 18
Kasus pencurian tahun 2009, pelaku merusak pagar yang berada di area pengawasan pos- 55 dan masuk ke area plansite



Foto No. 19

Kasus pencurian kabel di area pengawasan pos-61 tahun 2010, pelaku tidak tertangkap



Foto No. 20

Massa IKBAL tahun 2010 memblokir jalan masuk ke area plansite menuntut ganti rugi lahan yang telah dijanjikan pemerintah saat pembangunan kilang Arun tahun 1974.



Foto No. 21

Penggunaan *electronic key* pada ruang-ruang tertentu



Foto No. 22

Kondisi lampu yang dibiarkan menyala

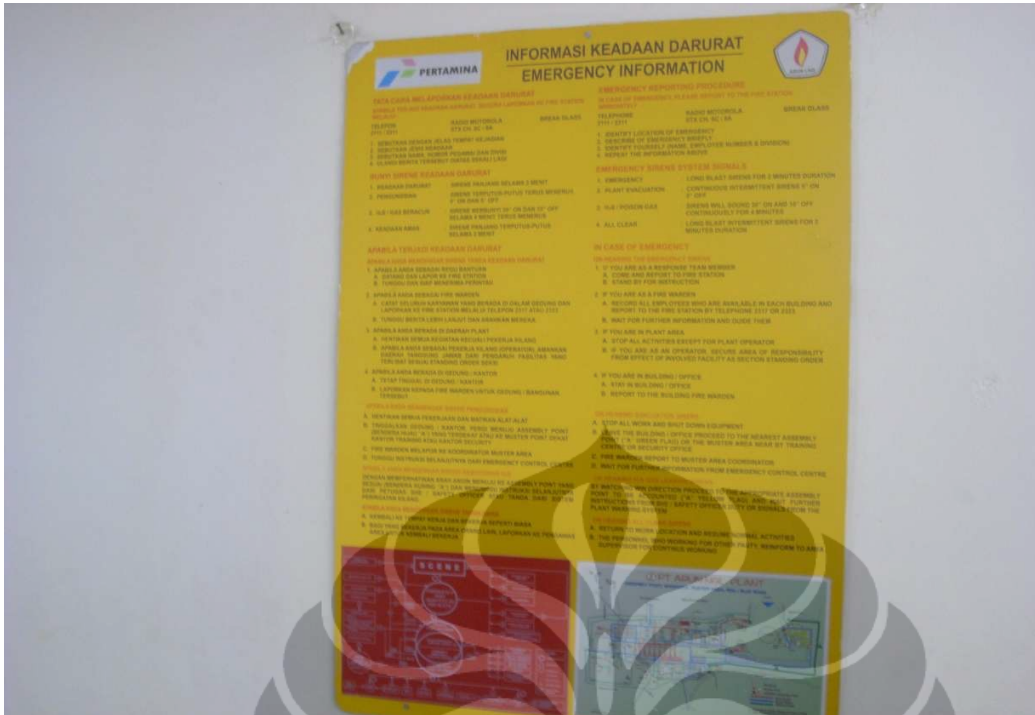


Foto No. 23

Informasi keadaan darurat yang dipasang di tempat-tempat strategis.



Foto No. 24

Fire Warden adalah orang yang ditunjuk bertanggungjawab atas orang-orang yang berada di wilayah pengawasannya untuk mengarahkan ke daerah aman terhadap bencana



Foto No. 25

Bendera hijau adalah titik kumpul orang / pekerja saat terjadi bunyi alarm tanda bahaya



Foto No. 26

Pos menara gate-56



Foto No. 27

Main gate sebagai akses kontrol, tampak sebelah kanan ada pintu *metal detector* yang sudah tidak berfungsi



Foto No. 28

Minimnya perlengkapan perorangan satpam termasuk fasilitas yang ada pada pos. Penulis berada pada pos *pioneer camp*



Foto No. 29

Wawancara dengan Tuhapeut Gampong Batuphat Barat mengenai program CSR dan Pemolisian Komuniti



Foto No. 30

ID Badge untuk visitor berisi kertas yang dilaminating



Foto No. 31
Daily Vehicle Pass untuk non kendaraan PT Arun



Foto No. 32
Wawancara penulis dengan AKBP Isfar (Kasubdit Bin Satpam Dit Binmas Polda Aceh) mengenai korwasbintechnis terhadap pengamanan swakarsa khususnya PT Arun NGL

RIWAYAT HIDUP PENULIS

- N a m a : Ayi Satria Yuddha
 Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 11 April 1977
 Pangkat / NRP : Kompol / 77040608
- Pendidikan Umum : SDN 1 Saleppa, Majene Sul-Sel, 1989
 SLTPN 2 Sungguminasa, Gowa Sul-Sel, 1992
 SMAN 5 Ujung Pandang, Sul-Sel, 1995
- Kepolisian : Akademi Kepolisian, 1998
 Dikjur Daspa Lantas, 1999
 KIBI Sebas Paja Akpol, 2000
 Dikjur Lanpa Regident Pengemudi Lantas, 2001
 Dikjur Lanpa Manajemen Rekayasa Lantas, 2002
 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2006
- Penugasan Dalam Negeri : Pamapta "C" Polres Muna Polda Sultra, 1999
 Kapolsek Pasarwajo Polres Buton Polda Sultra, 2001
 Kasat Lantas Polres Buton Polda Sultra, 2002
 Kasat Lantas Polres Kolaka Polda Sultra, 2003
 Kasi Turjawali Subdit Bin Gakkum Dit Lantas Polda Sultra, 2003.
 Pama PTIK (Dalam rangka studi PTIK), 2006
 Kasubbag Kerma Ops Bag Bin Ops Biro Ops Polda Aceh, 2006
 Kabag Ops Polres Pidie Polda Aceh, 2008

Kabag Ops Polres Lhokseumawe Polda Aceh,
2009.

Parik It Bid Ops Itwasda Polda Aceh, 2009

Pama PTIK (Dalam rangka Dik KIK-UI), 2009

Keluarga : Cut Maryani, SKM (istri)
Nasyiwa Aini Fiantika (anak ke-1)
M. Raffa Dziaul Haq (anak ke-2)

